ISSN 3047-1753
VOLUME 1, 2024

Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2023

9 773047 175000

Kementerian Kelautan dan Perikanan
2024

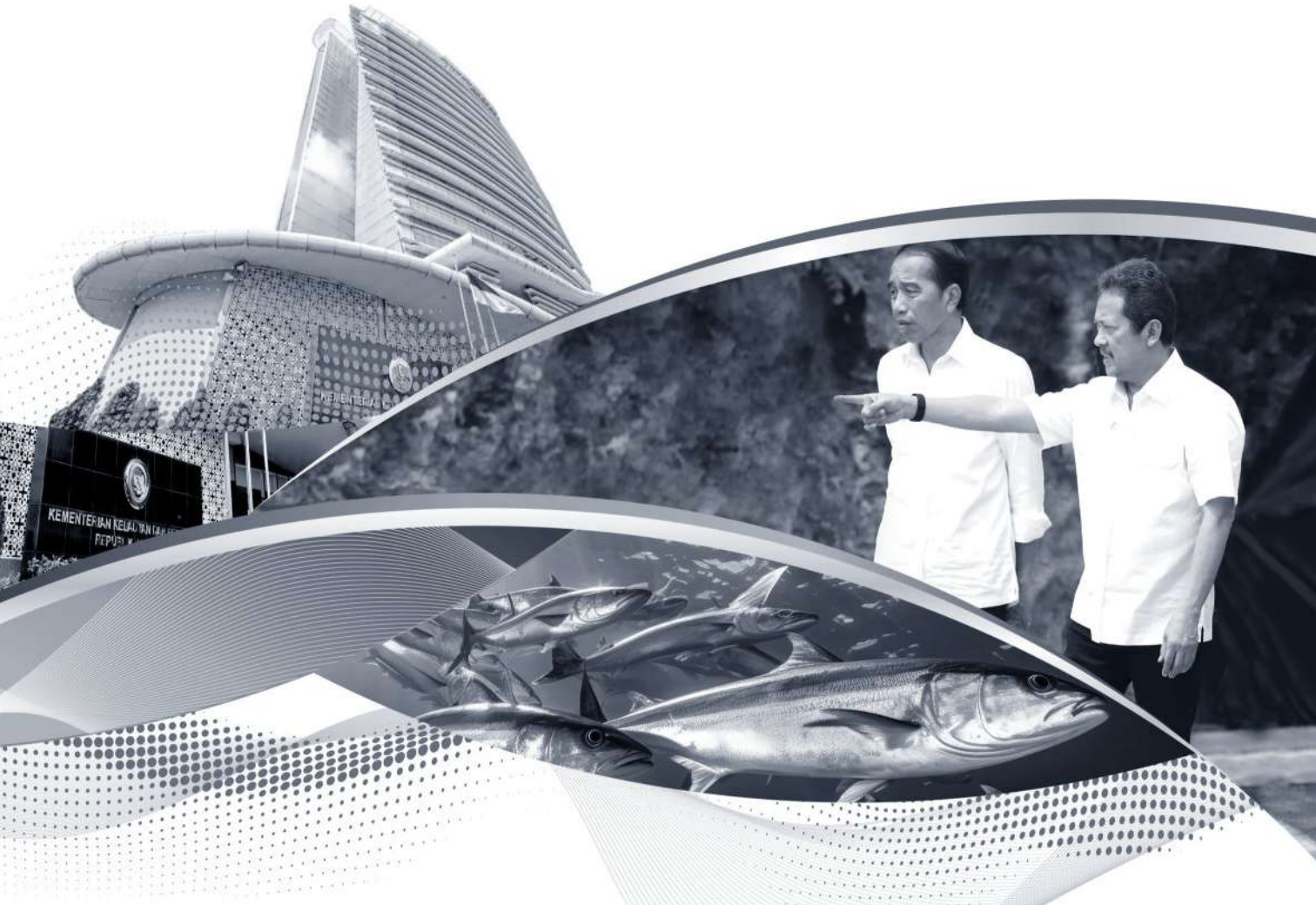

Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2023

Kementerian Kelautan dan Perikanan
2024

TIM PENYUSUN

ISSN 3047-1753
VOLUME 1, 2024

Pengarah
Menteri Kelautan dan Perikanan

Penanggung Jawab
Sekretaris Jenderal

Kontributor
- Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
- Dirjen Perikanan Tangkap
- Dirjen Perikanan Budi Daya
- Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- Inspektur Jenderal
- Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
- Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP
- Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
- Kepala Biro Perencanaan
- Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
- Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/ Jasa
- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
- Kepala Biro Keuangan
- Kepala Biro Hukum
- Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi
- Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
- Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap
- Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya
- Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- Sekretaris Inspektorat Jenderal
- Sekretaris Ditjen Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
- Sekretaris BPPSDMKP
- Sekretaris BPPMHKP
- Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023

296 hlm.; 20 cm x 25 cm

Penerbit
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Gambir, Jakarta Pusat

Tahun
2024

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis.

Tim Penyusun
- Ali Rahmat Iman Santoso, S.St.Pi, M.Si Biro Perencanaan
- Ade Wiguna Nur Yasin, S.Pi., MGFAB, P, Biro Perencanaan
- Muhammad Ramli,S.Pi., M.Si, Biro Perencanaan
- Siddiq Pratomo, S.Pi., MT, Biro Perencanaan
- Dr Benny Khairuddin, S.E., M.Si, Biro Perencanaan
- Agus Haryanto, S, Pi., MSi, Biro Perencanaan
- Meirina Anggraeni, S.Pi., M.Si, Biro Perencanaan
- Helena Yusfik, S.TP, M.E, Biro Perencanaan
- Ika Yusnita, S.Pi., M.Si, Biro Perencanaan
- Dr. Munawar, S.Pi., M.Ec.Dev, Biro Perencanaan
- Sigit Rachmad Admojiarso, S.T, Biro Perencanaan
- Ikhsan Zuhry, A.Md, Biro Perencanaan,
- Yusmansyah, S.Pi., MP., M.Sc, Biro Perencanaan
- Mareta Nirmalanti, S.Pi., M.Si,Pusdatin
- Mohamad Armansyah, S.T., MAP, Pusdatin
- Krisna Fery Rahmantya, S.Si., M.Si, Pusdatin
- Bambang Prajoko, S.Pi., M.Si, Ditjen Kelautan dan Pengelolaan Ruang Laut

- Purwono Budi Santoso, S.Si., M.Env.Man, Ditjen PSDKP
- Risman Ferdiansyah, S.St.Pi., M.Si, BPPMHKP
- Jonathan Graydam Genti, S.Pi., M.Ling, Ditjen Perikanan Tangkap
- Muhamad Nur Purnama, S.Pi, Ditjen Perikanan Tangkap
- Mushlihatun Nur, S.E., M.Si, Ditjen Perikanan Budidaya
- Elimawati Birro S.St.Pi, Biro Perencanaan
- Untung Adi Nugroho, S.ST.Pi., M.Si, Inspektorat Jenderal
- Soni Supriatna, S.E,Ditjen PDSPKP
- Harfy Birna Alia Putri, A.Md, Ditjen PSDKP
- Eka Sunahwati, S.Pi., M.Si, BPPSDMKP
- Ratna Ayu Rahardini, S.Pi, Biro Perencanaan
- Sutrisno Subagyo, S.E., M.AP, Biro Keuangan
- Aris Suyono, S.E., M.Ak, Biro Keuangan
- Ari Wicaksana, S. Kom, Biro SDMAO
- Sundariyati, S.Sos., M.M, Biro SDMAO
- Anita Setianingsih, S.Pi., M. Si, Ditjen PSDKP
- Achmad Hidayat, S.St.Pi., M.P, Ditjen PDSPKP
- Ida Widaningsih, S.H, Ditjen Perikanan Budidaya
- Anita Ratna Dewi Kusumawati, S.Pi., MEM, Ditjen PSDKP
- Rahmadi Sunoko, S.Pi., M.Sc, BPPSDMKP
- Dewi Rukmasari, S.Pi, BPPSDMKP
- Fransiska Maharani Suryaningrum, S.St.Pi., M.Si, BPPMHKP
- Wisnu Danang Saputro, S.E, Biro Keuangan
- Salsabil Tamsil, S.St.Pi., M.P.A, Inspektorat Jenderal
- Sunu Eko Prastya, S.Pi., M.Si, Inspektorat Jenderal
- Akmaluddin, S.Pi, Inspektorat Jenderal
- Jemirulloh, S. Kom, Pusdatin
- Supriyatun, S.St.Pi, M.A.B, Pusdatin
- Sigit Rachmad Admojiarso, S.T, Biro Perencanaan
- Yusmansyah, S.Pi., MP., M.Sc, Biro Perencanaan
- Samsu Muarip, S.Pi, Ditjen PSDKP
- Ahmad Nasrullah, S.ST.Pi, BPPMHKP
- Tiara Pratiwi, S.Pi, Ditjen PDSPKP
- Miko Novri Amandra, S.Stat., M.Si, Ditjen Perikanan Tangkap
- Anita Febrina Zendrato, S.Pi, Ditjen Perikanan Tangkap
- Erdha Sulistyo Pambudi, S.E, Ditjen Perikanan Tangkap
- Febry Budianto, S.T, M.T, M.Sc, Inspektorat Jenderal
- Budi Yuwono, S.St.Pi. MP, Ditjen PDSPKP
- Dr. Munawar, S.Pi, M.Ec.Dev, Biro Perencanaan
- Dr. Dida Daniarsyah, S.Pd., M.Si., Biro SDMAO
- Hadian Idhar Yasaditama, S.T.,M.P.P, Ditjen Perikanan Tangkap
- Muhammad Anas, S.Pi.,M.S.E.M.A, Ditjen Perikanan Tangkap
- Surya Kusbiandany, S.Pi, BPPMHKP
- Dede Fardiansyah, S.Si, Ditjen Perikanan Budidaya
- Aditya Sudirman, S.Hum., M.E, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
- Mochamad Alief Farid, S.Si, M.Sc, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
- Rahmadi Sunoko, S.Pi,M.Sc, BPPSDMKP
- Yudianto, S.P, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi,
- Mega Afrianti, S.T. MAP, Pusdatin
- Darmawangsa, S.Pi, Ditjen PDSPKP
- Feri Yuniarto, S.T, Biro SDMAO
- Enny Syafrida Marpaung, S.Kom, MP, Ditjen Kelautan dan Pengelolaan Ruang Laut
- Satriani Situmorang, S.E, Biro Keuangan
- Yusixka Warih Satyaningrum, S.Pi, BPPMHKP
- Ikhsan Zuhry, A.Md, Biro Perencanaan
- Cut Pinta Keumala,S.Pi, Biro Perencanaan
- Juniyanti Romauli Hutahaean, A.Md.Ak., Biro Perencanaan
- Hario Agung Setiono, Pusdatin

ISSN 3047-1753
VOLUME 1, 2024

daftar isi

DAFTAR ISI

h.4

KATA PENGANTAR

h.12

RINGKASAN

h.16

01

Pendahuluan

h.26

- Latar Belakang
- Tujuan
- Tugas dan Fungsi KKP
- Sumber Daya Manusia KKP
- Potensi
- Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Kelautan dan Perikanan
- Lingkungan Strategis
- Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

02

Perencanaan Kinerja

h.42

- Rencana Strategis KKP 2020-2024
- Perjanjian dan Pelaporan Kinerja Tahun 2023
- Pemanfaatan Informasi Kinerja Tahun 2022
- Keselarasan Renstra 2020-2024, Renja KKP Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja 2023

ISSN 3047-1753
VOLUME 1, 2024

03
Akuntabilitas Kinerja

h.70

- Capaian Kinerja Organisasi
  1. Sasaran Strategis 1. Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkat
  2. Sasaran Strategis 2. Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan
  3. Sasaran Strategis 3. Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat
  4. Sasaran Strategis 4. Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan Meningkat
  5. Sasaran Strategis 5. Tata Kelola Sumber Daya KP Bertanggung Jawab
  6. Sasaran Strategis 6. Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing
  7. Sasaran Strategis 7. Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Kelautan Dan Perikanan Efektif
  8. Sasaran Strategis 8. Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas
- Kinerja Anggaran
- Evaluasi atasCapaian KinerjaTahun 2023 sebagai Feedback Perencanaan Kinerja Tahun 2024
- Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerimtah (SAKIP) Tahun 2023

04
Prestasi dan Kinerja Lainnya

h.262

05
Penutup

h.278

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

daftar tabel

Tabel 1. Jumlah Pegawai KKP Tahun 2023 30
Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 44
Tabel 3. Perbandingan Sasaran Strategis pada Renstra KKP 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja 2023 45
Tabel 4. Kegiatan KKP dalam Mendukung Prioritas Nasional 46
Tabel 5. Realisasi Capaian Kinerja KKP Tahun 2022 dan Target 2023 52
Tabel 6. Keselarasan Sasaran Strategis Renstra 2020-2024, Renja 2023 dan Perjanjian Kinerja KKP Tahun 2023 56
Tabel 7. Keselarasan Indikator Kinerja dan Target Renstra 2020-2024, Renja 2023 dan Perjanjian Kinerja KKP Tahun 2023 58
Tabel 8. Keselarasan Indikator Kinerja dan Target Renstra 2020-2024, Renja 2023 dan Perjanjian Kinerja KKP Tahun 2023 64
Tabel 9. Capaian IK KKP Tahun 2023 71
Tabel 10. Capaian IKMKP Tahun 2023 76
Tabel 11. Kategori IKMKP Provinsi Tahun 2023 78
Tabel 12. Capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN) 2023 80
Tabel 13. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Januari - Desember Tahun 2023 86
Tabel 14. Indeks Konsumsi Rumah Tangga pada Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Januari - Desember Tahun 2023 87
Tabel 15. Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) 88
Tabel 16. Capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN) 2023 91
Tabel 17. Capaian IK Nilai Tukar Petambak Garam Tahun 2023 92
Tabel 18. Capaian Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman 97
Tabel 19. Capaian Luas Kawasan Konservasi Perairan 103
Tabel 20. Capaian Pertumbuhan PDB Perikanan 109
Tabel 21. Capaian Nilai Ekspor Hasil Perikanan 115
Tabel 22. Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan Berdasarkan Komoditas Utama Tahun 2023 116
Tabel 23. Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor Tahun 2023 117
Tabel 24. Capaian Konsumsi Ikan 125
Tabel 25. Capaian Konsumsi Ikan Per Provinsi 126
Tabel 26. Capaian Konsumsi Ikan 131
Tabel 27. Realisasi PNBP KKP per Unit Kerja Eselon I per Sumber Pendapatan Tahun 2023 (dalam Rp) 132
Tabel 28. Capaian Tenaga Kerja yang Terlibat 137
Tabel 29. Rincian Realisasi Tenaga Kerja yang Terlibat Tahun 2023 137
Tabel 30. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap Dunia Usaha dan Dunia Insutrsi (DUDI) 141
Tabel 31. Perbandingan Capaian Persentase Serapan Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pada Dunia Usaha dan Dunia Industri/ DUDI dengan KL Lainnya Tahun 2022 142
Tabel 32. Distribusi Serapan Lulusan pada Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terserap DUDI 143
Tabel 33. Sebaran Lulusan Satuan Kerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan yang Terserap DUDI 144
Tabel 34. Perhitungan Capaian Persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada dunia usaha dan dunia industri Tahun 2023 144
Tabel 35. Capaian WPP NRI yang melaksanakan Penangkapan Ikan Terukur Tahun 2023 150
Tabel 36. Capaian Penyusunan Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Penyusunan Rencana Zonasi 155

Tabel 37. Capaian Tenaga Kerja yang Terlibat 157
Tabel 38. Perkembangan Pertek dan Matek Perairan Pesisir MKP (RZWP-3-K) 162
Tabel 39. Capaian Produksi Perikanan Tahun 2023 166
Tabel 40. Capaian Produksi Perikanan Tahun 2023 166
Tabel 41. Capaian IK Produksi Garam Tahun 2023 181
Tabel 42. Tabel Data Produksi dan Stok Garam Tahun 2023 183
Tabel 43. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%) Tahun 2023 187
Tabel 44. Capaian Dana yang Disalurkan untuk Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan 193
Tabel 45. Rincian Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP Tahun 2023 194
Tabel 46. Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 195
Tabel 47. Capaian Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan 202
Tabel 48. Hasil Pengawasan 4 Objek Pengawasan 203
Tabel 49. Tabel hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan 204
Tabel 50. Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi 209
Tabel 51. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 210
Tabel 52. Sebaran Capaian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 211
Tabel 53. Capaian Luas Kawasan Konservasi Perairan 212
Tabel 54. Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2023 (Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Kementerian PAN RB) 213
Tabel 55. Capaian IKPA KKP Tahun 2023 229
Tabel 56. Revisi Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dan 2024 230
Tabel 57. Capaian IKPA KKP Tahun 2023 230
Tabel 58. Rincian Capaian IKPA KKP Tahun 2023 Per Unit Eselon I 231
Tabel 59. Perbandingan Nilai IKPA K/L Seluruh Indonesia Tahun 2023 233
Tabel 60. Pagu Anggaran KKP per Unit Eselon I per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023 238
Tabel 61. Pagu Anggaran KKP per Sumber Dana Tahun Anggaran 2023 238
Tabel 62. Jumlah Satuan Kerja Lingkup KKP Tahun 2023 239
Tabel 63. Pagu Anggaran KKP per Kewenangan Tahun Anggaran 2023 239
Tabel 64. Realisasi Anggaran KKP Tahun 2023 240
Tabel 65. Pagu dan Realisasi Anggaran per Unit Eselon I per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023 241
Tabel 66. Pagu dan Realisasi Anggaran KKP per Sumber Dana Tahun Anggaran 2023 242
Tabel 67. Pagu dan Realisasi KKP per Kewenangan TA 2023 243
Tabel 68. Pagu dan Realisasi KKP per Kewenangan TA 2023 243
Tabel 69. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran 244
Tabel 70. Daftar Kerja Sama KKP dengan Lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah dan Pemerintah Daerah 247
Tabel 71. Realisasi Tahun 2023 dan Target Kinerja Tahun 2024 252
Tabel 72. Anggaran KKP Tahun 2024 254
Tabel 73. Hasil Evaluasi SAKIP KKP Tahun 2023 254
Tabel 74. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi SAKIP KKP Tahun 2023 256

daftar gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan 29
Gambar 2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP 31
Gambar 3. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Berdasarkan Permen PANRB 53 Tahun 2014 39
Gambar 4. Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 43
Gambar 5. Visi Misi KKP Tahun 2020-2024 43
Gambar 6. Dialog Kinerja Organisasi KKP Tahun 2023 55
Gambar 7. Tampilan Dashboard Aplikasi Kinerjaku Tahun 2023 70
Gambar 8. Grafik Capaian Nilai Kinerja Organisasi 2019-2023 72
Gambar 9. Capaian IK KKP Tahun 2023 73
Gambar 10. Grafik Capaian IKMKP 2023 (Indeks Sosial dan Indeks Ekonomi) 76
Gambar 11. Peresmian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN) di Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar Kalimantan Selatan 79
Gambar 12. Penandatangan Kesepakatan Bersama KKP dan Kementerian BUMN dan Pertamina terkait Kemudahan Akses BBM Bersubsisi untuk Nelayan 79
Gambar 13. Pelatihan Pengolahan 79
Gambar 14. Grafik Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2023 81
Gambar 15. Sebaran Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2023 Per Provinsi 81
Gambar 16. Grafik Pergerakan IT dan IB Nilai Tukar Nelayan Tahun 2022 82
Gambar 17. Grafik Pergerakan IT dan IB Nilai Tukar Nelayan (NTN) 2023 82
Gambar 18. Grafik Gap Pergerakan IT dan IB Nilai Tukar Nelayan Tahun 2023 dan 2022 83
Gambar 19. Grafik Perkembangan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan, 2029-2023 84
Gambar 20. Grafik Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Januari- Desember Tahun 2023 85
Gambar 21. Peta Capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan bulan Januari - Desember Tahun 2023 89
Gambar 22. Lokasi Sampling Perhitungan NTPHP 90
Gambar 23. Realisasi NTPHP Tahun 2018-2023 90
Gambar 24. Realisasi NTPG Tahun 2018-2023 92
Gambar 25. Pameran Produk Pengolahan Hasil Perikanan pada Acara Bulan Cinta Laut di Surabaya 94
Gambar 26. Grafik Capaian Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman 98
Gambar 27. Grafik Produksi dan Potensi per WPP 99
Gambar 28. Grafik sebaran pelaksanaan log book penangkapan ikan per WPPNRI dan Laut Lepas Tahun 2023 100
Gambar 29. Grafik sebaran penempatan Observer per WPPNRI dan Laut Lepas Tahun 2023 101
Gambar 30. Grafik Luas Kawasan Konservasi Perairan Tahun 2017-2023 103
Gambar 31. Kegiatan penyuluhan perikanan 106
Gambar 32. Perbandingan Pertumbuhan PDB Nasional, PDB Perikanan dan PDB Pertanian 110
Gambar 33. Nilai PDB Perikanan berdasarkan Harga Konstan (Rp.miliar) 111
Gambar 34. Kontribusi PDB Perikanan terhadap PDB Nasional berdasarkan Harga Berlaku Tahun 2018-2023 (%) 111
Gambar 35. Kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan ke Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin di Mandiangin Barat, Kabupaten Banjar, Kalsel yang menghasilkan banyak inovasi di antaranya budidaya ikan-ikan lokal seperti gabus haruan, papuyu dan belida, hingga pengembangan albumin ikan gabus 113
Gambar 36. Grafik Nilai Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2018-2023 115

Gambar 37. Grafik Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2023 116
Gambar 38. Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan Berdasarkan Provinsi Asal Tahun 2023 118
Gambar 39. Keikutsertaan KKP dalam Pameran Internatiol 120
Gambar 40. Laman Bursa Pasar Ikan 121
Gambar 41. Pelepasan Ekspor Udang (Produk Frozen dan Coated Shrimp) dari Makasar dengan tujuan Jepang pada 7 Juni 2023 121
Gambar 42. Pelepasan Ekspor Udang Perdana Hasil Perikanan dari Cold Storage 1000 ton Muara Baru menuju Fuzhou dan Xiamen (China) pada 9 November 2023 122
Gambar 43. Capaian Konsumsi Ikan 2018-2023 125
Gambar 44. Kampanye Gemarikan di Kabupaten Purbalingga 127
Gambar 45. Kegiatan Hari Ikan Nasional 128
Gambar 46. Penyerahan Cool Box Kepada Penerima 128
Gambar 47. Penyerahan Mobil ATI 129
Gambar 48. Pasar Ikan Yang Dibangun 129
Gambar 49. Sentra Kuliner Yang Dibangun 129
Gambar 50. Grafik Capaian PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan 2014-2023 132
Gambar 51. Kegiatan Bongkar Muat Kapal Perikanan 134
Gambar 52. Kegiatan Penyuluh Perikanan Mendampingi Keluarga Nelayan 139
Gambar 53. Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan Bidang Fermentasi Pakan pada Budidaya Ikan Nila 139
Gambar 54. Capaian Persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada dunia usaha dan dunia industri Tahun 2020- 2023 142
Gambar 55. Sebaran Lulusan yang Terserap DUDI Tahun 2023 145
Gambar 56. Sebaran Lulusan yang Terserap DUDI di Luar Negeri Tahun 2023 145
Gambar 57. Kegiatan Pembekalan Teknis Peningkatan Kapasitas Pemantau di atas Kapal Penangkap ikan dan Kapal Pengangkut Ikan (Observer Board) yang di laksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan The United States Agency for International Development (USAID) di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung 147
Gambar 58. Kegiatan Wisuda Satuan Pendidikan Lingkup KKP 147
Gambar 59. Dashboard Elektronik Penangkapan Ikan Terukur (ePIT) 151
Gambar 60. Proses Kegiatan Penataan Ruang Laut 155
Gambar 61. Mandat KKP berdasarkan PP 21 tentang Penyeelnggaraan Penataan Ruang 159
Gambar 62. Status Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah 160
Gambar 63. Sebaran KSN Ruang Laut 160
Gambar 64. Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut 163
Gambar 65. Grafik Produksi Perikanan Tahun 2018-2023 166
Gambar 66. Produksi Udang Nasional Tahun 2019 - 2023 168
Gambar 67. Produksi Kerapu Nasional Tahun 2019 - 2023 169
Gambar 68. Produksi Kakap Nasional Tahun 2019 - 2023 170
Gambar 69. Produksi Bandeng Nasional Tahun 2019 - 2023 170
Gambar 70. Produksi Patin Nasional Tahun 2019 - 2023 171
Gambar 71. Produksi Nila Nasional Tahun 2019 - 2023 172
Gambar 72. Produksi Ikan Mas Nasional Tahun 2019 - 2023 173
Gambar 73. Produksi Lele Nasional Tahun 2019 - 2023 174
Gambar 74. Produksi Gurame Nasional Tahun 2019 - 2023 174
Gambar 75. Produksi Rumput Laut Nasional Tahun 2019 - 2023 175

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Gambar 76. Menteri Kelautan dan Perikanan Meninjau perkembangan pembangunan tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kebumen, Jawa Tengah 177
Gambar 77. Penyaluran Bantuan Benih Udang Vaname kepada Pembudidaya Ikan 177
Gambar 78. Aktivitas Pembongkaran Ikan di PPN Pekalongan 178
Gambar 79. Aktivitas Pasca Produksi di PPN Pemangkat 178
Gambar 80. Kunjungan Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan ke kampung budidaya rumput laut Mamolo, Kabupaten Nunukan dan Penyaluran Bantuan kepada Pembudidaya Ikan 179
Gambar 81. Grafik Produksi Garam Tahun 2017-2023 182
Gambar 82. Rapat Koordinasi Pembangunan Pabrik Pengolahan Garam di Bima 184
Gambar 83. Panen Perdana Koperasi Pantai Cioleng Bahari dengan Metode Tunnel Garam (Bantuan Program Usaha Garam Rakyat KKP kolaborasi dengan Pusat Studi Pesiisr dan Kelautan Universitas Brawijaya di Desa Sinar Laut, Cianjur, Provinsi Jawa Barat) 185
Gambar 84. Panen Perdana Kelompok Usaha Garam (KUGAR) Putra Pansela Cidahon dengan metode produksi tunnel garam (Bantuan Program Usaha Garam Rakyat Kolaborasi dengan Pusat Studi Pesisir dan Kelautan Universitas Brawijaya di Desa Hegarsari, Cianjur Provinsi Jawa Barat) 185
Gambar 85. Dokumentasi Kegiatan Temu Koordinasi Penanganan Kasus 190
Gambar 86. Temu Mitra Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan 190
Gambar 87. Peresmian Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu Ekspor Lingkup Bandar Udara Internasional Kualanamu, Medan 190
Gambar 88. KKP telah melaksanakan kegiatan pelepasan ekspor perdana komoditi hasil kelautan dan perikanan yang dilaksanakan di Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo, Kab. Manggarai Barat, NTT 191
Gambar 89. Bimtek Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Ikan Karantina di Lampung Selatan 191
Gambar 90. Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Permodalan di Tulungagung dengan Tujuan Menumbuhkan Minat Kewirausahaan di Bidang Olahan dan Pemasar Hasil Perikanan 196
Gambar 91. LPMUKP Membantu Pengembangan Sumber Daya Laut Lokal di Kab. Buru melalui Penyaluran Dana Bergulir BLU-LPMUKP 197
Gambar 92. Gambar 87. Panen Perdana Kelompok Usaha Garam (KUGAR) Putra Pansela Cidahon dengan metode produksi *tunnel* garam (Bantuan Program Usaha Garam Rakyat Kolaborasi dengan Pusat Studi Pesisir dan Kelautan Universitas Brawijaya di Desa Hegarsari, Cianjur Provinsi Jawa Barat) 197
Gambar 93. LPMUKP Hadir dalam Kegiatan Peningkatan Literasi dan Digitalisasi Keuangan Kolaborasi dengan Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM guna Mendukung Peningkatan Perluasan Akses Pembiayaan bagi Pelaku Usaha UMKM pada Sentra Garam di Kab. Pangkajene Kepulauan 198
Gambar 94. Penandatangan Kerjasama KKP dengan PT. Permodalan Nasional Madani 199
Gambar 95. Capaian Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan 202
Gambar 96. Menteri Kelautan dan Perikanan Gelar Ekspose Hasil Pengawasan Sumber Daya KP di Batam, Kepulauan Riau 204
Gambar 97. Menteri Kelautan dan Perikanan Melakukan Penyegelan Ikan Salem Impor di Batu Ampar Batam, Kepulauan Riau 204
Gambar 98. Empat Kriteria Pelaku Usaha Patuh 205
Gambar 99. Grafik kepatuhan pelaku usaha berdasarkan hasil pemeriksaan periode 2023 205

Gambar 100. Menteri Kelautan dan Perikanan Sambut Kedatangan Kapal Pengawasa Orca 6 yang merupakan Hibah dari Pemerintah Jepang sebagai Bentuk Konkret Kerja Sama dalam Pemberantasan IUU *Fishing* dan *Destructive Fishing* di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman 207
Gambar 101. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 210
Gambar 102. Grafik Capaian Indeks Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2017-2023 212
Gambar 103. Kategori Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 229
Gambar 104. Capaian IKPA Triwulanan Unit Eselon I KKP Tahun 2023 232
Gambar 105. Rincian Output (RO) Mendukung Prioritas Nasional Dalam Rencana Kerja KKP Tahun 2023 237
Gambar 106a. KKP berkoordinasi, berkolaborasi dan bersinergi dengan K/L, BUMN dan PEMDA 245
Gambar 106b. KKP berkoordinasi, berkolaborasi dan bersinergi dengan Universitas, Ormas Lokal, Ormas Asing dan Swasta 245
Gambar 107. Penyerahan Germas Award 262
Gambar 108. Penyerahan Anugerah Parahita Ekapraya 262
Gambar 109. Penyerahan JDIH Terbaik V Tingkat Kementerian 263
Gambar 110. Piagam Peringkat Kedua BKN Award 2023 Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja 264
Gambar 111. Penyerahan Penghargaan Kinerja Anggaran Terbaik 264
Gambar 112. Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 266
Gambar 113. Penghargaan Juara Kedua Anugerah Reksa Bandha Tahun 2023 267
Gambar 114. Penghargaan Bhumandala Kencana Tahun 2023 268
Gambar 115. Penghargaan Indonesian *Logistic Award* Tahun 2023 269
Gambar 116. Penghargaan Bidang Kearsipan AA (Sangat Memuaskan) 270
Gambar 117. Penghargaan Peringkat 8 Pelayanan Prima 271
Gambar 118. Penghargaan Juristica Award 271
Gambar 119. *The Best Leader for Developing Econy Strategy* 272
Gambar 120. Penghargaan Indonesia *Visionary Leader* 274
Gambar 121. Penghargaan UPP Terbaik Penyedia Sarana Prasarana Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan 275

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

kata pengantar

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja KKP Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi terkait dan publik atas amanat dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada KKP.

Laporan Kinerja menguraikan target kinerja, capaian kinerja, kendala, dan upaya yang telah dilakukan, kinerja anggaran, penghargaan serta kinerja lainnya yang telah diraih sepanjang Tahun 2023. Laporan disusun berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.

Dalam rangka mempercepat akselerasi pembangunan kelautan dan perikanan, KKP saat ini sedang fokus pada pelaksanaan 5 kebijakan ekonomi biru yang terdiri dari Penambahan luas kawasan konservasi laut, Penangkapan ikan terukur berbasis kuota, Pengembangan budidaya

”KKP berkomitmen untuk terus berbenah diri dan melakukan berbagai terobosan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan menerapkan prinsip pengelolaan berkelanjutan berbasis ekonomi biru.”

ikan di kawasan laut, pesisir, dan darat secara berkelanjutan, Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta pembersihan sampah laut melalui partisipasi nelayan dan masyarakat.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan terlibat dalam upaya bersama menjaga keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan. Semangat kerjasama ini menjadi kunci bagi kemajuan dan keberlanjutan sektor ini demi kesejahteraan bangsa. Semoga kerja sama yang baik selama ini dapat terus ditingkatkan.

Jakarta, 20 Februari 2024

SAKTI WAHYU TRENGGONO
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

SAKTI WAHYU TRENGGONO
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520336
LAMAN www.kkp.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami tersebut, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 14 Februari 2024
Inspektur Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Tomanda Syaifullah

23 November 2023 | Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia meresmikan Kampung Nelayan Modern (Kalamo) Kampung Samber-Binyeri, Kabupaten Biak Numfor

RINGKASAN

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KKP Tahun 2023 sebesar 102,13. Perhitungan Kinerja Organisasi KKP Tahun 2023 dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja revisi yang telah ditetapkan, terdiri dari 8 Sasaran Strategis dan 18 Indikator Kinerja dengan nilai sebesar 102,13. Sebanyak 14 indikator kinerja telah mencapai target yaitu: IKMKP, Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman, Luas kawasan konservasi perairan, Konsumsi ikan, Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri / DUDI, WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur, Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir, Produksi garam, Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor, Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP, Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, Nilai RB KKP, dan Pertumbuhan PDB Perikanan. Sedangkan empat indikator kinerja belum mencapai target yaitu Nilai IKPA KKP, nilai ekspor hasil perikanan, nilai PNBP sektor KP, dan produksi perikanan.

Realisasi Anggaran pada Tahun 2023 sebesar 98,14% dari pagu Rp 6,46 triliun. Berdasarkan realisasi jenis belanja yaitu belanja pegawai 98,69%, belanja barang 97,69% dan belanja modal 99,32%. Untuk percepatan pencapaian target pembangunan kelautan dan perikanan, KKP juga bersinergi dan kolaborasi dengan Kementerian /Lembaga/ Pemerintah Daerah/pihak swasta, Perguruan Tinggi dan pihak terkait lainnya sehingga dampak pembangunan lebih besar dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini tentu saja selaras dengan tujuan Reformasi Birokrasi yaitu memberikan dampak nyata kepada masyarakat serta menjadikan Visi sebagai aksi nyata. Kedepan untuk mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih, KKP berkomitmen melanjutkan praktik baik yang telah dilaksanakan di tahun 2023 dan melakukan inovasi lainnya sebagai Langkah nyata dalam membangun kelautan dan perikanan dengan berbasis ekonomi biru (*blue economy*).

Capaian Kinerja Utama

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tahun

2023

TARGET	CAPAIAN
62,66	62,75

IK 1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (indeks)

TARGET	CAPAIAN
76,00	58,18

IK 2. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)

TARGET	CAPAIAN
29,10	29,20

IK 3. Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha)

TARGET	CAPAIAN
4,00	5,49

IK 4. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan (%)

TARGET	CAPAIAN**
6,77	5,63

IK 5. Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)

TARGET	CAPAIAN *
57,61	57,61

IK 6. Konsumsi ikan (Kg/kap/thn)

TARGET	CAPAIAN
4,04	1,69

IK 7. Nilai PNBP sektor KP (Triliun Rupiah)

TARGET	CAPAIAN
456.657	569.631

IK 8. Tenaga kerja yang terlibat (Orang)

TARGET	CAPAIAN
70,00	74,17

IK 9. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri / DUDI (%)

TARGET	CAPAIAN
11	11

IK 10. WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur (WPP)

TARGET	CAPAIAN
32	32

IK 11. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)

TARGET	CAPAIAN***
28,22	24,74

IK 12. Produksi perikanan (Juta ton)

TARGET	CAPAIAN
2,5	2,55

IK 13. Produksi Garam (Juta ton)

TARGET	CAPAIAN
98,00	99,84

IK 14. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

TARGET	CAPAIAN
6,99	7,70

IK 15. Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP (Triliun Rupiah)

TARGET	CAPAIAN
97,00	97,96

IK 16. Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)

TARGET	CAPAIAN
78,00	85,40

IK 17. Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP (indeks)

TARGET	CAPAIAN
93.75	91.99

IK 18. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP (nilai)

** angka prognosa; ** angka sementara; *** angka sangat sementara*

11 Desember 2023 | Puncak Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) KKP Tahun 2023

Kaledoskop Tahun 2023

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Januari

1. Pembentukan Ocean Institute of Indonesia
2. Pembentukan Vocational Goes to Actors
3. Pelantikan Taruna/Taruni Tahun Akademik 2022/2023

Februari

4. KKP Hentikan Dua Proyek Reklamasi di Kepulauan Riau

Maret

5. Peresmian Tambak BUBK Kebumen bersama Presiden Joko Widodo
6. KKP Gelar UMKM Kelautan dan Perikanan Thrive Expo 2023
7. Pencanangan Bulan Mutu Karantina (BMK)

April

8. Pertemuan Bilateral Indonesia dan Tiongkok
9. Penerimaan Taruna/Taruni Kelautan dan Perikanan
10. Town Hall Meeting bersama Menteri Trenggono

Juni

13. Panen Udang Parsial bersama Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin
14. KKP Gelar Puncak World Ocean Day 2023
15. Penyambutan Kapal Pengawas Orca 05
16. Operasi GANNET-7, Patroli bersam Indonesia-Australia Jaga Perbat

Mei

11 KKP Menjadi Tuan Rumah Perhelatan The 4th Meeting of the Parties to the FAO Agreement on Port State Measures (PSMA)

12 Gelaran Indonesia Tuna Conference (ITC) dan International Coastal Tuna Bussiness Forum (ICTBF-7)

na
asan Negara

Agustus

20 KKP Gelar Puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Palu, Sulawesi Tengah

21 Gelaran VOGA Fest 2023

22 KKP Gelar Pekan Olahraga dan Lomba HUT ke-78 RI

Juli

17 KKP Bantu Pemulangan ABK Sri Lanka yang terdampar di lautan Samudera Hindia

18 Atlet kontingen KKP berpartisipasi pada PORNAS KORPRI 2023

19 KKP Kembali Raih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK

23 Pengukuhan Syahbandar Perikanan bersama Menteri KP dan Menteri Perhubungan

24 Wisuda dan Pelantikan Taruna Baru Nasional

Kaledoskop Tahun 2023

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

September

25 Penyelamatan musibah kebakaran kapal nelayan oleh kapal perikanan KKP di Nizam Zachman

26 Kick Off Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan 2023

Oktober

27 Penyambutan Kedatangan Kapal Pengawas Orca 06

28 KKP Pamerkan Dua Instrumen Pengelolaan Ruang Laut Berkelanjutan di KTT AIS Forum 2023

29 KKP Bagikan Produk Perikanan Sehat dan Bermutu

30 KKP Gelar Apel Siaga Nasional Penyuluh Perikanan

31 Peluncuran SFV Panembangan

32 Gernas Bulan Cinta Laut bersama Ibu Iriana Joko Widodo dan Ibu Wury Maruf Amin

33 Ulang Tahun KKP ke 24

Sem

Peresmian Kampung Nel
bersama Presiden Joko Wi

38 Peresmian Modelling Budidaya
Laut di Wakatobi, Sulawesi Teng

39 Pelepasan Ekspor Perdana ke F
Xiamen, China dari Gedung Co
berkapasitas 1000 ton di Muara

40 KKP Gelar Konferensi Nasional
Pengelolaan Sumber Daya Laut,
dan Pulau-Pulau Kecil

November

34 Puncak Apresiasi Gernas Bulan Cinta Laut

35 KKP Gelar Festival Ikan Hias Nusantara 2023

36 arak Hari Ikan Nasional 2023

37 ayan Modern di Biak Numfor dodo dan Menteri Trenggono

Rumput gara

Fuzhou dan old Storage Baru

(KONAS) Pesisir,

Desember

41 KKP Gelar Rapat Koordinasi Nasional Lingkup KKP

42 Puncak Hari Anti Korupsi Sedunia 2023 di KKP

43 Semarak Puncak Apresiasi Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan

44 KKP Luncurkan Armada Kapal Pengawas KP. Barakuda 01 dan KP. Barakuda 02

45 KKP Berbagi Ikan kepada Masyarakat

WISUDA DAN PELANTIKAN
TARUNA BASU NASIONAL
TAHUN 2023
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

Bab • 01

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yang dimuktahirkan melalui Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahunan yang disusun sebagai penjabaran Tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024.

Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

RKP Tahun 2023 memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing". Tujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020–2024 tetap dipertahankan dalam RKP Tahun 2023 menjadi tujuh Prioritas Nasional (PN), yakni (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Malusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKP merupakan

upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Arah kebijakan dan strategi pembangunan Tahun 2023 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Tahun 2023 merupakan Tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19). Kapasitas produktif perekonomian yang terkoreksi akibat COVID-19 ditingkatkan melalui transformasi ekonomi yang mencakup peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi, pemulihan sosial yang inklusif melalui pembangunan SDM dan tenaga kerja yang berkualitas, serta transisi pembangunan ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi, diharapkan mampu meningkatkan daya saing perekonomian.

Berlanjutnya agenda transformasi ekonomi tersebut diprakirakan akan mendorong akselerasi ekonomi Indonesia pada Tahun 2023. Setelah mengalami pemulihan kuat pada Tahun 2021, ekonomi global diprakirakan mengalami perlambatan pada Tahun 2023. Perekonomian negara berkembang diprakirakan belum mampu kembali menuju tren sebelum pandemi pada Tahun 2022, berbeda dibandingkan dengan negara maju yang diprakirakan sudah kembali ke tren sebelum pandemi. Perlambatan ekonomi global tersebut disebabkan oleh ketidakseimbangan tingkat vaksinasi global antarnegara, penyebaran varian baru COVID-19, kebijakan fiskal dan moneter yang lebih ketat,berlanjutnya gangguan rantai pasok, dan dampak luka memar akibat pandemi COVID-19 (*scarring effect*). Perencanaan pembangunan pada Tahun 2023 berdasarkan dokumen RKP Tahun 2023 akan ditekankan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar. Memperhatikan sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan Tahun 2020, kebijakan pembangunan Tahun 2021, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian, maka RKP 2023 mengusung tema, "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis KKP Tahun 2020–2024 (Renstra KKP Tahun 2020–2024), visi KKP Tahun 2020–2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang merupakan penjabaran dari visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020–2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN Tahun 2020–2024, KKP terutama melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia" melalui "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi Kelautan dan Perikanan.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap perekonomian nasional.
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP".
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, dengan tujuan meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2023 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan Presiden yang terkait dengan sektor kelautan dan dan perikanan. Arah dan kebijakan KKP yang akan ditempuh dalam Tahun 2023, terdiri atas: 1). Memperluas Kawasan Konservasi Laut, 2). Penangkapan Ikan Terukur berbasis Kuota; 3) Pengembangan Budidaya Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan; 4) Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan 5) Pembersihan Sampah Plastik di Laut Melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Tujuan

Laporan Kinerja KKP merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran KKP. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja KKP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja selama Tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja.

Tugas dan Fungsi KKP

Tugas KKP sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang KKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut KKP menyelenggarakan fungsi: a). perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budi daya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; b). koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP; c). pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab KKP; d). pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KKP; e). pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan KKP di daerah; f). penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan; g). penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan h). pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Struktur Organisasi

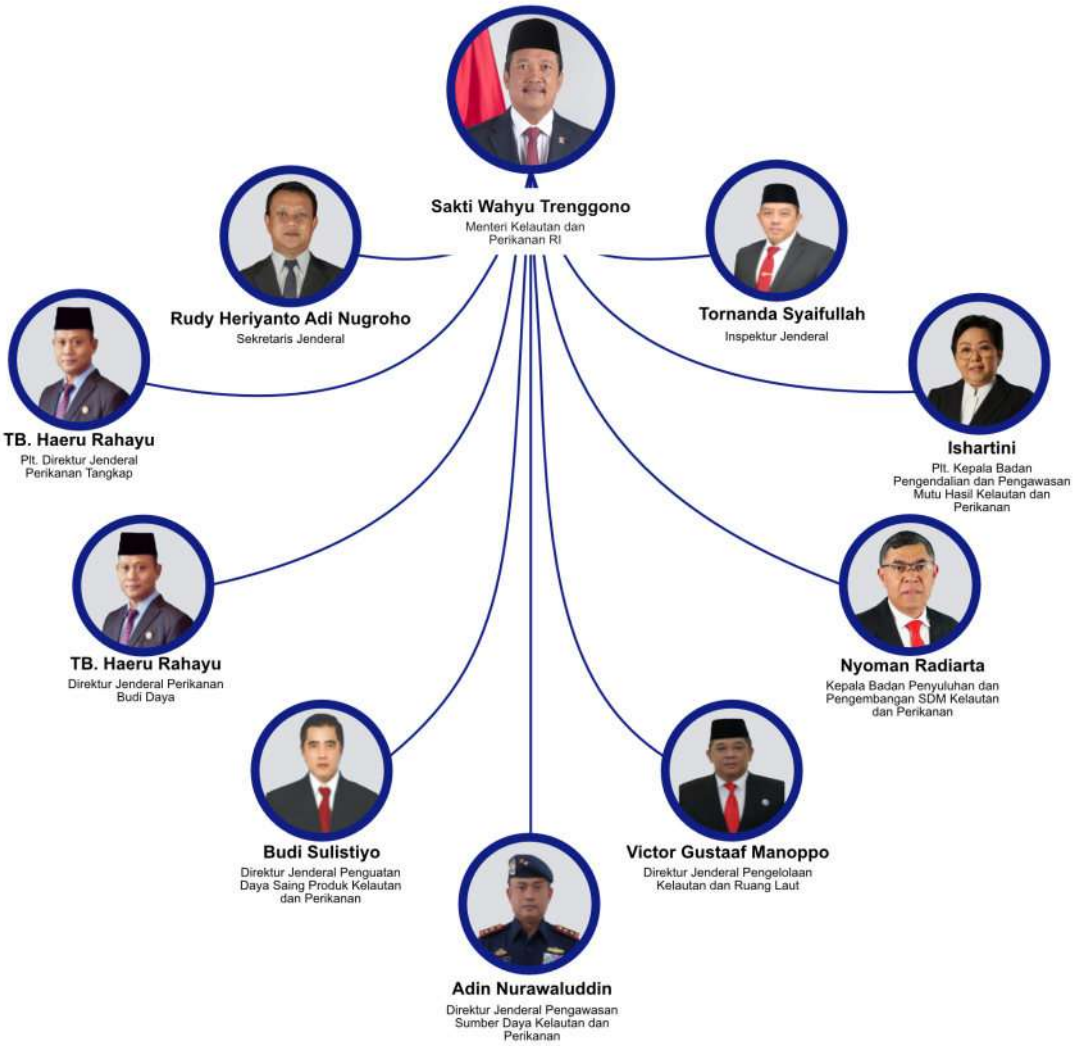

Gambar 1. | Struktur Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sumber Daya Manusia KKP

KKP terdiri atas: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; c. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; d. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya: e. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; f. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; g. Inspektorat Jenderal; h. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; i. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; j. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya; k. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga; dan l. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, dengan jumlah pegawai sebagai berikut :

Tabel 1. | Jumlah Pegawai KKP Tahun 2023

PUSAT										KESELURUHAN		
PRIA					WANITA							
PNS	PPPK	JPT NON ASN	KON-TRAK	OUT-SOURCE	PNS	PPPK	JPT NON ASN	KON-TRAK	OUT-SOURCE	PNS	Non-PNS	TOTAL
1.669	79	2	326	247	1.006	57	-	191	75	2.811	841	3.652
UPT										**KESELURUHAN**		
PRIA					WANITA							
PNS	PPPK	JPT NON ASN	KON-TRAK	OUT-SOURCE	PNS	PPPK	JPT NON ASN	KON-TRAK	OUT-SOURCE	PNS	Non-PNS	TOTAL
6.143	680	-	2.103	1.352	3.123	359	-	1.081	311	10.305	4.847	15.152
SELURUH KKP										**KESELURUHAN**		
PRIA					WANITA							
PNS	PPPK	JPT NON ASN	KON-TRAK	OUT-SOURCE	PNS	PPPK	JPT NON ASN	KON-TRAK	OUT-SOURCE	PNS	Non-PNS	TOTAL
7.812	759	2	2.429	1.599	4.129	416	-	1.272	386	13.116	5.688	18.804

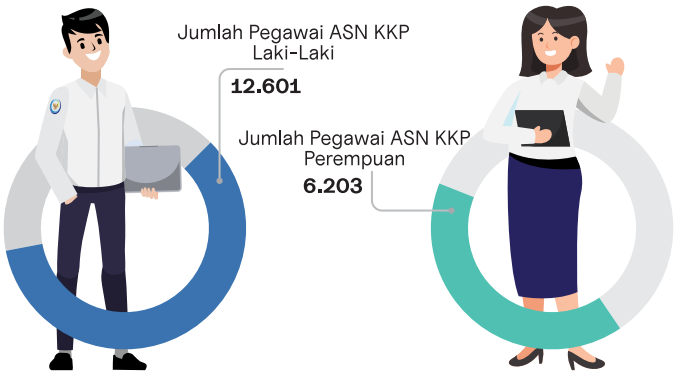

Kinerja KKP ditopang oleh 18.804 terdiri dari ASN 13.116 dan Non ASN 5.688 yang tersebar pada 9 unit unit Kerja Eselon I.

Sebaran Unit Pelaksana Teknis adalah sebagai berikut.

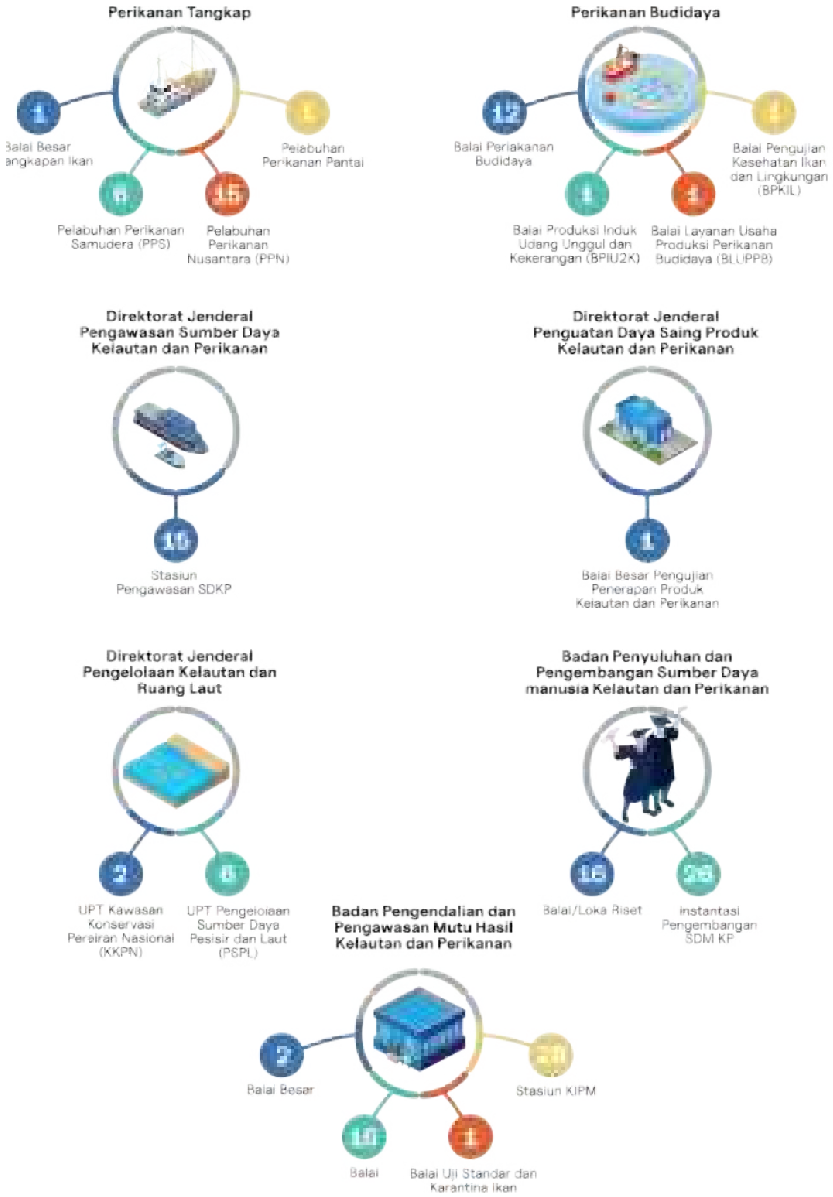

Gambar 2. | Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Potensi

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504 pulau, dan yang sudah dibakukan dan didaftarkan ke Perserikanan Bangsa Bangsa (PBB) sejumlah 16.671 pulau. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km² yang terdiri dari luas laut teritorial 0,29 juta km², luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan 3,11 juta km², dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia 3,00 juta km². Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km², luas landas kontinen 2,8 juta km², dan panjang garis pantai 108.000 km (Badan Informasi Geospasial dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, 2018).

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa Sumber Daya Alam (SDA) terbarukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi), SDA tak terbarukan (minyak, gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nuftah).

Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37 persen dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut.

Potensi mikro flora-fauna kelautan juga belum tereksplorasi sebagai penyangga pangan fungsional pada masa depan. Seiring dengan kegiatan penangkapan ikan, kegiatan budidaya ikan juga selalu meningkat sejak Tahun 1980-an, seperti berkembangnya budidaya laut untuk berbagai jenis ikan seperti kerapu, kakap, dan baronang, budidaya tambak untuk komoditas udang dan bandeng, serta budidaya air tawar seperti ikan mas, nila, lele, dan patin. Indonesia mempunyai potensi lahan perikanan budidaya yang sangat luas yaitu 17,91 juta ha yang meliputi lahan budidaya air tawar 2,8 juta ha (15,8%), lahan budidaya air payau 2,96 juta ha (16,5%) dan lahan budidaya laut 12,12 juta ha (67,7%).

Pemanfaatan potensi lahan perikanan baru mencapai 2,7% yang terdiri atas pemanfaatan lahan budidaya laut 278.920 ha, pemanfaatan lahan budidaya tambak 605.909 ha, dan pemanfaatan lahan budidaya air tawar 316.446 ha. Potensi produksi perikanan budidaya di Indonesia mencapai 100 juta ton/Tahun dengan nilai produksi mencapai USD 251 miliar (Dahuri, 2019). Kontribusi subsektor perikanan budidaya terhadap total nilai ekspor nonmigas adalah 1,13%, dan 37,71% jika dibandingkan terhadap total nilai ekspor perikanan pada Tahun 2018 (BPS, 2019).

Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat mendukung untuk pengembangan pakan ikan mandiri guna mengurangi ketergantungan akan pakan pabrikan yang sangat tergantung kepada bahan baku impor, dalam hal ini tepung ikan. Beberapa bahan tepung pakan yang dapat digunakan sebagai pengganti tepung impor antara lain adalah tepung maggot (ulat lalat hitam/ *black soldier*), daging kerang hijau, ikan rucah atau ikan sisa olahan, ikan pemakan plankton

yang nilai ekonominya rendah di masyarakat, bahan fermentasi berbagai tumbuhan, serta cacing *lumbricus*. Keanekaragaman hayati laut Indonesia memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan baik bagi kepentingan konservasi maupun ekonomi produktif.

Berdasarkan citra satelit, diperkirakan luas terumbu karang Indonesia mencapai 2,5 juta ha (P2O-LIPI, 2018) atau sekitar 10% dari total terumbu karang dunia yaitu seluas 284.300 km^2 (*Spalding et al*. 2001) dengan penyumbang terbesar adalah *coral triangle* yang menyumbang sekitar 34% (luas 73.000 km^2) terhadap total luas terumbu karang dunia (Burke et al. 2014). Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga karang dunia yang memiliki kekayaan jenis karang paling tinggi yaitu 569 jenis dari 82 marga dan 15 suku (Suharsono, 2014) atau sekitar 70% lebih jenis karang dunia dan lima jenis diantaranya merupakan jenis yang endemik.

Selanjutnya LIPI melalui Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) menyatakan bahwa penelitian dan pemantauan terumbu karang terhadap 1.067 *site* di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa terumbu karang dalam kategori jelek sebanyak 386 *site* (36,18%), kategori cukup sebanyak 366 *site* (34,3%), kategori baik sebanyak 245 *site* (22,96%), dan kategori sangat baik sebesar 70 *site* (6,56%). Indonesia juga mempunyai wilayah lamun dan mangrove yang luas. Berdasarkan penelitian P2O-LIPI (2018) luasan lamun Indonesia seluas 293.464 ha, sedangkan luas kawasan mangrove berdasarkan data *One Map Mangrove* (2018) seluas 3,5 juta ha.

Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya nonhayati yang melimpah. Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi namun belum terkelola secara memadai. Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam, merupakan subsektor kelautan yang belum tergarap secara optimal.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan memiliki peranan strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, sehingga memiliki kapasitas dan kompetensi yang diharapkan untuk optimalnya pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.

Tantangan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Pembangunan kelautan dan perikanan memiliki tantangan karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Tantangan untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan saat ini diantaranya adalah: a. produktivitas armada penangkapan ikan yang masih belum optimal dan struktur

armada penangkapan ikan masih didominasi skala kecil dan tradisional; b. kegiatan usaha budidaya ikan di Indonesia masih didominasi oleh pembudidaya skala kecil, teknologi tradisional, produktivitas yang rendah, penurunan daya dukung perairan dan lingkungan, dampak perubahan iklim, nilai tambah yang masih relatif kecil, serta pemanfaatan lahan yang belum optimal, dan biaya produksi yang tinggi; c. ketersediaan bahan baku yang tidak stabil untuk mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan; d. akses permodalan untuk peningkatan skala usaha; e. daya saing dan mutu produk perikanan untuk ekspor yang masih perlu ditingkatkan; f. sarana prasarana pendukung di daerah belum seluruhnya memadai seperti pelabuhan perikanan, balai benih, pertambakan garam, budidaya ikan, dan lain lain; serta g. degradasi ekosistem, perubahan iklim, dan cuaca ekstrim.

Selain itu tantangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, antara lain: pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), termasuk optimalisasi kelembagaan WPPNRI; b. harmonisasi ruang laut dan ruang darat untuk penguatan melalui penyelarasan Rencana Tata Ruang (RTR) menurut klasifikasinya dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW), dan Rencana Tata Ruang Laut (RTRL); c. akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil serta perairan di sekitarnya; d. masih terjadinya praktek IUU *fishing* dan *destructive fishing*; e. penerapan *good aquaculture practices* masih belum dilaksanakan secara optimal dalam pelaksanaan kegiatan perikanan budidaya; dan f. sinergi *stakeholders* dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Permasalahan pengembangan perikanan tangkap antara lain: a. belum optimalnya pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan adanya degradasi Sumber Daya Ikan (SDI) akibat ekploitasi melebihi batas kemampuan ikan untuk melakukan regenerasi; b. tingkat produktivitas kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang masih perlu ditingkatkan; c. infrastruktur dan konektivitas pelabuhan perikanan serta sarana dan prasara lainnya yang belum memadai; dan d. belum optimalnya akses nelayan terhadap faktor produksi termasuk permodalan serta sistem perlindungan yang harus terus dikembangkan.

Permasalahan pengembangan perikanan budidaya adalah terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul dan bermutu, harga pakan yang masih mahal mengakibatkan biaya produksi tidak efisien, penyakit, kapasitas sumber daya manusia, kondisi infrastruktur yang belum memadai dan terbatas untuk mendukung usaha perikanan budidaya yaitu antara lain balai benih ikan, saluran irigasi, listrik, jalan produksi, laboratorium kesehatan ikan, laboratorium kultur jaringan. Permasalahan lain yang menghambat pengembangan perikanan budidaya secara berkelanjutan adalah terjadinya asimetrik regulasi yang bersifat intrasektoral dan intersektoral, persyaratan perizinan yang sangat kompleks, kelembagaan pembudi daya ikan masih belum *bankable*, dan keterbatasan akses permodalan.

Permasalahan daya saing industri perikanan nasional untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki masih perlu dioptimalkan untuk menjawab permintaan global yang terus berubah dan semakin ketat. Perluasan investasi asing dan dalam negeri, peningkatan produksi

unit pengolahan ikan, penanganan pasca panen yang baik, diversifikasi produk baru sesuai tuntutan pasar, pengembangan sarana dan prasarana, penguatan sistem logistik, dan keberlanjutan usaha perlu terus dilakukan. Selain itu, Pemerintah berupaya untuk menanganani permasalahan permodalan, penurunan hambatan tarif dan non tarif, guna memperkuat pembangunan daya saing produk kelautan dan perikanan. Disisi lain upaya penguatan sistem karantina ikan serta penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dihadapkan pada permasalahan dengan belum optimalnya penerapan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir (kapal, tambak, supplier, dan unit pengolah ikan), masih kurangnya sarana dan prasarana inspeksi dan laboratorium pengujian, sarana layanan dan pengawasan di sentra-sentra produksi, serta di pintu-pintu pos lintas batas negara dan di bandara/pelabuhan baru.

Selain itu, masih terjadi praktik-praktik IUU (*Illegal, Unregulated, Unreported*) *Fishing* di WPPNRI, baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan dengan cara merusak (*destructive fishing*) dan tidak sesuai ketentuan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII). Saat ini, kemampuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas sarana, prasarana, dan kelembagaan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya), peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam skala nasional maupun internasional, serta peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP. Selain itu masalah perbatasan laut merupakan salah satu kendala dalam pengawasan SDKP mengingat kasus pencurian ikan masih marak terjadi di wilayah perairan perbatasan seperti, Laut Natuna sebelah utara, Laut Sulawesi sebelah utara, dan Selat Malaka yang masih terdapat *unresolved* area dengan negara tetangga. Hal ini menjadikan kasus perikanan di wilayah perbatasan akan terus menjadi tantangan tersendiri.

Terkait dengan permasalahan garam, selama ini kebutuhan nasional garam dalam negeri banyak dipenuhi dari impor. Sebagai negara yang memiliki panjang pantai nomor dua di dunia, sudah seharusnya kebutuhan nasional garam dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Saat ini produksi garam nasional masih belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri baik secara kuantitas maupun kualitas, yang antara lain dikarenakan usaha pergaraman masih tradisional, infrastruktur yang minim, dan tata niaga garam yang belum mendukung.

Aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, baik yang berada di daratan, wilayah pesisir, maupun laut, tidak dapat terlepas dari keberadaan potensi bencana alam dan dampak perubahan iklim yang dapat terjadi di wilayah Indonesia. Bencana alam dan perubahan iklim dapat berdampak serius terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, seperti kenaikan muka air laut yang dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil dan sebagian wilayah/lahan budidaya di wilayah pesisir, intrusi air laut ke daratan, peningkatan dan perubahan intensitas cuaca ekstrim (badai, siklon, banjir) yang berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan dan budidaya ikan, serta kerusakan sarana dan prasarana.

Permasalahan lainnya yang masih dihadapi Indonesia adalah masih adanya masyarakat

yang kekurangan gizi (*undernutrition*) dan kerdil (*stunting*). Penyelesaian permasalahan ini membutuhkan peran sektor kelautan dan perikanan, khususnya dalam menyediakan sumber pangan bergizi berbasis protein ikan dengan jumlah dan aksesibilitas yang memadai.

Lingkungan Strategis

Pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Lingkungan strategis kelautan dan perikanan internal yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan perikanan, yaitu:

1. Aspek ekonomi yang berfokus pada upaya peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap PDB dan pendapatan, serta penyerapan tenaga kerja;
2. Aspek sosial dan politik yang berkaitan dengan konstelasi politik di tingkat nasional maupun daerah serta pembagian wewenang urusan perikanan dengan pemerintah daerah dalam koridor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Kerangka kebijakan dan hukum nasional terkait dengan peningkatan keterlibatan stakeholders dalam penyusunan kebijakan di sektor kelautan dan perikanan dan terkait ratifikasi berbagai konvensi internasional, pelaksanaan Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, dan berbagai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berkaitan dengan bidang kelautan dan perikanan;
4. Sistem kelembagaan dan pemerintahan di pusat dan daerah terutama menyangkut sinergi dan dukungan lintas K/L terkait serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten dan/atau Kota;
5. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Teknologi Informasi terutama terkait dengan penyediaan data statistik perikanan yang handal sangat diperlukan sebagai data dasar untuk mengukur tingkat eksploitasi dan status stok ikan di satu WPPNRI yang berguna untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan ekonomi;
6. Kapasitas sumber daya manusia terutama berkaitan dengan pendayagunaan peran strategis sumber daya manusia perikanan sebagai penentu keberhasilan kegiatan di sentra-sentra kelautan dan perikanan; dan
7. Sistem pengawasan terutama terkait dengan jaminan ketertiban pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan demi terjaganya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pada konteks pembangunan kelautan dan perikanan, lingkungan strategis eksternal yang secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yakni: *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, *United Nations Fish Stocks Agreement* (UNFSA) 1995, FAO *Compliance* 1993, *Port State Measures Agreement* 2009, *Code of Conduct for Responsible Fisheries* dan *International Plan of Action, Sustainable Development Goals* (SDGs) kelautan dan perikanan, dan *The United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada Tahun 1994. Terdapat juga organisasi pengelolaan perikanan regional atau *Regional Fisheries Management Organisations* (RFMOs) yang melingkupi perairan Indonesia seperti *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC),

Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT), dan *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC).

Selain itu, terdapat pula berbagai Pakta Internasional dan Regional, seperti *World Trade Organization* (WTO), dan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), Konvensi dan kerja sama *Convention on Biological Diversity* (CBD), *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), *International Coral Reef Initiative* (ICRI) dan *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security* (CTI-CFF). Sebagai bagian dari entitas pada hukum dan perjanjian internasional tersebut, maka Indonesia harus mampu mengoptimalkan keterlibatannya.

Beberapa faktor strategis lingkungan internal yang menjadi kekuatan, atara lain:

1. Sumber daya ikan, habitat, dan produksi.
2. Pengelolaan perikanan nasional berbasis WPPNRI.
3. Komunikasi dengan *stakeholders* kelautan dan perikanan.
4. Penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan.
5. Ketersediaan bahan baku untuk industri perikanan.
6. Permintaan hasil perikanan dalam negeri; dan.
7. Pengelolaan sistem pembinaan mutu dan keamanan pangan.

Sedangkan yang menjadi kelemahan, antara lain: 1. ekonomi nasional; 2. sosial budaya nasional; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan faktor strategis lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang, antara lain: 1. permintaan hasil perikanan dunia; 2. sumber daya alam dan tingkat produksi perikanan dunia; 3. kerja sama bilateral, regional, multilateral, serta instrumen internasional (termasuk RFMOs); 4. kependudukan dunia. Sedangkan yang menjadi ancaman, antara lain: 1. globalisasi perdagangan dan pasar bebas hasil perikanan regional serta dunia; 2. praktik IUU *Fishing*; 3. ketentuan *World Trade Organisation* (WTO); dan 4. pengaruh atas dikeluarkannya status Indonesia sebagai negara berkembang oleh Amerika Serikat.

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja disusun dengan sistematika sebagaimana berikut:

Bab I. Pendahuluan
Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran mandat dan peran strategis KKP sebagaimana tertuang dalam Renstra dan Renja KKP Tahun 2023 serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023.

Bab II Perencanaan Kinerja
Bab ini menguraikan penjelasan mengenai Rencana Strategis, dukungan pada Prioritas Nasional, Rencana Kerja dan Anggaran KKP Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja
Bab ini menyajikan informasi terkait pencapaian dan analisis indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja KKP Tahun 2023, serta upaya peningkatan kinerja. Selain itu juga diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang meliputi efisiensi anggaran dan pemanfaatan teknologi informasi.

Bab IV Prestasi dan Kinerja Lainnya
Pada subbab ini menguraikan prestasi KKP dalam upaya peningkatan layanan publik.

Bab V. Penutup
Bab ini menyajikan informasi dan simpulan umum terkait dengan kinerja 2023.

Lampiran
Bab ini menyajikan informasi Perjanjian Kinerja KKP Tahun 2023 dan Matrik Target Renstra 2020-2024.

Gambar 3. | Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Berdasarkan Permen PANRB 53 Tahun 2014

UDIDAYA UDANG

Bab • 02

PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN KINERJA

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Dari visi tersebut, terdapat lima arahan utama dari Presiden yaitu Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Trasformasi Ekonomi.

Rencana Strategis KKP 2020-2024

Untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden, maka dicanangkan sembilan misi dan tujuh agenda pembangunan nasional Tahun 2020-2024.

23 November 2023 Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan meresmikan Kampung Nelayan Modern (Kalamo) Kampung Samber-Binyeri, Kabupaten Biak Numfor

Gambar 4. | Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024

Sebagai organisasi yang membantu presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP Tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Gambar 5. | Visi Misi KKP Tahun 2020-2024

Dalam rangka menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

1. Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan meningkatnya kapasitas dan kompeten SDM Kelautan dan Perikanan dan menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional, dengan tujuan optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap, meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan, meningkatnya pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, meningkatnya sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamana hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan dan optimalnya pengelolaan ruang laut.
3. Peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, dengan tujuan meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP.

Untuk mencapai 9 tujuan tersebut, telah ditetapkan 9 sasaran strategis yang akan dituju dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. | Tujuan dan Sasaran Strategis

No	Tujuan	→	Sasaran Strategis
1	Optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap	→	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat
2	Meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan	→	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat
3	Optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil	→	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan
4	Meningkatnya kapasitas dan kompeten SDM Kelautan dan Perikanan	→	Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat
5	Menguatnya inovasi kelautan dan perikanan	→	Rekomendasi kebijakan dimanfaatkan
6	Optimalnya pengelolaan ruang laut	→	Tatakelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab
7	Meningkatnya sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamana hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan	→	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing
8	Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	→	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Integratif
9	Meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP	→	Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas

11 Desember 2023 | Pelantikan Sekretaris Jenderal KKP oleh Menteri Kelautan dan Perikanan di Gedung Mina Bahari IV

Dengan beralihnya fungsi riset ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, maka terdapat penyesuaian Sasaran Strategis dari semula 9 menjadi 8 Sasaran strategis dan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Hal tersebut juga telah menjadi fokus penyelarasan dalam dokumen Revisi Renstra KKP 2020-2024 yang sampai saat ini masih dalam proses menunggu Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) KKP selesai.

Tabel 3. | Perbandingan Sasaran Strategis pada Renstra KKP 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja 2023

SS (semula) tertuang dalam Renstra KKP 2020-2024	SS (menjadi) tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023
SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat
SS-2 Ekonomi sektor KP meningkat	SS-2 Ekonomi sektor KP meningkat
SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan
SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat	SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat
SS-5 Rekomendasi kebijakan dimanfaatkan	-
SS-6 Tatakelola SDKP bertanggung jawab	SS-5 Tatakelola SDKP bertanggung jawab
SS-7 Industrialisasi KP berdaya saing	SS-6 Industrialisasi KP berdaya saing
SS-8 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Integratif	SS-7 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Integratif
SS-9 Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	SS-8 Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas

Pada Tahun 2023, terdapat enam Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah 2023 yang diterjemahkan ke dalam kegiatan KKP berdasarkan Prioritas Nasional.

Tabel 4. | Kegiatan KKP dalam Mendukung Prioritas Nasional

Prioritas Nasional (PN)	Unit Eselon I	Kegiatan	KRO (Kelompok Rincian *Output*)
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Sekretariat Jenderal	Pengelolaan Data dan Informasi	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
			Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Ditjen Perikanan Tangkap	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	Perizinan Produk
			Sertifikasi Profesi dan SDM
			Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
			Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha
			Bantuan Peralatan / Sarana
		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Sertifikasi Profesi dan SDM
			Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
			Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan
		Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	Perizinan Produk
			Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
			Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
			Bantuan Masyarakat
			Bantuan Kelompok Masyarakat
			Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat
			Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
			Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
		Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
			Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi
			Pemantauan produk
			Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan

Prioritas Nasional (PN)	Unit Eselon I	Kegiatan	KRO (Kelompok Rincian *Output*)
	Ditjen Perikanan Budi Daya	Pengelolaan Perbenihan Ikan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
			Bantuan Peralatan / Sarana
			Bantuan Hewan
			Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
			Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
		Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
			Bantuan Peralatan / Sarana
			Penyidikan dan Pengujian Penyakit
			Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
			Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
		Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
			Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
			Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
			Bantuan Masyarakat
			Bantuan Peralatan / Sarana
			Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
			Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
		Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
			Bantuan Peralatan / Sarana
			Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
			Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga

Prioritas Nasional (PN)	Unit Eselon I	Kegiatan	KRO (Kelompok Rincian *Output*)
	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
			Bantuan Peralatan / Sarana
			Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
			Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
			Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
		Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
			Forum
			Promosi
			Bantuan Peralatan / Sarana
			Data dan Informasi Publik
			Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
			Sistem Informasi Pemerintahan
		Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	Sertifikasi Produk
			Fasilitasi dan Pembinaan UMKM
			Fasilitasi dan Pembinaan Industri
			Bantuan Peralatan / Sarana
			Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
		Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	Promosi
			Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
			Fasilitasi dan Pembinaan UMKM
		Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM

Prioritas Nasional (PN)	Unit Eselon I	Kegiatan	KRO (Kelompok Rincian *Output*)
	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
			Bantuan Peralatan / Sarana
			Sarana Pengembangan Kawasan
		Perencanaan Ruang Laut	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan
			Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
			Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
	Badan Pengem-bangan dan Penyuluhan SDM KP	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
			Penyidikan dan Pengujian Produk
			Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
			Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
			Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan
		Riset Kelautan	OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Inkubasi Bisnis Kelautan dan Perikanan	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan

Prioritas Nasional (PN)	Unit Eselon I	Kegiatan	KRO (Kelompok Rincian *Output*)
	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Karantina Ikan	Sertifikasi Produk
			Sertifikasi Lembaga
			Penanganan Perkara
			Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
			Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
		Pengendalian Mutu	Sertifikasi Produk
			Pengawasan dan Pengendalian Produk
			Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
			Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
			Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
		Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
			Standarisasi Lembaga
			Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
			Pengawasan dan Pengendalian Produk
2. Mengem-bangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Ditjen Perikanan Tangkap	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi
	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bantuan Peralatan / Sarana
			Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
			Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Promosi
	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
			Sarana Bidang Pendidikan
			Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi
			Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan
4. Revolusi Mental dan Pembang-unan Kebudayaan	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
			Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat

Prioritas Nasional (PN)	Unit Eselon I	Kegiatan	KRO (Kelompok Rincian *Output*)
5. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
		Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan
			Kerja sama
			Kemitraan
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
			Bantuan Kelompok Masyarakat
			Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem
			Konservasi Jenis/Spesies
			Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan
			Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
		Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
			Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
			Bantuan Peralatan / Sarana
			Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana
			Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
			Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem
6. Memperkuat Stabilitas Polhukhan-kam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sekretariat Jenderal	Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	Kerja sama
	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam
			Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
			Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
			Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
			Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pemanfaatan Informasi Kinerja Tahun 2022 sebagai *Feedback* Perencanaan Tahun 2023

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam perjanjian kinerja, KKP melaksanakan 5 (lima) program pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut: 1). Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, 2). Program Dukungan Manajemen, 3). Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, 4). Program Kualitas Lingkungan Hidup, dan 5). Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Dalam menyusun target Tahun 2023, tetap memperhatikan arah kebijakan nasional dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2023 sebagaimana telah tercantum Renstra KKP 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan juga mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator kinerja Tahun 2022 dan kondisi lingkungan serta dinamika yang terjadi.

Tabel 5. | Realisasi Capaian Kinerja KKP Tahun 2022 dan Target 2023

No	2022				2023					
	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target	Capaian	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target Berdasarkan Perjanjian Kinerja			Ket.
							Target Awal	Revisi Juni	Revisi Nov.	
1	Kesejah-teraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	Indeks Kesejah-teraan Masyarakat KP	61,47	61,38	Kesejah-teraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	Indeks Kesejah-teraan Masyarakat KP	62,66	62,66	62,66	Target disusun dengan memper-hatikan capaian Tahun 2022 serta berdasarkan target 2023 pada Renstra KKP 2020-2024
2	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	72	61,71	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	76	76	76	Target disusun dengan memper-hatikan capaian Tahun 2022 serta berdasarkan target 2023 pada Renstra KKP 2020-2024
3	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	Luas kawasan konservasi perairan	28,9	28,9	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	Luas kawasan konservasi perairan	29,1	29,10	29,1	Target disusun memperhatikan capaian Tahun 2022
4	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto	4	2,85	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto	4	4	4	Target disusun memperhatikan capaian Tahun 2022 serta berdasarkan target Pertumbu-han PDB Nasional dalam RKP 2023 yaitu sebesar 5,3-5,9 persen

No	2022				2023					
	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target	Capaian	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target Berdasarkan Perjanjian Kinerja			Ket.
							Target Awal	Revisi Juni	Revisi Nov.	
5	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	Nilai ekspor hasil perikanan	7,13	6,24	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	Nilai ekspor hasil perikanan	6,77	6,77	6,77	Target disusun dengan memper-hatikan capaian Tahun 2022
6	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	Konsumsi ikan	59,53	56,48	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	Konsumsi ikan	57,50	57,61	57,61	Target disusun dengan memper-hatikan capaian Tahun 2022
7	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	Nilai PNBP sektor KP	1,87	1,87	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	Nilai PNBP sektor KP	4,038	4,038	4,038	Target disusun dengan memper-hatikan capaian Tahun 2022
8	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	Tenaga kerja yang terlibat	651.018	1.133.510	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	Tenaga kerja yang terlibat	455.707	455.707	455.707	Terdapat penyesuaian manual Indikator kInerja dengan mempersempit ruang lingkup capaian IK
9	Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri / DUDI	65	66,01	Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri / DUDI	70	70	70	Target disusun dengan memper-hatikan capaian Tahun 2022 serta berdasarkan target 2023 pada Renstra KKP 2020-2024
10	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	WPPNRI yang melaksa-nakan penangkapan ikan terukur	11	11	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	WPPNRI yang melaksa-nakan penangkapan ikan terukur	11	11	11	Target disusun memperhatikan capaian Tahun 2022. IK belum tercantum dalam Renstra KKP 2020-2024 namun telah diusulkan dalam revisi Renstra KKP.
11	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir	27	34	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir	32	32	32	Target disusun memperhatikan capaian Tahun 2022 serta target Renja KKP 2023.
12	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP	100	102,51						IK ini menjadi IK Level I di Ditjen PSDKP dengan target 2023 sebesar 100 persen.
13	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi perikanan	27,09	24,85	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi perikanan	28,22	28,22	28,22	Target disusun berdasarkan target Renja KKP 2023
14	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi garam	0,7	0,7	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi garam	2	2	2	Target disusun berdasarkan target Renja KKP 2023

No	2022				2023					
	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target	Capaian	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target Berdasarkan Perjanjian Kinerja			Ket.
							Target Awal	Revisi Juni	Revisi Nov.	
15	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor	98	99,58	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor	98	98	98	Target disusun berdasarkan target Renja KKP 2023
16	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP	9,48	10,62	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP	10,26	10,26	6,99	Target disusun berdasarkan target Renja KKP 2023
17	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif	Persentase penanganan pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	93	99,38						IK ini menjadi IK Level I di Ditjen PSDKP dengan nomenklatur indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan dan Indeks kinerja penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan
18	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif	WPPNRI rawan kegiatan kelautan dan perikanan ilegal yang diawasi	6	6						IK ini menjadi IK Level I di Ditjen PSDKP dengan nomenklatur IK Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
19	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	96	96,56	Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif	Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	97	97	97	Target disusun dengan memper-hatikan capaian Tahun 2022 dan target Renstra KKP2020-2024
20	Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP	73	77,79	Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP	74	74	78	Target disusun memperhatikan capaian Tahun 2022 dan adanya penyesuaian *roadmap* RB (Permen PAN RB 3/2023)
21	Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP	89	93,49	Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP	89	89	93,75	Target disusun dengan memper-hatikan capaian Tahun 2022 dan adanya penyesuaian manual indikator Kinerja dari 12 kriteria menjadi 8 kriteria

Keselarasan Renstra 2020-2024, Renja KKP Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja 2023 serta Penyesuaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

KKP terus menjaga keselarasan Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Namun demikian di tahun 2023, terdapat beberapa penyesuaian target dengan adanya perubahan dan dinamika lingkungan. Proses penyesuaian Perjanjian Kinerja merupakan proses "keberlanjutan" dari reviu atas Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya. Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani digunakan sebagai komitmen organisasi yang akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Sasaran Strategis dan indikator kinerja di dalam Perjanjian Kinerja dilakukan penajaman dan dilakukan perbaikan substansi dan peningkatan target (apabila diperlukan), termasuk penyelarasan pada level unit kerja eselon I dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan eksternal dan internal yang dinamis. Perubahan tersebut memerlukan adaptasi dan agilitas organisasi. Tahun 2023 Perjanjian Kinerja KKP mengalami perubahan sebanyak 3 kali yaitu Januari 2023, Juni 2023, dan November 2023. Beberapa proses dan pembahasan penyesuaian Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

a. Dialog Kinerja Organisasi dan Penyerahan DIPA Tahun 2023 pada 28 Desember 2022.
b. Penetapan Indikator Kinerja KKP Tahun 2023 melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Indikator Kinerja Utama KKP Tahun 2023.
c. Terbitnya Keputusan Menteri KP Nomor 166 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri KP Nomor 32 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi KKP tahun 2020-2024, mengakibatkan perubahan target indikator kinerja RB KKP Tahun 2023.

Gambar 6. | Dialog Kinerja Organisasi KKP Tahun 2023

Tabel 6. | Keselarasan Sasaran Strategis Renstra 2020-2024, Renja 2023 dan Perjanjian Kinerja KKP Tahun 2023

Renstra KKP Tahun 2020-2024	Rencana Kerja Tahun 2023 (Permen KP 85 Tahun 2022)	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Pengesahan Janu-ari 2023)	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Pengesahan Juni 2023)	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Pengesahan November 2023)	Penjelasan
SS 1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	SS 1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	SS 1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	SS 1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	SS 1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	
SS 2. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	SS 2. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	SS 2. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	SS 2. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	SS 2. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	Terdapat penyesuaian urutan Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga urutan tidak sama dengan di Rencana Strategis 2020-2024 dan Rencana Kerja KKP Tahun 2023, yaitu pada Rencana Strategis SS. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat semula SS 2 menjadi SS 3 di Rencana Kerja KKP dan Perjanjian Kinerja KKP Tahun 2023.
SS 3. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	SS 3. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	SS 3. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	SS 3. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	SS 3. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	Terdapat penyesuaian urutan Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga urutan tidak sama dengan di Rencana Strategis 2020-2024 dan Rencana Kerja KKP Tahun 2023, yaitu pada Rencana Strategis SS. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat semula SS 2 menjadi SS 3 di Rencana Kerja KKP dan Perjanjian Kinerja KKP Tahun 2023.
SS 4. Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat	SS 4. Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat	SS 4. Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat	SS 4. Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat	SS 4. Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat	
SS 5. Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan	-	-	-	-	Tugas dan Fungsri Riset beralih ke BRIN
SS 6. Tatakelola SDKP bertanggung jawab	SS 5. Tata Kelola SDKP bertanggung jawab	SS 5. Tata Kelola SDKP bertanggung jawab	SS 5. Tata Kelola SDKP bertanggung jawab	SS 5. Tata Kelola SDKP bertanggung jawab	

Renstra KKP Tahun 2020-2024	Rencana Kerja Tahun 2023 (Permen KP 85 Tahun 2022)	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Pengesahan Janu-ari 2023)	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Pengesahan Juni 2023)	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Pengesahan November 2023)	Penjelasan
SS 7. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	SS 6. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	SS 6. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	SS 6. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	SS 6. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	
SS 8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif	SS 8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif	SS 7. Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif	SS 7. Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif	SS 7. Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif	Terdapat penyesuaian Sasaran Strategis nomenklatur yaitu SS "Pengawasan Sumber Daya integratif" di Rencana Strategis KKP 2020-2024 menjadi "Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan Efektif" di Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja KKP Tahun 2023.
SS 9. Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	SS 8. Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	SS 8. Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	SS 8. Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	SS 8. Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	

Tabel 7. | Keselarasan Indikator Kinerja dan Target Renstra 2020-2024, Renja 2023 dan Perjanjian Kinerja KKP Tahun 2023

Indikator Kinerja	Renstra KKP Tahun 2020-2024	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Tahun 2023 (Permen KP 85 Tahun 2022)	Indikator Kinerja	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Pengesahan Januari 2023)
1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP (indeks)	62,66	1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP (indeks)	62,66	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP (indeks)	62,66
2. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Perikanan (%)	8,51	2. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (%)	5,00-6,00	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (%)	4
3. Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	7,66	3. Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	7,66	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	6,77
4. Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	61,02	4. Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	61,02	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	57,50
	-			Nilai PNBP sektor KP (Rp. Triliun)	4.038
	-			Tenaga Kerja yang Terlibat (orang)	456.657
5. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	≤76	5. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	≤76	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	≤76
6. Luas kawasan konservasi perairan (juta ha)	26	6. Luas kawasan konservasi (juta ha)	29,1	Luas kawasan konservasi (juta ha)	29,10
7. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri/DUDI (%)	70	7. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri/DUDI (%)	70	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri/DUDI (%)	70
8. Hasil Riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan (hasil riset)	13	-	-	-	-
9. WPP NRI yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (WPP)	9	8. WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur	11	WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur	11

	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Pengesahan Juni 2023)	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Pengesahan November 2023)	Penjelasan
	62,66	62,66	Target sesuai Renstra dan Renja
	4	4	Target disesuaikan menjadi 4% dengan memperhatikan capaian Tahun 2022 sebesar 2,85%
	6,77	6,77	Target disesuaikan menjadi 6,77 USD miliar dengan memperhatikan capaian Tahun 2022 sebesar 6,24 USD miliar dan kondisi perekonomian global
	57,61	57,61	Target disesuaikan menjadi 57,61 kg/kapita/tahun memperhatikan realisasi tahun 2022 sebesar 56,48
	4.038	4.038	Indikator Kinerja baru di tahun 2022 dan berlanjut di 2023
	456.657	456.657	Indikator Kinerja baru di tahun 2022 dan berlanjut di 2023
	≤76	≤76	Target memperhatikan capaian tahun 2022 dan sesuai Renstra dan Renja
	29,10	29,10	Target berdasarkan evaluasi capaian 2022
	70	70	Target berdasarkan Renstra KKP 2020-2024
	-	-	Tugas dan fungsi beralih ke BRIN
	11	11	Disesuaikan menjadi Indikator Kinerja WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur

Indikator Kinerja	Renstra KKP Tahun 2020-2024	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Tahun 2023 (Permen KP 85 Tahun 2022)	Indikator Kinerja	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Pengesahan Januari 2023)	
	-	9. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perişanan (%)	100			
10. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (rencana zonasi)	26	10. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (rencana zonasi	30		32	
11. Persentase Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	97	11. Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	97		97	
1. Produksi perikanan (juta ton)	31,01	12. Produksi perikanan (juta ton)	30,58		28,22	
2. Produksi garam (juta ton)	3,3	13. Produksi garam (juta ton)	2		2	
	-	14. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)	98		98	
	-	15. Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan-KUR KPdan BLU LPMUKP (triliun)	9,91	Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP (Rp. Triliun)	10,26	
3. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	70	16. Jumlah WPPNRI rawan kegiatan kelautan dan perikanan ilegal yang diawasi	8	–		

	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Pengesahan Juni 2023)	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Pengesahan November 2023)	Penjelasan
			Indikator Kinerja diturunkan menjadi Indikator di Level Unit Kerja Eselon I yaitu di Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP
	32	32	Target berdasarkan evaluasi capaian 2022
	97	97	Target disusun sesuai Renstra
	28,22	28,22	Target berdasarkan evaluasi capaian 2022
	2	2	Target berdasarkan evaluasi capaian 2022
	98	98	Target belum tercantum di Renstra KKP, namun telah tercantum sebagai Indikator Kinerja di Unit Kerja Eselon I
	10,26	6,99	
	–	–	Indikator Kinerja diturunkan menjadi Indikator di Level Unit Kerja Eselon I yaitu di Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP

Indikator Kinerja	Renstra KKP Tahun 2020-2024	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Tahun 2023 (Permen KP 85 Tahun 2022)	Indikator Kinerja	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Pengesahan Januari 2023)	
4. Persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan (%)	93	17. Persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan (%)	93	_		
5. Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP (Nilai)	74	18. Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP (Nilai)	74			
6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP (Nilai)	90	19. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP (Nilai)	90			

Keterangan :

1. *Terdapat penyesuaian urutan Sasaran Strategis pada Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga urutan tidak sama dengan di Rencana Strategis 2020-2024, yaitu pada Rencana Strategis SS. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat semula SS 2 menjadi SS 3 di Rencana Kerja KKP dan Perjanjian Kinerja KKP Tahun 2023.*
2. *Terdapat penyesuaian Sasaran Strategis nomenklatur yaitu SS "Pengawasan Sumber Daya integratif" di Rencana Strategis KKP 2020-2024 menjadi "Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan Efektif" di Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja KKP Tahun 2023.*
3. *Terdapat Indikator Kinerja yang di dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja KKP Tahun 2023 yaitu Nilai PNBP sektor KP (Rp. triliun) dan Tenaga Kerja yang Terlibat (orang) yang belum tercantum dalam Rencana Strategis KKP 2020-2024. Penambahan indikator kinerja tersebut berdasarkan hasil dialog kinerja organisasi Tahun 2022 dan hasil evaluasi kinerja.*

	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Pengesahan Juni 2023)	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Pengesahan November 2023)	Penjelasan
	–	–	Indikator Kinerja diturunkan menjadi Indikator di Level Unit Kerja Eselon I yaitu di Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP
	74	78	Target disesuaikan menjadi 78 menyesuaikan *Roadmap* RB KKP 2023-2024 (Kepmen KP 166/2023)
	93,75	93,75	Target disesuaikan menjadi 78 menyesuaikan *Roadmap* RB KKP 2023-2024 (Kepmen KP 166/2023)

Tahun 2023 terdapat penyesuaian perjanjian kinerja sebanyak 3 kali yaitu Januari, Juni dan November 2023, dengan penjelasan perubahan Perjanjian Kinerja sebagaimana Tabel 9.

Tabel 8. | Keselarasan Indikator Kinerja dan Target Renstra 2020-2024, Renja 2023 dan Perjanjian Kinerja KKP Tahun 2023

Januari 2023					Juni 2023				
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		
1	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	1	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP (indeks)	62,66	1	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	1	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP (indeks)	
2	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	2	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	≤76	2	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	2	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	
		3	Luas kawasan konservasi (Juta Ha)	29,10			3	Luas kawasan konservasi (Juta Ha)	
3	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	4	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan (%)	4	3	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	4	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan (%)	
		5	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	6,77			5	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	
		6	Konsumsi ikan (Kg/kap/thn)	57,50			6	Konsumsi ikan (Kg/kap/thn)	
		7	Nilai PNBP sektor KP (Triliun Rupiah)	4.038			7	Nilai PNBP sektor KP (Triliun Rupiah)	
		8	Tenaga kerja yang terlibat (Orang)	456.657			8	Tenaga kerja yang terlibat (Orang)	
4	Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat	9	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri / DUDI (%)	70	4	Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat	9	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri / DUDI (%)	
5	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	10	WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur (WPP)	11	5	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	10	WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur (WPP)	
		11	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	32			11	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	

	Juni 2023		November 2023					
	Target	Penjelasan Perubahan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Penjelasan Perubahan
	62,66	Tetap	1	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	1	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP (indeks)	62,66	Tetap
	≤76	Tetap	2	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	2	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	≤76	Tetap
	29,10	Tetap			3	Luas kawasan konservasi (Juta Ha)	29,10	Tetap
	4	Tetap	3	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	4	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan (%)	4	Tetap
	6,77	Tetap			5	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	6,77	Tetap
	57,61				6	Konsumsi ikan (Kg/kap/thn)	57,61	Tetap
	4.038	Tetap			7	Nilai PNBP sektor KP (Triliun Rupiah)	4.038	Tetap
	456.657	Tetap			8	Tenaga kerja yang terlibat (Orang)	456.657	Tetap
	70	Tetap	4	Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat	9	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri / DUDI (%)	70	Tetap
	11	Tetap	5	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	10	WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur (WPP)	11	Tetap
	32	Tetap			11	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	32	Tetap

Januari 2023					Juni 2023				
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		
6	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	12	Produksi perikanan (Juta ton)	28,22	6	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	12	Produksi perikanan (Juta ton)	
		13	Produksi garam (Juta ton)	2			13	Produksi garam (Juta ton)	
		14	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)	98			14	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)	
		15	Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP (Triliun Rupiah)	10,26			15	Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP (Triliun Rupiah)	
7	Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif	16	Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	97	7	Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif	16	Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	
8	Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	17	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP (nilai)	74	8	Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	17	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP (nilai)	
		18	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP (nilai)	89			18	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP (nilai)	

	Juni 2023		November 2023					
	Target	Penjelasan Perubahan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Penjelasan Perubahan
	28,22	Tetap	6	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	12	Produksi perikanan (Juta ton)	28,22	Tetap
	2	Tetap			13	Produksi garam (Juta ton)	2	Tetap
	98	Tetap			14	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)	98	Tetap
	10,26	Tetap			15	Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP (Triliun Rupiah)	6,99	Penyesuaian target disebabkan perlambatan penyaluran KUR Tahun 2023 sebagai akibat dari terbitnya Peraturan Menteri Kooordinator Bidang Perekonomian No 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang mengatur kenaikan suku bunga KUR semula 3% menjadi 6% dan adanya pengaturan peningkatan kriteria bagi kreditur yang lebih ketat sehingga menyulitkan perbankan mencari kreditur yang memenuhi syarat
	97	Tetap	7	Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif	16	Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	97	Tetap
	74	Tetap	8	Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	17	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) KKP (nilai)	78	Target menyesuaikan perubahan Road Map RB KKP sebagaimana Kepmen KP Nomor 166 Tahun 2023
	89	Tetap			18	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP (nilai)	93,75	Target menyesuaikan perubahan *Road Map* RB KKP sebagaimana Kepmen KP Nomor 166 Tahun 2023

Bab • 03

AKUNTABILITAS KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi

Dalam memantau capaian kinerja organisasi, KKP melakukan pengukuran kinerja secara periodik. Proses pengukuran dan penghitungan capaian kinerja menggunakan manual IK yang telah disusun dan disepakati sebelumnya menggunakan aplikasi kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id). Tampilan *dashboard* capaian KKP Tahun 2023 seperti pada gambar berikut:

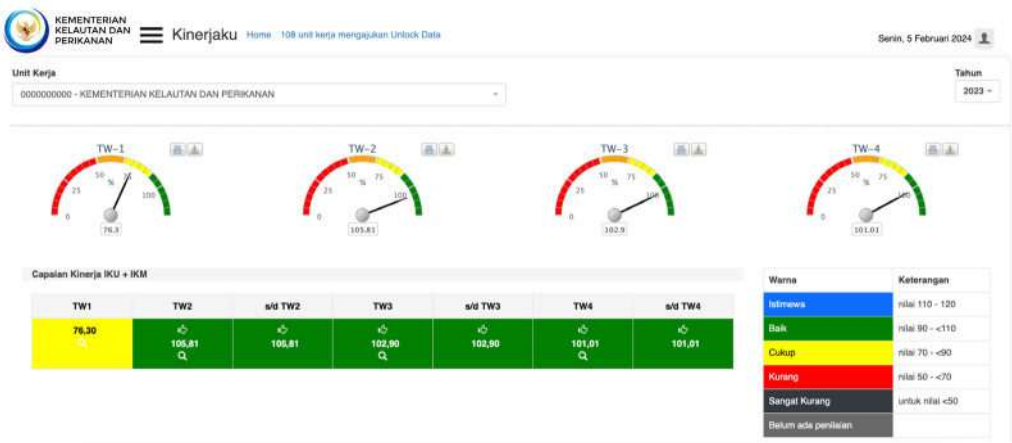

Gambar 7. | Tampilan *Dashboard* Aplikasi Kinerjaku Tahun 2023

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Tahun 2023 sebesar 102,13 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 9. | Capaian IK KKP Tahun 2023

Kode		Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2023	Realisasi	% Realisasi
SS.01		**Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat**					**100,14**	
	IKSS.01.1	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	62,66	62,75	100,14
SS.02		**Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan**					**110,17**	
	IKSS.02.1	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	Minimize	Nilai Posisi Akhir	76	58,18	120,00
	IKSS.02.2	Luas kawasan konservasi perairan	Juta Ha	Maximize	Nilai Posisi Akhir	29,1	29,2	100,34
SS.03		**Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat**					**93**	
	IKSS.03.1	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Perikanan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	4	5,49	120,00
	IKSS.03.2	Nilai ekspor hasil perikanan	USD miliar	Maximize	Nilai Posisi Akhir	6,77	5,62	83,01
	IKSS.03.3	Konsumsi ikan	kg/kap/ thn	Maximize	Nilai Posisi Akhir	57,61	57,61	100,00
	IKSS.03.4	Nilai PNBP sektor KP	Triliun Rupiah	Maximize	Nilai Posisi Akhir	4,04	1,69	41,85
	IKSS.03.5	Tenaga kerja yang terlibat	orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	456.657,00	569.631,00	120,00
SS.04		**Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat**					**105,96**	
	IKSS.04.1	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri / DUDI	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	74,17	105,96
SS.05		**Tatakelola SDKP bertanggung jawab**					**100**	
	IKSS.05.1	WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur	WPP	Maximize	Nilai Posisi Akhir	11	11	100,00
	IKSS.05.2	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir	kawasan	Maximize	Nilai Posisi Akhir	32	32	100,00

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Kode		Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2023	Realisasi	% Realisasi
SS.06		**Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing**					**104,93**	
	IKSS.06.1	Produksi perikanan	Juta Ton	Maximize	Nilai Posisi Akhir	28,22	24,74	87,67
	IKSS.06.2	Produksi garam	Juta Ton	Maximize	Nilai Posisi Akhir	2	2,55	120,00
	IKSS.06.3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	98	99,84	101,88
	IKSS.06.4	Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP	Triliun Rupiah	Maximize	Nilai Posisi Akhir	6,99	7,7	110,16
SS.07		**Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif**					**100,99**	
	IKSS.07.1	Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	97	97,96	100,99
SS.08		**Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas**					**103,81**	
	IKSS.08.1	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	78	85,4	109,49
	IKSS.08.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,75	91,99	98,12

Gambar 8. | Grafik Capaian Nilai Kinerja Organisasi 2019-2023

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 2019-2023 bersifat fluktuatif. NKO 2023 sebesar 102,13 atau mengalami perlambatan apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 102,71. Namun demikian, capaian NKO tersebut tidak dapat dibandingkan secara *apple to apple* karena adanya perbedaan jumlah indikator kinerja dan kondisi lingkungan ekternal dan tantangan yang tidak selalu sama di setiap tahun. Rincian NKO dan Jumlah Indikator Kinerja 2029-2023 dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 9. | Capaian IK KKP Tahun 2023

SS • 1

Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkat

Sasaran Strategis 1 memiliki satu indikator yakni Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan. KKP berkomitmen untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dan memberikan perhatian penuh terhadap kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan.

IK-1, Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Definisi

Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan dari kemerdekaan Indonesia yang selanjutnya menjadi mandat pembangunan kepada siapa pun yang melaksanakan roda pemerintahan. Amanat pembangunan ini tercantum pada salah satu misi KKP yaitu pencapaian kesejahteraan rakyat melalui pengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan inovasi IPTEK kelautan dan perikanan.

Salah satu indikator kinerja KKP atas penjabaran misi “kesejahteraan” adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP. Hal ini secara eksplisit tercantum dalam Permen KP No. 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024. Kesejahteraan masyarakat ini menempati urutan teratas dalam peta strategi KKP dari sisi perspektif *stakeholder*. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) diperlukan untuk : a) mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan di Indonesia, b) alat ukur keberhasilan program pembangunan yang inklusif di sektor kelautan dan perikanan, dan c) alat ukur yang mempertimbangkan aspek kesenjangan terutama antarwilayah. Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR) adalah indeks untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat di Indonesia. IKraR dirancang sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan yang inklusif, serta alat ukur yang mampu melihat ketersediaan akses terhadap pemenuhan hak-hak dasar rakyat (KemenkoKesra, 2011). Indikator Kesejahteraan Sosial (Masyarakat KP) diharapkan dapat digunakan sebagai basis bagi KKP dalam melakukan intervensi

Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Tahun 2023

atau proses serta usaha terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat KP. Selama ini belum ada ukuran tingkat kesejahteraan yang dapat merepresentasi dimensi serta atribut (indikator) yang diharapkan. Indikator Kesejahteraan Rakyat (IKraR) yang dikembangkan Menko Kesra pada tahun 2012 dijadikan acuan basis pengembangan Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP).

Analisis Capaian

Capaian IKMKP 2023 dihitung berdasarkan 14 indikator yang merupakan turunan dari dua dimensi yaitu dimensi sosial dan kelembagaan serta dimensi ekonomi. Dimensi sosial dan kelembagaan terdiri dari 1). jumlah penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha perikanan tangkap, 2). jumlah penumbuhan dan pengembangan kelembagaaan usaha budidaya ikan, 3). jumlah penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pengolah dan pemasaran perikanan, 4). jumlah penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pengolah dan pemasaran perikanan, 5). jumlah penumbuhan dan pengembangan masyarakat pengawas, 6).jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang meningkat kelasnya dari jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh, 8). jumlah kelompok yang disuluh mendukung tata kelola pemanfaatan sumber daya KP yang berdaya saing dan berkelanjutan. Sedangkan untuk dimensi ekonomi terdiri dari 1). Nilai Tukar Nelayan 2). Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan, 3). Nilai Tukar Pengolahan dan Pemasaran, 4). Nilai Tukar Petambak Garam, 5). Volume Ekspor Produk Perikanan, 6). Volume Impor Perikanan, 7). Angka Konsumsi Ikan, 8). Proporsi pengeluaran pangan terhadap total pendapatan.

Metode pembobotan selanjutnya digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing dimensi kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Metode pembobotan ditentukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya. Penentuan besaran bobot dihitung berjenjang. Bobot dimensi ditentukan menggunakan teknik bobot prioritas. Capaian IKMKP pada Tahun 2023 tercantum pada Tabel 10 sebagai berikut :

Tabel 10. | Capaian IKMKP Tahun 2023

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

IK-1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Realisasi 2018-2022					2023				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
56,94	57,66	58,31	59,07	61,38	62,66	62,75	100,14%	2,23%	62,66	100,14%	63,87	98,25%

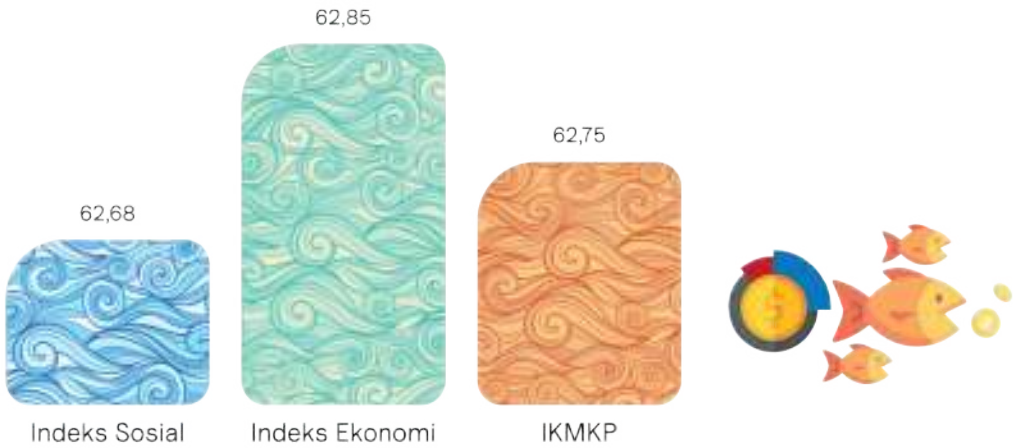

Gambar 10. | Grafik Capaian IKMKP 2023 (Indeks Sosial dan Indeks Ekonomi)

Perhitungan IKMKP Tahun 2023 yang dilakukan oleh Balai Besar Riset Sosial dan Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) dengan menggunakan 14 indikator yang mencakup dimensi sosial dan kelembagaan serta dimensi ekonomi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa capaian IKMKP 2023 sebesar 62,75 dengan capaian dimensi sosial kelembagaan dan ekonomi masing-masing sebesar 62,68 dan 62,85. Realisasi IKMKP mencapai 100,14% dari target IKMKP 2023 sebesar 62,66.

Berdasarkan analisis, indikator sosial kelembagaan yang perlu dioptimalkan adalah penumbuhan kelembagaan kelompok nelayan (KUB) dan pembudidaya ikan (POKDAKAN). Indikator ekonomi yang perlu dioptimalkan lagi dengan melakukan upaya meningkatkan nilai tukar nelayan (NTN) dan nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi). Secara umum capaian IKMKP 2023 (*Gambar 9*) meningkat pada dimensi ekonomi, dan dimensi Sosial dan kelembagaan. Capaian nilai IKMKP 2023 tumbuh positif sebesar 2,23 % dibandingkan Tahun 2022 sebesar 61,38.

Mengacu pada selang kriteria IKRar (Kemenkokesra, 2015), terdapat 3 (tiga) provinsi termasuk kelompok IKMKP pada selang kelompok ≤ 37 dan 2 (dua) provinsi di Indonesia berada pada selang nilai IKMKP 37,01 sampai 42,00. Selanjutnya, 1 (satu) provinsi berada pada selang nilai IKMKP 47,01 sampai 52,00 dan sisanya sebanyak 25 (dua puluh lima) provinsi termasuk kelompok IKMKP > 52,01. Jika dibandingkan dengan nilai IKMKP Tahun 2022, pada Tahun 2023 terdapat peningkatan jumlah provinsi yang memiliki indeks IKMKP ≥ 52,01 karena pada Tahun 2021 hanya 21 (dua puluh satu) provinsi yang memiliki indeks IKMKP ≥ 52,01.

Tabel 11. | Kategori IKMKP Provinsi Tahun 2023

No	Kategori	Provinsi
1	IKMKP < 37,00	Banten, Lampung, Kalimantan Barat
2	37,01 < IKMKP ≤ 42,00	Sumatera Selata, Sulawesi Utara
3	42,01 < IKMKP ≤ 47,00	Maluku
4	≥ 52,01	Gorontalo, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Riau, Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Papua Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Papua, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Kep. Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Jawa Timur, Kep. Riau, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Bali, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Maluku Utara

Peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan melalui peningkatan peran provinsi dapat difokuskan pada lokasi strategis di Provinsi Banten, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Utara. Fokus pengembangan di lima daerah/provinsi tersebut adalah: 1) Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang meningkat kelasnya dari jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh; 2) Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pengolah dan pemasaran perikanan (Poklasar); dan 3) peningkatan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan.

Program/Kegiatan yang Menunjang Indikator Kinerja

Beberapa hal yang menunjang tercapainya IKMKP antara lain melalui pelaksanaan kegiatan prioritas yang telah dilakukan ditahun 2023 diantaranya membangun Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kebumen, Jawa Tengah, revitalisasi tambak udang di 8 lokasi dan tambak bandeng di 5 lokasi, membangun modeling hilirisasi rumput laut di Wakatobi dengan luasan 45 hektar, penyaluran 83,18 juta ekor bantuan benih udang, 12 ribu ekor calon induk udang, 33,64 juta ekor bantuan benih dan 67,19 ribu ekor bantuan calon induk, pembangunan 2 unit percontohan pembenihan kepiting di Pasuruan, penyaluran bantuan 163 unit keramba jaring apung, penyaluran bantuan bioflok 657 unit, Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) sebanyak 55 paket, bantuan 28 unit mesin dan bahan baku pakan, pengembangan sistem perbenihan sebanyak 3 unit *broodstock center* dan pelepasan jenis dan/atau varietas ikan unggul bekerjasama dengan unit kerja lainnya, yaitu telah dilakukan pelepasan sebanyak 10 varietas induk unggul (Udang vaname Global Gen, Ikan Batak Tor Soro, Nila Nirwana II, Nila Sultana, Nila Srikandi, Kerapu Cantang, Nila Anjani, Nila Merah Nilasa, Nila Jantan Pandu dan Nila Betina Kunti, Lele Sangkuriang dua dan Induk Udang Unggul Vaname NuSa Dewa (Nusantara Sakti Dewata), Percepatan pelaksanaan kegiatan sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB), penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan UPT daerah serta kelengkapan SDM pendataan, distribusi 1.243 unit mesin kapal perikanan di 24 Provinsi, distribusi 19.002 unit alat kapal perikanan di 24 Provinsi, sertifikasi awak kapal perikanan sebanyak 49.812 orang, pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di 42 lokasi, mempermudah akses pendanaan dan permodalan bagi nelayan untuk operasional melaut melalui BLU LPMUKP, fasilitasi KUR, gerai pendanaan, dan gerai nelayan.

Gambar 11. | Peresmian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN) di Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar Kalimantan Selatan

Gambar 12. | Penandatangan Kesepakatan Bersama KKP dan Kementerian BUMN dan Pertamina terkait Kemudahan Akses BBM Bersubsisi untuk Nelayan

Gambar 13. | Pelatihan Pengolahan

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan capaian IKMKP kedepan akan dilakukan 1). mendorong penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha perikanan tangkap (KUP), 2) mendorong penumbuhan dan pengembangan kelembagaan kelompok usaha budidaya ikan (POKDAKAN), 3) mendorong peningkatan NTN, NTPi dan Angka konsumsi Ikan, 4) Meningkatkan volume ekspor perikanan, 4) menumbuhkan lapangan usaha alternatif guna meningkatkan pendapatan kelompok nelayan dan pembudidaya, serta 5) peningkatan produksi garam.

Penjelasan empat faktor dimensi ekonomi yang mempengaruhi nilai IKMKP, yaitu Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi), Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP), dan Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) sebagai berikut:

1. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

NTN adalah indikator yang mengukur kemampuan daya beli nelayan sebagai salah satu pelaku utama di subsektor perikanan tangkap. NTN diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima nelayan dengan harga yang dibayarkan nelayan yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik. Capaian NTN Tahun 2018-2019 tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun berikutnya dikatenakan adanya perubahan tahun dasar dalam perhitungan NTN. Realisasi NTN selama 4 tahun terakhir (2020-2023), mengalami kenaikan yaitu pada Tahun 2020 sebesar 100,22, Tahun 2021 sebesar 104,69, Tahun 2022 sebesar 106,45 dan Tahun 2023 sedikit menurun menjadi 105,40.

Tabel 12. | Capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN) 2023

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan												
IK-1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan												
Indikator Kinerja Pembentuk : Nilai Tukar Nelayan												
Realisasi 2018-2022					2023				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
113,28	113,74	100,22	104,69	106,45	107	105,4	98,50%	-0,99	106	99,43%	107	98,50%

Sumber. Badan Pusat Statistik

Rata-rata NTN dari Januari - Desember 2023 sebesar 105,40 atau telah tercapai 98,50% dari target 107. Hal ini mengindikasikan bahwa NTN Tahun 2023 berada di atas 100 artinya kenaikan harga rata-rata yang diterima nelayan lebih besar dengan yang dibayarkan atau usaha perikanan tangkap memberikan keuntungan bagi nelayan dan dapat dijadikan sebagai kegiatan usaha masyarakat.

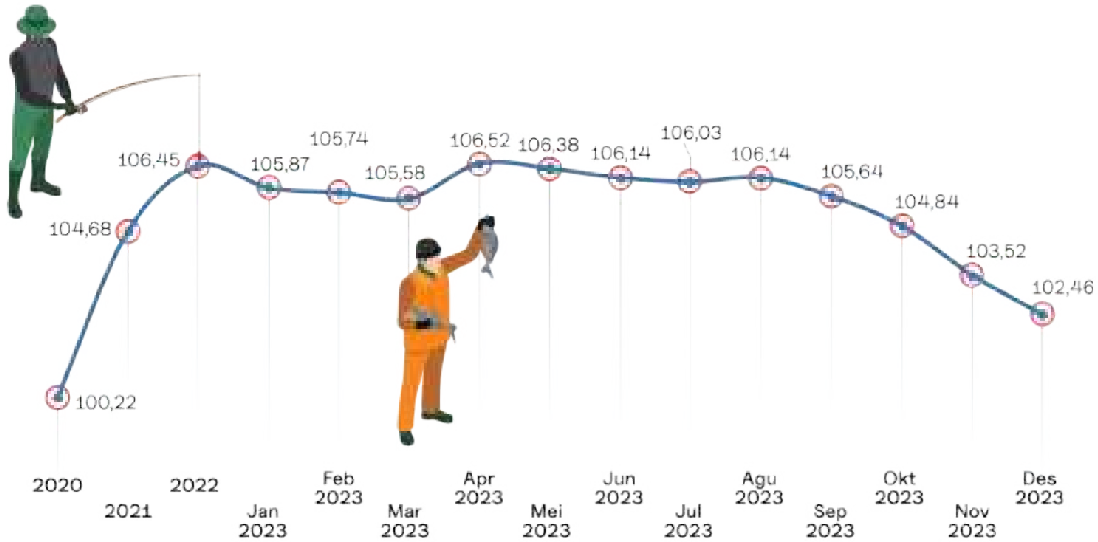

Gambar 14. | Grafik Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2023

Gambar 15. | Sebaran Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2023 Per Provinsi

Berdasarkan grafik di atas (*Gambar 13 dan 14*) dapat dilihat bahwa perubahan signifikan antara Tahun 2018-2019 dengan Tahun 2020-2023 karena adanya perubahan tahun dasar pada Tahun 2020, sehingga data Tahun 2018-2019 tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2020-2023.

Berdasarkan Grafik diatas (*Gambar 15 dan 16*) dapat dilihat bahwa Indeks Harga yang Diterima (It) dan Indeks Harga yang Dibayar (Ib) Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan It dan Ib pada Tahun 2022. Namun jika dilihat dari pergerakan It dan Ib pada Tahun 2023, It dan Ib semakin mendekat di bandingkan dengan Tahun 2022. Hal ini mengakibatkan NTN Tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan NTN Tahun 2022.

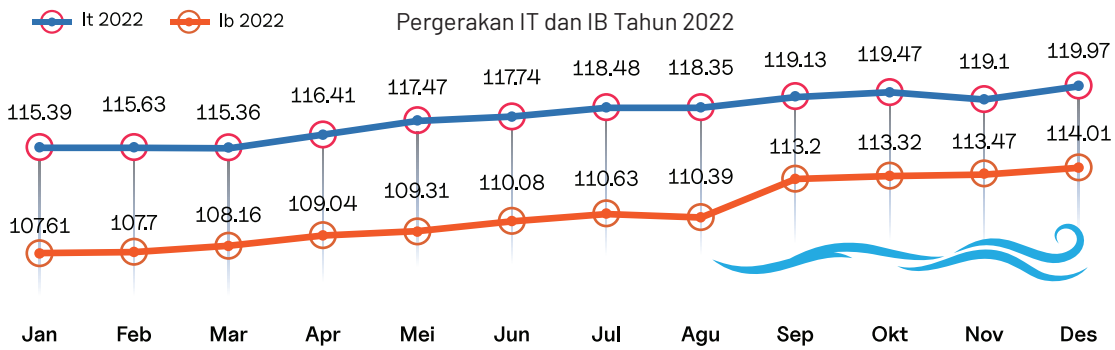

Gambar 16. | Grafik Pergerakan IT dan IB Nilai Tukar Nelayan Tahun 2022

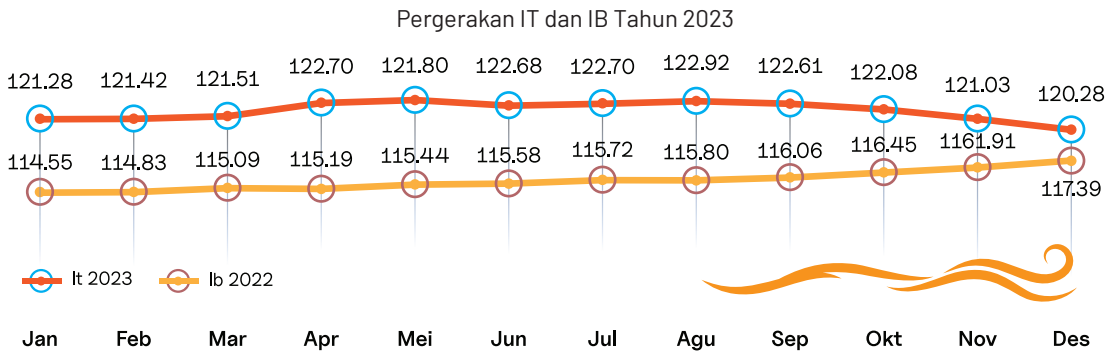

Gambar 17. | Grafik Pergerakan IT dan IB Nilai Tukar Nelayan (NTN) 2023

Pertumbuhan NTN Tahun 2023 mengalami tren perlambatan sebesar 2,65 dengan nilai tertinggi pada April 2023 sebesar 106,52 dan terendah pada Desember 2023 sebesar 102,46. Jika dibandingkan dengan target NTN sampai akhir Renstra Tahun 2024 sebesar 107 posisi capaian Tahun 2023 sudah mencapai 98,50%. Apabila dibandingkan dengan Nilai Tukar Petani Tahun 2023 yaitu 112,46, NTN masih dibawah capaian Nilai Tukar Petani .

Berdasarkan Grafik diatas (*Gambar 15* dan *16*) dapat dilihat bahwa Indeks Harga yang Diterima (It) dan Indeks Harga yang Dibayar (Ib) Tahun 2023 lebih tiggi dibandingkan dengan It dan Ib pada Tahun 2022. Namun jika dilihat dari pergerakan It dan Ib pada Tahun 2023, It dan Ib semakin mendekat di bandingkan dengan Tahun 2022. Hal ini mengakibatkan NTN Tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan NTN Tahun 2022 (*Gambar 17*).

Pergerakan Gap IT dan IB Tahun 2022-2023

Gambar 18. | Grafik *Gap* Pergerakan IT dan IB Nilai Tukar Nelayan Tahun 2023 dan 2022

Pada Tahun 2023 Indeks konsumsi rumah tangga (IKRT) merupakan salah satu penyusun Indeks yang dibayarkan (Ib). Indeks konsumsi rumah tangga tertinggi adalah dari subkelompok Makanan, Minuman dan Tembakau. Komoditas subkelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil yang cukup tinggi terhadap peningkatan IKRT di Tahun 2023.

Berdasarkan data inflasi komoditas sub kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil yang cukup tinggi. Komoditas yang memberikan andil inflasi tertinggi yaitu beras, daging ayam ras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih dan tomat. Sedangkan untuk komoditas ikan segar memberikan andil yang relatif kecil. Komoditas subkelompok makanan, minuman, dan tembakau tumbuh 6,37% pada Tahun 2023 sedangkan pada Tahun 2022 hanya sebesar 5,06%, hal ini mengakibatkan peningkatan It lebih rendah di bandingkan Ib sehingga NTN menurun.

2. Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) adalah salah satu indikator kinerja KKP yang digunakan untuk mengukur daya tukar hasil usaha budidaya dengan pemenuhan kebutuhan sehari-sehari dan biaya usaha budidaya. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) merupakan angka indek antara indeks harga yang diterima oleh pembudidaya ikan (It) terhadap indeks harga yang dibayar oleh pembudidaya ikan (Ib). Nilai tukar lebih besar dari 100 berarti pembudidaya mengalami surplus kenaikan harga produksi lebih tinggi dibanding kenaikan harga konsumsi, nilai tukar sama dengan 100 berarti pembudidaya mengalami impas kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi dan nilai tukar lebih kecil dari 100 berarti pembudidaya mengalami defisit kenaikan harga produksi lebih kecil daripada kenaikan harga konsumsi.

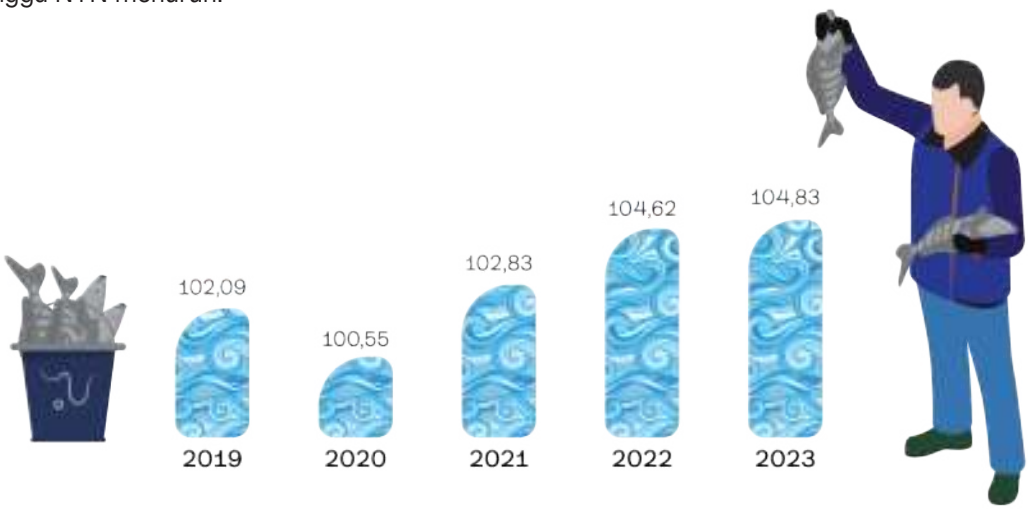

Gambar 19. | Grafik Perkembangan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan, 2029-2023

Rata-rata Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) Tahun 2023 sebesar 104,92. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Tahun 2023 berada di atas 100. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan sejak bulan September mengalami penurunan sampai bulan Desember. Penurunan ini disebabkan karena naiknya indeks harga yang dibayar dan menurunnya harga rumput laut. Apabila dibandingkan dengan Nilai Tukar Petani Tahun 2023 yaitu 112,46, NTPi masih dibawah capaian Nilai Tukar Petani.

Jika dilihat perkembangan selama kurun waktu 2020 – 2023 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) mengalami kenaikan sebesar 1,40 persen per tahun. Untuk Tahun 2019 NTPI menggunakan tahun dasar 2012 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2020-2023 yang telah menggunakan tahun dasar 2018. Naiknya nilai tukar ini disebabkan naiknya indeks diterima oleh pembudidaya ikan setiap Tahunnya sehingga nilai tukar usaha terus naik setiap tahunnya.

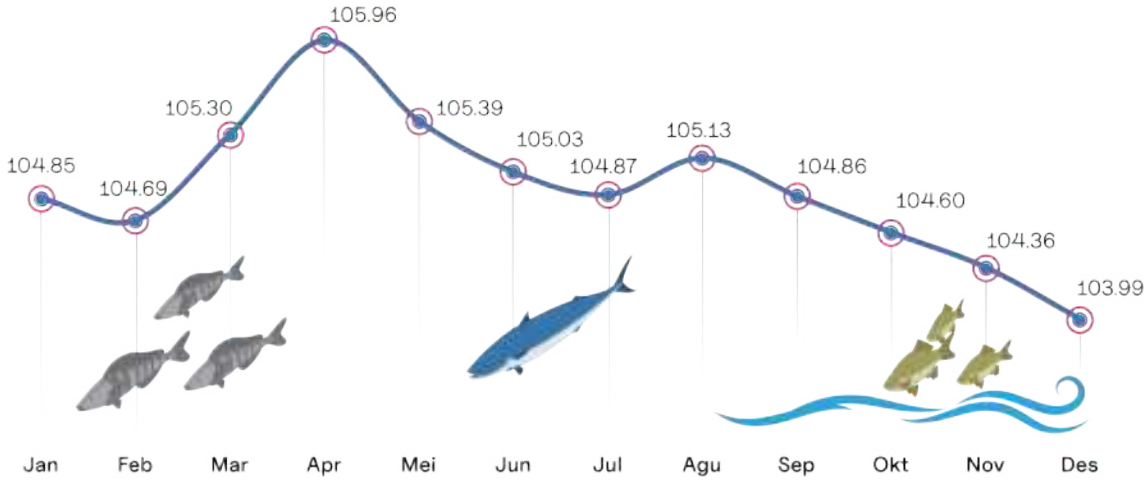

Gambar 20. | Grafik Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Januari- Desember Tahun 2023

Tabel 13. | Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Januari - Desember Tahun 2023

No	Komponen NTPi	2023												Rata-rata
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Otk	Nov	Des	
1	**Indeks Harga yang Diterima**	**119,55**	**119,77**	**120,88**	**121,88**	**121,51**	**121,24**	**121,19**	**121,49**	**121,45**	**121,42**	**121,60**	**121,49**	**121,12**
	Budidaya Air Tawar	113,34	113,01	113,53	115,01	114,66	114,88	115,17	114,70	114,44	114,47	114,34	115,08	114,39
	Budidaya Laut	120,87	120,81	121,08	121,06	119,64	118,20	117,60	116,78	116,79	115,57	115,75	115,39	118,30
	Budidaya Air Payau	118,38	118,89	120,48	120,93	121,14	121,19	121,30	122,27	123,01	123,47	123,62	123,52	121,52
2	**Indeks Harga yang Dibayar**	**114,02**	**114,40**	**114,80**	**115,02**	**115,30**	**115,43**	**115,55**	**115,56**	**115,82**	**116,08**	**116,52**	**116,83**	**115,45**
	Konsumsi Rumah Tangga	115,05	115,43	115,77	116,00	116,42	116,69	116,82	116,79	117,19	117,62	118,45	119,05	116,77
	BPPBM	113,12	113,48	113,88	114,08	114,24	114,25	114,36	114,39	114,52	114,60	114,73	114,76	114,20
	Nilai Tukar Pembudiaya Ikan	**104,85**	**104,69**	**105,30**	**105,96**	**105,39**	**105,03**	**104,87**	**105,13**	**104,86**	**104,60**	**104,36**	**103,99**	**104,92**

Jika dilihat dari tabel 14. di atas dapat digambarkan bahwa selama Tahun 2023 rata-rata indeks harga yang diterima (It) sebesar 121,12. Rata-Rata Indeks harga yang diterima (It) tertinggi terdapat pada budidaya air payau sebesar 121,52 dan terendah terdapat pada budidaya air tawar sebesar 114,39. Sedangkan rata-rata indek harga yang dibayar (Ib) sebesar 115,45 terdiri dari Komsumsi Rumah Tangga (KRT) sebesar 116,77 dan Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) sebesar 114,20.

Tabel 14. | Indeks Konsumsi Rumah Tangga pada Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Januari - Desember Tahun 2023

Komponen Komsumsi Rumah Tangga	Bulan												Rata-rata
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Otk	Nov	Des	
Konsumsi Rumah Tangga	**115,05**	**115,43**	**115,77**	**116,00**	**116,42**	**116,69**	**116,82**	**116,79**	**117,19**	**117,62**	**118,45**	**119,05**	**116,77**
Makanan, Minuman Dan Tembakau	116,95	117,50	117,97	118,17	118,87	119,38	119,52	119,36	119,94	120,54	122,02	123,00	119,44
Pakaian Dan Alas Kaki	116,89	117,10	117,37	118,69	118,86	118,95	119,21	119,31	119,43	119,50	119,63	119,77	118,73
Perumahan, Air, Listrik Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	107,46	107,59	107,70	107,77	107,82	107,88	107,95	108,07	108,10	108,16	108,22	108,29	107,92
Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	114,37	114,70	114,91	115,07	115,24	115,37	115,48	115,58	115,76	115,86	116,02	116,19	115,38
Kesehatan	113,14	113,39	113,55	113,68	113,82	113,87	113,95	114,09	114,24	114,40	114,52	114,80	113,95
Transportasi	117,63	117,84	118,04	118,13	118,21	117,80	117,91	117,99	118,49	119,05	118,88	118,89	118,24
Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	104,38	104,41	104,40	104,40	104,39	104,40	104,39	104,39	104,39	104,40	104,39	104,49	104,40
Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	112,24	112,39	112,49	112,57	112,74	112,91	113,51	113,84	113,96	114,03	114,15	114,28	113,26
Pendidikan	104,03	104,04	104,04	104,04	104,04	104,04	104,25	104,49	104,52	104,53	104,53	104,54	104,26
Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran	111,63	111,84	112,02	112,18	112,34	112,49	112,62	112,77	112,85	112,95	113,17	113,31	112,51
Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	116,61	116,87	117,12	117,55	117,77	117,93	118,09	118,21	118,36	118,56	118,91	119,27	117,94

Selama periode Januari – Desember, indeks konsumsi rumah tangga tertinggi secara rata-rata adalah Makanan, Minuman dan Tembakau (119,44), Pakaian dan Alas Kaki (118,73) serta Transportasi (118,24). Tingginya kenaikan ketiga komponen ini dikarenakan adanya kenaikan harga pada kebutuhan pokok yang menyebabkan inflasi harga sehingga memicu naiknya harga-harga komponen lainnya.

Tabel 15. | Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)

Komponen Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	Bulan												Rata-rata
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Otk	Nov	Des	
BPPBM	**113,12**	**113,48**	**113,88**	**114,08**	**114,24**	**114,25**	**114,36**	**114,39**	**114,52**	**114,60**	**114,73**	**114,76**	**114,20**
Bibit/Benih	113,72	114,28	114,90	115,17	115,41	115,07	114,97	114,94	115,09	115,14	115,34	115,11	114,93
Pupuk, Obat-Obatan, Dan Pakan Ikan	115,19	115,65	116,09	116,34	116,56	116,65	116,91	116,96	117,05	117,16	117,31	117,43	116,61
Sewa Dan Pengeluaran Lainnya	104,37	104,40	104,48	104,53	104,54	104,55	104,60	104,62	104,62	104,62	104,63	104,69	104,55
Transportasi Dan Komunikasi	120,56	120,94	121,04	121,09	121,17	120,87	120,89	120,97	121,40	121,77	121,66	121,64	121,17
Barang Modal	107,33	107,38	107,45	107,51	107,53	107,60	107,63	107,68	107,70	107,74	107,75	107,82	107,59
Upah Buruh	110,40	110,68	110,76	110,86	110,96	111,12	111,42	111,46	111,85	111,85	111,92	112,06	111,28

Berdasarkan komponennya selama periode Januari – Desember, Indeks BPPBM yang tertinggi berturut-turut adalah Transportasi dan Komunikasi sebesar 121,17, pupuk, obat-obatan dan pakan ikan sebesar 116,61 dan benih/bibit sebesar 114,93. Tingginya ketiga komponen tersebut dalam Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) disebabkan kenaikan inflasi, tingginya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang mempengaruhi harga tepung ikan dan secara langsung mempengaruhi harga pakan ikan. Sementara bibit/benih mengalami kenaikan dimungkinkan karena naiknya harga benih.

Terdapat 18 provinsi yang rata-rata indeks NTPI-nya di atas 100, yaitu Kalimantan Selatan (100,02), Sulawesi Tengah (100,47), Bengkulu (101,13), Riau (101,37), Banten (102,74), Jambi (103,41), NTB (103,99), NTT (104,79), Bali (105,18), Maluku Utara (105,57), DKI Jakarta (108,70), Papua (108,74), Maluku (110,53), Jawa Barat (111,05), Jawa Tengah (111,11), Sulawesi Selatan (111,35), Sulawesi Barat (112,30), Aceh (112,55) dan Sulawesi Tenggara (115,06). NTPI rata-rata tertinggi adalah provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai sebesar 115,06 dan NTPI terendah provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 89,58.

Gambar 21. | Peta Capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan bulan Januari - Desember Tahun 2023

Untuk menjaga capaian NTPi tetap diatas 100, perlu menjaga produktivitas pembudidaya dan harga komoditas di tingkat pembudidaya tidak turun atau bahkan naik serta menekan biaya yang dikeluarkan oleh pembudidaya. Bibit/benih dan pakan adalah komponen yang berpengaruh dan dapat diintervensi oleh KKP, melalui distribusi hasil produksi benih guna menjaga keberlangsungan usaha pembudidaya.

3. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)

Nilai tukar pengolah hasil perikanan mengukur kemampuan tukar produk olahan hasil perikanan yang dihasilkan pengolah hasil perikanan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam proses produksi pengolahan hasil perikanan. Dari angka NTPHP dapat diketahui tingkat daya saing suatu produk olahan hasil perikanan dibandingkan dengan produk lain, sehingga arah pengembangan kebijakan pada spesialisasi produk unggulan wilayah yang berkualitas dapat dilakukan.

NTPHP merupakan perbandingan indeks harga yang diterima rumah tangga pengolah hasil perikanan dengan indeks harga yang dibayar rumah tangga pengolah hasil perikanan. NTPHP dihitung berdasarkan sampling yang akan dilakukan di 40 Kabupaten/Kota yang tersebar di 5 Provinsi. Lokasi yang menjadi sampling dipilih berdasarkan kesepakatan KKP dengan Badan Pusat Statistik (BPS) saat pengambilan tahun dasar untuk perhitungan NTPHP di tahun 2015. Beberapa pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut adalah banyaknya jumlah UPI terutama skala mikro dan kecil dan variasi jenis kegiatan pengolahan ikan pada kelima provinsi tersebut sehingga dapat mewakili seluruh provinsi di Indonesia.

Gambar 22. | Lokasi Sampling Perhitungan NTPHP

Gambar 23. | Realisasi NTPHP Tahun 2018-2023

Tabel 16. | Capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN) 2023

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

IK-1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja Pembentuk : NTPHP

Realisasi 2018-2022					2023				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
113,28	103,53	103,95	104,05	104,01	104,25	104,67	100,40%	0,63	104,25	100,40%	104,75	99,92%

Realisasi NTPHP Tahun 2023 sebesar 104,67 atau mencapai 104,40% dari target 2023, atau setara dengan 99,92% dari target jangka menengah 2024 yaitu 104,75. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 104,01 maka capaian tahun 2023 mengalami kenaikan 0,66 poin atau sebesar 0,63%. Apabila dibandingkan dengan Nilai Tukar Petani Tahun 2023 yaitu 112,46 NTPHP masih dibawah capaian Nilai Tukar Petani.

4. Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)

Nilai Tukar Petambak Garam merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petambak garam (Indeks terima = It) dengan indeks harga yang dibayar petambak garam (Indeks bayar = Ib). Indeks harga yang diterima petambak garam (It) merupakan indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petambak garam, sedangkan Ib adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petambak garam, baik untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi. NTPG mengukur kemampuan tukar garam yang dihasilkan petambak dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi garam, yang diperoleh melalui pelaksanaan survei harga NTPG. Perkembangan capaian IK Nilai Tukar Petambak Garam disajikan sebagai berikut:

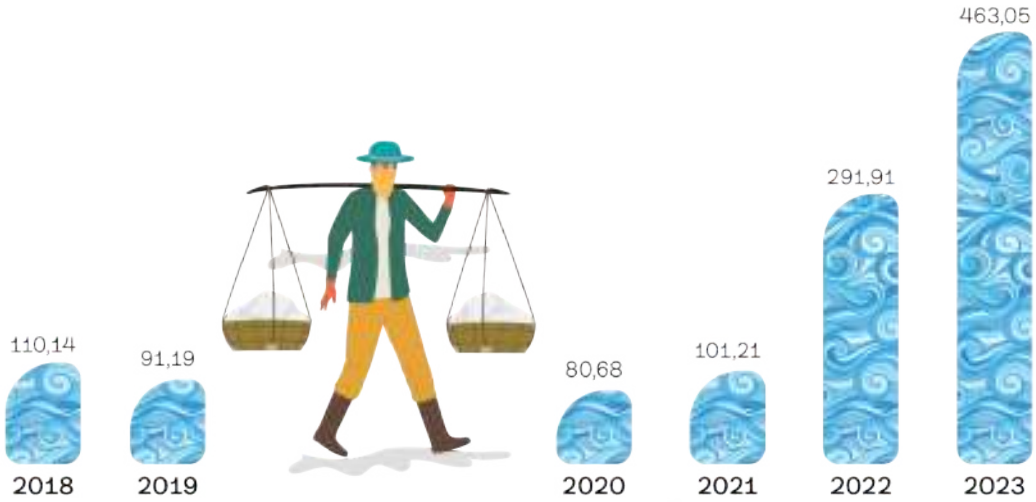

Gambar 24. | Realisasi NTPG Tahun 2018-2023

Tabel 17. | Capaian IK Nilai Tukar Petambak Garam Tahun 2023

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan												
IK-1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan												
Indikator Kinerja Pembentuk : NTPG												
Realisasi 2018-2022					2023				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
110,14	91,19	80,68	101,21	291,91	101,5	463,05	456,21%	58,63	101,5	456,21%	103,75	446,31%

Realisasi NTPG pada Tahun 2023 sebesar 463,05 atau mencapai 456,21% dari target Tahun 2023 yaitu 101,5. Capaian NTPg Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 58,63% dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 291,91. Apabila dibandingkan dengan Nilai Tukar Petani Tahun 2023 yaitu 112,46, NTPG diatas capaian Nilai Tukar Petani.

Keberhasilan capaian indeks NTPG Tahun 2023 disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. NTPG membandingkan harga-harga tahun berjalan dengan harga-harga di Tahun dasar (2014), baik harga garam, harga barang/modal produksi maupun harga barang konsumsi.
2. Tahun 2023 terjadi peningkatan NTPG bulanan yang signifikan jika dibandingkan dengan Tahun 2022. Tingginya nilai NTPG sudah terlihat sejak awal tahun, yaitu 573,82 di Januari naik terus sampai terjadi puncak pada bulan Mei senilai 856,50 dan mulai menurun pada bulan berikutnya sampai senilai 172,30 pada bulan Desember.
3. Harga garam di Tahun 2023 sudah tinggi sejak bulan Januari (di atas Rp. 2.000/kg) dan semakin meningkat di bulan Mei (di atas Rp. 4.000/kg), sedangkan perubahan harga barang/modal produksi dan barang konsumsi tidak terlalu tinggi (inflasi 6%).
4. Melonjaknya angka NTPG tersebut diakibatkan oleh terjadinya lonjakan dari Indeks Harga yang Diterima (It) pada jenis Produk Garam Tambak yang merupakan indikasi dari terjadinya harga tinggi produk garam tambak di tingkat produsen dibanding dengan harga garam pada diagram timbang Tahun 2014.
5. Data sampel yang diperoleh menunjukkan bahwa di setiap lokus survei harga produk garam tambak di awal Tahun 2023 cenderung sudah tinggi dengan harga puncak pada bulan Mei dan menurun di bulan Juli-Agustus.

Program/Kegiatan yang Menunjang Indikator Kinerja

Program/Kegiatan yang sudah dilakukan untuk menunjang capaian NTN, NTPi, NTPHP dan NTPG adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan teknologi penangkapan, penyediaan modal berbunga rendah, peningkatan SDM nelayan, penyediaan cold storage dan rantai dingin, penguatan sistem logistik ikan, serta optimalisasi peran BUMN/Koperasi untuk *offtaker* hasil tangkapan ikan nelayan. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengefisienkan biaya dilakukan melalui percepatan penyaluran bantuan alat penangkapan ikan, mempermudah proses rekomendasi pembangunan SPBUN, serta mengintensifkan koordinasi dengan KL terkait penyediaan BBM bersubsidi.
2. Penyaluran bantuan benih guna menjaga keberlangsungan usaha pembudidaya.
3. Integrasi Lahan garam seluas 154,07 hektar.
4. Pembangunan 29 Gudang garam rakyat.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Dalam rangka perbaikan capaian NTN, NTPi, NTPHP dan NTPG, KKP berkomitmen terus melakukan upaya antara lain : pembangunan budidaya rumput laut berbasis Kawasan, sertifikasi lahan pembudidaya, sertfikasi CBIB, sertifikasi CPIB, pembangunan kluster tambak udang, pembangunan kluster tambak bandeng, penyaluran bantuan sarana pengolahan dan pemasaran serta pelatihan usaha dan penyuluhan kepada masyarakat kelautan dan perikanan.

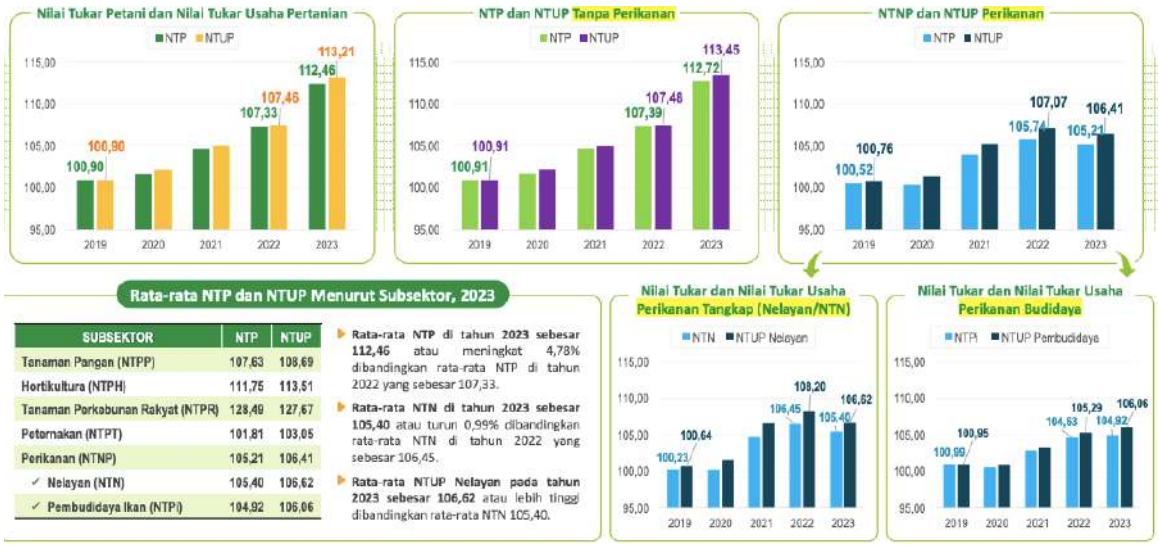

SUBSEKTOR	NTP	NTUP
Tanaman Pangan (NTPP)	107,63	108,69
Hortikultura (NTPH)	111,75	113,51
Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR)	128,49	127,67
Peternakan (NTPT)	101,81	103,05
Perikanan (NTNP)	105,21	106,41
✓ Nelayan (NTN)	105,40	106,62
✓ Pembudidaya Ikan (NTPi)	104,92	106,06

Gambar 24. | Perbandingan Realisasi NTN, NTPi, NTPHP dan NTPG dengan Nilai Tukar Petani Tahun 2023

Gambar 25. | Pameran Produk Pengolahan Hasil Perikanan pada Acara Bulan Cinta Laut di Surabaya

SS • 2

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan

Sasaran Strategis Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan ditandai dengan meningkatnya daya dukung sehingga sumber daya kelautan dan perikanan dapat berkelanjutan dan dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Pencapaian Sasaran Strategis 2, diukur melalui 2 indikator kinerja yakni Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman dan Luas Kawasan Konservasi.

IK 2. Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman

Definisi

Indikator ini mengukur sejauh mana kebijakan perikanan tangkap dalam melakukan pengelolaan perikanan di suatu WPPNRI atau jenis ikan tertentu melalui kegiatan kapal perikanan yang menerapkan *logbook* penangkapan ikan, kapal perikanan yang dipantau oleh observer dan penghitungan alokasi sumber daya ikan dengan 2 kegiatan utama yaitu, *logbook* penangkapan ikan (LBPI) dan Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan (Observer).

Banyaknya kapal perikanan yang melaporkan logbook penangkapan ikan (LBPI) untuk setiap tripnya di WPPNRI memberikan gambaran tingkat eksploitasi potensi perikanan dan ketersediaan data penangkapan ikan di WPPNRI. Pemantauan Observer selama hari laut kapal perikanan, menjamin ketersediaan data yang dapat digunakan sebagai data pembanding atau salah satu sarana validasi data LBPI dan memberikan informasi terkait data biologis ikan hasil tangkapan serta aktivitas penangkapan di atas kapal, misalnya penanganan ikan dilindungi yang tertangkap oleh alat penangkap ikan yang digunakan.

Dalam hal pemanfaatan sumber daya ikan, perlu adanya pengendalian penangkapan ikan salah satunya melalui penerapan kuota usaha penangkapan ikan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaataan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia serta evaluasi terhadap pengelolaan perikanan yang sudah dilaksanakan. Perhitungan IK ini dari jumlah volume produksi tangkapan laut pada satu Tahun berjalan (tidak termasuk tuna, cakalang, kekerangan) dibagi dengan jumlah potensi sumber daya ikan berdasarkan Kepmen KP Nomor 19 Tahun 2022.

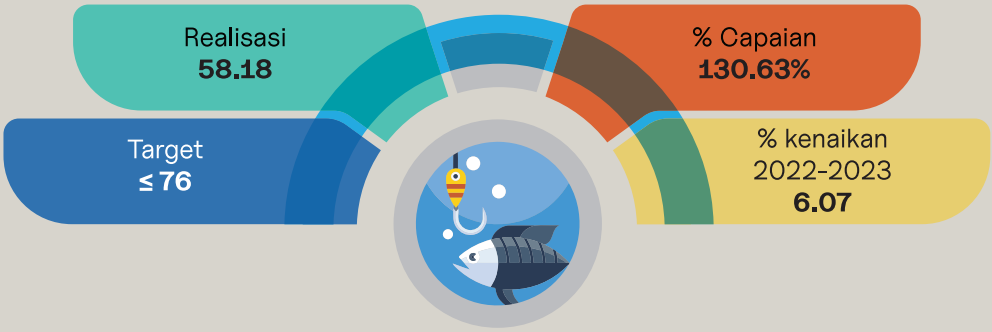

Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%), Tahun 2023

Analisis Capaian

Indikator ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-14 Ekonomi Kelautan yaitu "Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman". Capaian IK Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman terdapat pada **Tabel 18.**

Tabel 18. | Capaian Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

Sasaran Strategis 2. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan										
IK-2. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)										
Realisasi 2020-2022			2023				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
51,80	51,90	61.71	≤ 76	58.18	130.63%	6.07	≤ 76	130.63%	≤ 80	137.50%

Keterangan :
- *untuk tahun 2017 s.d 2021 potensi jumlah tangkapan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/2017 tentang Estimasi Potensi Jumlah Tangkapan, yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan SDI di WPP NRI.*
- *Tahun 2022 potensi jumlah tangkapan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di WPP NRI.*

Gambar 26. | Grafik Capaian Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

Realisasi Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman sebesar 58,18 atau 130,63% dari target ≤ 76%. Capaian tersebut dihasilkan dari perhitungan jumlah produksi perikanan tangkap pada perairan laut sebesar 6.987.856 ton dibandingkan dengan total estimasi potensi sumber daya ikan sebesar 12.011.071 ton/tahun berdasarkan Kepmen 19/2022 diluar produksi tuna, tongkol, cakalang (TTC). Hal ini menunjukkan bahwa proporsi tangkapan berada dalam batas biologis yang aman, dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi di bidang perikanan tangkap. Potensi sumber daya ikan harus terus dikelola secara optimal dan berkelanjutan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan.

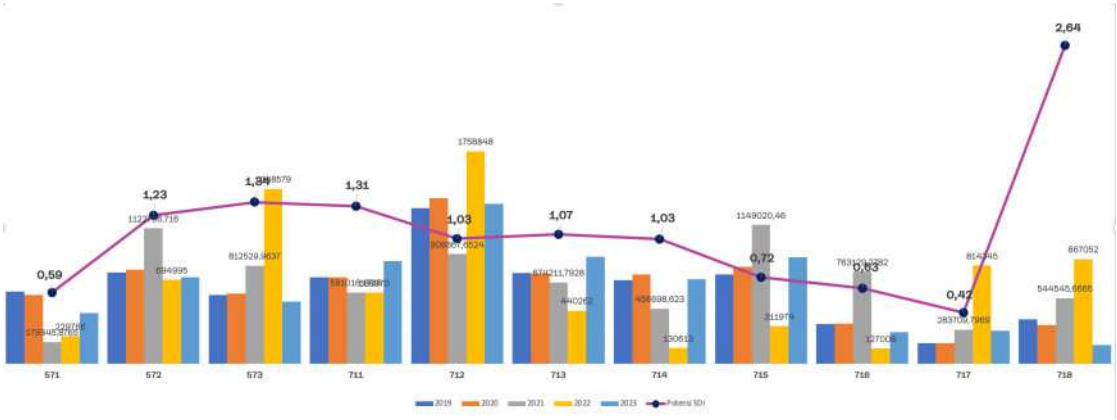

Gambar 27. | Grafik Produksi dan Potensi per WPP

Gambar 26 menunjukkan bahwa terdapat 2 WPP (712, 715) yang melampaui potensi sedangkan potensi yang masih dapat dimanfaatkan dengan baik adalah di WPP 718. Hal ini terlihat bahwa hasil tangkapan di 718 lebih sedikit dibandingkan dengan WPP lainnya padahal potensi tangkapan mencapai 2,64 juta ton. Kedepannya kegiatan penangkapan dapat lebih diarahkan untuk maksimalkan proses kegiatan penangkapan ikan di zona tersebut.

Program/Kegiatan yang Menunjang Indikator Kinerja

Keberhasilan pencapaian proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%) didukung dengan pelaksanaan kegiatan diantaranya :

1. Kegiatan pendataan berbasis daerah penangkapan melalui pelaporan *Logbook* penangkapan ikan (LBPI) yang dirancang secara akurat pada setiap *trip* di WPPNRI guna memberikan gambaran tingkat eksploitasi potensi perikanan dan ketersediaan data penangkapan ikan di WPPNRI.
2. Pengumpulan data dan verifikasi data *Logbook* Penangkapan Ikan dilakukan dengan menggunakan elektronik *Logbook* penangkapan ikan yang dirangkum dalam aplikasi SILOPI (Sistem Informasi *Logbook*). Data kapal perikanan yang telah melaporkan *Logbook* Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI dan Laut Lepas sebanyak 12.576 unit kapal dengan jumlah *trip* sebanyak 58.746 trip. *Logbook* penangkapan ikan juga telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala. Sehingga terdapat peningkatan kenaikan Data *Logbook* Penangkapan Ikan pada Tahun 2023 dibandingkan Tahun sebelumnya.

3. Penempatan tenaga observer di kapal perikanan untuk menjamin ketersediaan data sebagai data pembanding. LBPI juga menjadi sarana validasi data yang memberikan informasi data biologis ikan. Penempatan Observer di atas kapal dilaksanakan mulai awal Januari s.d. Desember 2023 di 8 WPPNRI dan Laut Lepas dengan 205 Unit Kapal dan jumlah hari layar sebanyak 8.919 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Kapal Pengangkut Ikan/kapal Penyangga sebanyak 49 Unit Kapal dengan hari layar sebanyak 5.375 hari layar di wilayah pengelolaan perikanan 573, 714, 718 dan Laut Lepas;
   b. Kapal Penangkap Ikan (Purse Seine, Long Line, Hand Line, Rawai Tuna, Bouke Ami, Pancing Cumi, Rawai Hanyut. Tonda dan Pole & Line) sebanyak 162 Unit Kapal dengan Jumlah Hari Layar Sebesar 3.544 Hari Layar;

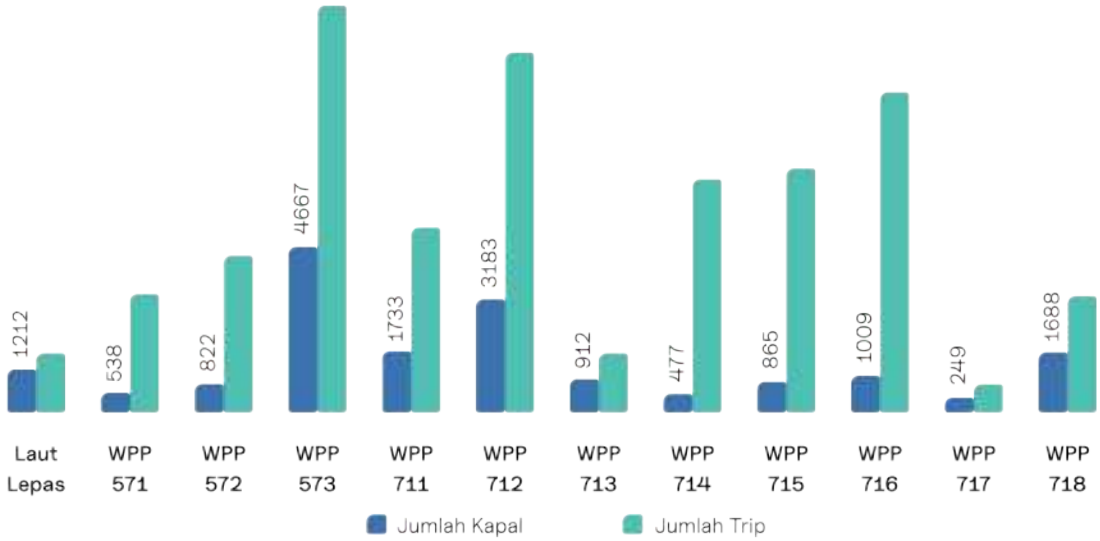

Gambar 28. | Grafik sebaran pelaksanaan log book penangkapan ikan per WPPNRI dan Laut Lepas Tahun 2023

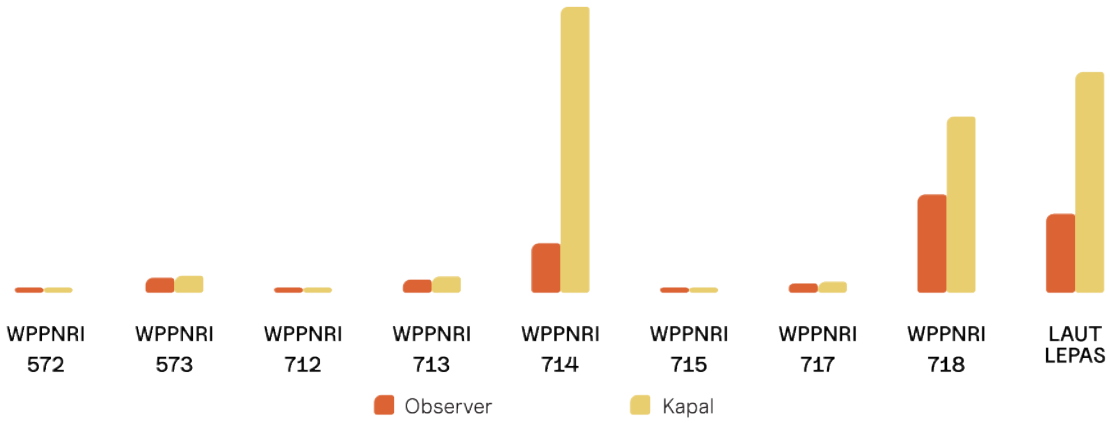

Gambar 29. | Grafik sebaran penempatan Observer per WPPNRI dan Laut Lepas Tahun 2023

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Dalam rangka mencapai target proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman kedepan, upaya yang akan dilakukan diantaranya :

1. Mengoptimalkan peran petugas pemantau di atas kapal perikanan (*observer on board*), salah satunya untuk meningkatkan akurasi dan kualitas data perikanan tangkap.
2. Validasi Data *Logbook* Penangkapan Ikan dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan terukur serta Pengolahan dan Analisis Data *Logbook* Penangkapan Ikan dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan terukur
3. Pemantauan dan Evaluasi Penerapan *Logbook* Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan
4. Sosialisasi Penerapan *e-Log Book* Penangkapan Ikan

Luas Kawasan Konservasi (juta ha)
Tahun 2023

IK 3. Luas Kawasan Konservasi

Definisi

Kawasan Konservasi menurut IUCN WCPA (*International Union for the Conservation of Nature World Comission on Protected Areas*) adalah suatu wilayah yang memiliki batas geografis yang jelas, diakui, diperuntukkan, dan dikelola, baik secara formal maupun tidak formal agar dalam jangka panjang dapat melindungi alam berikut jasa-jasa ekosistem dan nilai-nilai budayanya. Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara nomenklatur definisi Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan definisi tersebut, kawasan konservasi berfungsi sebagai wilayah untuk melindungi dan melestarikan sumber daya yang ada di dalamnya. Kawasan konservasi tidak hanya berbicara tentang perlindungan dan pelestarian saja, tetapi juga menekankan pentingnya pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia menargetkan Kawasan Konservasi seluas 32,5 juta konservasi atau sebesar 10% dari luas perairan Indonesia pada Tahun 2030. Target ini sesuai dengan komitmen global Konvensi Keanekaragaman Hayati Dunia (*Convention on Biological Diversity*/ CBD)–Aichi Target 11, dan *Sustainable Development Goal* 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 menargetkan penambahan luas kawasan menjadi 26,9 juta konservasi pada Tahun 2024 dan telah terlampaui pada Tahun 2021 dengan capaian sebesar 28,4 juta hektar. Namun demikian, KKP terus melakukan upaya penambahan luas kawasan konservasi, bahkan menargetkan penambahan luasan kawasan konservasi 30% sampai dengan 2045 guna mendukung Ekonomi Biru.

Tabel 19. | Capaian Luas Kawasan Konservasi Perairan

Sasaran Strategis 2. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan												
IK-3. Luas Kawasan Konservasi (juta ha)												
Realisasi 2018-2022					2023				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
20,87	23,14	24,11	28,4	28,9	29,10	29,20	100,34%	1,04	26,00	112,31%	26,90	108,55%

Analisis Capaian

Target indikator kinerja Luas Kawasan Konservasi Tahun 2023 adalah seluas 29,1 juta hektar (Ha.) atau meningkat 0,2 juta hektar dari Tahun 2022. Hingga akhir Tahun 2023 terdapat penambahan kawasan konservasi seluas 0,3 juta Ha sehingga realisasi luas Kawasan konservasi di Tahun 2023 ini seluas 29,2 juta Ha atau mencapai Capaian luasan kawasan konservasi disajikan pada *Gambar 29.* berikut:

Gambar 30. | Grafik Luas Kawasan Konservasi Perairan Tahun 2017-2023

> **Target kawasan konservasi tahun 2023 sebesar 29,10 juta hektar dengan realisasi sebesar 29,2 juta hektar atau mencapai 100,34%.**

Keberhasilan pencapaian target luas Kawasan konservasi antara lain disebabkan :

1. Penambahan luasan kawasan konservasi dari alokasi ruang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT).
2. Komitmen KKP bersama dengan Pemerintah Daerah secara teknis dalam setiap proses pembentukan dan penambahan luas kawasan konservasi. Dalam proses pembentukan dan penetapan kawasan konservasi, LSM/Mitra juga turut mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau proses penetapan kawasan konservasi, antara lain indentifikasi dan inventarisasi data monitoring biofisik dan sosekbud, penyusunan rencana zonasi, serta FGD dan konsultasi publik dengan *stakeholder*.

Kegiatan/Program yang Menunjang Indikator Kinerja

Kegiatan pendukung ketercapaian Luas Kawasan Konservasi yang dilakukan pada Tahun 2023, meliputi:

1. Penambahan Luas Kawasan Konservasi

Untuk mencapai target penambahan luas kawasan konservasi telah dialokasikan kawasan konservasi baru dalam Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW). Kawasan Konservasi baru yang dialokasikan, antara lain:

1. Kawasan Konservasi Teluk Bone dalam RZ KAW Teluk Bone seluas 208.344,66 Ha yang dietapkan melalui Perpres 6 Tahun 2023
2. Kawasan Konservasi Sabalana dalam RZ KAW Laut Flores seluas 156.538,80 Ha yang ditetapkan melalui Perpres 29 Tahun 2023
3. Kawasan Konservasi di wilayah Yurisdiksi RZ KAW Laut Sulawesi seluas 1.300,62 Ha yang ditetapkan melalui Perpres 4 Tahun 2022
4. Kawasan Konservasi >12 mil di RZ KAW Laut Sulawesi seluas 63.849,63 Ha yang ditetapkan melalui Perpres 4 Tahun 2022.

2. Penetapan Kawasan Konservasi

Realisasi kawasan konservasi yang telah ditetapkan di Tahun 2023 seluas 1,5 Juta Ha dengan rincian :

1) Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Tuing Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Kepmen KP No. 1 Tahun 2023 seluas 7.372,50 Ha.
2) Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Way Kambas Provinsi Lampung melalui Kepmen KP No. 2 Tahun 2023 seluas 60.420,98 Ha.
3) Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Kolepom Provinsi Papua Selatan melalui Kepmen KP No. 5 Tahun 2023 seluas 356.337,90 Ha.
4) Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Panjang Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kepmen KP No. 102 Tahun 2023 seluas 22.185,14 Ha.
5) Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Kramat, Bedil, dan Temudong Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kepmen KP No. 104 Tahun 2023 seluas 1.955,55 Ha.
6) Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Lipan dan Pulau Rakit Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kepmen KP No. 105 Tahun 2023 seluas 26.670,80 Ha.
7) Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Indragiri Hilir Provinsi Riau melalui Kepmen KP No. 107 Tahun 2023 seluas 126.097,64 Ha.
8) Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Ketugar dan Perairan di Sekitarnya Serta Perlang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Kepmen KP No. 108 Tahun 2023 seluas 11.358,29 Ha.
9) Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Buleleng Provinsi Bali melalui Kepmen KP Nomor 102 Tahun 2023 seluas 18.060,18 Ha.
10) Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Karangasem Provinsi Bali melalui Kepmen KP Nomor 103 Tahun 2023 seluas 5.478,41 Ha.
11) Penetapan Kawasan Konservadi di Perairan di Wilayah Ngambur Provinsi Lampung melalui Kepmen KP Nomor 104 Tahun 2023 seluas 4.584,87 Ha.
12) Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Batang dan Pulau Segama Provinsi Lampung melalui Kepmen KP Nomor 105 Tahun 2023 seluas 14.878,71 Ha.
13) Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepmen KP Nomor 106 Tahun 2023 seluas 277.072,61 Ha.
14) Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Agam Provinsi Sumatera Barat melalui Kepmen KP Nomor 126 Tahun 2023 seluas 6.535,98 Ha.
15) Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Teluk Gorontalo Provinsi Gorontalo melalui Kepmen KP Nomor 127 Tahun 2023 seluas 76.580,48 Ha.
16) Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara melalui Kepmen KP Nomor 128 Tahun 2023 seluas 25.531,26 Ha.
17) Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara melalui Kepmen KP Nomor 129 Tahun 2023 seluas 39.931,20 Ha.

18) Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Biak Numfor Provinsi Papua melalui Kepmen KP Nomor 184 Tahun 2023 seluas 49.062,44 Ha.
19) Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Lepar dan Pulau Pongok Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Kepmen KP Nomor 185 Tahun 2023 seluas 92.519,25 Ha.
20) Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Misool Utara Kepulauan Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya melalui Kepmen KP Nomor 191 Tahun 2023 seluas 308.777,35 Ha.

3. Analisis data primer dan sekunder, analisis lokasi potensial menggunakan software pengolahan data spasial (ArcGIS, QGIS, dan Marxan), dan penyusunan draft prakarsa oleh Tim Teknis Perancangan Pengembangan Kawasan Konservasi Indonesia 30x45 pada periode bulan Oktober 2022 sampai dengan penyempurnaan di akhir Tahun 2023.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Dalam rangka mencapai target luas Kawasan konservasi perairan kedepan, upaya yang akan dilakukan diantaranya *review* regulasi terkait Kawasan konservasi, meningkatkan kompetensi SDM terkait fungsi pengelolaan dan karbon biru, mengakselerasi publikasi kawasan konservasi dalam peta laut, Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA), mendorong kerja sama mitra yang sesuai kebutuhan pengelolaan, meningkatkan kualitas data dan informasi kawasan konservasi berbasis sistem dan penyusunan neraca sumberdaya laut, mendukung inisiasi masyarakat dalam mempercepat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dengan memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana serta pendampingan kepada Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK).

Gambar 31. | Kegiatan penyuluhan perikanan

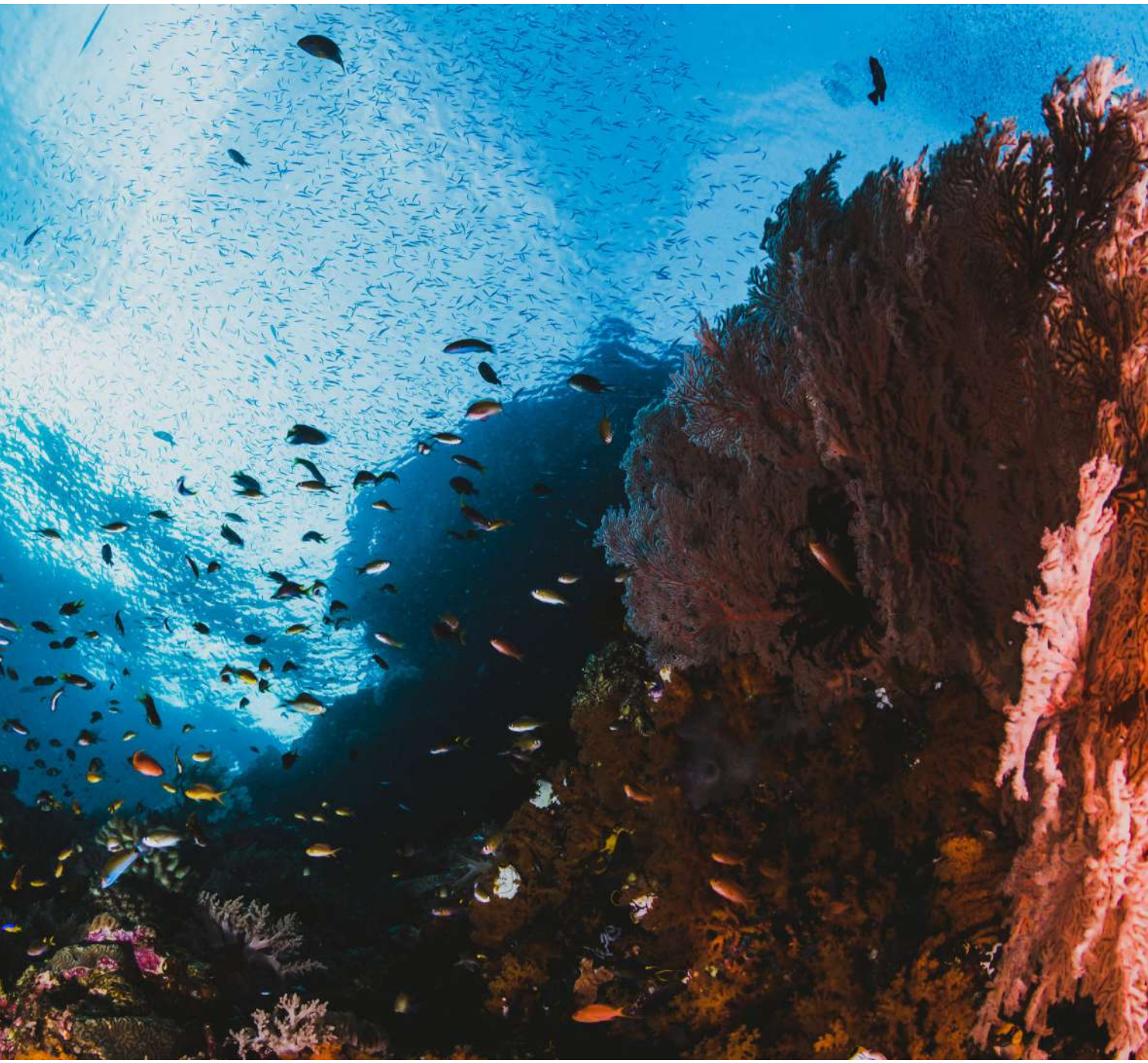

SS • 3

Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat

Sasaran Strategis 3 ini mempunyai 5 ukuran indikator kinerja yaitu : Pertumbuhan PDB Perikanan, Nilai Ekspor Hasil Perikanan, Konsumsi Ikan, Nilai PNBP Sektor KP dan Tenaga kerja yang terlibat.

IK 4. Pertumbuhan PDB Perikanan

Definisi

Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perikanan. Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan merupakan perubahan PDB (atas dasar harga konstan) sektor perikanan dari satu periode ke periode berikutnya. PDB Perikanan tersebut hanya didasarkan pada sektor primer yang mencakup perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sumber data capaian PDB berasal dari Berita Resmi Statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.

Analisis Capaian

Secara kumulatif (c-to-c), PDB Perikanan atas dasar harga konstan telah mencapai nilai sebesar Rp. 290,6 trilliun. Atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 275,5 trilliun. Hal Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi perikanan semakin kuat dan menuju ke arah pemulihan. Pertumbuhan sektor perikanan 5,49 persen salah satunya didorong oleh peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya. Pertumbuhan sektor perikanan menunjukkan adanya peningkatan daya beli (*purchasing power*) dari para pelaku sektor kelautan dan perikanan dibandingkan sektor lain pada kelompok pertanian, kehutanan, perikanan. Pertumbuhan sektor perikanan Tahun 2023 menunjukkan bahwa sektor perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya menunjukkan potensi besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Capaian pertumbuhan PDB Perikanan dapat dilihat pada **Tabel 20.**

Pertumbuhan PDB Perikanan
Tahun 2023

Tabel 20. | Capaian Pertumbuhan PDB Perikanan

Sasaran Strategis 3. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat												
IK-4. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (%)												
Realisasi 2018-2022					2023				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
5,19	5,73	0,73	5,45	2,79	4	5,49	137,26%	12.46	8,51	64,52%	5	109,80%

Sumber. Badan Pusat Statistik

Gambar 32. | Perbandingan Pertumbuhan PDB Nasional, PDB Perikanan dan PDB Pertanian

Pertumbuhan PDB Perikanan Tahun 2023 tumbuh positif sebesar 5,49% lebih tinggi dari PDB Nasional sebesar 5,05 persen dan PDB Pertanian sebesar 1,3 persen. Pertumbuhan PDB Tahun 2023 telah mencapai 137,26 persen atau 120 persen dalam aplikasi kinerjaku terhadap target Tahun 2023 sebesar 4%. Kontribusi perekonomian sektor perikanan Tahun 2023 sebesar 2,66 persen, kontribusi ini lebih tinggi daripada Tahun 2022 (2,58 persen). Secara kumulatif (c-to-c), PDB Perikanan atas dasar harga konstan telah mencapai nilai sebesar Rp. 290,6 triliun atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 275,5 triliun.

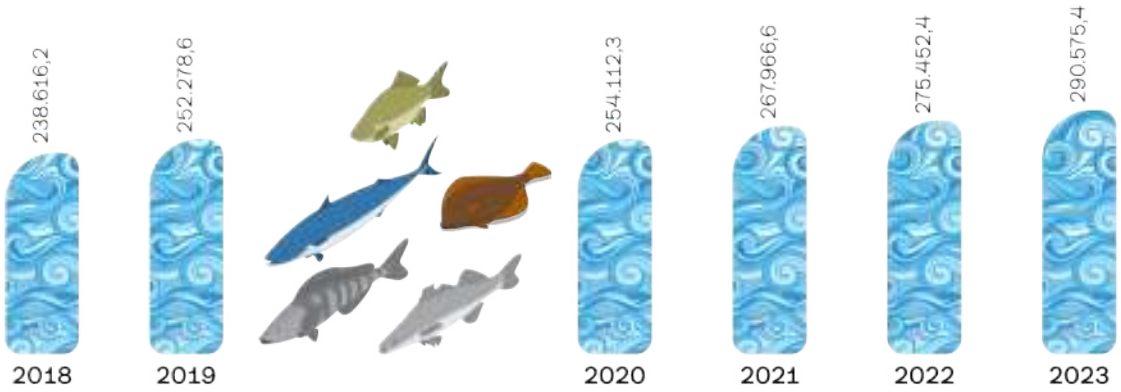

Gambar 33. | Nilai PDB Perikanan berdasarkan Harga Konstan (Rp.miliar)

Gambar 34. | Kontribusi PDB Perikanan terhadap PDB Nasional berdasarkan Harga Berlaku Tahun 2018-2023 (%)

Kontribusi PDB ADHB sektor perikanan Indonesia Tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan nilai tambah yang mencerminkan peningkatan *income* para pelaku subsektor kelautan dan perikanan secara rata-rata pada Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022. Arah pergerakan perekonomian sektor perikanan sepanjang 2023 ini menunjukkan kenaikan. Capaian PDB Perikanan mengalami pertumbuhan yang positif. Pergerakan perekonomian sektor perikanan yang optimistis tersebut dicapai karena KKP dapat memastikan tidak terjadi gangguan terhadap ketersediaan Ikan di Pasar dengan cara menjaga lancarnya aliran pasokan dari nelayan dan pembudidaya ikan ke pasar eceran, serta terjadi peningkatan ekspor perikanan.

Pencapaian pertumbuhan PDB Perikanan belum memperhitungkan pertumbuhan lapangan usaha sub sektor kelautan dan perikanan yang menjadi tanggung jawab KKP berdasarkan UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya, baik dari komoditas pengolahan hasil perikanan, komoditas pergaraman, biofarmakologi dan bioteknologi dari hasil laut, dan jasa-jasa kelautan.

Program/Kegiatan yang Menunjang Indikator Kinerja

Keberhasilan pencapaian pertumbuhan PDB perikanan didukung oleh pelaksanaan kegiatan prioritas KKP dalam meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya antara lain penyaluran bantuan benih, calon induk, pembangunan kluster tambak udang dan bandeng, pemberian bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap serta digitalisasi usaha kelautan dan perikanan.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Kedepan untuk dapat mencapai target pertumbuhan PDB, KKP terus berupaya meningkatkan pertumbuhan PDB Perikanan antara lain melalui:

1) meningkatkan produksi perikanan baik tangkap dan budidaya dan produktifitas sektor kelautan dan perikanan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana pelaku usaha perikanan serta digitalisasi usaha kelautan dan perikanan.
2) penguatan rantai pasok hasil perikanan termasuk rantai dingin serta penguatan jaminan mutu keamanan produk kelautan dan perikanan.
3) pengembangan sentra produksi kelautan dan perikanan termasuk pengembangan kampung-kampung perikanan, pelabuhan perikanan dan fasilitas pemasaran perikanan.
4) penguatan kelembagaan pelaku usaha termasuk pembentukan korporasi nelayan dan pembudidaya, perlindungan bagi pelaku usaha perikanan dan pendampingan dan penyuluhan.
5) mendorong peningkatan konsumsi ikan dalam negeri dan kinerja ekspor produk perikanan Indonesia.

Gambar 35. | Kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan ke Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin di Mandiangin Barat, Kabupaten Banjar, Kalsel yang menghasilkan banyak inovasi di antaranya budidaya ikan-ikan lokal seperti gabus haruan, papuyu dan belida, hingga pengembangan albumin ikan gabus

Nilai Ekspor Hasil Perikanan
Tahun 2023

IK5. Nilai Ekspor Hasil Perikanan

Definisi

Nilai ekspor hasil perikanan adalah jumlah komoditas produk perikanan, baik hidup, segar, dingin, maupun olahan yang dikategorikan dalam kode *Harmonized System* (HS) sebanyak 507 kode HS dalam 8 digit yang dijual ke luar negeri yang dikonversi dalam bentuk uang (US Dollar). Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Analisis Capaian

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yakni USD 6,24 miliar, maka capaian tahun 2023 mengalami perlambatan sebesar 9,19%. Penurunan nilai ekspor hasil perikanan tersebut juga diikuti dengan penurunan nilai ekspor non migas dan ekspor Indonesia secara keseluruhan di tahun 2023. Dibanding periode yang sama pada tahun 2022, eskpor non migas mengalami perlambatan sebesar 11,33%, sedangkan ekspor Indonesia secara keseluruhan melambat sebesar 11,96% (BPS,

> **Nilai ekspor hasil perikanan Indonesia Tahun 2023 mencapai USD 5,63 miliar (angka sementara) atau mencapai 83,16% terhadap target tahun 2023 (USD 6,77 miliar). Jika dibanding target jangka menengah tahun 2024 (USD 8 miliar), maka capaian ini telah mencapai 70,37%.**

Tabel 21. | Capaian Nilai Ekspor Hasil Perikanan

Sasaran Strategis 3. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat												
IK-5. Nilai ekspor hasil perikanan (USD Miliar)												
Realisasi 2018-2022					2023				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
4,86	4,94	5,21	5,72	6,24	6,77	5,63	83,16%	-9,78	7,66	83,16%	8	70,38%

**angka sementara*
Sumber Data: BPS (diolah Ditjen PDSPKP)

2023). Nilai ekspor hasil perikanan Tahun 2023 berkontribusi sebesar 2,18% terhadap nilai ekspor nasional Tahun 2023 sebesar USD 258,8 miliar (angka sementara) atau 2,32% terhadap nilai ekspor non migas Tahun 2023 yakni sebesar USD 242,9 miliar (BPS, Desember 2023). Indikator kinerja nilai ekspor hasil perikanan pada Tahun 2023 memiliki capaian sebagaimana pada **Tabel 21.**

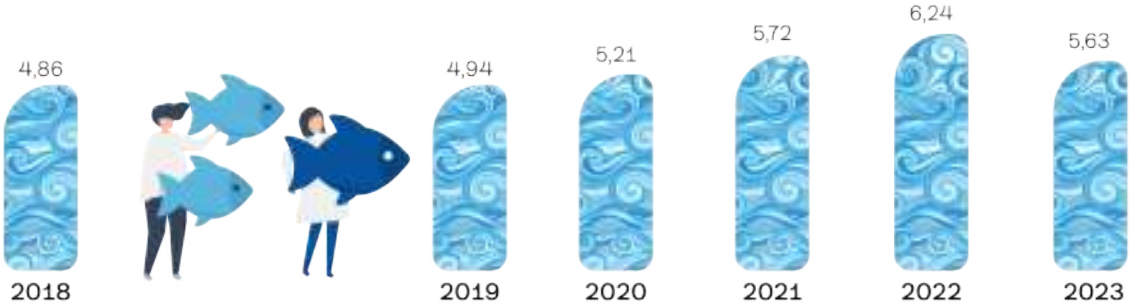

Gambar 36. | Grafik Nilai Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2018-2023

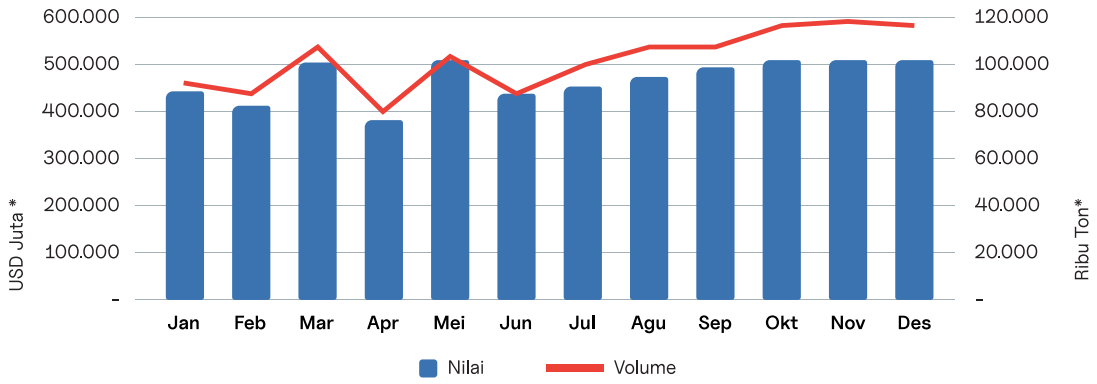

Gambar 37. | Grafik Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2023

Tabel 22. | Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan Berdasarkan Komoditas Utama Tahun 2023

Jenis Komoditas	Volume (kg)*	%	Nilai (USD)*	%
Udang	220.858.901	18,1	1.729.400.632	30,7
Tuna-Tongkol-Cakalang	203.201.462	16,6	927.180.140	16,5
Cumi-Sotong-Gurita	152.936.063	12,5	762.708.981	13,5
Rumput Laut	265.843.755	21,8	433.715.441	7,7
Rajungan-Kepiting	28.993.379	2,4	445.959.225	7,9
Lainnya	348.748.816	28,6	1.330.525.680	23,6
Total	1.220.582.382		5.629.490.103	

**angka sementara*
Sumber Data: BPS (diolah)

Terdapat 5 jenis komoditas utama ekspor dari indonesia antara lain udang, tuna-tongkol-cakalang, cumi-sotong-gurita, rumput laut, dan rajungan-kepiting. Selain 5 jenis komoditas utama tersebut, terdapat komoditas lainnya meliputi mutiara, tilapia, ikan hias, sarden, kerapu, layur, surimi, hati-telur ikan, dan sebagainya dengan kontribusi 23,6% atau USD 1,33 miliar.

Tabel 23. | Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor Tahun 2023

Jenis Komoditas	Volume (kg)*	%	Nilai (USD)*	%
United States	217.826.107	17,8	1.908.029.995	33,9
China	438.654.115	35,9	1.138.660.830	20,2
Japan	113.921.855	9,3	690.708.153	12,3
ASEAN	216.838.601	17,8	674.831.445	12,0
Uni Eropa	55.753.688	4,6	333.699.740	5,9
Timur Tengah	38.353.586	3,1	145.451.255	2,6
Lainnya	139.234.430	11,4	738.108.676	13,1
Total	1.220.582.382		5.629.490.103	

**angka sementara*
Sumber Data: BPS (diolah)

Berdasarkan negara tujuan, nilai ekspor produk perikanan terbesar berasal dari Amerika Serikat sebesar USD 1,91 miliar (33,9%), China sebesar USD 1,14 miliar (20,2%), Jepang sebesar USD 690,71 juta (12,3%), ASEAN sebesar USD 674,83 juta (12,0%), Uni Eropa sebesar USD 333,69 juta (5,9%), dan Timur Tengah sebesar USD 145,45 juta (2,6%).

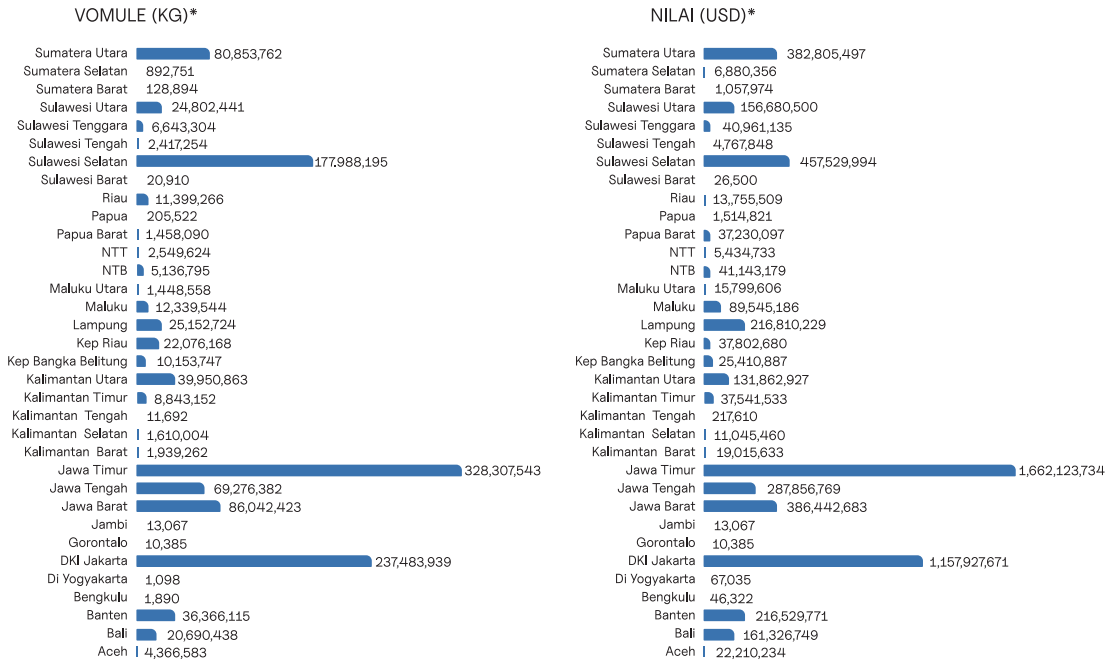

Gambar 38. | Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan Berdasarkan Provinsi Asal Tahun 2023

Dari gambar di atas diketahui bahwa terdapat tiga provinsi yang memberikan kontribusi nilai ekspor hasil perikanan terbesar yaitu (1) Provinsi Jawa Timur dengan kontribusi sebesar 29,53%, (2) Provinsi DKI Jakarta dengan kontribusi sebesar 20,57%, dan Provinsi Sulawesi Selatan dengan kontribusi sebesar 8,13%.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target nilai ekspor hasil perikanan antara lain :

a. Tren penurunan harga komoditas, kondisi global dan perlambatan ekonomi dunia serta aktivitas produksi atau industri di berbagai negara. Kondisi ini menyebabkan permintaan global juga menurun. Berdasarkan data BPS tahun 2023 tercatat total nilai ekspor Indonesia pada Januari – Desember 2023 mencapai 258,82 miliar dollar AS, mengalami perlambatan 11,33 persen dibandingkan ekspor 2022 yang sebesar 275,96 miliar dollar AS (*https://www.kompas.id/baca/ekonomi pada 15 Januari 2024*).
b. Perlambatan ekonomi yang terjadi di negara-negara utama tujuan ekspor produk perikanan seperti di Amerika Serikat telah mempengaruhi daya beli masyarakat. Adapun rincian penurunan impor produk perikanan sebagai berikut :

1) **Amerika Serikat**
Total nilai impor produk perikanan di AS hingga Oktober 2023 mengalami penurunan sebesar 17,37% menjadi USD 23,09 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau sebesar USD 27,94 miliar, dengan rincian: Udang turun sebesar USD 1,65 miliar (-22,89%), Rajungan-kepiting turun sebesar USD 1,43 miliar (-47,63%), Tuna - Cakalang - Tongkol turun sebesar USD 417,19 juta (-19,62%), Tilapia turun sebesar USD 122,39 juta (-17,31%), Cumi-Sotong-Gurita turun sebesar USD 204,23 juta (-27,79%) dan Rumput laut turun sebesar USD 30,00 juta (-10,20%). (Sumber data: KKP diolah dari Trademap.org)

2) **Uni Eropa**
Total nilai impor produk perikanan di Uni Eropa (extra-trade) hingga Agustus 2023 mengalami penurunan sebesar 1,17% menjadi USD 23,75 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau sebesar USD 24,03 miliar, dengan rincian: Udang turun sebesar USD 493,52 juta (-14,71%), Cumi-Sotong-Gurita turun sebesar USD 211,78 juta (-8,6%), Tuna-Cakalang-Tongkol turun sebesar USD 3,83 Juta (-0,18%), Tilapia turun sebesar USD 23,91 juta (-33,05%) (Sumber data: KKP diolah dari Trademap.org)

3) **Jepang**
Total nilai impor produk perikanan di Jepang hingga Oktober 2023 mengalami perlambatan sebesar 6,71% menjadi USD 11,72 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau sebesar USD 12,56 miliar, dengan rincian : Udang turun sebesar USD 371,15 juta (-19,36%), Tuna -Cakalang-Tongkol turun USD 85,50 juta (-4,92%), Rajungan-Kepiting turun sebesar USD 155,38 juta (-26,25%), Cumi -Gurita turun sebesar USD 40,17 juta (-3,83%), Tilapia turun sebesar USD 288,00 Ribu (-13,19%). (Sumber data: KKP diolah dari Trademap.org).

Program/Kegiatan yang Menunjang Indikator Kinerja

Meskipun belum mencapai target ekspor, namun disepanjanga Tahun 2023, KKP telah berupaya meningkatkan ekspor hasil perikanan diantaranya melalui :

a. Berpartisipasi dalam pameran internasional untuk memperluas pasar ekspor di pasar prospektif dan potensial salah satunya yaitu keikutsertaan dalam pameran *seafood expo North America.*
b. Koordinasi tindak lanjut atas penyelesaian perundingan protocol perubahaan *Indonesia-Japan Economic Paertnership* (IJEPA) yang telah disepakati pada 16 Desember 2023 yaitu proses *legal scrubbing* untuk penyamaan konteks bahasa hukum.
c. Koordinasi penyelesaian hambatan ekspor udang ke Amerika Serikat atas tuduhan CVD dan Anti-*dumping*.
d. Keikutsertaan KKP pada *Seafood Show of Asia Expo* (SSA) - SIAL Interfood 2023 dengan Potensi transaksi sebesar Rp1,65 miliar. Produk yang diminati antara lain: *fish skin snack*, pempek ikan dan udang, *baby fish snack, snack* olahan rumput laut, minuman olahan rumput laut, olahan ikan lele, sambal ikan, pepes ikan, kerupuk ikan, mie ikan bandeng, ikan kaleng olahan, abon ikan dan bandeng isi tanpa duri. Para calon *buyers* potensial antara lain berasal dari Indonesia, Malaysia, Turki, RRT dan Jepang.

Gambar 39. | Keikutsertaan KKP dalam Pameran Internasional

e. Keikutsertaan dan/atau fasilitasi forum perluasan akses pasar negara tujuan ekspor dalam rangka peningkatan ekspor komoditas unggulan perikanan melalui penanganan hambatan ekspor, pembukaan akses pasar ekspor, dan perundingan perdagangan bilateral/regional/multilateral. Forum yang diikuti antara lain: forum Kerjasama Indonesia – *Singapore Agribusiness Working Group* (ISAWG), menyelesaikan perundingan Protokol Perubahan Indonesia – *Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) yang mengakomodasi kepentingan Indonesia dengan pembebasan tarif 4 pos tarif produk olahan tuna dan cakalang asal Indonesia, dan mengikuti forum Perkembangan Pemenuhan Persyaratan Ekspor Udang Tangkapan (*wild-caught shrimp*) ke Amerika Serikat.
f. Pengembangan sistem informasi berupa bursa pasar ikan berbasis website yang dapat mengakses aplikasi (*https://bursaikan.kkp.go.id/*)
g. Mendorong hilirisasi dengan target agar UMKM dapat naik kelas dan mampu melakukan ekspor produk kelautan dan perikanan. Peran bursa pasar ikan adalah menyedikan informasi terkait persyaratan dan prosedur ekspor yang dapat diakses oleh para pelaku usaha.

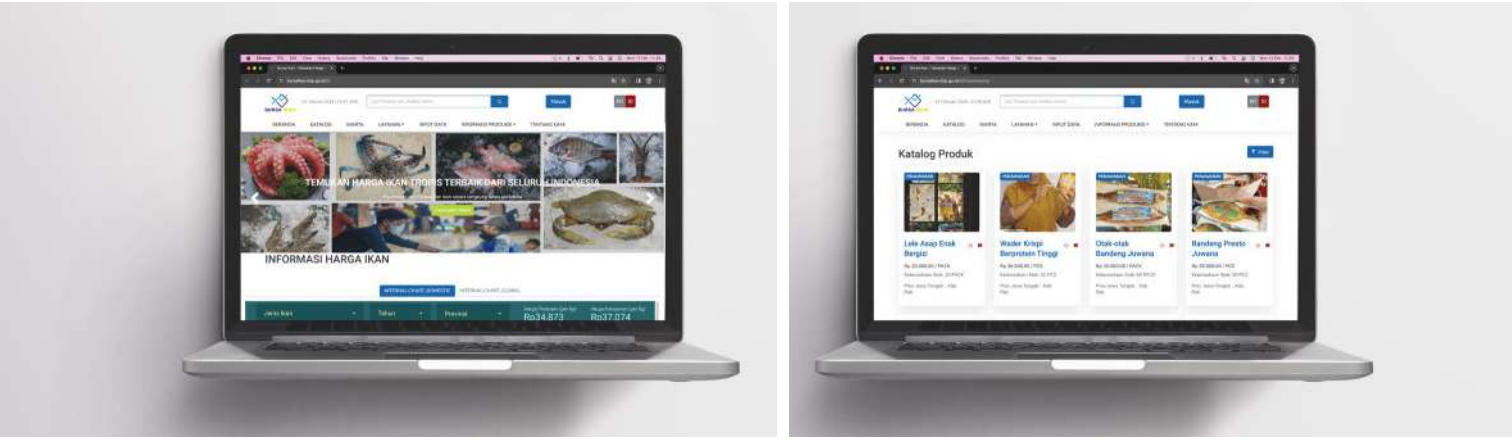

Gambar 40. | Laman Bursa Pasar Ikan

Gambar 41. | Pelepasan Ekspor Udang (Produk *Frozen* dan *Coated Shrimp*) dari Makasar dengan tujuan Jepang pada 7 Juni 2023

h. Penyusunan Profil Ekspor hasil kelautan perikanan yang meliputi Profil Pasar Kepiting, Profil Pasar Rumput Laut, Tilapia dan Rumput Laut.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Rencana tindak lanjut kedepan rangka meningkatkan capaian nilai ekspor hasil perikanan, antara lain:

1) Mempercepat proses penanganan hambatan ekspor di Amerika Serikat melalui pemenuhan Persyaratan Sertifikasi Udang Tangkapan Amerika Serikat melalui penyampaian tanggapan *additional information* kepada pihak *US. Department of State* dan penyampaian dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam proses sertifikasi tersebut.
2) Mempercepat penyelesaian peningkatan akses pasar di Jepang, melalui percepatan penyelesaian perundingan IJEPA untuk produk perikanan.
3) Melakukan sinergitas dan kerjasama dengan BPOM dalam rangka pelaksanaan ekspor ikan dan olahan ikan ke Kerajaan Arab Saudi.

Gambar 42. | Pelepasan Ekspor Udang Perdana Hasil Perikanan dari *Cold Storage* 1000 ton Muara Baru menuju Fuzhou dan Xiamen (China) pada 9 November 2023

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

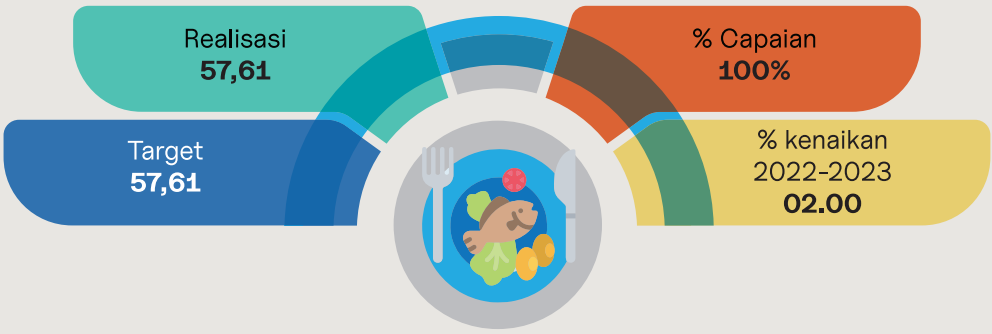

Konsumsi ikan (kg/kap/Tahun)
Tahun 2023

IK6. Konsumsi Ikan

Definisi

Konsumsi ikan adalah jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan neraca permintaan ikan untuk konsumsi domestik. Ikan mencakup ikan segar dan olahan sesuai dengan ketentuan dari BPS. Konsumsi Ikan merupakan angka konsumsi ikan perkapita secara Nasional (secara utuh segar) dari seluruh provinsi dibagi jumlah provinsi pda periode satu tahun.

Analisis Capaian

Konsumsi ikan Tahun 2023 ditargetkan sebesar 57,61 kg/kapita, dengan realisasi berdasarkan hasil penghitungan sementara sebesar 57,61 kg/kapita setara ikan utuh segar atau mencapai 100% dari target. Capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,34 kg/kapita setara ikan utuh segar atau mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,59% dibandingkan Tahun 2022 yaitu sebesar 57,27 kg/kapita setara ikan utuh segar.

Tabel 24. | Capaian Konsumsi Ikan

Sasaran Strategis 3. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat												
IK-6. Konsumsi ikan (kg/kap/Tahun)												
Realisasi 2018-2022					2023				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
50,69	54,50	54,56	55,37	57,27	57,61	57,61	100%	02.00	57,61	100%	62,5	92,18%

**angka prognosa*

Capaian konsumsi ikan tahun 2023 pada Tabel 26 merupakan data prognosa berdasarkan perkembangan konsumsi ikan tahun- tahun sebelumnya. Hal ini karena *raw* data Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai data dasar penghitungan konsumsi ikan diperoleh minus satu tahun (T-1) dari tahun berjalan.

Gambar 43. | Capaian Konsumsi Ikan 2018-2023

Tabel 25. | Capaian Konsumsi Ikan Per Provinsi

No.	Provinsi	Capaian AKI Tahun 2022 (kg/kapita)	Target AKI Tahun 2023	Capaian Sementara AKI Tahun 2023 (Kg/Kapita)	%Capaian Sementara terhadap Target AKI Tahun 2023	Perkembangan 2022-2023
1	Aceh	65,93	60,46	66,36	109,76	0,65
2	Sumatera Utara	53,65	60,73	54,65	90,00	1,86
3	Sumatera Barat	42,52	51,39	43,66	84,95	2,67
4	Riau	46,52	51,11	47,40	92,75	1,89
5	Jambi	40,8	48,65	43,50	89,41	6,62
6	Sumatera Selatan	43,68	56,95	46,21	81,14	5,79
7	Bengkulu	46,75	64,79	48,47	74,81	3,68
8	Lampung	37,02	39,68	39,98	100,74	7,98
9	Kepulauan Bangka Belitung	68,43	66,59	68,52	102,90	0,13
10	Kepulauan Riau	66,18	66,34	66,49	100,22	0,47
11	DKI Jakarta	48,61	48,65	50,30	103,38	3,47
12	Jawa Barat	40,76	35,42	41,77	117,92	2,48
13	Jawa Tengah	38,83	35,25	40,03	113,54	3,08
14	DI. Yogyakarta	35,57	33,92	38,16	112,48	7,27
15	Jawa Timur	48,33	42,14	49,49	117,44	2,39
16	Banten	46,65	45,27	47,15	104,15	1,07
17	Bali	47,09	45,87	48,48	105,70	2,95
18	Nusa Tenggara Barat	53,29	43,44	53,88	124,04	1,11
19	Nusa Tenggara Timur	55,61	49,02	53,06	108,23	-4,59
20	Kalimantan Barat	51,37	47,41	52,13	109,95	1,48
21	Kalimantan Tengah	57,95	58,31	57,73	99,01	-0,38
22	Kalimantan Selatan	65,52	62,07	65,63	105,74	0,17
23	Kalimantan Timur	58,51	63,44	58,45	92,14	-0,10
24	Kalimantan Utara	72,75	70,22	73,36	104,47	0,84
25	Sulawesi Utara	74,84	74,76	71,02	95,00	-5,10
26	Sulawesi Tengah	67,36	64,68	68,20	105,44	1,25

No.	Provinsi	Capaian AKI Tahun 2022 (kg/kapita)	Target AKI Tahun 2023	Capaian Sementara AKI Tahun 2023 (Kg/Kapita)	%Capaian Sementara terhadap Target AKI Tahun 2023	Perkembangan 2022-2023
27	Sulawesi Selatan	69,53	73,70	68,82	93,37	-1,03
28	Sulawesi Tenggara	73,38	79,04	73,08	92,46	-0,41
29	Gorontalo	64,87	70,32	65,61	93,30	1,13
30	Sulawesi Barat	66,1	65,30	67,75	103,76	2,50
31	Maluku	79,49	77,92	79,76	102,36	0,33
32	Maluku Utara	68,15	76,26	65,01	85,25	-4,61
33	Papua Barat	75,33	70,53	73,94	104,83	-1,85
34	Papua	75,98	59,00	76,95	130,43	1,28
	Rata-rata Provinsi	57,27	57,61	57,61	100,00	0,59

Program/Kegiatan yang Menunjang Indikator Kinerja

KKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja Konsumsi Ikan antara lain:

a. Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang diselenggarakan sebanyak 185 promosi, terdiri dari kegiatan Perluasan Safari Gemarikan dalam rangka pencegahan *stunting* gizi buruk (165 promosi), Pelaksanaan Bazar (14 bazar), dan Promosi pada Media Sosial Gemarikan (6 promosi);

Gambar 44. | Kampanye Gemarikan di Kabupaten Purbalingga

b. Kegiatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) dilaksanakan pada tanggal 19 – 21 November di Lapangan banteng, Jakarta Pusat.
c. Koordinasi Nasional Forikan dalam rangkaian Harkannas ke-10.
d. Pengadaan bantuan pemerintah peralatan pemasaran (*coolbox*) sebanyak 5.324 unit untuk 345 kelompok penerima.
e. Pengadaan Mobil ATI sebanyak 3 (tiga) unit. Ketiga Mobil ATI tersebut telah diserahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kepada 3 koperasi penerima yaitu Koperasi Albar Asyarif Nusantara Jaya (Kab. Cianjur), Koperasi Sumber Sejahtera (Kab. Bogor), dan Koperasi Wono Minasari (Kab. Magelang) pada Puncak Peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) tanggal 21 November 2023.
f. Penyusunan profil pasar dalam negeri hasil kelautan dan perikanan yaitu Angka Konsumsi Ikan Tahunan (1), Angka Konsumsi Ikan bulanan (1), Akses pasar dalam negeri (2), Profil pasar (3) dan Peta kebutuhan berdasarkan preferensi konsumen.
g. Pembangunan Pasar Ikan yaitu Pasar Ikan Bersih di Boyolali, Sula, Pinrang, dan Muna serta Gerai Ulam Mart Gambir, Jakarta Pusat.
h. Pembangunan 5 (lima) Sentra Kuliner Ikan yaitu, Senkul Singkawang, Sumedang, Biak, Bau-Bau dan Pulau Pasaran Lampung.

Gambar 45. | Kegiatan Hari Ikan Nasional

Gambar 46. | Penyerahan *Cool Box*

Gambar 47. | Penyerahan Mobil ATI

Gambar 48. | Pasar Ikan Yang Dibangun

Gambar 49. | Sentra Kuliner Yang Dibangun

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan rangka meningkatkan capaian angka konsumsi ikan, antara lain Kampanye Gerakan Memasyarakatan Makan Ikan (Gemarikan), dan Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri.

Nilai PNBP Sektor KP (Rp Triliun)
Tahun 2023

IK 7. Nilai PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan

Definisi

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan sumber pendapatan yang berasal dari pajak dan hibah. Pada APBN Tahun 2023. Target PNBP sektor Kelautan dan Perikanan sebesar Rp4,04 triliun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dinyatakan bahwa pengelolaan PNBP meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan pimpinan instansi pengelola PNBP, memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan Negara yang berasal dari PNBP. PNBP sektor KP berasal dari penerimaan PNBP SDA perikanan, PNBP lainnya berupa penerimaan yang diperoleh Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya serta pendapatan badan layanan umum.

Indikator kinerja PNBP Sektor KP belum tercantum dalam Renstra KKP 2020-2024 sehingga belum dapat dibandingkan dengan target di Renstra KKP 2020-2024. Capaian IK Nilai PNBP Sektor KP sebagaimana terdapat pada Tabel 26.

Tabel 26. | Capaian Konsumsi Ikan

Sasaran Strategis 3. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat												
IK 7. Nilai PNBP Sektor KP (Rp Triliun)												
Realisasi 2018-2022					2023				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
0,77	0,79	0,86	0,996	1,87	4,038	1,69	41,85%	-9,63	-	-	-	-

**angka prognosa*

Target PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebesar Rp4,038 triliun atau Rp4,04 triliun dalam aplikasi kinerjaku dengan realisasi sebesar Rp1,69 triliun atau mencapai Rp41,85%. Realisasi PNBP Sektor KP sebesar Rp4,038 triliun terdiri dari PNBP yang bersumber dari Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp707 miliar, PNBP Badan Layanan Umum sebesar Rp89 miliar, PNBP Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan sebesar Rp637 miliar dan PNBP Lainnya berupa PNBP pelayanan, PNBP pengelolaan BMN, PNBP hak negara lainnya sebesar Rp267 miliar

Gambar 50. | Grafik Capaian PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan 2014-2023

Tabel 27. | Realisasi PNBP KKP per Unit Kerja Eselon I per Sumber Pendapatan Tahun 2023 (dalam Rp)

No	Unit Kerja Eselon I	Realisasi (Rp)
1	**Ditjen Perikanan Tangkap**	**736.108.210.555**
	a. SDA	636.893.353.269
	b. PNBP Lainnya	99.214.857.286
2	**Ditjen Perikanan Budi Daya**	**43.258.107.475**
	a. PNBP Lainnya	29.629.013.046
	b. BLU- Jepara	1.639.471.822
	c. BLU-Situbondo	3.850.475.751
	d. BLU-Karawang	8.139.146.856
3	Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP	30.613.322.664
4	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP	15.226.344.631
5	Ditjen Pegelolaan Kelautan dan Ruang Laut	707.036.792.705
6	**Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan**	**32.056.666.124**
	a. PNBP Lainnya	18.191.719.739
	b. BLU- Tegal	9.075.535.075
	c. BLU- Sidoarjo	4.789.411.310

No	Unit Kerja Eselon I	Realisasi (Rp)
7	Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	71.800.956.299
8	Inspektorat Jenderal	420.555.837
9	**Sekretariat Jenderal**	**62.519.537.707**
	a. Biro Umum dan PBJ	1.329.718.915
	b. BLU- LPMUKP	61.121.091.532
	c. BPISDKP	68.727.260
	Jumlah	**1.699.040.493.997**

Sumber: Aplikasi OMSPAN, Kementerian Keuangan

Analisis Capaian

Apabila dibandingkan dengan target PNBP Nasional sebagaimana Perpres 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, target PNBP nasional tahun 2023 sebesar Rp515,8 triliun dengan realisasi s.d 12 Desember 2023 sebesar 554,5 triliun terdiri dari Pendapatan SDA Non Migas, Pendapatan Kekayaaan Negara Dipisahkan dan Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp554,5 triliun, SDA Migas sebesar Rp109 triliun dan SDA Non Migas sebesar Rp131,0 triliun (Sumber: Kementerian Keuangan). Capaian PNBP KKP Tahun 2023 mengalami perlambatan sebesar 9,63% dibanding Tahun 2022 hal ini disebabkan:

a. Tahun 2023 merupakan Tahun transisi, yairu Tahun pertama pelaksanaan penarikan pascaproduksi yang sebelumnya praproduksi. Pada Tahun transisi, kapal yang beroperasi di Tahun 2023 masih mengantongi izin praproduksi dan sudah membayar PNBP prapoduksi di Tahun 2022. Kapal yang masih mengantongi izin (SIPI) praproduksi belum dapat ditarik PNBP pascaproduksi sampai dengan izin pascaproduksinya terbit.
b. Penarikan PNBP SDA perikanan pascaproduksi menggunakan metode *self assessment* (wajib bayar atau pelaku usaha pemilik izin yang menghitung sendiri besaran kewajiban pembayaran PNBP). Pada Tahun transisi 2023, kepatuhan pelaku usaha untuk melaporkan data produksi penangkapan ikan secara lengkap dan akurat masih belum optimal dengan berbagai modus yang dilakukan.
c. Sebagian besar pelabuhan perikanan yang menjadi pelabuhan pangkalan penarikan PNBP SDA pascaproduksi adalah pelabuhan perikanan UPT daerah.

Program/Kegiatan yang Menunjang Indikator Kinerja

Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, namun capaian PNBP Sektor KP tetap melanjutkan kinerja positif tahun 2022. Dalam rangka optimalisasi PNBP telah melaksanakan beberapa upaya diantaranya :

1. Revisi harga acuan ikan berdasarkan masukan dari sejumlah pelaku usaha perikanan. Ketentuan harga acuan itu diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Ikan.

2. Memperkuat pengawasan seiring pelaksanaan PNBP pascaproduksi. Pengawasan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi serta patroli langsung di laut.
3. Peralihan skema PNBP praproduksi ke pascaproduksi untuk sektor perikanan tangkap membutuhkan kesiapan regulasi dan infrastruktur. Berdasarkan hal tersebut, sepanjang tahun 2023 KKP telah melakukan persiapan diantaranya kesiapan pelabuhan, di antaranya logistik, listrik, air bersih, dan gudang beku.
4. Telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1569/MEN-KP/X/2023 tentang Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, Evaluasi SIUP, perizinan berusaha sub sektor pennagkpan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkuran ikan, pemberian perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan sub sektor penagngkutan ikan baru/perpanjangan untuk musim penangkapan ikan tahun 2023, perubahan format SIUP, perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan sub sektor pengankutan ikan menjadi format pennagkapan ikan terukur, pengaktifan dan pemasangan system pemantauan kapal perikanan, dan penggunaan aplikasi penangkapan ikan elektronik (E-PIT).

Gambar 51. | Kegiatan Bongkar Muat Kapal Perikanan

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Arah kebijakan pengelolaan PNBP Sektor KP dalam rangka optimalisasi kontribusi PNBP sektor kelautan dan perikanan terhadap penerimaan negara secara nasional dengan melakukan langkah strategis antara lain:

1. Peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, kelengkapan SDM pendataan, dll dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur.
2. Penyempurnaan proses bisnis dan regulasi pengelolaan PNBP terutama mekanisme pemungutan, perhitungan, penyetoran dan sanksi pengelolaan PNBP.
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan PNBP sehingga lebih cepat, tepat, dan terintegrasi.
4. Peningkatan pembinaan dan koordinasi antar instansi.
5. Optimalisasi fungsi kantor vertikal KKP di daerah/Unit Pelaksana Teknis dalam rangka penguatan data potensi, perencanaan, kinerja, dan implementasi kebijakan PNBP.
6. Peningkatan pengawasan dan peran serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka pengawasan kepatuhan perundangundangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atas pengelolaan PNBP.
7. Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi PNBP.

Tenaga kerja yang terlibat (orang)
Tahun 2023

IK 8. Tenaga Kerja Yang Terlibat

Definisi

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta sertifikasi pengendalian mutu dan karantina ikan. Target tenaga kerja yang terlibat bidang kelautan dan perikanan Tahun 2023 sebesar 456.657 orang. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru di tahun 2022 sehingga belum tercantum dalam Renstra KKP 2020-2024 dan berlanjut di tahun 2023.

Analisis Capaian

Indikator kinerja tenaga kerja yang terlibat di sektor kelautan dan perikanan merupakan indikator baru sejak tahun 2022, sehingga belum tercantum dalam Renstra KKP Tahun 2020-2024. Target Tahun 2023 ditetapkan lebih kecil dari realisasi Tahun 2022, hal ini disebabkan adanya penyesuaian formulasi perhitungan di tahun 2023 dengan mempersempit ruang lingkup tenaga kerja yang terlibat.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 1.133.510 orang, realisasi tahun 2023 mengalami perlambatan sebesar 49,75 persen. Namun demikian hal tersebut tidak dapat dibandingkan secara *apple to apple* karena adanya perbedaan formulasi perhitungan. Rincian per bidang tenaga kerja yang terlibat di sektor kelautan dan perikanan tercantum dalam **Tabel 28.**

Tabel 28. | Capaian Tenaga Kerja yang Terlibat

Sasaran Strategis 3. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat												
IK 8. Tenaga kerja yang terlibat (orang)												
Realisasi 2018-2022					2023				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Reali-sasi	% Capai-an	% Kenaik-an 2022-2023	Target 2023	% Capai-an ter-hadap Target 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
-	-	-	-	1.133.510	456.657	569.631	124,74% atau 120% dalam aplikasi kinerjaku	-49,75	-	-	-	-

Tabel 29. | Rincian Realisasi Tenaga Kerja yang Terlibat Tahun 2023

No.	Bidang	Satuan	Target	Realisasi	% Realisasi	Keterangan
1.	Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Orang	2.850	4.582	161%	Tenaga Kerja yang terlibat dalam pembangunan sarana niaga garam, pembangunan unit bisnis biofarmakologi tugas pembantuan pugar kabupaten, pengembangan wisata bahari dan pengelolaan BMKT
2.	Perikanan Tangkap	orang	285.000	304.053	107%	Tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya ikan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, pelaksanaan *observer* di atas kapal perikanan, pelaporan data *logbook* penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi, sertifikasi awak kapal perikanan, sertifikasi petugas kapal perikanan, peningkatan kompetensi nelayan/awak kapal, perjanjian kerja laut, peningkatan kompetensi petugas pelabuhan perikanan dalam rangka mendukung Perikanan Ikan Terukur, peningkatan kompetensi syahbandar dan petugas kesyahbandaran

No.	Bidang	Satuan	Target	Realisasi	% Realisasi	Keterangan
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Orang	80.000	150.157	188%	Tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung pada UPI ber HACCP. Tenaga kerja yang terlibat langsung merupakan tenaga kerja tetap pelaku usaha (pengolah) yang secara langsung melaksanakan kegiatan di sektor KP pada UPI ber HACCP. Tenaga kerja yang terlibat secara tidak langsung merupakan pihak lain yang tumbuh dan/atau terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja langsung dari kegiatan sektor KP seperti tenaga kerja harian dan Borongan pada UPI ber HACCP.
4.	Penguatan Daya Saing dan Produk KP	Orang	49.600	52.428	106%	Tenaga Kerja yang terlibat dalam 1). bidang pengolahan dan bina mutu (Pabrik Es, Sarana pasca panen hasil kelautan dan perikanan, Chest Freezer, Peralatan pengolahan, Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan, 2). Bidang Logistik logistik hasil kelautan dan perikanan, 3).pemasaran hasil kelautan dan perikanan, 4). usaha dan investasi dan 5).pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan.
5.	Perikanan Budi Daya	orang	26.865	45.892	171%	Tenaga Kerja yang terlibat di bidang kawasan dan kesehatan ikan (pengelolaan *excavator, shrimp estate* dan Pemanfaatan Pengelolaan Iritasi Tambak Partisipatif/PITAP, bidang produksi dan usaha, bidang perbenihan (bantuan benih, bantuan calon induk, bantuan kebun bibit rumput laut, bantuan keramba jaring apung, bantuan Unit Perbenihan Rakyat dan bantuan jaring)
6.	Penyuluhan dan Pengem-bangan SDM KP	orang	12.342	12.519	101%	Tenaga Kerja yang terlibat di Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), Penyuluh Perikanan Bantu, dan UMKM di BBRBLPP Gondol, BPPP Ambon, BPPP Banyuwangi, BPPP Bitung, BPPP Medan, BPPP Tegal, BRPBAPPP Maros, BRPBATPP Bogor, BRPPUPP Palembang.

Program/Kegiatan yang Menunjang Indikator Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator disebabkan adanya pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat kelautan dan perikanan, kegiatan penyuluhan, pelatihan mandiri kelautan dan perikanan (P2MKP), Penyuluh Perikanan Bantu, dan UMKM di BBRBLPP Gondol, BPPP Ambon, BPPP Banyuwangi, BPPP Bitung, BPPP Medan, BPPP Tegal, BRPBAPPP Maros, BRPBATPP Bogor, BRPPUPP Palembang.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja
Dalam upaya pencapaian kinerja pada periode selanjutnya, akan dilakukan langkah-langkah mempercepat proses penyaluran bantuan pemerintah serta pelaksanaan penyuluhan perikanan.

Gambar 52. | Kegiatan Penyuluh Perikanan Mendampingi Keluarga Nelayan

Gambar 53. | Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan Bidang Fermentasi Pakan pada Budidaya Ikan Nila

SS • 4

Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan Meningkat

Sasaran Strategis (SS) terdiri dari satu IK yaitu Persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

IK 9. Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan yang Terserap Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

Definisi

Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan KP yang terserap di dunia usaha dan dunia industri pada Tahun 2023, ditargetkan sebanyak 70%. Indikator ini merupakan representasi dari jumlah lulusan pendidikan menengah dan tinggi vokasi KP yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan serta jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha yang menerapkan hasil pelatihan dan/atau bekerja di dunia usaha dan industri.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri Tahun 2023 sebesar 74,17 persen atau telah mencapai 105,36%. Satuan Pendidikan KP telah meluluskan peserta didik sebanyak 2.407 Orang serta Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP telah melatih masyarakat sebanyak 34.518 Orang. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 66,01 realisasi tahun 2023 meningkat sebesar 12,36 persen, sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra KKP 2020-2024, capaian tahun 2023 telah melebihi target dengan nilai capaian sebesar 103,01%.

Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan yang Terserap Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), Tahun 2023

Analisis Capaian

Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan KP yang terserap di dunia usaha dan dunia industri menjadi indikator sejak tahun 2020, sehingga untuk tahun 2018 dan 2019 capaian tidak dapat dibandingkan.

Tabel 30. | Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

Sasaran Strategis 4. Kapasitas dan Kompetensi SDM KP Meningkat												
IK 8. Persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada dunia usaha dan dunia industri / DUDI (%)												
Realisasi 2018-2022					2023				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
-	-	54,82	62,58	66,01	70	74,17	105,96%	12,36	70	105,96%	72	103,01%

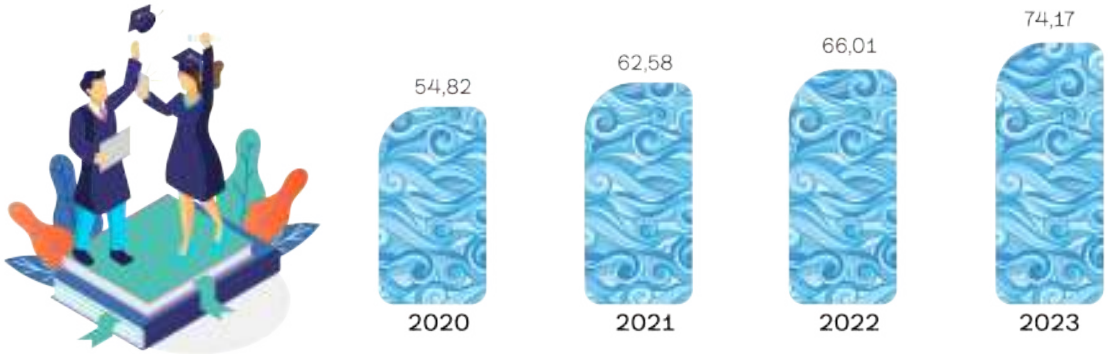

Gambar 54. | Capaian Persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada dunia usaha dan dunia industri Tahun 2020- 2023

Tabel 31. | Perbandingan Capaian Persentase Serapan Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pada Dunia Usaha dan Dunia Industri/ DUDI dengan KL Lainnya Tahun 2022

No.	Satuan Kerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
1.	BPPSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan	65	66,01	101,55
2.	BPPSDM Kementerian Pertanian	80	84,46	105,57
3.	BPPSDM Kementerian Perindustrian	79	100	120

Berikut adalah perbandingan capaian indikator kinerja dengan K/L lainnya yang mempunyai indikator kinerja dengan substansi sama dengan Persentase Serapan Lulusan Pendidikan dan Pelatihana pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) disajikan pada tabel diatas Tabel 32.

Capaian Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan KP yang terserap DUDI lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian BPPSDM Kementerian Pertanian dan Perindustrian, hal ini dikarenakan capaian BPPSDM Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian diukur setelah lulusan memiliki masa tunggu lebih dari 6 bulan atau dihitung berdasarkan lulusan tahun sebelumnya sedangkan lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP diukur pada tahun berjalan dengan masa tunggu 5 bulan. Sedangkan untuk informasi terkait Perbandingan capaian KL terkait di tahun 2023 belum didapatkan capaiannya karena KL lain dalam proses penyusunan Laporan Kinerja. Distribusi serapan lulusan pada satuan pendidikan KP Tahun 2023 *Tabel 32.*

Tabel 32. | Distribusi Serapan Lulusan pada Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terserap DUDI

No.	Satuan Pendidikan KP	Serapan Lulusan		
		Target 2022	Realisasi 2022	%
1	Politeknik AUP	394	296	75,13
2	Politeknik KP Sidoarjo	152	114	75,00
3	Politeknik KP Bitung	131	102	77,86
4	Politeknik KP Sorong	86	66	76,74
5	Politeknik KP Karawang	94	72	76,60
6	Politeknik KP Bone	229	173	75,55
7	Politeknik KP Kupang	145	67	46,21
8	Politeknik KP Dumai	83	63	75,90
9	Politeknik KP Pangandaran	90	73	81,11
10	Politeknik KP Jembrana	87	68	78,16
11	AK Wakatobi	48	36	75,00
12	SUPM Ladong	98	79	80,61
13	SUPM Pariaman	140	105	75,00
14	SUPM Kotaagung	31	26	83,87
15	SUPM Tegal	188	141	75,00
16	SUPM Pontianak	149	115	77,18
17	SUPM Waiheru	155	117	75,48
18	SUPM Sorong	107	30	28,04
	Jumlah	2.407	1.743	72,41

Capaian jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha yang menerapkan hasil pelatihan dan/atau bekerja di DUDI orang dari total peserta pelatihan sebanyak 25.644 orang. Hasil ini terdistribusi di 5 (lima) BPPP yaitu BPPP Medan, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BPPP Bitung dan BPPP Ambon, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33. | Sebaran Lulusan Satuan Kerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan yang Terserap DUDI

No	Satuan Kerja	Jumlah Mayarakat dilatih	Jumlah Terserap DUDI	%
1	BPPP Medan	3.200	2.240	70,00
2	BPPP Tegal	17.759	13.822	77,83
3	BPPP Banyuwangi	6.869	4.808	70,00
4	BPPP Bitung	3.130	2.200	70,29
5	BPPP Ambon	3.560	2.574	72,30
	Jumlah	34.518	25.644	74,29

Tabel 34. | Perhitungan Capaian Persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada dunia usaha dan dunia industri Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah	Terserap DUDI	% Capaian
1	Masyarakat KP Yang dilatih	34.518	25.644	
2	Lulusan Pendidikan KP	2.407	1.743	
	Jumlah	36.925	27.387	74,17%

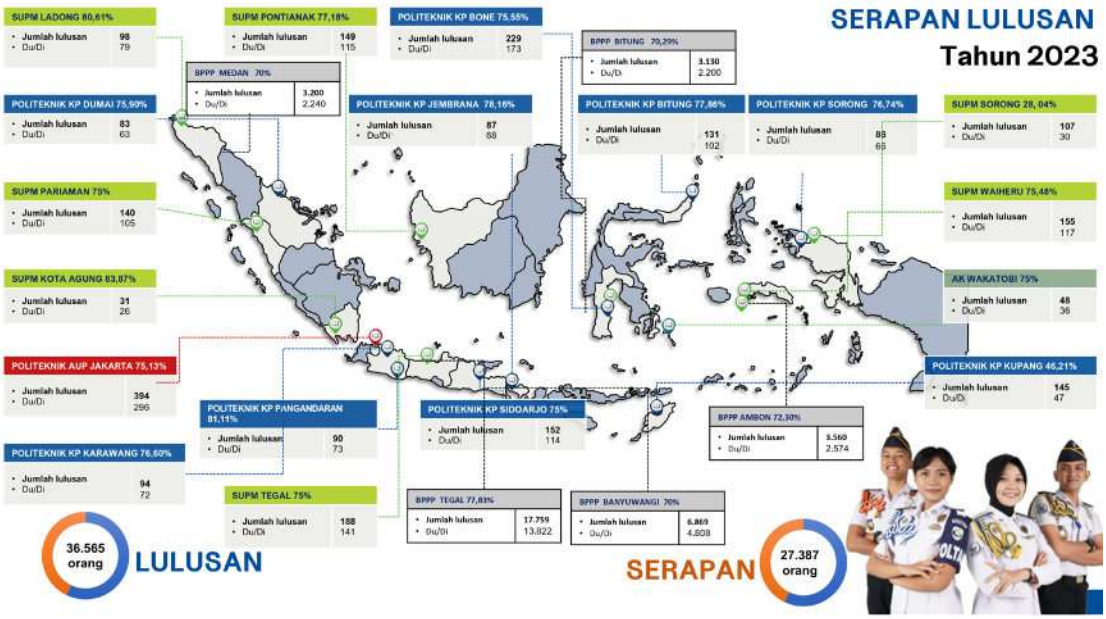

Gambar 55. | Sebaran Lulusan yang Terserap DUDI Tahun 2023

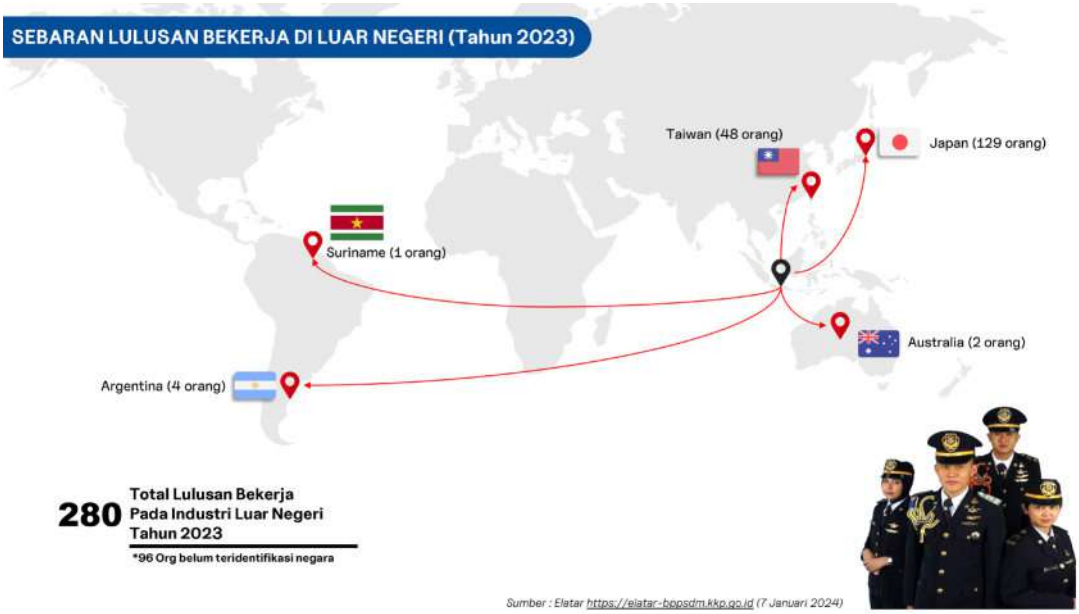

Gambar 56. | Sebaran Lulusan yang Terserap DUDI di Luar Negeri Tahun 2023

Adapun faktor yang menyebabkan keberhasilan capaian indikator kinerja ini, antara lain:

1. Sistem pendataan alumni yang *update* di satuan pendidikan KP.
2. Kerja sama dan komunikasi baik yang dilakukan antara Pusat Pendidikan, Satuan Pendidikan KP, dan Pelaku Dunia Industri.
3. Reviu kurikulum yang rutin dilakukan oleh Pusdik dan satuan pendidikan KP yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.
4. Kompetensi yang sesuai antara lulusan satuan Pendidikan KP dengan kebutuhan di dunia industri.
5. Kurikulum kewirausahaan yang terdapat pada satuan Pendidikan KP dapat mendukung dan mendorong semangat alumni, membuka peluang wirausaha atau bekerja di perusahaan.

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut disebabkan antara lain oleh:

1. Penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan yang dilaksanakan pada awal tahun, yang bertujuan untuk menyiapkan SDM calon maupun penerima program bantuan KKP dan untuk mendukung program–program prioritas KKP.
2. Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk lulusan pelatihan penangkapan ikan (BST, Ankapin, Atkapin, dll.) dan perusahaan olahan hasil perikanan.
3. Pendampingan bagi lulusan pelatihan oleh penyuluh di Kab/kota sehingga hambatan dalam usaha kelautan dan perikanan dapat diatasi.
4. Sistem pendataan alumni yang terorganisir.
5. Kompetensi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan di dunia usaha/dunia industri.

Program/Kegiatan yang Menunjang Indikator Kinerja

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Pelaksanaan pemetaan kebutuhan pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai berkontribusi dalam menghasilkan capaian pelaku utama/usaha yang kompeten. Pemetaan ini memberikan kontribusi atas penyelenggaraan pelatihan yang tepat sasaran dan mampu memberikan solusi terhadap kebutuhan pelaku utama/usaha untuk meningkatkan kompetensi sehingga menerapkan hasil pelatihannya.
2. Pelaksanaan kegiatan evaluasi pasca pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai sebelum dan setelah mendapatkan pelatihan dan penyuluhan KP.
3. Ketersediaan instrumen pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja yang telah disosialisasikan ke seluruh Balai di awal tahun 2023 membantu kemudahan dalam penyampaian laporan capaian kinerja.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada dunia usaha dan dunia industri, langkah-langkah yang akan dilakukan kedepan diantaranya kerjasama antara satuan pendidikan KP dengan perusahaan sektor kelautan dan perikanan dalam rangka penerimaan peserta didik untuk melakukan magang di perusahaan dan memprioritaskan lulusan satuan pendidikan KP untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan, evaluasi pasca pelatihan kepada peserta sebelum dan setelah mendapatkan pelatihan dan penyuluhan KP, pemetaan kebutuhan pelatihan, mengedepankan sistem pembelajaran *teaching factory* pada satuan pendidikan KKP yang dominan berisi praktik, sehingga nantinya saat lulus para peserta didik menjadi generasi muda siap kerja bahkan membangun usaha perikanannya sendiri. Selain itu para wisudawan dari satuan pendidikan tidak hanya menerima ijazah tapi juga sertifikat kompetensi dan sertifikat pelatihan seperti sertifikat *Basic Safety Training*, Ahli Nautika dan Teknika Kapal Penangkap Ikan, Keahlian Teknik

Penangkapan Ikan, Keahlian Permesinan Perikanan, Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Pembauatn Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACPP) dan Sertifikasi Pengolah Ikan. Diharapkan melalui Sertifikasi Pelatihan, dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan serta menjadi salah satu syarat bagi peserta didik untuk siap bersaing di dunia usaha dan dunia industri.

Gambar 57. | Kegiatan Pembekalan Teknis Peningkatan Kapasitas Pemantau di atas Kapal Penangkap ikan dan Kapal Pengangkut Ikan (*Observer Board*) yang di laksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan *The United States Agency for International Development* (USAID) di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung

Gambar 58. | Kegiatan Wisuda Satuan Pendidikan Lingkup KKP

SS • 5

Tata Kelola Sumber Daya KP Bertanggung Jawab

IK 10. WPP NRI yang Melaksanakan Penangkapan Ikan Terukur

Definisi

Penangkapan Ikan Terukur (PIT) merupakan sebuah konsep penangkapan ikan yang terkendali yang dilakukan di zona tertentu dengan kuota penangkapan ikan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, memberikan kesempatan berusaha, serta meningkatkan keadilan dan kesejahteraan nelayan. Pengendalian dilakukan dengan perizinan, dengan mempertimbangkan kuota per kapal (*ouput control*) serta hasil tangkapan pelaku usaha yang dapat dimanfaatkan berdasarkan kuota (*catch limit*). Terdapat aspek pengaturan dalam pengelolaan PIT, diantaranya area penangkapan ikan, jumlah ikan yang boleh ditangkap berdasarkan kuota volume produksi, musim penangkapan ikan, jumlah dan ukuran kapal, jenis alat tangkap, pelabuhan perikanan sebagai tempat pendaratan/pembongkaran ikan, penggunaan ABK lokal, suplai pasar domestik dan ekspor ikan harus dilakukan dari pelabuhan di WPP yang ditetapkan, serta pemberlakuan PNBP pasca produksi.

Zona PIT adalah wilayah perairan di WPPNRI dan Laut Lepas yang ditetapkan sebagai wilayah perairan yang dapat dikelola untuk pemanfaatan sumber daya ikan dengan cara penangkapan ikan terukur. Zona penangkapan ikan ini dibagi dalam 6 zona dengan 3 klasifikasi zona utama, yaitu:

a. Zona penangkapan ikan berbasis kuota untuk industri, yaitu zona 1 (WPPNRI 711), zona 2 (WPPNRI 716, 717, dan Laut Lepas), zona 3 (WPPNRI 715, 718 dan 714) serta zona 4 (WPPNRI 572, 573, dan Laut Lepas);
b. Zona penangkapan ikan khusus untuk nelayan tradisional yaitu zona 5 (WPPNRI 571) dan zona 6 (WPPNRI 712 dan 713); dan
c. Zona pemijahan dan daerah pengasuhan ikan (*spawning and nursery grounds*) pada WPP 714.

WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur (WPP)
Tahun 2023

Melalui implementasi PIT diharapkan penyebaran lokasi pelabuhan pangkalan untuk kapal ukuran > 30 GT sehingga pendaratan ikan sesuai dengan SIPI, penyerapan tenaga kerja lokal di berbagai wilayah karena para investor diwajibkan menggunakan tenaga kerja dari masyarakat sekitar, penangkapan ikan diseluruh zona (maksimal 12 mil) untuk nelayan tradiosional/lokal dan kelestarian SDA di WPP 714 (*spawning ground*). Pada Tahun 2023, telah disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

a. Penerbitan Permen KP Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 11 Nomor Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.
b. Penyiapan rancangan Kepmen KP tentang kuota penangkapan ikan, kuota industri dan/atau kuota Nelayan Lokal pada setiap Pelabuhan Pangkalan, produktivitas Kapal Penangkap Ikan dan Pelabuhan Pangkalan PIT.
c. Penerbitan 4 (empat) Surat Edaran terkait: 1) kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaksanaan penarikan PNBP berupa PHP Pascaproduksi; 2) migrasi Perizinan subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Pengangkutan Ikan dan 3) tahapan pelaksanaan kebijakan PIT pada Tahun 2023.

Analisis Capaian

WPP NRI yang Melaksanakan Penangkapan Ikan Terukur merupakan indikator baru sejak tahun 2022 sehingga capaiannya belum dapat dibandingkan dengan tahun 2019-2021 dan belum tercantum dalam Renstra KKP 2020-2024. Rincian capaian WPP NRI yang Melaksanakan Penangkapan Ikan Terukur sebagaimana tercantum dalam Tabel 35.

Target WPP NRI yang Melaksanakan Penangkapan Ikan Terukur Tahun 2023 adalah 11 WPP dengan realisasi 11 WPP atau telah mencapai 100% terdiri WPP 571, 572, 573, 711, 712,713, 714, 715, 716, 717, 718. Capaian tersebut dihitung dari jumlah WPP yang melaksanakan prinsip-prinsip penangkapan ikan terukur dengan persyaratan 1). Pengaturan Pelabuhan pangkalan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan atau mengisi perbekalan, dan 2). Peningkatan kualitas dan kuantitas pendataan hasil tangkapan dengan penguatan teknologi Informasi.

Tabel 35. | Capaian WPP NRI yang melaksanakan Penangkapan Ikan Terukur Tahun 2023

Sasaran Strategis 5. Tata Kelola SDKP bertanggung jawab

IK 10. WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur (WPP)

Realisasi 2018-2022					2023				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
-	-	-	-	11	11	11	100.00%	-	-	-	-	-

Dalam hal persiapan pengaturan pelabuhan pangkalan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan dan atau mengisi perbekalan, KKP telah menetapkan pelabuhan pangkalan yang telah memenuhi syarat penarikan pasca produksi sesuai dengan ditetapkannya Kepmen KP Nomor 139 Tahun 2023 tentang Penetapan Pelabuhan Pangkalan yang telah Memenuhi Syarat Penarikan Pasca Produksi atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.

Kepmen KP Nomor 139 Tahun 2023 mengganti Kepmen KP sebelumnya yaitu Kepmen KP Nomor 4 Tahun 2023 yang sebelumnya telah ditetapkan sejumlah 77 pelabuhan perikanan/umum/swasta diubah menjadi 171 pelabuhan perikanan/umum/swasta yang tersebar pada

11 WPPNRI (6 zona PIT). Dengan adanya penambahan pelabuhan pangkalan yang memenuhi syarat penarikan pasca produksi atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam perikanan, penambahan jenis ikan, dan penyesuaian harga acuan ikan pada beberapa jenis ikan di beberapa pelabuhan pangkalan, telah ditetapkan Kepmen KP Nomor 199 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Ikan.

Pada Tahun 2023, kegiatan PIT telah dilaksanakan untuk penerapan pasca produksi dan zona, sementara untuk penerapan kuota memerlukan kesiapan sehingga dilakukan relaksasi mengenai kuota penangkapan ikan dan sertifikat kuota penangkapan ikan sebagaimana Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B.1954/MEN-KP/XI/2023 tentang Relaksasi Kebijakan pada masa transisi Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur.

Sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan perikanan untuk mendukung PIT, antara lain:

a. Sosialisasi tata cara penggunaan aplikasi penangkapan ikan secara elektronik (e-PIT) kepada seluruh pelaku usaha di daerahnya;
b. Analisis dan evaluasi (anev) terhadap perizinan berusaha yang ada saat ini baik yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun daerah merujuk ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023. Pelaksanaan anev secara mandiri oleh pelaku usaha secara elektronik melalui akun masing-masing pada aplikasi SILAT/SIMKADA modul Evaluasi Mandiri, dengan batas waktu s.d 27 Oktober 2023.
c. Analisis dan evaluasi pelaksanaan penarikan PNBP sumber daya alam perikanan pascaproduksi.
d. Menyelesaikan migrasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan bagi kapal yang selama ini perizinan berusahanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah menjadi perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di atas 12 mil laut, antarprovinsi, atau antarnegara.

Tahun 2023 jumlah kapal yang sudah aktivasi ePIT yaitu 12.335 unit kapal perikanan. Nilai PHP yang sudah diterima sejumlah Rp593.468.296.838,00. Dengan aplikasi ePIT ini, data yang disajikan dapat disortir berdasarkan zona penangkapan, daerah penangkapan ikan dan pelabuhan pangkalan pendaratan ikan.

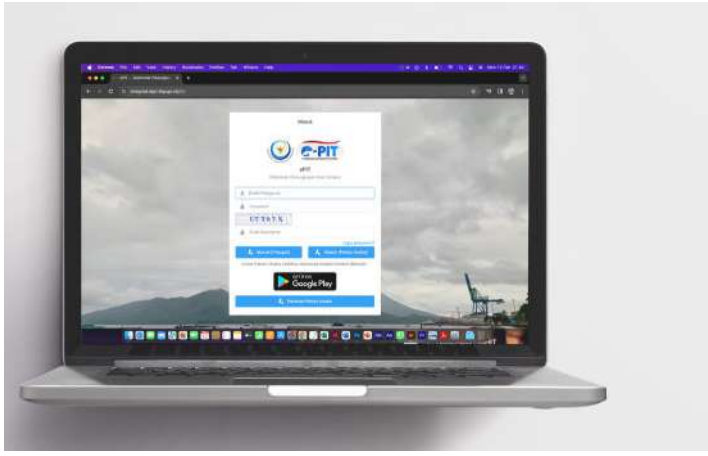

Gambar 59. | *Dashboard* Elektronik Penangkapan Ikan Terukur (ePIT)

Pada aplikasi ePIT, KKP dapat dilihat jumlah kapal perikanan perizinan pusat (izin yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan) di seluruh WPPNRI yang terbagi kedalam 6 zona penangkapan. Selain itu aplikasi ePIT dapat memantau produksi hasil tangkapan pelaku usaha yang didaratkan sampai dengan per nama kapal. Data produksi dan nilai produksi tersebut akan menjadi dasar terhadap penarikan PNBP pasca produksi sesuai dengan kode *billing* yang terbit, yang kemudian harus dibayarkan oleh pelaku usaha perikanan tangkap.

Program/Kegiatan yang Menunjang Indikator Kinerja

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan PIT, telah dilakukan beberapa kegiatan diantaranya:

a. Migrasi perizinan berusaha, dari izin daerah ke izin pusat terkait dengan daerah penangkapan ikan > 12 mil laut.
b. Pendataan kapal 5-30 GT yang akan beroperasi di atas 12 mil laut, antar provinsi, atau antar negara untuk migrasi menjadi perizinan berusaha yang diterbitkan pusat;
c. Melaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha dan stakeholders.
d. Melaksanakan pendampingan dan perbantuan pelaksanaan gerai migrasi.
e. Menginformasikan kepada pelaku usaha yang sudah melakukan migrasi dan belum memperpanjang izin untuk musim penangkapan 2024 agar segera memperpanjang izin.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Dalam rangka pencapaian kinerja kedepan terkait WPP NRI yang melaksanakan Penangkapan Ikan Terukur, upaya yang akan dilakukan antara lain penyediaan sarpras di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perikanan Tangkap pusat maupun UPT daerah di Pelabuhan Perikanan, penyediaan SDM di Pelabuhan Perikanan yaitu petugas pengolah data, verifikator, petugas mutu, syahbandar dan petugas kesyahbandaran dan pengawalan pelaksanaan pungutan negara bukan pajak (PNBP) pascaproduksi di Pelabuhan perikanan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan penangkapan ikan terukur, peningkatan kompetensi nelayan lokal melalui bimtek alat tangkap, servis permesinan, pelatihan kecakapan nelayan, cara penangkapan ikan yang baik, dan perjanjian kerja laut, Pemantauan dan evaluasi perizinan dalam rangka mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Penyusunan/Reviu Pedoman Penataan Perizinan untuk mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.

Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)
Tahun 2023

IK 11. Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir

Definisi

Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan berbagai pusat pembangunan kelautan nasional, untuk memiliki kepastian hukum perlu disusun dokumen perencanaan meliputi perencanaan tata ruang laut nasional, perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perencanaan zonasi kawasan laut. Kegiatan Perencanaan Ruang Laut berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, dan Permen KP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, kedudukannya dapat dilihat pada gambar diatas, Gambar 59.

Penerapan penyelenggaraan penataan ruang laut diatas diharapkan dapat memberikan dampak yang positif yaitu kepastian Hukum Pemanfaatan Ruang Laut, Minimal konflik penggunaan ruang laut, mengakomodir perluasan Kawasan Konservasi Laut (KKP & KLHK) dalam program Penataan Ruang Laut dan mengakomodir kegiatan perikanan tangkap dan budidaya laut dalam Penataan Ruang Laut berbasis Ekonomi Biru dan Kesehatan Laut.

Analisis Capaian

Kondisi eksisting perencanaan ruang laut sampai dengan Tahun 2023 antara lain:

1. Telah terbit 3 Peraturan Presiden Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) terdiri dari KSN IKN, KSN Gerbangkertosusilo, dan KSN Kedungsepur.
2. Telah terbit 6 Peraturan Menteri KP KP KSNT PPKT (Pulau Nipa, Klater Maratua, Pulau Senua, Pulau Rusa dan Raya, Pulau Berhala dan Klaster Anambas).

Gambar 60. | Proses Kegiatan Penataan Ruang Laut

3. Telah terbit 9 Peraturan Presiden Rencana Zonasi KAW (Selat Makassar, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Teluk Tomini, Teluk Bone, Laut Natuna – Natuna Utara, Laut Maluku, Selat Malaka, Laut Flores.
4. 28 Peraturan Rencana Zonasi RZWP3K dan 12 Peraturan Daerah Integrasi (Sulawesi Selatan, Papua Barat, Jawa Barat, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Jambi, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Bengkulu, DIY dan Papua).

Realisasi kemajuan pelaksanaan dalam rangka mendukung indikator kinerja berupa Penyusunan Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Penyusunan Rencana Zonasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 36. | Capaian Penyusunan Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Penyusunan Rencana Zonasi

No.	Kegiatan	Target lokasi	Realisasi Tahun 2023
1.	Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW)	1. Laut Barat Sumatera	Dokumen Final
		2. Laut Utara Papua	
2.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)	3. Batulicin	Dokumen Final
		4. Timika	
		5. Goa Kwandang	
		6. Pare Pare	

No.	Kegiatan	Target lokasi	Realisasi Tahun 2023
3.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil/Terluar (RZ KSNT PPKT)	7. Klaster Sabu Raijua (Pulau Sabu)	Dokumen Final
		8. Klaster Sabu Raijua (Pulau Dana)	
		9. Klaster Wetar (Pulau Wetar)	Dokumen Final
		10. Klaster Wetar (Pulau Liran)	
		11. Klaster Maluku (Pulau Marsela)	
		12. Pulau Larat	Dokumen Final
		13. Pulau Miangas	Dokumen Final
		14. Pulau Intata	Dokumen Final
		15. Pulau Kakarotan	
		16. Pulau Marampit	
		17. Pulau Kabaruan	Dokumen Final
		18. Pulau Makalehi	Dokumen Final
		19. Pulau Mantehage	
		20. Pulau Alor	Dokumen Final
4.	Kawasan (Provinsi) yang di Fasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	21. Persetujuan Teknis (Pertek) Sulawesi Barat	Dokumen Peraturan Teknis
		22. Persetujuan Teknis (Pertek) Bengkulu	
		23. Persetujuan Teknis (Pertek) Kalimantan Selatan	
		24. Persetujuan Teknis (Pertek) Sulawesi Utara	
		25. Persetujuan Teknis (Pertek) NTT	
		26. Persetujuan Teknis (Pertek) Sumatera Utara	
		27. Lintas Sektor (Linsek) Sulawesi Tengah	Perda Integrasi di Riau, Jambi, Kalimantan Timur, Papua
		28. Lintas Sektor (Linsek) Jambi	
		29. Lintas Sektor (Linsek) Kalimantan Timur	
		30. Lintas Sektor (Linsek) Papua Barat	
5.	Dokumen Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)	31. Wilayah NKRI	Dokumen Integrasi Materi Teknis Ruang Laut dengan RTRWN
6.	Perairan KSNT Non PPKT yang memiliki Rencana Zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Kawasan)	32. Belitung	Draft Ranperpres RZ KSNT Non PPKT Belitung

Tabel 37. | Capaian Tenaga Kerja yang Terlibat

Sasaran Strategis 5. Tata Kelola SDKP bertanggung jawab

IK 11. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)

Realisasi 2020-2022			2023				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
14	13	34	32	32	100.00%	-5.88	32	100.00%	21	-

Target Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Tahun 2023 adalah 32 kawasan dengan realisasi 32 atau mencapai 100%. Secara kumulatif target Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir hingga Tahun 2024 adalah 102 kawasan, sehingga sampai dengan Tahun 2023, telah menyelesaikan sebanyak 93 kawasan atau 91,18 % dari target akhir sebesar 102.

Selanjutnya, untuk capaian Indikator Kinerja berupa Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir pada Tahun 2023 disajikan pada Tabel 37 :

Realisasi Tahun 2023 sebanyak 32 kawasan terdiri dari 31 dokumen final dan 1 *draft* perpres, dengan rincian sebagai berikut:

1. Laut Barat Sumatera (Dokumen Final Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW))
2. Laut Utara Papua (Dokumen Final RZ KAW)
3. Batulicin (Dokumen Final Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN))
4. Timika (Dokumen Final RZ KSN)
5. Pare-pare (Dokumen Final RZ KSN)
6. Goa Kwandang (Dokumen Final RZ KSN)
7. Pulau Sabu (Dokumen Final RZ KSNT PPKT)
8. Pulau Dana (Dokumen Final RZ KSNT PPKT)
9. Pulau Alor (Dokumen Final RZ KSNT PPKT)
10. Pulau Miangas (Dokumen Final RZ KSNT PPKT)
11. Pulau Intata (Dokumen Final RZ KSNT PPKT)
12. Pulau Kakarotan (Dokumen Final RZ KSNT PPKT)
13. Pulau Marampit (Dokumen Final RZ KSNT PPKT)
14. Pulau Kabaruan (Dokumen Final RZ KSNT PPKT)
15. Pulau Makalehi (Dokumen Final RZ KSNT PPKT)

16. Pulau Mantehage (Dokumen Final RZ KSNT PPKT)
17. Pulau Wetar (Dokumen Final RZ KSNT PPKT)
18. Pulau Liran (Dokumen Final RZ KSNT PPKT)
19. Pulau Larat (Dokumen Final RZ KSNT PPKT)
20. Pulau Marsela (Dokumen Final RZ KSNT PPKT)
21. Sulawesi Barat (Dokumen Persetujuan Teknis)
22. Bengkulu (Dokumen Persetujuan Teknis)
23. Kalimantan Selatan (Dokumen Persetujuan Teknis)
24. Sulawesi Utara (Dokumen Persetujuan Teknis)
25. Nusa Tenggara Timur (Dokumen Persetujuan Teknis)
26. Sumatera Utara (Dokumen Persetujuan Teknis)
27. Sulawesi Tengah (Lintas Sektor)
28. Jambi (Lintas Sektor)
29. Kalimantan Timur (Lintas Sektor)
30. Papua Barat (Lintas Sektor)
31. Draft Ranperpres Belitung (Dokumen Rencana Zonasi KSNT Non-PPKT yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan)
32. Dokumen Integrasi Penyusunan Materi Teknis Ruang Laut dan Integrasi PP RTRWN

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023 ditunjang oleh faktor adanya komitmen dan peran serta atau partisipasi aktif para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam rangkaian pelaksanaan penyusunan Rencana Zonasi termasuk diantaranya rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait. Kendala yang dihadapi adalah pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan waktu dari Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait dan Pemerintah Daerah. Guna mengantisipasi kendala tersebut, telah dilaksanakan kegiatan, antara lain:

1. Melakukan koordinasi yang lebih intens dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah yang terllibat dalam penyusunan dokumen rencana zonasi.
2. Memperhatikan kualifikasi tenaga ahli yang membantu penyusunan dokumen final rencana zonasi.
3. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan.

Upaya efisiensi penggunaan sumberdaya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.

Program/Kegiatan yang Menunjang Indikator Kinerja

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan dalam upaya mencapai target pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1.Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW)

Penyusunan dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) pada Tahun 2023 terdiri dari 2 dokumen, yaitu RZ KAW Laut Barat Sumatera dan RZ KAW Laut Utara Papua, dengan capaian yaitu tersusunnya dokumen final. Selanjutnya, sampai Tahun 2023, terdapat dua RZ KAW yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) yaitu : Perpres Nomor 83 Tahun 2020 tentang RZ KAW Selat Makassar, Perpres Nomor 83 Tahun 2020 tentang RZ KAW Selat Makassar, Perpres Nomor 03 Tahun 2022 tentang RZ KAW Laut Jawa, Perpres Nomor 04 Tahun 2022 tentang RZ KAW Laut Sulawesi, Perpres Nomor 05 Tahun 2022 tentang RZ KAW Teluk Tomini, Perpres Nomor 06 Tahun 2022 tentang RZ KAW Teluk Bone, Perpres Nomor 40 Tahun 2020 tentang RZ KAW Laut Maluku, Perpres Nomor 41 Tahun 2022 tentang RZ KAW Laut Natuna-Natuna Utara, Perpres Nomor 29 Tahun 2023 tentang

Gambar 61. | Mandat KKP berdasarkan PP 21 tentang PenyeeInggaraan Penataan Ruang

RZ KAW Laut Flores, Perpres Nomor 30 Tahun 2023 tentang RZ KAW Selat Malaka.

Kegiatan pendukung yang sudah dilaksanakan antara lain harmonisasi rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KAW Laut Banda dan RZ KAW Laut Bali, Konsultasi Publik II Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) Laut Barat Sumatera – Bagian Selatan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2023 di Lampung, Penyusunan Dokumen Final RZ KAW T.A 2023, Pembahasan Kedudukan Rencana Zonasi KAW, KSN dan KSNT dalam RTRWN Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN). Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Sedangkan, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional. Untuk melindungi sumberdaya dan lingkungan laut, serta memanfaatkan potensi sumberdaya perairan di KSN, perlu disusun Materi Teknis Ruang Perairan Rencana Tata Ruang (RTR) KSN. Penyusunan Materi Teknis (Matek) tersebut juga sesuai dengan amanat UU Nomor 32/2014 tentang Kelautan dan PP Nomor 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta arahan kebijakan maritim dan kelautan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024.

Selanjutnya, berdasarkan amanat Perpu No 2/2022 tentang Cipta Kerja, UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, dan PP Nomor 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka materi teknis tersebut akan diintegrasikan ke dalam RTR KSN dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres),

target capaian kinerja Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan RTR KSN pada Tahun 2023 adalah 4 lokasi yaitu: (1) KSN Pare-pare; (2) KSN Timika; (3) KSN Batulicin; (4) KSN Gopandang (Gorontalo-Paguyaman-Kwandang).

Rangkaian kegiatan penyusunan Materi Teknis RZ KSN yaitu Koordinasi Persiapan Konsultasi Publik RZ KSN Gopandang, Konsultasi Publik II Penyusunan Materi Teknis Perairan RTR KSN Kawasan Pare-pare, Konsultasi

Gambar 62. | Status Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah

Gambar 63. | Sebaran KSN Ruang Laut

Publik II Penyusunan materi teknis RTR RZ KSN Kawasan Batulicin dan Pembahasan Penajaman RTR KSN Sudut Kepentingan Ekonomi, Konsultasi Publik Materi Teknis Ruang Perairan RTR KSN Timika.

Target Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan RZ KSNT PPKT pada Tahun 2023 adalah 14 PPKT yang dikelompokkan dalam 9 kluster yaitu KSNT PPKT Pulau Sabu dan Pulau Dana, KSNT PPKT Pulau Alor, KSNT PPKT Pulau Miangas, KSNT PPKT Pulau Intata, Pulau Kakarotan dan Pulau Marampit, KSNT PPKT Pulau Kabaruan, KSNT PPKT Pulau Makalehi dan Pulau Mantehage, KSNT PPKT Pulau Wetar dan Pulau Liran, KSNT PPKT Pulau Larat dan KSNT PPKT Pulau Marsela. Capaian kinerja Penyusunan Materi Teknis Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) PPKT yaitu tersusunnya dokumen final dengan kegiatan pendukung antara lain Konsultasi Publik I Penyusunan RZ KSNT PPKT, Diskusi Tematik Kependudukan RZ KSNT PPKT, Diskusi Tematik RZ KSNT Kawasan Pare-pare, Konsultasi Publik II Penyusunan RZ KSNT PPKT, Konsultasi Publik II Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencakup Pulau Alor, Pulau Sabu dan Dana, Sosialisasi Materi Teknis Ruang Perairan RZ KSNT PPKT Pulau Nuhu Yut dan Konsultasi Publik II Penyusunan RZ KSNT PPKT Klaster Maluku.

2. Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)

Pada Tahun 2023 KKP memiliki target fasilitasi Integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk 10 Provinsi. Target Persetujuan Teknis (Pertek) yaitu Sulawesi Barat, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, NTT. Target Lintas Sektor (Linsek): Sulawesi Tengah, Jambi, Kalimantan Timur dan Papua barat.

Sampai telah diterbitkan Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap Materi Teknis Perairan Pesisir untuk 6 Provinsi dan tersusunnya Perda integrasi di Sulawesi Tengah, Jambi, Kalimantan Timur dan Papua Barat. Adapun kegiatan pendukung untuk mencapai target yang direncanakan antara lain:

a. Tindaklanjut Pembahasan Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Nasional Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir (RZWP-3-K)
b. Rapat Kerja Teknis Nasional dalam rangka Integrasi RZWP-3-K ke dalam RTRW Provinsi.
c. Asistensi Integrasi RZWP3K-RTRW Jawa Tengah.
d. Asistensi Pengintegrasian RZWP-3-K ke dalam RTRW Provinsi DKI Jakarta.
e. Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah dalam rangka Percepatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah.
f. Peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka Integrasi RZWP-3-K dan RTRW Provinsi.

3. Dokumen Materi Teknis Ruang Laut yang akan diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Pada Tahun 2023 dilakukan proses integrasi antara materi teknis ruang laut yang telah disusun oleh KKP dengan materi teknis ruang darat yang telah disusun oleh Kementerian ATR/BPN. Selanjutnya, proses integrasi ini dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Capaian kegiatan Tahun 2023 yaitu Dokumen Final Integrasi RTRL dan RTRWN. Guna mencapai target yang telah ditetapkan, maka dilakukan

Tabel 38. | Perkembangan Pertek dan Matek Perairan Pesisir MKP (RZWP-3-K)

No.	Kegiatan		Target lokasi		Realisasi Tahun 2023
1	Aceh	1	Sulawesi Selatan	1	Papua Selatan
2	Riau	2	Papua Barat	2	Papua Tengah
3	Kepulauan Riau	3	Jawa Barat	3	Papua Barat Daya
4	Kepulauan Bangka Belitung	4	Banten		
5	Kalimantan Barat	5	Bali		
6	Kalimantan Tengah	6	Kalimantan Timur		
7	DKI Jakarta	7	Jambi		
8	Gorontalo	8	Sulawesi Tengah		
9	Sulawesi Tenggara	9	Kalimantan Selatan		
10	Sumatera Selatan	10	Bengkulu		
11	NTB	11	DI Yogyakarta		
12	Sumatera Barat	12	Papua		
13	Jawa Timur				
14	Maluku				
15	Lampung				
16	Maluku Utara				
17	Jawa Tengah				
18	Sumatera Utara				
19	Sulawesi Barat				
20	Sulawesi Utara				
21	Kalimantan Utara				
22	NTT				

pelaksanaan kegiatan pendukung yang telah diselenggarakan, antara lain:

a. FGD Penyusunan Matek Ruang Laut RTRWN terkait Pembahasan Tujuan, Kebijakan, dan Strategi.
b. FGD Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Muatan Ruang Laut Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
c. Pembahasan Kriteria dan Usulan Lokasi KSN serta Lokasi Kawasan Budi Daya yang memiliki Nilai Strategis Nasional dalam Integrasi RTRWN.
d. Pembahasan Kedudukan Rencana Zonasi KAW, KSN dan KSNT dalam RTRWN.

4.Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu non Pulau-Pulau Kecil/ Terluar (RZ KSNT Non PPKT)

Penyusunan RZ KSNT Non PPKT baru dimulai pada Tahun 2022 dengan menyusun RZ KSNT Non PPKT Geopark Belitung. Taman bumi atau Geopark merupakan sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai. Nilai tersebut berkaitan dengan aspek Warisan Geologi (*geoheritage*), keragaman geologi (*geodiversity*) dan keragaman budaya (*culture diversity*). Selanjutnya, Geopark dikelola dalam rangka keperluan untuk konservasi, edukasi dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Dalam prakteknya diperlukan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungannya. Kegiatan penyusunan RZ KSN Non PPKT terus berprogres dan telah melaksanakan beberapa aktivitas guna mendukung capaian indikator tersebut di atas, antara lain pembahasan *draft* naskah buku populer RZ KSNT Geopark Belitong.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Dalam rangka mencapai target Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Tahun 2024, KKP berkomitemn untuk melakukan praktik baik yang telah dilakukan di tahun 2023 antara lain pembahasan ranperpres antar K/L, penyusunan dokumen awal rencana zonasi, konsultasi publik dan penyusunan dokumen antara, reviu dan upadating materi teknis ruang perairan KSN, konsultasi publik RZ KSNT Non PPKT, penyusunan dokumen antara, dan penyusunan dokumen final

Gambar 64. | Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

SS • 6

Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing

IK 12. Produksi Perikanan

Definisi

Produksi perikanan merupakan jumlah produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Jumlah hasil produksi perikanan budidaya merupakan produksi yang dihasilkan oleh seluruh kabupaten/kota yang meliputi perikanan tawar, payau dan laut (termasuk rumput laut), sedangkan untuk jumlah produksi perikanan tangkap terdiri dari produksi perikanan tangkap laut dan perairan umum daratan. Target produksi perikanan Tahun 2023 sebesar 28,22 juta ton terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 8,26 juta ton, ikan perikanan budidaya sebesar 10,58 juta ton dan rumput laut sebesar 9,48 juta ton.

Analisis Capaian

Produksi perikanan budidaya untuk komoditas ikan mengalami peningkatan sebesar 11,89 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 (*y-on-y*) sebesar 5,54 juta ton. Produksi perikanan budidaya untuk komoditas rumput laut mengalami peningkatan sebesar 16,60 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 (*y-on-y*) sebesar 9,23 juta ton. Perikanan tangkap laut berkontribusi terhadap pertumbuhan capaian produksi perikanan sebesar 4,5 persen yaitu sebesar 6,94 juta ton di tahun 2022 menjadi 7,25 juta ton di tahun 2023. Sedangkan perikanan tangkap yang berasal dari perairan umum daratan memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 12,68 persen yaitu sebesar 0,46 juta ton di tahun 2022 menjadi 0,52 juta ton di tahun 2023.

*: Angka sangat sementara

Produksi Perikanan (juta ton)
Tahun 2023

Capaian produksi perikanan Tahun 2023 sebesar 24,74 juta ton (angka sangat sementara) atau mencapai 87,67 persen dari target Tahun 2023 sebesar 28,22 juta ton. Meskipun belum mencapai target namun produksi perikanan tumbuh positif sebesar 11,55 persen dibanding produksi perikanan Tahun 2022 sebesar 22,18 juta ton. Produksi perikanan sebesar 24,74 juta ton terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 7,77 juta ton (perikanan tangkap laut sebesar 7,25 juta ton dan perikanan tangkap umum sebesar 0,52 juta ton) dan perikanan budidaya sebesar 16,97 juta ton terdiri dari rumput laut sebesar 10,77 dan ikan hasil perikanan budidaya sebesar 6,20 juta ton.

Tabel 39. | Capaian Produksi Perikanan Tahun 2023

Sasaran Strategis 6. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing

IK 12. Produksi Perikanan (juta ton)

Realisasi 2018-2022					2023				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
23,05	22,76	21,83	21,87	22,18	28,22	24,74*	87,67%	11,56	31,01	79,78%	32,75	75,54%

Sumber: satudatakkp (2023)
** : Angka sangat sementara*

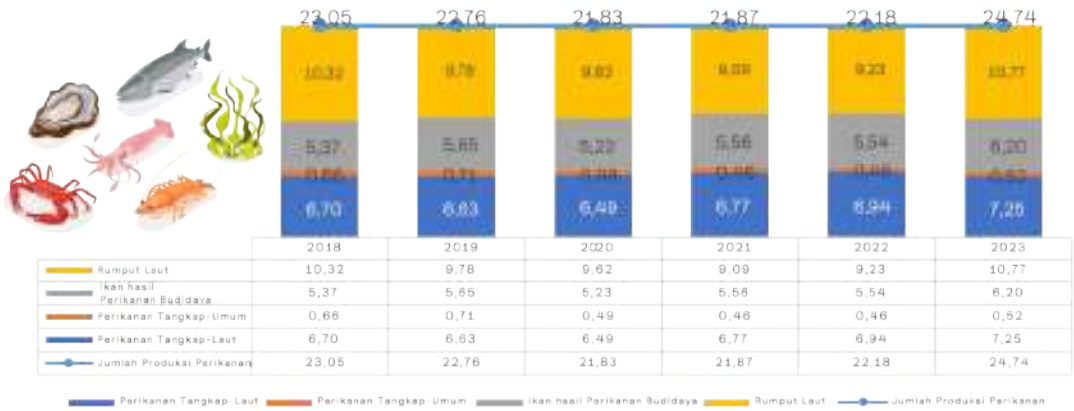

Gambar 65. | Grafik Produksi Perikanan Tahun 2018-2023

Rincian produksi perikanann per komoditas disajikan pada **Tabel 40.**

Tabel 40. | Capaian Produksi Perikanan Tahun 2023

Komoditas	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
1. Perikanan Tangkap	**7.361.121**	**7.335.322**	**6.989.090**	**7.224.501**	**7.399.551**	**7.770.100**
Perikanan Tangkap-Laut	6.701.834	6.630.123	6.494.140	6.767.565	6.936.581	7.248.410
Udang	233.713	199.440	206.765	247.502	250.008	293.136
Tuna	409.016	349.530	300.803	359.132	354.692	319.167
Cakalang	510.686	527.175	468.269	432.845	472.942	599.306

Komoditas	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Tongkol	630.062	545.072	581.074	593.906	635.282	654.216
Lainnya	4.918.357	5.008.907	4.937.229	5.134.180	5.223.657	5.382.585
Perikanan Tangkap-Umum	659.287	705.199	494.950	456.936	462.970	521.690
Udang	39.954	46.920	18.900	17.180	17.321	23.394
Ikan	494.371	658.279	476.050			
Lainnya						
2. Perikanan Budidaya	**15.688.734**	**15.425.625**	**14.845.015**	**14.648.310**	**14.776.057**	**16.967.518**
Bandeng	875.592	824.239	811.883	780.763	779.706	852.216
Gurami	173.345	190.389	152.669	149.170	159.572	195.353
Ikan Lainnya	358.249	343.368	311.331	337.196	355.632	526.267
Kakap	9.583	7.228	5.418	8.464	8.642	8.701
Kerapu	16.414	13.829	9.478	2.296	12.240	30.934
Lele	944.779	1.088.945	993.768	1.041.422	1.101.625	1.137.807
Ikan Mas	534.215	620.831	560.669	651.238	508.724	533.646
Nila	1.171.236	1.317.561	1.172.633	1.300.529	1.356.654	1.364.436
Patin	373.262	380.130	327.146	332.023	340.444	431.381
Rumput Laut	10.320.202	9.775.986	9.618.421	9.092.031	9.234.268	10.766.778
Udang	911.857	863.119	881.599	953.177	918.550	1.120.000
Jumlah Produksi Perikanan	23.049.855	22.760.947	21.834.105	21.872.810	22.175.608	24.737.618

Sumber: satudatakkp (2023)
** : Angka sangat sementara*

1. Produksi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap terdiri dari produksi yang di daratkan di laut dan perairan darat. Produksi perikanan tangkap berasal dari pelabuhan perikanan dan hasil agregasi kabupaten/kota menggunakan metode sampling. Produksi perikanan tangkap Tahun 2023 sebesar 7,77 juta ton atau mencapai 95,22% dari target Tahun 2023 sebesar 8,16 juta ton. Volume produksi perikanan tangkap berasal dari 93,29% produksi perikanan tangkap di laut yaitu sebesar 7,25 juta ton dan sisanya sebesar 6,71% atau 0,52 juta ton berasal dari perairan darat. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya produksi perikanan tangkap yaitu : (1) peningkatan biaya menuju hari besar keagamaan, (2) cuaca dan gelombang tinggi di beberapa daerah di Indonesia pada akhir Tahun 2023, (3) penurunan konsumsi ikan dan kebiasaan di beberapa daerah yang tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan selama natal dan tahun baru yang juga menyebabkan turunnya jumlah *trip* penangkapan.

2. Produksi Perikanan Budidaya

Capaian produksi perikanan budidaya pada Tahun 2023 sebesar 16,97 juta ton dan jika dibandingkan dengan target pada Tahun 2023 yakni sebesar 21,58 juta ton maka capaian produksi perikanan budidaya adalah sebesar 78,63 persen. Produksi perikanan budidaya Tahun 2023 naik jika dibandingkan dengan produksi Tahun 2022 sebesar 14,83 persen. Jika dilihat selama periode 2018 – 2023, volume produksi perikanan budidaya selama waktu tersebut mengalami sedikit kenaikan dengan rata-rata per Tahunnya naik sebesar 2,65 persen.

Analisis capaian produksi perikanan budidaya per jenis komoditas dijelaskan sebagai berikut:

a. Udang

Perkembangan produksi udang nasional Tahun 2019 - 2023 mengalami peningkatan dengan peningkatan rata-rata sebesar 7,14% per tahunnya. Pada Tahun 2023 produksi udang mencapai target sebesar 78,27%., tidak tercapainya target produksi udang ini terutama disebabkan karena terhambatnya ekspor udang Indonesia karena ada penolakan komoditas ekspor udang di pasar USA, akan tetapi produksi masih tetap meningkat dibandingkan Tahun 2022 seiring dengan mulai bergulirnya program terobosan terhadap budidaya udang yang diinisiasi oleh KKP. KKP telah dan terus mengambil langkah nyata dalam upaya peningkatan volume dan nilai produksi udang adalah (i)Rehabilitasi saluran dan infrastruktur tambak untuk mengembalikan performance tambak sesuai standar kelayakan teknis; (ii) Bantuan sarana budidaya udang yang merupakan stimulus bagi pembudidaya untuk meningkatkan usaha budidaya udang; (iii) Melakukan berbagai kerjasama lintas sektoral dan *stakeholders* lain untuk mempermudah akses baik infrastruktur, sarana dan prasarana budidaya, serta akses pasar dan permodalan; (iv) Pengembangan pola budidaya berbasis manajemen kawasan/ klaster; (v) Penguatan kelembagaan dan pengembangan kemitraan usaha; (vi) Peningkatan input teknologi budidaya yang aplikatif, efektif dan efisien berbasis wawasan

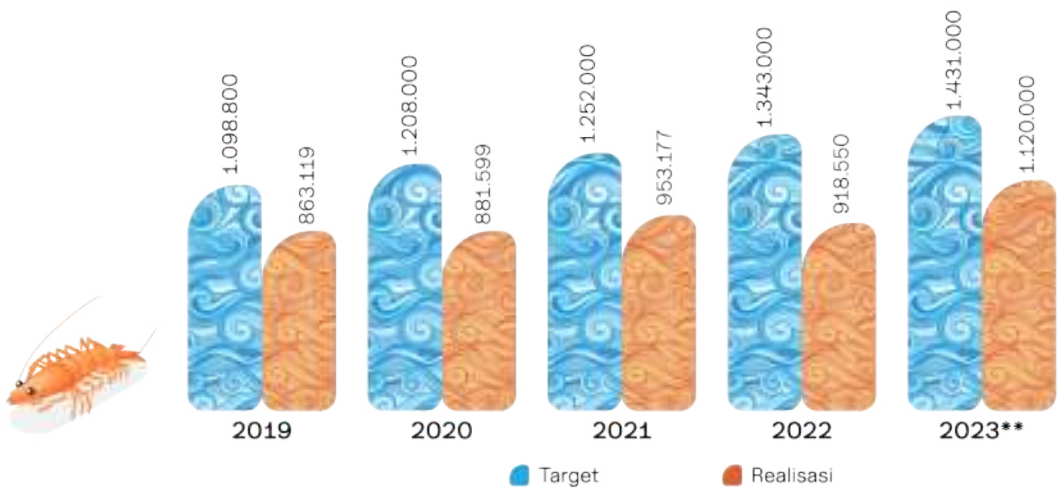

Gambar 66. | Produksi Udang Nasional Tahun 2019 - 2023

lingkungan; (vii) Pendampingan teknologi secara intensif dan masif terhadap pelaku usaha budidaya udang.

b. Kerapu

Trend produksi ikan kerapu dari Tahun 2019 - 2023 menunjukkan kinerja yang cukup positif. Hal ini bisa diihat dari trend produksinya yang cenderung naik dari Tahun 2020. Produksi ikan kerapu pada Tahun 2023 meningkat dari Tahun 2022 mencapai 30.934 ton atau tercapai targetnya sebesar 162,81% dari target sebesar 19.000 ton. Tercapainya target dan peningkatan produksi di Tahun 2023 mengindikasikan kebangkitan budidaya kerapu dapat dilihat dari semakin banyak minat masyarakat untuk membudidayakan dan negara-negara pengimpor kerapu hidup sudah mulai membuka kran impornya. Untuk lebih memacu peningkatan produksi kerapu ini berbagai upaya telah dilakukan oleh KKP antara lain (i) Penyediaan benih ikan kerapu yang bermutu di UPT dan unit pembenihan skala rumah tangga (HSRT); dan (ii) Adanya kebijakan program bantuan KJA budidaya ikan kerapu di beberapa daerah potensial yang memicu perkembangan kawasan budidaya kerapu di beberapa daerah potensial.

c. Kakap

Capaian produksi ikan kakap dari Tahun 2019 - 2023 sedikit mengalami kenaikan dengan kenaikan rata-rata sebesar 6,82% per tahun. Kakap merupakan salah satu jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang cukup digemari sebagai ikan konsumsi sehingga dengan sedikitnya produksi menyebabkan harga ikan kakap cenderung naik. Capaian produksi ikan kakap pada Tahun 2023 mencapai 66,93% dari produksi yang ditargetkan. Ketidaktercapaian target produksi ini lebih banyak karena ketersediaan benih ikan kakap yang terbatas. Selain itu semakin banyak masyarakat yang mengusahakan tambak intensif sehingga lahan tambak tradisional yang hasil sampingannya berupa ikan kakap semakin sedikit dan secara tidak langsung berdampak pada produksi ikan kakap itu sendiri. Untuk lebih meningkatkan produksi ikan kakap KKP telah mengalokasikan

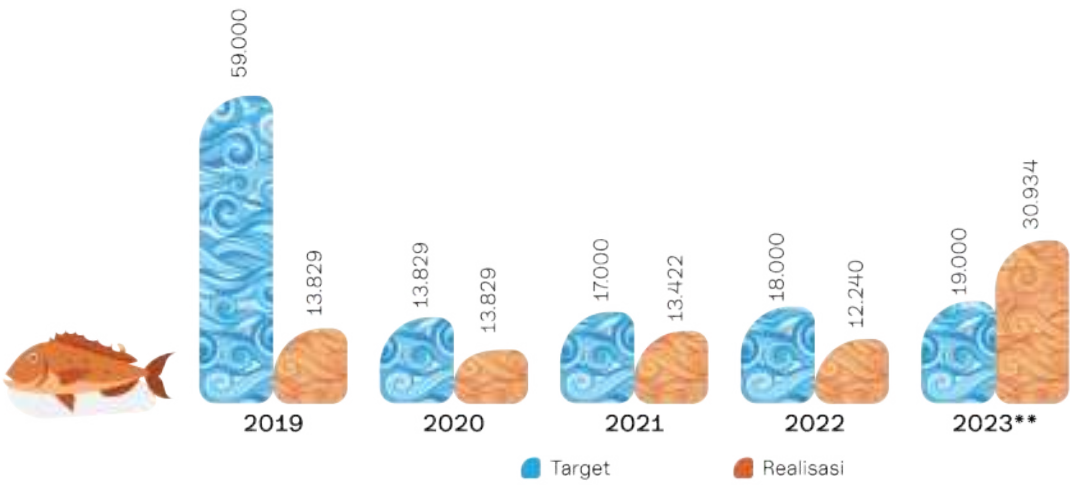

Gambar 67. | Produksi Kerapu Nasional Tahun 2019 - 2023

bantuan berupa KJA laut dan pengembangan benih kakap di beberapa UPT pusat untuk mendukung budidaya kakap di KJA laut.

d. Bandeng

Perkembangan produksi bandeng dari Tahun 2019 - 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,96%. Sempat terjadi penurunan pada Tahun 2020 s.d 2022 karena pandemi dan meningkat kembali pada Tahun 2023. Namun Selama kurun waktu Tahun 2019 - 2023 target produksi bandeng tidak tercapai. Ketidaktercapaian ini disebabkan oleh terbatasnya sentra produksi benih bandeng walaupun berbagai teknologi diversifikasi olahan bandeng yang menyebabkan minat

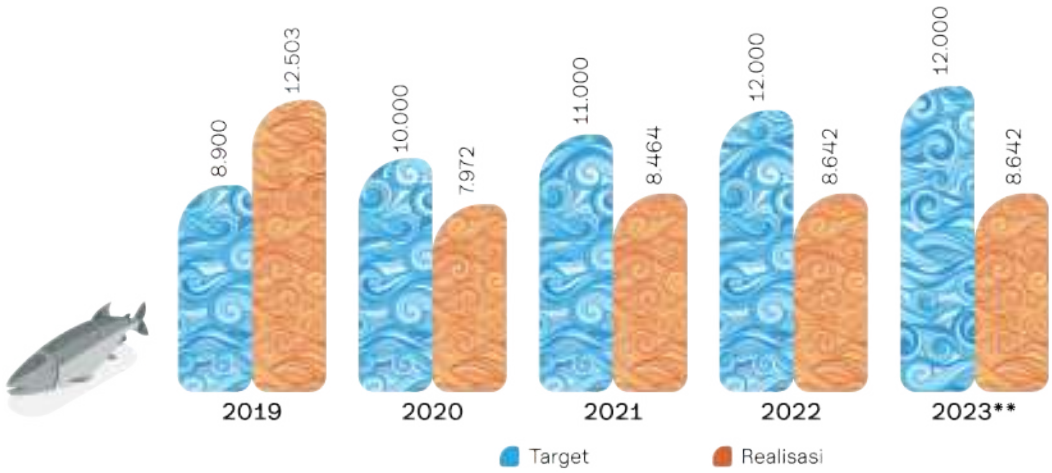

Gambar 68. | Produksi Kakap Nasional Tahun 2019 - 2023

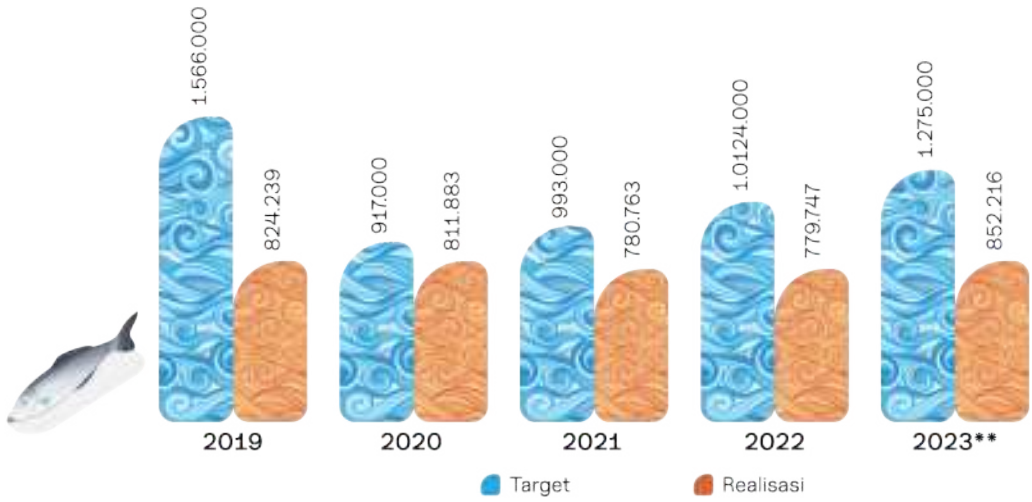

Gambar 69. | Produksi Bandeng Nasional Tahun 2019 - 2023

masyarakat akan produk bandeng tetap tinggi. Indikasi masih adanya ekspor nener juga menyebabkan ketersediaan nener dalam negeri semakin berkurang sehingga semakin sulit untuk mencapai angka yang ditargetkan. Untuk kembali dapat meningkatkan produksi bandeng dan mencapai target produksinya, upaya yang telah dilakukan KKP dengan beberapa langkah kebijakan strategis yang akan dilakukan antara lain : a) Membentuk model penerapan industrialisasi bandeng sebagai upaya dalam rangka menumbuh kembangkan usaha budidaya bandeng pada kawasan-kawasan potensial; b) Pengembangan *broodstock* bandeng dalam upaya pemenuhan kebutuhan benih berkualitas di sentral-sentral produksi; c) Pengembangan *input* teknologi yang aplikatif, efektif dan efisien berbasis wawasan lingkungan; d) Menggandeng Asosiasi Pelaku Usaha Bandeng Indonesia (ASPUBI), yang dalam hal ini diposisikan sebagai partner Pemerintah khususnya dalam mendorong implementasi kebijakan industrialisasi bandeng. Langkah-langkah di atas akan terus di dorong sehingga capaian volume dan nilai produksi periode 2020-2024 akan mampu tercapai.

e. Patin

Produksi ikan patin dari Tahun 2019-2023 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 4,17%. Produksi pada kurun waktu tersebut masih belum mencapai target tahunan yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan capaian pada Tahun 2023 terhadap target sebesar 53,86%. Belum tercapainya produksi ikan patin di Tahun 2023 antara lain disebabkan karena masih sulitnya memasarkan ikan patin mengingat ikan patin merupakan ikan yang belum bisa diterima oleh semua etnik di Indonesia. Ikan patin banyak disukai di Kalimantan dan Sumatera bagian Selatan sementara di Pulau Jawa penduduknya kurang menyukai ikan patin. Disisi lain permasalahan tingginya biaya produksi akibat tingginya harga pakan pabrikan tidak sebanding dengan harga yang berlaku di pasaran, sehingga secara ekonomis tingkat efisiensi kurang. Untuk itu perlu dilakukan

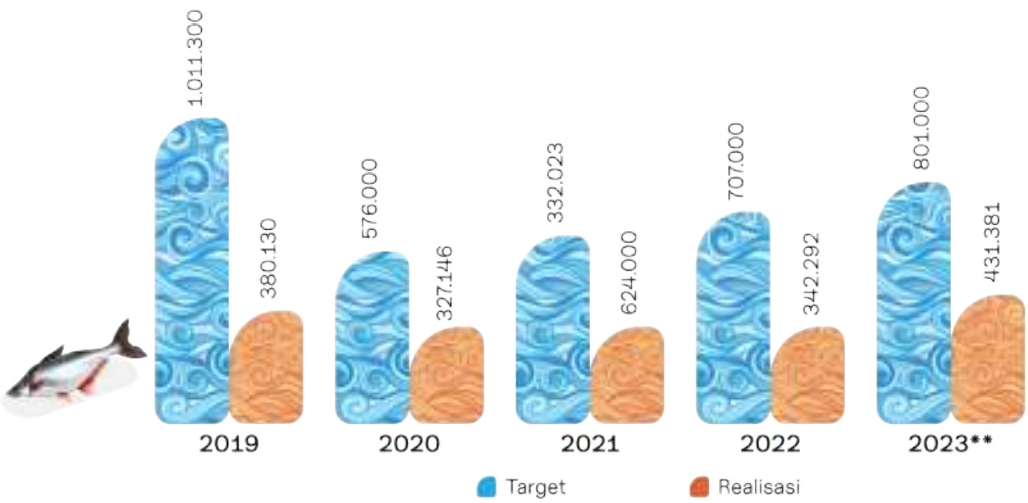

Gambar 70. | Produksi Patin Nasional Tahun 2019 - 2023

upaya mendorong pengembangan budidaya ikan patin melalui kerjasama sinergi, baik lintas sektoral, swasta maupun *stakeholders* lain, untuk menjamin ketercapaian produksi ikan patin di tahun kedepan. Kerjasama tersebut difokuskan untuk menciptakan peluang pasar yang lebih luas terutama pasar luar negeri seperti Arab Saudi dan daerah Timur Tengah lainnya, pengembangan input teknologi yang aplikatif, efektif dan efisien, pengembangan kawasan budidaya ikan patin terintegrasi, serta peningkatan nilai tambah produk melalui diversifikasi produk olahan berbahan baku ikan patin dan pengembangan unit pengolahan ikan patin. Melalui upaya di atas, maka secara langsung akan mampu memberikan jaminan terhadap jalannya siklus bisnis yang positif dan berkesinambungan dan mendorong peningkatan konsumsi ikan patin terutama daerah di luar Sumatera dan Kalimantan.

f. Nila

Produksi ikan nila dari Tahun 2019 - 2023 mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan 1,20 persen meskipun produksi nila sampai dengan Tahun 2023 belum dapat dicapai yang baru tercapai 65,82% dari target Tahun 2023. Peningkatan produksi ikan nila, menunjukkan bahwa terjadi geliat pembudidayaan ikan nila di daerah. Penyebab tidak tercapainya target volume produksi pada kurun waktu tersebut, antara lain dikarenakan secara umum kapasitas usaha yang dijalankan pembudidaya masih dalam skala kecil, dan kegiatan rasionalisasi jumlah KJA baik di sungai atau danau turut mempengaruhi capaian produksi ikan nila. Rencana aksi dalam upaya pencapaian kinerja antara lain melalui pengembangan budidaya ikan nila melalui intensifikasi dengan bioflok dan running water, pemanfaatan bahan baku lokal untuk pembuatan pakan ikan secara mandiri yang berkualitas, ekstensifikasi pada kawasan potensial serta menciptakan peluang pasar yang lebih luas.

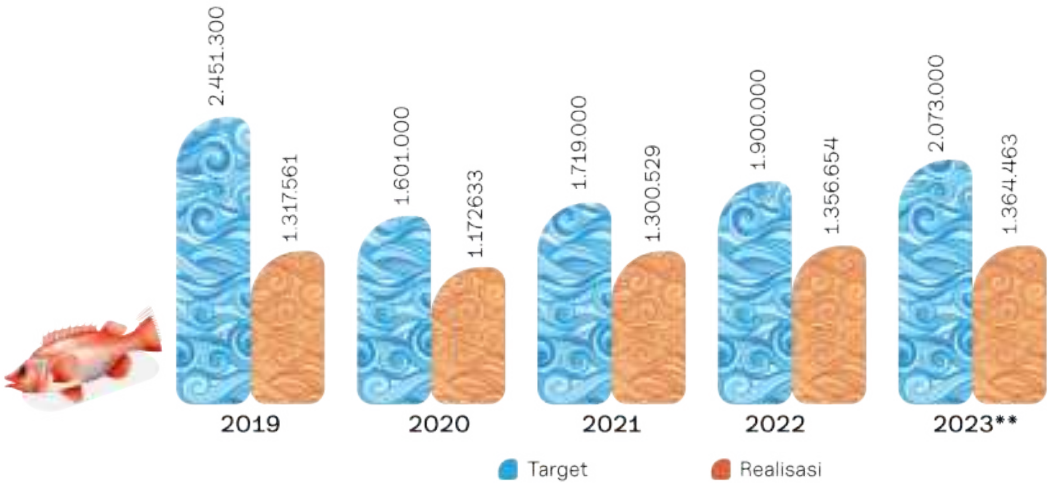

Gambar 71. | Produksi Nila Nasional Tahun 2019 - 2023

g. Ikan Mas

Produksi ikan mas selama Tahun 2019 - 2023 mengalami penurunan sebesar 2,64% dan target produksi belum mencapai target. Belum tercapainya target produksi ikan mas terutama disebabkan merebaknya berbagai penyakit ikan yang menyebabkan tingkat produktifitas menurun. Pencapaian target produksi ikan mas pada beberapa tahun belakangan ini dan ke depan mengalami tantangan dengan adanya kebijakan zero keramba jaring apung secara nyata telah memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan produksi ikan mas. KKP berupaya untuk memenuhi target yang telah ditetapkan melalui beberapa upaya diantaranya intensifikasi melalui pengembangan teknologi budidaya dan nutrisi (pakan) berkualitas berbasis bahan baku lokal, pengembangan kapasitas usaha dengan dukungan penguatan modal bagi usaha skala kecil melalui penguatan kemitraan usaha, perluasan akses pasar dan peningkatan nilai tambah, dan pengembangan budidaya ikan dikombinasikan dengan lahan padi atau minapadi.

h. Lele

Produksi ikan lele menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan peningkatan produksi rata-rata sebesar 1,28%. Produksi ikan lele selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif, namun di Tahun 2021 produksi mulai meningkat mengingat pandemi sudah beralih status menjadi endemi dengan semakin banyak penduduk Indonesia yang mendapat dosis vaksin ketiga, ikan lele yang bisa dibudidayakan dengan mudah ini memiliki satu kekuatan yaitu, memenuhi kebutuhan lokal. Untuk mempertahankan capaian produksi lele, beberapa upaya yang akan dilakukan diantaranya pengembangan teknologi budidaya secara intensifikasi dengan bioflok untuk efisiensi pakan, penggunaan teknologi budidaya ikan lele dengan terpal sebagai upaya efesiensi pemanfaatan lahan, efisiensi pakan melalui bantuan gerakan pakan mandiri, dan pembangunan pabrik pakan guna memenuhi kebutuhan pakan yang berkualitas dan terjangkau.

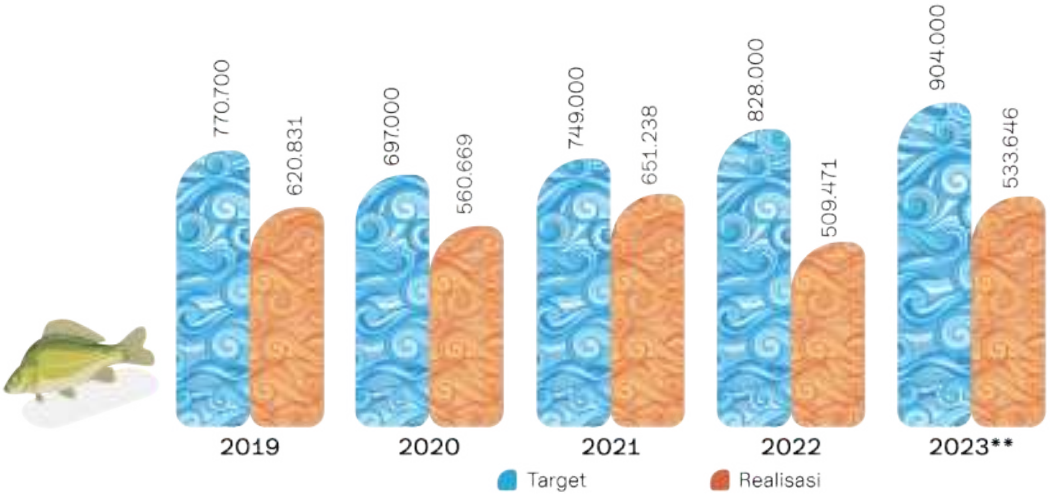

Gambar 72. | Produksi Ikan Mas Nasional Tahun 2019 - 2023

i. Gurame

Produksi gurame Tahun 2019 - 2023 menunjukkan kinerja positif, dengan kenaikan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 1,72%. Produksi gurami Tahun 2023 belum mencapai target produksi dengan capaian sebesar 44,30%. Namun produksi mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan produksi gurami tahun 2022, disebabkan karena nilai ekonomis ikan gurame yang cukup tinggi dan pemasarannya cukup terbuka. Produksi gurame didominasi pada beberapa sentra-sentra produksi yang sudah ada, sedangkan disisi lain kapasitas usaha yang dijalankan tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, hal ini disebabkan karena

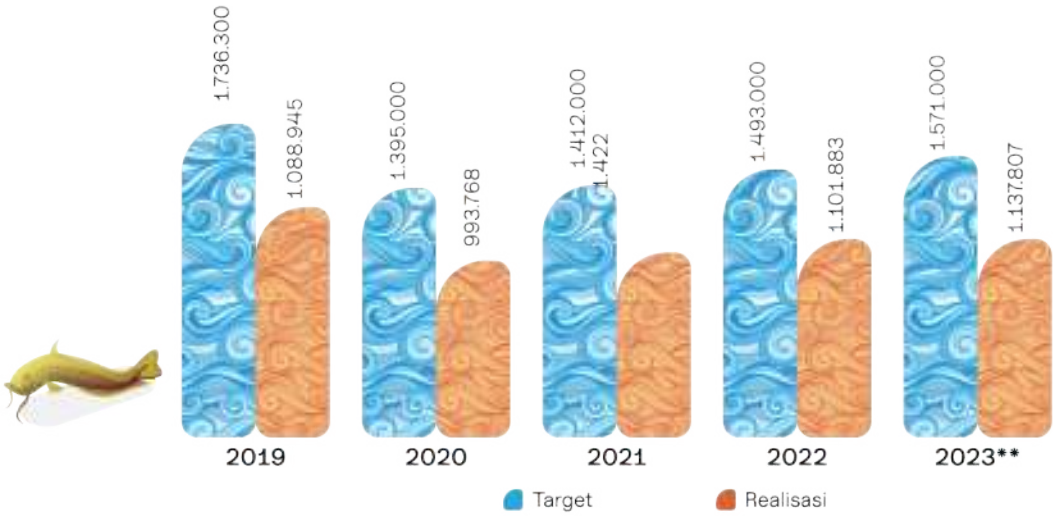

Gambar 73. | Produksi Lele Nasional Tahun 2019 - 2023

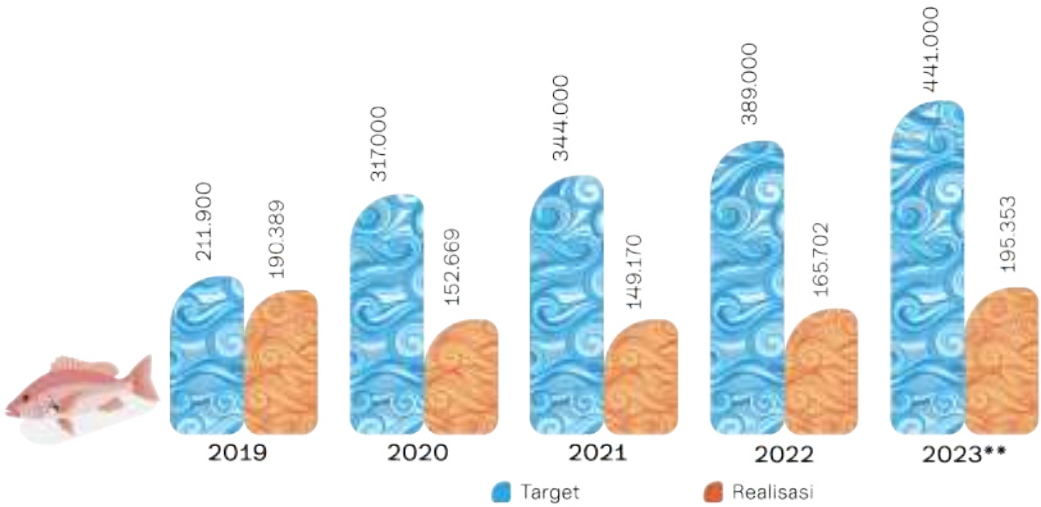

Gambar 74. | Produksi Gurame Nasional Tahun 2019 - 2023

proses produksi budidaya yang cukup lama dan semakin sedikitnya ketersediaan pakan alami untuk gurame disebabkan banyaknya alih fungsi lahan, karena gurame merupakan salah satu ikan yang mengkonsumsi pakan alternatif seperti daun talas ataupun pakan alternatif lainnya. Pengembangan pola usaha berbasis segmentasi merupakan langkah yang tepat karena secara nyata mampu memberikan keuntungan yang cukup signifikan. Percepatan pengembangan kawasan melalui pendekatan pola segmentasi usaha diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk terjun melakukan usaha budidaya gurame.

j. Rumput Laut

Produksi rumput laut memberikan kontribusi yang paling besar terhadap total produksi perikanan budidaya, dimana secara nasional produksi rumput laut memberikan *share* sebesar 63,45 persen terhadap produksi perikanan budidaya. Perkembangan produksi rumput laut dari Tahun 2019 - 2023 menunjukan trend positif dengan rata-rata kenaikan sebesar 2,77 persen. Kenaikan ini disebabkan karena beberapa sentra rumput laut mulai bangkit dengan kualitas bibit yang semakin baik sehingga tahan terhadap kondisi lingkungan, tidak cepat terserang penyakit, dan produksi bibit rumput laut kultur jaringan telah menjangkau seluruh wilayah sentra budidaya rumput laut di Indonesia. Selama 5 tahun terakhir rumput laut tetap sebagai penyumbang utama pada produksi perikanan budidaya. Tingginya pencapaian komoditas rumput laut disebabkan budidaya rumput laut mempunyai masa pemeliharaan yang cukup singkat (45 hari per siklus) sehingga perputaran modal usaha dapat lebih cepat, serta cara budidaya yang mudah. Rumput laut juga cocok dibudidayakan di daerah-daerah dengan curah hujan rendah. Keuntungan lainnya adalah modal kerja yang relatif kecil, penggunaan teknologi yang sederhana, dan peluang pasar yang terbuka lebar mengingat rumput laut merupakan bahan baku untuk beberapa industri, seperti biofuel, agar-agar, karagenan, kosmetik, obat-obatan dan lain-lain. Selain itu, pemerintah juga terus menerus

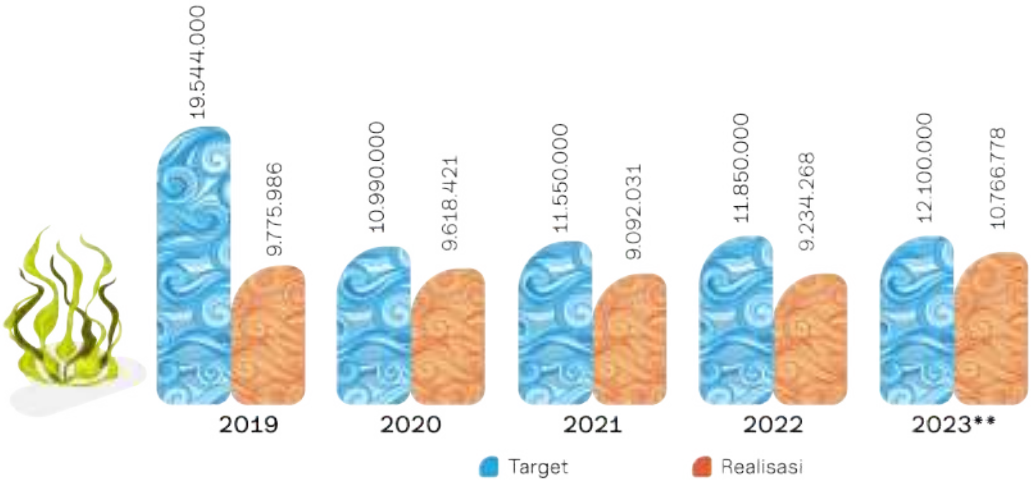

Gambar 75. | Produksi Rumput Laut Nasional Tahun 2019 - 2023

melakukan upaya terobosan diantaranya pengembangan industrialisasi rumput laut di sentra-sentra penghasil rumput laut. Rumput laut Indonesia didominasi spesies *Gracilaria spp* dan *Euchema cottonii.* Namun beberapa beberapa tahun terakhir mulai berkembang komoditas *Euchema spinosum* dan *Caulerpa sp.*

Program/Kegiatan yang Menunjang Indikator Kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target produksi perikanan diantaranya :

1. Penyaluran 1.243 unit mesin kapal perikanan di 24 Provinsi.
2. Sertifikasi Awak kapal perikanan sebanyak 49.812 orang
3. Pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di 42 lokasi
4. Koordinasi dengan BP Migas dan Pertamina untuk mendapatkan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan, Koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Kementerian BUMN untuk memperluas jangkauan program solar untuk koperasi nelayan, dan Mempermudah akses pendanaan dan permodalan bagi nelayan untuk operasional melaut melalui KUR, gerai pendanaan, dan gerai nelayan.
5. Pembangunan kluster tambak udang dan bandeng.
6. Penyediaan benih dan calon induk ikan, penyaluran bantuan sarana, perbaikan saluran tersier, perbaikan tambak, fasilitasi sistem kemitraan serta pembinaan dan pendampingan teknis budidaya.
7. Pengembangan sistem perbenihan melalui penguatan *broodstock center*.
8. Pelepasan jenis dan/atau varietas ikan unggul bekerjasama dengan unit kerja lainnya, yaitu telah dilakukan pelepasan sebanyak 10 varietas induk unggul (Udang vaname Global Gen, Ikan Batak Tor Soro, Nila Nirwana II, Nila Sultana, Nila Srikandi, Kerapu Cantang, Nila Anjani, Nila Merah Nilasa, Nila Jantan Pandu dan Nila Betina Kunti, Lele Sangkuriang dua, Udang Windu Domestikasi.
9. Pengembangan sistem produksi melalui pengembangan input teknologi yang sesuai standar (teknologi anjuran), aplikatif, efektif dan efisien berbasis wawasan lingkungan, meningkatkan daya saing produk hasil produksi budidaya melalui percepatan pelaksanaan kegiatan sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB), pengembangan percontohan usaha perikanan budidaya sebagai upaya dalam mensosialisasikan model pengelolaan budidaya berkelanjutan.
10. Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan melalui kegiatan terobosan utama: (i) Pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana UPTD Provinsi; (ii) Normalisasi saluran irigasi tambak bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum; (iv) Penataan dan rehabilitasi kawasan tambak dalam rangka Gerakan Revitalisasi Tambak; (v) Pemberdayaan pembudidaya ikan melalui pengelolaan jaringan irigasi tambak partisipatif (PITAP) di kawasan industrialisasi; (vi) Pengembangan kawasan dan penguatan operasional industrialisasi perikanan budidaya i; dan (vii) Pemberian bantuan sarana dan prasarana lainnya seperti KJA, *excavator* dan mesin pelet.
11. Pengembangan budidaya rumput laut kultur jaringan.
12. Pengawalan dan Penerapan Teknologi Adaptif Perikanan Budidaya yang dilakukan oleh 15 UPT Perikanan Budidaya.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Dalam rangka mencapai target produksi perikanan Tahun 2024, KKP berkomitmen untuk melakukan praktik baik yang telah dilakukan di tahun 2023 antara lain penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya, kemudahan akses pendanaan dan permodalan bagi nelayan dan pembudidaya ikan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), gerai pendanaan dan dana bergulir LPMUKP dan memperluas jangkauan program solar untuk koperasi nelayan dan pembudidaya ikan.

Gambar 76. | Menteri Kelautan dan Perikanan Meninjau perkembangan pembangunan tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kebumen, Jawa Tengah.

Gambar 77. | Penyaluran Bantuan Benih Udang Vaname kepada Pembudidaya Ikan

Gambar 78. | Aktivitas Pembongkaran Ikan di PPN Pekalongan

Gambar 79. | Aktivitas Pembongkaran Ikan di PPN Pemangkat

Gambar 80. | Kunjungan Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan ke kampung budidaya rumput laut Mamolo, Kabupaten Nunukan dan Penyaluran Bantuan kepada Pembudidaya Ikan

Produksi Garam (juta ton)
Tahun 2023

IK 13. Produksi Garam

Definisi

Perlindungan dan pemberdayaan petambak garam yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam diarahkan untuk peningkatan usaha pergaraman dalam negeri. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan garam nasional pada Tahun 2022 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 126 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran. Kebutuhan garam yang harus dipenuhi dari dalam negeri yaitu: garam konsumsi, garam untuk aneka pangan, garam untuk industri penyamakan kulit, garam untuk water treatment, garam untuk industri pakan ternak, garam untuk industri pengasinan ikan, garam untuk peternakan dan perkebunan, garam untuk industri sabun dan deterjen, garam untuk industri tekstil, garam untuk pengeboran minyak, garam untuk industri farmasi, dan garam untuk kosmetik.

Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional dilaksanakan pada Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yaitu pada provinsi yang memiliki potensi pengembangan usaha pergaraman. Pelaksanaan SEGAR dilaksanakan melalui sistem bisnis pergaraman yang tertuang dalam rencana aksi. Intensifikasi lahan

Tabel 41. | Capaian IK Produksi Garam Tahun 2023

Sasaran Strategis 6. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing												
IK 13. Produksi Garam (juta ton)												
Realisasi 2018-2022					2023				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
2,7	2,85	1,37	1,09	0,7	2	2,55	127,50%	264,29	3,3	77,27%	3,4	75,00%

merupakan salah satu bagian dari rencana aksi yang diimplementasikan dalam bentuk integrasi lahan untuk tambak garam dan pemanfaatan teknologi produksi garam, sedangkan ekstensifikasi lahan dilakukan melalui identifikasi dan pemetaan lahan baru, pembukaan lahan baru, dan koordinasi dalam rangka penyediaan aksesibilitas menuju kawasan tambak garam.

Berbagai inovasi teknologi produksi (*on farm*) telah diterapkan di berbagai daerah seperti teknologi ulir filter (TUF), geoisolator atau *geomembrane*, integrasi lahan garam, penerapan teknologi rumah garam dan teknologi pembuatan garam lainnya. Inovasi teknologi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam rakyat serta menjaga pasokan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Produksi garam nasional bersumber dari produksi garam rakyat di kabupaten/kota penghasil garam dan hasil produksi PT. Garam. Kebutuhan garam akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan industri pengguna garam. Kebutuhan garam dalam negeri sampai saat ini belum bisa dipenuhi dari produksi garam nasional karena beberapa faktor yaitu teknologi yang masih tradisional, alih fungsi lahan tambak menjadi kawasan industri atau permukiman, serta produksi garam yang sangat dipengaruhi cuaca. Ada dua langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam yaitu ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru dan intensifikasi dengan inovasi teknologi dan manajemen lahan pergaraman.

Analisis Capaian

> **Target produksi garam Tahun 2023 sbeesar 2 juta ton dengan realisasi sebesar 2,55 juta ton atau telah mencapai 127,50 persen atau 120 persen dalam aplikasi kinerjaku. Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 sebesar 0,7 juta ton, produksi garam Tahun 2023 sebesar 2,55 juta ton mengalami kenaikan sebesar 264,29 persen. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra KKP Tahun 2020-2024 sebesar 3,4 juta ton, capaian tahun 2023 baru mencapai 75 persen. Jumlah produksi tersebut berasal dari pembuatan garam sistem evaporasi baik integrasi maupun non integrasi pergaraman.**

Gambar 81. | Grafik Produksi Garam Tahun 2017-2023

Produksi garam selama 2017-2023 fluktuatif, yaitu sebesar 1,1 juta ton di tahun 2017 dan menjadi sebesar 2,55 juta ton di tahun 2023. Pada Tahun 2023, rata-rata petambak mulai memproduksi garam pada bulan Juni 2023 dan kebanyakan sudah berhenti produksi pada bulan November walaupun pada bulan Desember masih ada beberapa petambak yang masih berproduksi. Harga garam juga tinggi sehingga para petambak antusias untuk memproduksi garam. Harga garam tertinggi mencapai Rp5.000 per kilogram pada bulan Juli 2023, ditingkat petambak garam. Perhitungan produksi garam Tahun 2023 pada 13 provinsi penghasil garam, PT. Garam dan Perusahaan swasta penghasil garam sebesar 2.551.730,949 ton dengan stok akhir sebesar 839.942,405 ton.

Tercapainya produksi garam juga didukung dengan kondisi musim kemarau meskipun sesekali turun hujan. Perhitungan produksi garam pada 13 provinsi penghasil garam, PT. Garam dan Perusahaan swasta penghasil garam sebesar 2.551.730,949 ton.

Rincian produksi garam di 13 provinsi penghasil garam, PT. Garam dan Perusahaan swasta sebagaimana tersaji dalam *Tabel 42*.

Tabel 42. | Tabel Data Produksi dan Stok Garam Tahun 2023

No.	Provinsi	Produksi		Jumlah	Stok
		Tambak	Non Tambak		
1	Aceh	875,704	8,358,115	9,233,820	393,425
2	Jawa Barat	394,348,172	0	394,348,172	31,251,233
3	Jawa Tengah	652,744,524	224,517	652,969,041	208,821,025
4	DI Yogyakarta	3,023	0	3,023	3,344
5	Jawa Timur	802,170,465	36,750	802,207,215	235,592,808
6	Banten	1,137,000	0	1,137,000	724,000
7	Bali	2,805,650	453,952	3,259,602	111,902
8	Nusa Tenggara Barat	205,250,080	285,206	205,535,286	79,750,249
9	Nusa Tenggara Timur	20,713,462	2,269,793	22,983,255	7,905,414
10	Sulawesi Tengah	276,631	0	276,631	0
11	Sulawesi Selatan	121,215,513	0	121,215,513	74,805,664
12	Sulawesi Tenggara	792	0	792	360
13	Gorontalo	1,596,602	0	1,596,602	582,980
	Total Pend. Garam Rakyat	2,203,137,615	11,628,334	2,214,765,949	639,942,405
Perusahaan-perusahaan:					
1.	PT. Garam			310,000,000	200,000,000
2.	PT. Cheetam			2,164,000	
3.	PT. Timor Livestock Lestari			11,550,000	
4.	PT. Tjakrawala Timur Sentosa			13,251,000	
Total Pendataan Garam Rakyat + Perusahaan				**2,551,730,949**	**839,942,405**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Program/Kegiatan yang Menunjang Indikator Kinerja

Kegiatan pendukung dalam mencapai Produksi Garam yang telah dilaksanakan dalam mencapai target produksi garam Tahun 2023, antara lain:

1. Penetapan Kepmen KP No.7/2023 tentang Sentra Ekonomi Garam Rakyat dan Kepmen KP No. 69/2023 tentang Besaran Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional pada Sentra Ekonomi Garam Rakyat.
2. Pendataan Usaha Garam di 65 Kabupaten yang tersebar di 13 provins.
3. Pembangunan sarpras garam di Ende dan Nagekeo.
4. Integrasi lahan garam.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Dalam rangka mempertahankan capaian produksi garam kedepan, upaya yang akan dilakukan kedepan antara lain : Pembangunan sarana dan/atau prasarana di sentra ekonomi garam (pembangunan Gudang Garam Rakyat, *Geomembran* integrasi lahan pergaraman dan integrasi lahan pergaraman, kolaborasi aktif dengan sektor swasta serta pihak terkait lainnya.

Gambar 82. | Rapat Koordinasi Pembangunan Pabrik Pengolahan Garam di Bima

Gambar 83. | Panen Perdana Koperasi Pantai Cioleng Bahari dengan Metode Tunnel Garam (Bantuan Program Usaha Garam Rakyat KKP kolaborasi dengan Pusat Studi Pesiisr dan Kelautan Universitas Brawijaya di Desa Sinar Laut, Cianjur, Provinsi Jawa Barat)

Gambar 84. | Panen Perdana Kelompok Usaha Garam (KUGAR) Putra Pansela Cidahon dengan metode produksi tunnel garam (Bantuan Program Usaha Garam Rakyat Kolaborasi dengan Pusat Studi Pesisir dan Kelautan Universitas Brawijaya di Desa Hegarsari, Cianjur Provinsi Jawa Barat)

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%), Tahun 2023

IK 14. Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang diterima oleh Negara Tujuan Ekspor

Definisi

Dalam rangka meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional melalui pengakuan penjaminan dalam bentuk Sertifikat kesehatan ikan (HC) serta sertifikat kesehatan ikan ekspor (*Health Certificate for Fish and Fish Products*/KI-D1) yang diterbitkan UPT KIPM KKP di negara tujuan ekspor untuk menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi, dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor berdasarkan notifkasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tersebut.

Analisis Capaian

Dalam rangka meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan pengakuan penjaminan dalam bentuk Sertifikat kesehatan ikan (HC) serta sertifikat kesehatan ikan ekspor (*Health Certificate for Fish and Fish Products*/KI-D1) yang diterbitkan UPT Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan di negara tujuan ekspor untuk menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi dan dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor. Berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tersebut.

Penjaminan bebas penyakit ikan karantina dalam bentuk penerbitan sertifikat kesehatan ikan (*Health Certificate for Fish and Fish Products*/KI-D1) yang telah memenuhi syarat negara tujuan pada Tahun 2023 sejumlah 96,139 sertifikat dari total 96.421 sertifikat. Selisih sertifikat yang diterbitkan sebanyak 282 diperoleh dari ekspor selain dari 40

Tabel 43. | Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%) Tahun 2023

Sasaran Strategis 6. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing												
IK 14. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)												
Realisasi 2018-2022					2023				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
-	-	99,29	99,35	99,58	98	99,84	101.88%	0.26	-	-	-	-

negara mitra yang mempersyaratkan KI-D1. Capaian ini meningkat 22,52% apabila dibandingkan capaian sertifikasi pada tahun 2022 sebesar 78,463 sertifikat. Capaian ini dihitung menggunakan *database* pada teknologi sistem informasi berupa *platform* aplikasi Sister Karoline (Sistem Informasi Teritegrasi Karantina Ikan dan Mutu *Online*) pada *link http://ppk.bkipm.id/*. Sistem ini telah digunakan sejak tahun 2007 dan saat ini telah digunakan hampir disemua kantor pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan di seluruh Indonesia. Pelayanan dengan Sister Karoline selain mempermudah layanan juga akan merekam semua kegiatan tindakan karantina ikan dan mutu yang dilakukan dalam proses sertifikasi karantina ikan dan mutu untuk kegiatan ekspor, impor dan domestik serta informasi kegiatan inspeksi.

Sedangkan sertifikasi Mutu (HC) yang memenuhi syarat sejumlah 105.115 sertifikat dengan 8 (delapan) kasus penolakan ekspor mutu di negara mitra. Terhadap notifkasi penolakan ekspor hasil perikanan Indonesia yang disampaikan oleh Otoritas Kompeten negara mitra tersebut, KKP telah melakukan *temporary suspend* kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI) bersangkutan, menginvestigasi penyebab permasalahan pada UPI tersebut hingga UPI melakukan perbaikan sistem jaminan mutu terhadap proses produksi. Pencabutan *suspend* sudah dilakukan setelah UPI melakukan tindakan perbaikan dan BKIPM menyampaikan notifkasi kembali ke negara mitra.

Target tenaga kerja dalam sektor kelautan dan perikanan Tahun 2023 sebesar 456.657 orang dengan realisasi sebesar 569.631 atau mencapai 124,74 persen atau 120 persen dalam aplikasi kinerjaku. Realisasi tenaga kerja yang terlibat tersebut dihitung berdasarkan tenaga kerja yang terlibat di bidang perikanan tangkap, perikanan budi daya, pengelolaan kelautan dan ruang laut, peningkatan daya saing, pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan serta penyuluhan dan pengembangan SDM KP.

Penjaminan bebas penyakit ikan karantina dalam bentuk penerbitan sertifikat kesehatan ikan (*Health Certificate for Fish and Fish Products*/KI-D1) yang telah memenuhi syarat negara tujuan Tahun 2023 sejumlah 96,139 sertifikat atau meningkat 22,52% jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 yang hanya mencapai 78.463 sertifikat serta Sertifikasi Mutu (HC) yang memenuhi syarat sejumlah 105.123 sertifikat dengan 8 kasus penolakan ekspor mutu sehingga capaian pada Tahun 2023 sebesar 99,84% dari target 98%.

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merupakan indikator kinerja baru di level KKP sejak tahun 2022, sehingga belum tercantum di Renstra KKP 2020-2024. Namun demikian indikator kinerja Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor telah menjadi indikator kinerja di level Unit Kerja Eselon I yaitu BPPMHKP (Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan).

Keberhasilan pencapaian indikator didukung melalui surveilan untuk pengendalian titik kritis penerapan HACCP, konsistensi dalam sistem penerapan *in-process inspection* di Unit Pengolahan Ikan, dan pengujian kesesuaian terhadap standar produk akhir (*end product testing*). Di samping itu, didukung oleh infrastruktur mutu laboratorium terutama dalam akreditasi dan penambahan ruang lingkup pengujian kimia, mikrobiologi dan *organoleptic* serta peningkatan kerjasama untuk memperkuat jejaring antar laboratorium UPT dalam rangka meningkatkan kapasitas, kompetensi dan kinerja laboratorium.

Faktor lainnya yang menjadi pendukung keberhasilan dalam mencapai indikator ini didukung oleh kinerja penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilakukan KKP, melalui *surveilan* konsistensi penerapan GMP, SSOP, dan HACCP melalui *in-process inspection* di Unit Pengolahan Ikan dan Pengujian terhadap produk akhir (*end product testing*). Di samping itu, keberhasilan ini juga

turut didukung oleh kinerja laboratorium dalam melakukan pengujian kimia, mikrobiologi dan organoleptik dan peningkatan kompetensi inspektur mutu yang ada di Unit Pelaksana Teknis.

Program/Kegiatan yang Menunjang Indikator Kinerja

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator ini pada Tahun 2023 antara lain :

1. Temu Koordinasi Penanganan Kasus
2. Kegiatan Temu Mitra Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dalam rangka harmonisasi dan mensosialisasikan perkembangan terkini persyaratan negara tujuan ekspor produk perikanan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Bimbingan Teknis Pemenuhan persyaratan Ekspor Tahun 2023 dalam rangka kegiatan Bulan Mutu Karantina Ikan Tahun 2023.
4. Temu Teknis Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka optimalisasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
5. Pendampingan Inspeksi Saudi *Food and Drug Authority* (SFDA) di beberapa lokus, yaitu 6 Unit Pengolahan Ikan (UPI), 2 laboratorium serta 3 tambak yang berlokasi di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai rangkaian proses persetujuan penambahan UPI terdaftar ke Arab Saudi dengan melihat penerapan sistem jaminan mutu hasil perikanan hulu hilir seperti yang tercantum dalam "*Memorandum of Understanding between The Indonesian Food and Drug Authority and Saudi Food and Drug Authority Concerning Control, Quality and Safety of Food and Drug Products*".
6. Pertemuan bilateral dan pembahasan teknis protokol ekspor/impor yang terkait SPS (*Sanitary & Phytosanitary*) dengan jajaran Bea Cukai Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau *General Administration Customs of the People's Republic of China* (GACC) di Kantor Pusat GACC Kota Beijing, RRT. Penandatanganan Protokol *Confidentiality Commitment* atau dikenal CC antara BKIPM dan FDA Amerika Serikat. Dengan adanya CC ini maka pembahasan lanjutan kerangka kerjasama perdagangan hasil perikanan *Regulatory Partnership Agreement* atau RPA khususnya untuk produk udang Indonesia yang diekspor ke AS akan mulai menapaki fase lanjutan. Dengan adanya kerjasama ini, maka produk udang Indonesia yang diekspor ke AS akan memperoleh *privilege* termasuk minimalisasi *technical measures* di *border* (*at border inspection*) serta keleluasaan dalam memperluas akses pasar serta meningkatkan volume ekspor. Sebagai catatan bahwa Amerika Serikat mengekspor udang dengan porsi 91%, sejumlah volume itu didapatkan dari 3 negara, dimana Indonesia menempati urutan ke-2 dalam penguasaan pasar udang di Amerika dibawah India dan diatas Ekuador.
7. Pertemuan bilateral dengan US FDA di Kantor *Joint Institute for Food Safety and Applied Nutrition, University of Maryland* Kota College Park Amerika Serikat. Pada Perundingan Putaran Keenam Indonesia-Canada *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (ICA-CEPA).

Gambar 85. | Dokumentasi Kegiatan Temu Koordinasi Penanganan Kasus

Gambar 86. | Temu Mitra Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Gambar 87. | Peresmian Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu Ekspor Lingkup Bandar Udara Internasional Kualanamu, Medan

Gambar 88. | KKP telah melaksanakan kegiatan pelepasan ekspor perdana komoditi hasil kelautan dan perikanan yang dilaksanakan di Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo, Kab. Manggarai Barat, NTT.

Gambar 89. | Bimtek Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Ikan Karantina di Lampung Selatan

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Dalam rangka perbaikan kinerja kedepan, KKP akan terus melanjutkan praktik baik yang telah dilaksanakan di tahun 2023 dengan melakukan :

1. Meningkatkan mutu dan keamanan produk perikanan di seluruh rantai produksi melalui monitoring Penerapan GMP, SSOP, dan HACCP di UPI.
2. Memastikan penerapan HACCP yang efektif di UPI untuk menghasilkan produk perikanan yang aman dan bermutu melalui surveilan pengendalian titik kritis HACCP UPI.
3. Menjamin produk perikanan ekspor memenuhi standar mutu dan keamanan negara tujuan ekspor melalui peningkatan kinerja laboratorium dengan penyediaan infrastruktur mutu laboratorium yang memadai, penambahan ruang lingkup pengujian untuk memperluas cakupan pengujian untuk mendeteksi lebih banyak kontaminan dan residu, memperkuat jejaring dan sinergi antar laboratorium untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dengan Peningkatan kerja sama antar laboratorium UPT.
4. Meningkatkan kemampuan inspektur mutu dalam mengawasi dan memastikan mutu produk perikanan.

Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP (Triliun Rupiah)
Tahun 2023

IK 15. Dana Yang DIsalurkan untuk Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Definisi

Dana yang disalurkan untuk Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan menghitung dua indikator pembentuk yaitu pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program yang disalurkan oleh lembaga perbankan dan lembaga keuangan bukan bank (nonbank) kepada UMKM kelautan dan perikanan dan penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP. Penyaluran kredit program dari perbankan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan pembiayaan dari lembaga keuangan nonbank yaitu pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang disalurkan oleh Holding Ultra Mikro, salah satunya yaitu PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekaar.

Analisis Capaian

Capaian IK ini dapat dilihat pada Tabel 44.

Jika dibandingkan dengan realisasi dana yang disalurkan untuk Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan tahun 2022 sebesar Rp10,49 triliun, maka capaian Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 29,74%. Adapun rincian penyaluran kredit program di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana pada Tabel 45.

Tabel 44. | Capaian Dana yang Disalurkan untuk Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Sasaran Strategis 6. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing												
IK 15. Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP (Triliun Rupiah)												
Realisasi 2018-2022					2023				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
			8,56	10,49	6,99	7,7	110,16%	-26,60	-	-	-	-

Target realisasi dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP Tahun 2023 sebesar Rp6,99 triliun terdiri dari kredit program sektor KP (KUR dan UMi) sebesar Rp6,33 triliun dan penyaluran dana bergulir LPMUKP sebesar Rp0,66 triliun. Realisasi tahun 2023 sebesar Rp7,7 triliun dengan rincian:

1. **Realisasi pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2023 mencapai Rp6,74 triliun dan disalurkan kepada 130.644 pelaku usaha KP. Realisasi KUR secara nasional tahun 2023 mencapai Rp269,5 triliun atau menurun sebesar 30,01% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp385,1 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi KUR nasional, maka proporsi realisasi KUR sektor KP mencapai 2,5%.**
2. **Realisasi pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui Ultra Mikro sebesar Rp0,63 triliun dan disalurkan kepada 115.499 pelaku usaha KP**
3. **Realisasi dana bergulir LPMUKP sebesar Rp328, 512 miliar dan disalurkan kepada 4.983 orang pemanfaat.**

Tabel 45. | Rincian Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP Tahun 2023

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan		
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	6.744.473.812.533	130.644
Ultra Mikro (UMi)	630.384.500.000	115.499
Dana Bergulir LPMUKP	328.512.512.900	4.983
Jumlah	7.703.370.825.433	251.126

Sumber : SIKP, Kemenkeu dan PT. PNM, dan BLU LPMUKP, Desember 2023 (diolah)

Berbagai kegiatan strategis dilakukan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha KP, diantaranya fasilitasi akses pembiayaan melalui pembentukan Kelompok Kerja baik di pusat maupun daerah, pendampingan usaha, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyaluran kredit program. KKP menargetkan Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program pada awal tahun 2023 sebesar Rp10,26 triliun, namun melihat kondisi penyaluran KUR di Indonesia cukup menurun sepanjang tahun sehingga pada Tahun 2023 KKP menurunkan target pembiayaan melalui KUR dan UMi menjadi sebesar Rp6,99 triliun pada tahun 2023. Untuk mencapai target tersebut.

KKP berupaya mendorong peningkatan realisasi Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program, antara lain: Pembentukan POKJA Kredit Program Kelautan dan Perikanan, koordinasi secara berkala dengan lembaga keuangan bank dan nonbank, Fasilitasi Akses Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan dan sosialisasi, pembinaan dan fasilitasi akses kredit sektor kelautan dan perikanan oleh Tenaga Pendamping Usaha dalam kegiatan Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA).

Realisasi KUR secara nasional Tahun 2023 mencapai Rp269,5 triliun atau menurun sebesar 30,01% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp385,1 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan kebijakan KUR Tahun 2023 yang ditetapkan dalam Permenko Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, sehingga Perbankan perlu melakukan penyesuaian dalam penyaluran pembiayaannya.

Penyesuaian kebijakan KUR di tahun 2023 yaitu:

a. Kebijakan KUR kembali ke masa sebelum Pandemi COVID-19, yaitu suku bunga 6% tanpa tambahan subsidi bunga 3%, target penyaluran KUR di sektor produksi (termasuk sektor KP) kembali ditetapkan sebesar 6%, kembalinya total akumulasi plafon KUR Kecil maksimal Rp500 juta, dan memperpanjang kebijakan restrukturisasi KUR sampai dengan 31 Maret 2024.
b. Kebijakan KUR mendorong graduasi debitur, dimana terdapat penurunan suku bunga KUR Super Mikro menjadi 3%, pembatasan maksimal akses KUR Mikro sebanyak 4 kali untuk sektor produksi (termasuk sektor KP), dan kenaikan suku bunga berjenjang untuk debitur KUR Mikro dan KUR Kecil berulang.
c. Kebijakan KUR untuk Memperluas Penyaluran dan Mendorong Peningkatan Debitur KUR, diantaranya penegasan pelaksanaan KUR tanpa agunan tambahan untuk plafon KUR sampai dengan Rp100 juta dan penambahan target debitur baru dan target debitur graduasi penyaluran KUR dengan plafon KUR tahun 2023 sebesar Rp450 triliun atau plafon sesuai kecukupan APBN 2023.
d. Berdasarkan hasil evaluasi penyaluran KUR pada semester I 2023 yang mengalami perlambatan, pemerintah mengambil langkah untuk menurunkan target KUR menjadi Rp279 triliun dari semula sebesar Rp450 triliun atau turun sebesar 34%, dengan tetap memperhatikan kecukupan anggaran subsidi bunga/subsidi marjin KUR (Sumber : Siaran Pers Kemenko Bidang Perekonomian Nomor HM.4.6/249/SET.M.EKON.3/07/2023 tanggal 14 Juli 2023)

Tabel 46. | Realisasi Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

Bidang Usaha	Tahun 2022		Tahun 2022		Pertumbuhan	
	Debitur (Pelaku Isaha)	Realisasi (Rp. triliun)	Debitur (Pelaku Isaha)	Realisasi KUR Rp. triliun)	Debitur	Realisasi KUR
Budidaya	66.751	3,40	43.765	2,490	-34,44	-26,76
Penangkapan	55.836	2,17	33.548	1,510	-39,92	-30,41
Jasa Perikanan	16.199	0,73	9.122	0,470	-43,69	-35,62
Pergaraman	80	0,01	76	0,008	-5,00	-20,00
Jumlah (hulu)	**138.866**	**6,31**	**86.511**	**4,478**	**-37,70**	**-29,03**
Perdagangan	76.047	3,33	40.398	2,090	-46,88	-37,24
Pengolahan	6.876	0,33	3.735	0,180	-45,68	-45,45
Jumlah (hilir)	**82.923**	**3,66**	**44.133**	**2,270**	**-46,78**	
Jumlah Sektor KP	**221.789**	**9,97**	**130.644,00**	**6,748**	**-41,10**	**-32,32**

Jika dibandingkan dengan Tahun 2022, penyaluran dana bergulir Tahun 2023 mengalami kenaikan realisasi yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh arah kebijakan LPMUKP yang difokuskan untuk mendukung program prioritas KKP sehingga terjadinya penyesuaian penyaluran dana bergulir termasuk target sasaran penyaluran kepada koperasi yang dapat menerima dana bergulir dengan jumlah yang lebih besar. Koperasi yang dibiayai pada program prioritas merupakan koperasi atau KUKP yang memiliki jumlah anggota yang besar sehingga dana bergulir LPMUKP tetap dapat dirasakan manfaatnya oleh anggota tersebut. Faktor keberhasilan pada pencapaian target penyaluran dana bergulir Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Pemberlakuan proses *clean and clear proposal* diawal dan dukungan sistem *Loan Originating System* (LOS) berpengaruh kepada kecepatan proposal usulan pembiayaan yang diajukan oleh debitur kepada LPMUKP. Proses *clean and clear* membuat proposal yang diajukan harus sudah lengkap dan harus mempunyai rekomendasi hasil pengecekan karakter berdasarkan Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK). Kemudian, prosesnya juga telah melalui sistem LOS sehingga usulan tersebut dapat dimonitoring secara *online* oleh pendamping di daerah, maupun oleh LPMUKP di pusat.
b. Konsistensi dalam mendukung pembiayaan pada program prioritas KKP membuahkan hasil yang positif, dimana dukungan pembiayaan pada program prioritas relatif menyerap dana kelolaan yang lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan kepada perorangan. Pembiayaan pada program prioritas diberikan kepada koperasi atau kelompok yang memiliki anggota aktif dengan jumlah yang besar, agar kepemanfaatan dana tersebut tetap dapat dirasakan oleh masyarakat. Kemudian, pembiayaan pada program prioritas juga lebih mudah untuk dimonitoring dikarenakan jumlah debiturnya (Koperasi/KUKP) akan relatif lebih sedikit.
c. Inisiasi pelaksanaan penyaluran dana bergulir melalui pola aktif dimana strategi penyaluram, identifikasi, dan verifikasi dilakukan langsung oleh tim program prioritas yang berada di pusat.

Gambar 90. | Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Permodalan di Tulungagung dengan Tujuan Menumbuhkan Minat Kewirausahaan di Bidang Olahan dan Pemasar Hasil Perikanan

Gambar 91. | LPMUKP Membantu Pengembangan Sumber Daya Laut Lokal di Kab. Buru melalui Penyaluran Dana Bergulir BLU-LPMUKP

Gambar 92. | Gambar 87. Panen Perdana Kelompok Usaha Garam (KUGAR) Putra Pansela Cidahon dengan metode produksi *tunnel* garam (Bantuan Program Usaha Garam Rakyat Kolaborasi dengan Pusat Studi Pesisir dan Kelautan Universitas Brawijaya di Desa Hegarsari, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat)

Gambar 93. | LPMUKP Hadir dalam Kegiatan Peningkatan Literasi dan Digitalisasi Keuangan Kolaborasi dengan Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM guna Mendukung Peningkatan Perluasan Akses Pembiayaan bagi Pelaku Usaha UMKM pada Sentra Garam di Kab. Pangkajene Kepulauan

Program/Kegiatan yang Menunjang Indikator Kinerja

Upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong pencapaian Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha Kelautan dan Perikanan melalui KUR, Ultra Mikro dan dana bergulir LPMUKP diantaranya:

1. Pembinaan, pendampingan dan monitoring Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPU KP) sebanyak 79 personil yang tersebar di 72 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi. Kehadiran TPU KP melalui fasilitasi Gerai Investasi dan Layanan Usaha (Gisela) turut berkontribusi pada penyaluran kredit program, baik melalui perbankan maupun lembaga keuangan nonbank. Tahun 2023, TPUKP telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp41,75 miliar kepada 993 pelaku usaha dan telah memfasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi 598 pelaku usaha.
2. Koordinasi dan sinergi kegiatan dengan Bank BRI dan PT. PNM dalam rangka peningkatan akses pembiayaan untuk mendukung program prioritas KKP, serta optimalisasi pemanfaatan data binaan TPU KP untuk dapat difasilitasi KUR BRI maupun program Ultra Mikro Mekaar dari PT. PNM.
3. Edukasi dan sosialisasi literasi keuangan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui fasilitasi akses pembiayaan di Kabupaten Kebumen dan Rembang dan pelaksanaan bimbingan teknis kewirausahaan dan akses pembiayaan bekerja sama bagi pelaku usaha KP di 54 lokasi.
4. Identifikasi dan verifikasi calon debitur potensial dalam rangka persiapan kegiatan fasilitasi akses permodalan dalam rangka mendukung program prioritas KKP.

5. Pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan secara berkala melalui program GISELA.
6. Pendandatanganan Kerjasama antara KKP dengan PT. Permodalan Nasional Madani Nomor 06/PDSPKP/KKP/PKS/XI/2023 tentang Sinergi Program Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro Sektor Kelautan dan Perikanan, dalam rangka peningkatan akses pembiayaan untuk mendukung program prioritas KKP, serta optimalisasi pemanfaatan data KUSUKA KKP. Adapun hal-hal yang dibahas adalah rencana sinergi kegiatan pengembangan klasterisasi usaha kelautan dan perikanan melalui peningkatan kapasitas usaha dan kemitraan, yang didukung dengan penyediaan akses pembiayaan dan edukasi tentang bagi UMKM binaan KKP.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Dengan ketercapaian target pada Tahun 2023, maka untuk mengoptimalkan capaian dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP (Kredit Program) melalui KUR, Ultra Mikro dan dana bergulir LPMUKP periode selanjutnya, KKP akan melanjutkan strategi penyaluran dana yang telah dilakukan pada Tahun 2023 yang diarahkan untuk mendukung program prioritas KKP antara lain melalui pembinaan dan pendampingan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, koordinasi dan sinergi kegiatan dengan Bank Penyalur KUR dan PT. PNM dalam rangka peningkatan akses pembiayaan, edukasi dan sosialisasi literasi keuangan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui fasilitasi akses pembiayaan, bimbingan teknis kewirausahaan dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha KP, identifikasi dan verifikasi calon debitur potensial dalam rangka persiapan kegiatan fasilitasi akses permodalan dalam rangka mendukung program prioritas KKP, dan menerapkan proses *clean and clear* proposal di awal.

Gambar 94. | Penandatangan Kerjasama KKP dengan PT. Permodalan Nasional Madani

SS • 7

Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan Efektif

IK 16. Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha KP

Definisi

KKP berupaya melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab. Implementasi tugas dan fungsi tersebut dapat terlihat dari kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah indikator yang menggambarkan kondisi tingkat kesesuaian/kepatuhan kegiatan/unit/proyek usaha sektor kelautan dan perikanan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan sebagai hasil (*outcome*) dari efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Analisis Capaian

Mengingat tantangan pengawasan SDKP tersebut, diupayakan strategi dan inovasi pengawasan SDKP, melalui pemberian pemahaman secara menyeluruh kepada seluruh jajaran yaitu Pengawas Perikanan, Polisi Khusus Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil, PPNS Perikanan dan Awak Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan dilapangan mengenai petunjuk teknis pengawas perikanan yang sesuai dengan ketentuan terbaru serta dengan mengupayakan penguatan kelembagaan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah. Kontribusi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terdiri dari kepatuhan pelaku usaha kelautan dan kepatuhan pelaku usaha perikanan, sebagaimana diuraikan sebagaimana Tabel 47.

Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%), Tahun 2023

Tahun 2023, realisasi indikator Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan" sebesar 97,96%. Capaian tersebut meningkat sebesar 1,4% dari tahun 2022. Capaian tahun 2023 selaras dengan konsistensi peningkatan kepatuhan pelaku usaha KP sejak tahun 2019. Capaian tersebut diperoleh dari 2.589 pelaku usaha yang patuh dari 2.643 pelaku usaha diperiksa. Hal ini didukung oleh beberapa faktor antara lain konsistensi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan pengenaan sanksi administratif kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan yang melanggar sebagai implementasi dari penerapan undang-undang cipta kerja. Target akhir kepatuhan pada akhir Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan" pada Renstra KKP tahun 2020-2024 sebesar 98% dapat tercapai apabila KKP berupaya terus konsisten melaksanakan pengawasan SDKP untuk mengawal kebijakan Kementerian.

Tabel 47. | Capaian Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Sasaran Strategis 7. Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif

IK 16. Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)

Realisasi 2020-2022			2023				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
94.76	95.72	96.56	97	97.96	100.99%	1.45	97	100.99%	98	99.96%

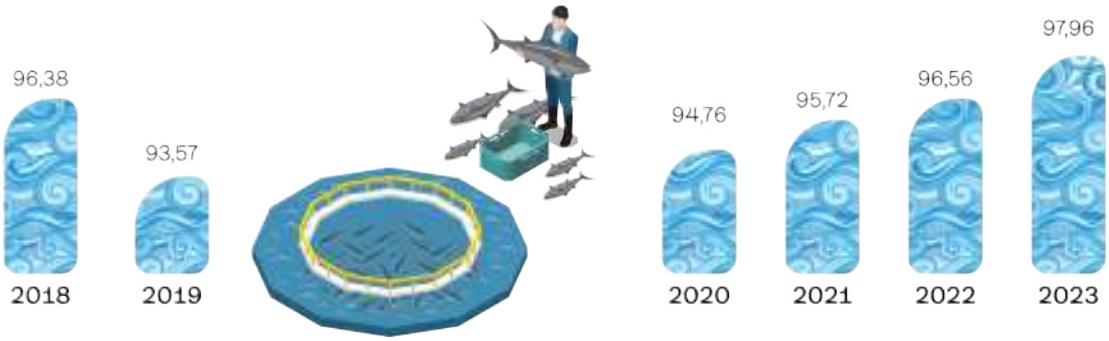

Gambar 95. | Capaian Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

a. Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan

Pelaku usaha sektor kelautan adalah pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut berdasarkan persetujuan/konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) dan pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan berdasarkan perizinan berusaha subsektor pengelolaan ruang laut. Pada Tahun 2023 pelaku usaha kelautan yang patuh sejumlah 61 pelaku usaha dari hasil verifikasi terhadap hasil pemeriksaan sebanyak 148 pelaku usaha. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap empat objek pengawasan, *Tabel 48*.

Tabel 48. | Hasil Pengawasan 4 Objek Pengawasan

No	Objek Pengawasan	Diperiksa	Patuh
1	Pemanfaatan pengelolaan ruang laut	93	35
2	Penangkapan/Pengambilan dan Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	31	17
3	Pengusahaan garam	7	4
4	Wisata tirta lainnya	17	5
	Jumlah	148	61

Dari 148 pelaku usaha, sebanyak 67 pelaku usaha memiliki ijin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan/atau OSS. Selain 61 pelaku usaha patuh juga terdapat 6 pelaku usaha patuh sebagai implikasi atas tindak lanjut hasil rekomendasi untuk upaya perbaikan yang telah diberikan Polisi Khusus Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) pada pemeriksaan sebelumnya periode Tahun 2023. Lebih lanjut, sebanyak 61 pelaku usaha yang patuh terdiri dari 35 pelaku usaha pemanfaatan pengelolaan ruang laut, 17 pelaku usaha penangkapan/pengambilan dan pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks* CITES, 4 pelaku usaha garam dan 5 pelaku usaha wisata tirta. Kendala yang dihadapi sepanjang 2023 dalam pengawasan pelaku usaha diantaranya:

1. Penanganan sengketa kapal kandas berpotensi beririsan dengan tusi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga harus dikoordinasikan dan membutuhkan waktu penanganan.
2. Upaya penyadartahuan masyarakat yang harus dilaksanakan secara reguler karena kesadaran masyarakat yang masih dinamis.

b. Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan

Pelaku usaha sektor perikanan adalah unit/proyek usaha orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang perikanan mencakup subsektor penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan, dan pemasaran ikan. Kepatuhan pelaku usaha perikanan diperoleh dari rata-rata persentase kepatuhan: 1) Pelaku usaha kapal perikanan; 2) Pelaku usaha pengolahan ikan; 3) Pelaku usaha distribusi hasil perikanan; dan 4) Pelaku usaha pembudidayaan ikan. Pengawasan dilakukan terhadap kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ijinnya diterbitkan oleh BKPM melalui *Online Single Submission* (OSS). Pada Tahun 2023, pelaku usaha yang diperiksa sebanyak 2.576 pelaku usaha dengan 2.522 diantaranya merupakan pelaku usaha yang patuh. Pemeriksaan pelaku usaha dilakukan oleh Pengawas Perikanan di UPT Pengawasan SDKP secara rutin dan tidak rutin atas beberapa sub bidang untuk mendukung Ekonomi Biru, program Penangkapan Ikan Terukur, *Tabel 49*.

Tabel 49. | Tabel hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan

No	Objek Pengawasan	Diperiksa	Patuh
1	Penangkapan ikan	1626	2.212
2	Pembudidayaan ikan	364	164
3	Pengolahan ikan	268	45
4	Distribusi perikanan	318	101
	Jumlah	**2.576**	**2.522**

Gambar 96. | Menteri Kelautan dan Perikanan Gelar Ekspose Hasil Pengawasan Sumber Daya KP di Batam, Kepulauan Riau

Gambar 97. | Menteri Kelautan dan Perikanan Melakukan Penyegelan Ikan Salem Impor di Batu Ampar Batam, Kepulauan Riau

Dari 2.522 pelaku usaha yang telah diverifikasi dan patuh, diklasifikasikan menjadi empat kriteria atas kondisi ideal telah memenuhi syarat dan atas tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan, *Gambar 98*.

Sebanyak 2.212 pelaku usaha patuh karena telah memenuhi syarat maka saat pemeriksaan dilaksanakan, upaya pengelolaan pemanfaatan sumber daya perikanan yang dilakukan pelaku usaha sudah ideal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak ada rekomendasi diterbitkan. Sedangkan untuk 310 pelaku usaha lainnya, mendapatkan rekomendasi untuk upaya perbaikan berupa pembinaan, sanksi dan non likuidasi. Rekomendasi yang diberikan telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha, sehingga terdapat perbaikan. Pada pemeriksaan selanjutnya, pelaku usaha tersebut dikategorikan patuh. *Gambar 98*.

Dari grafik pada Gambar 99. dapat dilihat bahwa sebagian besar pelaku usaha penangkapan ikan telah memenuhi syarat kepatuhan diikuti oleh pelaku usaha pengolahan ikan, pembudidayaan ikan dan terakhir distribusi perikanan. Sedangkan kondisi terbanyak selanjutnya adalah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang telah menindaklanjuti rekomendasi pembinaan pada saat pemeriksaan. Untuk sanksi terbanyak

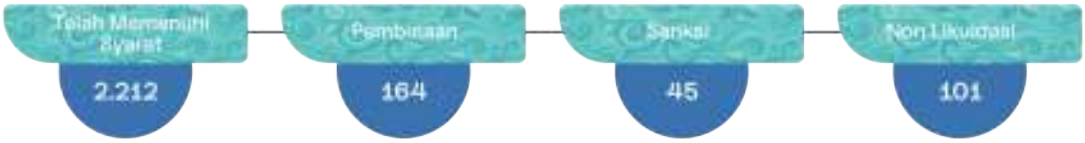

Gambar 98. | Empat Kriteria Pelaku Usaha Patuh

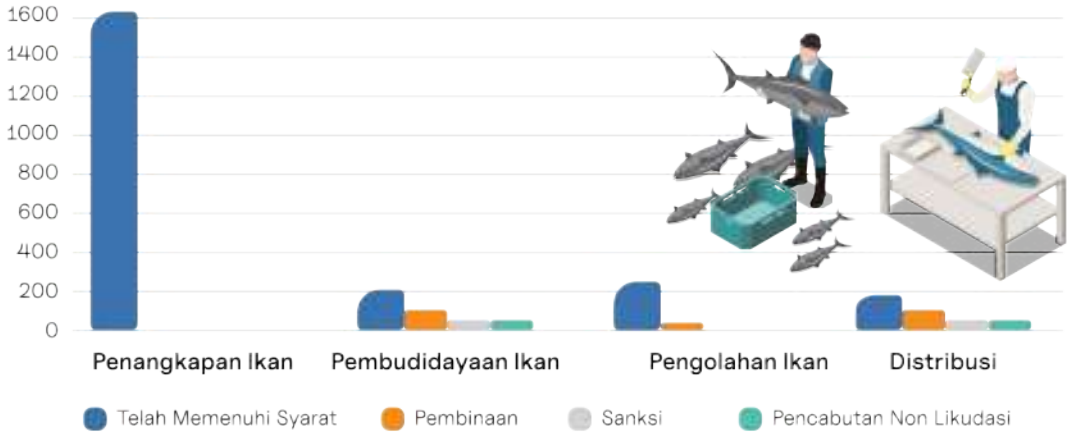

Gambar 99. | Grafik kepatuhan pelaku usaha berdasarkan hasil pemeriksaan periode 2023

yang telah ditindaklanjuti pada kegiatan pembudidayaan ikan. Atas hasil pengawasan kepatuhan bidang perikanan terdapat kendala sebagai berikut:

a. Pelaku usaha belum memahami secara utuh kelengkapan dokumen perizinan berusaha.
b. Kurangnya upaya penyadartahuan kepada masyarakat baik dari Pemda setempat, mitra eselon 1 lingkup KKP maupun Ditjen PSDKP.
c. Fasilitasi perizinan berusaha oleh Pemda belum dapat mengakomodir pelayanan ijin usaha.
d. Pelaku usaha sampai saat ini masih ada yang kesulitan dalam memenuhi kriteria persyaratan kegiatan usaha.

Namun demikian terdapat beberapa upaya perbaikan yang dilakukan diantaranya:

1. Pemberitahuan kepada pelaku usaha akan dilaksanakan pemeriksaan. Pemberitahuan jadwal pemeriksaan juga merupakan salah satu syarat pengawasan ijin usaha dari BKPM.
2. Frekuensi pengawasan terjadwal dengan baik melalui OSS.
3. Payung hukum pelaksanaan pengawasan sudah tersedia mulai dari juknis tata cara pengawasan, pengawasan Lobster, Kepiting dan Rajungan serta sanksi administratif.
4. *Form* pengawasan dan BAP telah terstandardisasi pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2021, sehingga jika terdapat pengenaan sanksi administratif telah sesuai prosedur.
5. Adanya sanksi administratif non denda sebagai *early warning* kepada pelaku usaha yang cenderung menghindari sanksi denda administratif.

Program/Kegiatan yang Menunjang Indikator Kinerja

Beberapa upaya yang mendukung pengawasan atas kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan diantaranya:

1. Perencanaan jadwal yang lebih akurat, dimana jadwal pengawasan saat ini ditentukan oleh BKPM.
2. Penyadartahuan masyarakat yang telah dilaksanakan melalui pembinaan/perbaikan, pengenaan sanksi perlu diperkuat dengan sosialisasi peraturan perundangan-undangan dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat.
3. Peningkatan kompetensi SDM Pengawas Perikanan.
4. Peningkatan kelembagaan pengawasan di daerah.
5. Supervisi pengawasan di lapangan yang sekaligus juga sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas Polsus PWP3K.
6. Pengenaan sanksi administratif kepada pelaku usaha kelautan. Upaya pengenaan sanksi administratif memberikan waktu dan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi yang diberikan.
7. Sosialisasi peraturan pemanfaatan sumber daya bidang kelautan kepada pelaku usaha yang dilakukan secara regular.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Dalam rangka mencapai target Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan kedepan, akan dilakukan upaya antara lain inovasi pengawasan SDKP melalui pemberian pemahaman secara menyeluruh kepada seluruh jajaran yaitu Pengawas Perikanan, Polisi Khusus Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil, PPNS Perikanan

dan Awak Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan dilapangan mengenai petunjuk teknis pengawas perikanan yang sesuai dengan ketentuan terbaru serta dengan mengupayakan penguatan kelembagaan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah.

Gambar 100. | Menteri Kelautan dan Perikanan Sambut Kedatangan Kapal Pengawasa Orca 6 yang merupakan Hibah dari Pemerintah Jepang sebagai Bentuk Konkret Kerja Sama dalam Pemberantasan *IUU Fishing* dan *Destructive Fishing* di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman

SS • 8

Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas

IK 17. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP

Definisi

IK 1. Indeks Reformasi Birokrasi KKP

1. Definisi Indikator Kinerja

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan khususnya berkaitan dengan tiga hal utama yaitu: (1) mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, (2) birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), (3) serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Nilai kinerja RB KKP merupakan ukuran perkembangan implementasi Reformasi Birokrasi di KKP yang dilaksanakan berdasarkan PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan PermenPANRB Nomor 25 tahun 2020 tentang *Roadmap* RB, PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi RB, KepmenPANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi RB, dan KepmenKP 166 Tahun 2023 tentang *Roadmap* RB KKP 2020-2024. Komponen RB K/L dibagi menjadi 2 dimensi yaitu dimensi RB *general* dan RB Tematik. Dimensi RB *General* (bobot 100) terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu: komponen capaian strategi pelaksanaan RB general (bobot 10), terdiri atas subkomponen kualitas rencana aksi dan subkomponen implementasi rencana aksi, komponen capaian implementasi kebijakan RB (bobot 40), diukur dengan 18 indikator dan capaian sasaran strategis (bobot 50), diukur dengan 7 indikator Dimensi RB Tematik (bobot 10) terdiri atas komponen capaian RB tematik (bobot 10), diukur dengan 5 indikator. Penajaman dan penyederhanaan evaluasi reformasi birokrasi di Tahun 2023 dilakukan melalui lebih mengukur hasil dan dampak dibandingkan dengan proses, menghilangkan kesan penilaian yang bersifat administrasi dan harmonisasi, integrasi dan sinergitas indikator penilaian reformasi birokrasi. Pelaksanaan dan evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan dengan berdasarkan pada:

Indeks Reformasi Birokrasi KKP
Tahun 2023

1. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN RB Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024.
2. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.
3. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023.

Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 50. | Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>100	sangat memuaskan
A	>80-100	memuaskan
A-		memuaskan dengan catatan
BB	>70-80	sangat baik
B	>60-70	baik
CC	>50-60	cukup
C	>30-50	kurang
D	>0-30	sangat kurang

Analisa Capaian Kinerja

Target Indeks RB KKP Tahun 2023 sebesar 78 dengan realisasi sebesar 85,40 atau telah mencapaai 109,49%. Capaian tersebut berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB yang diumumkan secara serentak melalui portal RB. Berdasarkan hasil evaluasi secara nasional yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, hasil evaluasi RB Tahun 2023 diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Rata-rata Indeks RB di tingkat Kementerian/Lembaga (82 KL) sebesar 76,81 atau mengalami kenaikan 0,28 poin.
2. Rata-rata Indeks RB di tingkat Pemerintah Provinsi (34 Provinsi sebeesar 69,71) atau mengalami kenaikan 2,31 poin.
3. Rata-rata Indeks RB di tingkat Pemerintah Kab/Kota (508 Provinsi sebesar 59,32) atau mengalami kenaikan 2,78 poin.

Gambar 101. | Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023

Tabel 51. | Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023

Sasaran Strategis 8. Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas

IK-17. Indeks Reformasi Birokrasi KKP

Realisasi 2018-2022					2023				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
78,6	79,38	78,27	77,79	78,43	78	85,4	109,49%	8,89	78	109,49%	80	106,75%

Pelaksanaan Evaluasi RB dilakukan melalui 2 jenis yaitu Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal. Evaluasi Internal dilaksanakan oleh Evaluator Internal yaitu APIP masing-masing K/L/D atau Tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal reformasi birokrasi di instansinya. Sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh evaluator eksternal yang terdiri dari Evaluator Meso dan Evaluator Nasional. Evaluator Meso merupakan KL yang memiliki peran, tugas dan fungsi untuk melakukan evaluasi aspek implementasi kebijakan yang merupakan komponen dari indeks reformasi birokrasi dan menjadi tanggung jawabnya. EValuastor Nasional merupakan Tim Evaluator yang ditetapkan oleh Ketua UPRBN yang berperan sebagai kordinator dalam pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi K/L/D. Pelaksanaan Evaluasi RB Tahun 2023 dilaksanakan secara terintegrasi melalui Portal RB Nasional dimana mulai dari input rencana aksi oleh K/L/PD, *input* data hasil indikator RB oleh KL Meso, penilaian/ evaluasi oleh evaluator nasional sampai pada penyampaian Laporan Hasil Evaluasi oleh Evaluator Internal dilakukan secara terpadu melalui Portal RB.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB secara umum temuan Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Instansi Pemerintah dikecualikan dari perhitungan karena tidak menjadi lokus penilaian indikator meso.
2. Instansi pemerintah banyak yang mendapatkan nilai nol karena tidak memenuhi persyaratan penilaian indikator meso.
3. Instansi pemerintah tidak mengoptimalkan dalam memilih tema RB tematik.
4. Instansi Pemerintah tidak menetapkan seluruh kegiatan utama sampai tahun 2024.
5. Instansi Pemerintah tidak menyusun rencana aksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
6. Rencana aksi sekedar formalitas, kurang berkualitas dan secara logika kurang berdampak.

Tabel 52. | Sebaran Capaian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023

Predikat	Kategori	Provinsi	Kab/Kota	Jumlah
AA	-	-	-	-
A	26	5	35	66
BB	44	13	100	157
B	12	12	135	159
CC	-	2	119	121
D	-	2	90	92
Jumlah	82	-	29	29
Populasi	82	34	508	624
%	100%	88,24%	53,15%	61,22%

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, tindak lanjut hasil evaluasi RB yang diperlukan oleh setiap RB adalah sebagai berikut :

1. Setiap Instansi Pemerintah perlu memastikan untuk melaksanakan selurh kegiatan utama dan memenuhi persyaratan penilaian dari KL pengampu indikator.
2. Setiap Instansi Pemerintah perlu memastikan rencaan aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi betul-betul mengungkit capaian indikator kegiatan utama.
3. Setiap instansi pemerintah perlu mengoptimalkan perannya dalam RB Temati

Tabel 53. | Capaian RB KKP

SP.01. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Jenderal

IK-1. Indeks Reformasi Birokrasi KKP

Realisasi 2018-2022					2023				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
78,6	79,38	78,27	77,79	78,43	78	85,4	109,49%	8,89	78	109,49%	80	106,75%

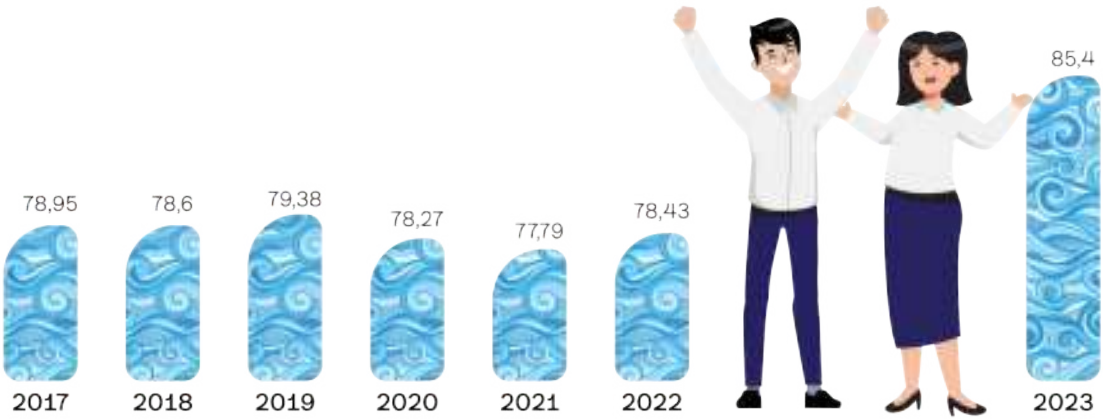

Gambar 102. | Grafik Capaian Indeks Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2017-2023

Pencapaian Indeks RB KKP Tahun 2023 disebabkan faktor-faktor antara lain :

1. Telah ditetapkan agen perubahan di lingkungan KKP berdasarkan hasil kolaborasi dari unit kerja eselon I.
2. Telah dilakukan pemetaan dampak dari kebijakan yang akan ditetapkan dalam regulasi dan dituangkan dalam kajian teknis saat pengajuan perencanaan.
3. Telah ditetapkan peta bisnis proses KKP tahun 2020-2024yang dituangkan dalam Keputusan Menteri KP Nomor 127 tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran strategis KKP.
4. Telah disusun peta rencana, dan telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pembangunan SPBE.
5. Telah diterbitkan Permen KP 13 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja ASN di Lingkungan KKP.
6. Telah dilakukan pemetaan atas *gap* kompetensi APIP untuk dapat menyusun program pengembangan kompetensi sehingga peran APIP dapat lebih optimal.
7. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelayanan publik dan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) telah dibahas dan ditindakdaklanjuti berdasarkan kritik dan pelaku usaha.

Tabel 54. | Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2023 (Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Kementerian PAN RB)

No	Kompo-nen	Sub Kompo-nen	Indikator Penilaian	Bo-bot	Skor	Skor In-dex	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,5	2,5	1. Terdapat Sasaran Kegiatan Utama yang belum dikawal dengan Rencana Aksi yang relevan; 2. Rencana Aksi belum sepenuhnya didukung dengan anggaran yang memadai.	1. Memastikan Rencana Aksi relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama; 2. Melakukan reviu agar Rencana Aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektifitas dan efisiensi.	Tim Penilai Nasional
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	96,23	5,61			Tim Penilai Nasional
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	100	2	Ke depannya masih perlu pertimbangan terkait eselon III dan IV yang masih ada	pertahankan	Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	5	2	sudah sangat baik	sudah sangat baik	Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	3,56	2,85	1. Penetapan Tujuan a) Rumusan rencana kerja belum menggambarkan cascading yang jelas dari sasaran program sampai dengan sasaran kegiatan. b) Terdapat satu sasaran kegiatan yang mendukung 2 sasaran strategis c) Terdapat beberapa indikator target kinerja yang kurang tepat mendukung sasaran kegiatan d) Penetapan Kinerja masih berorientasi pada *Output* dan belum pada *outcome* sehingga kurang dapat berperan kepada dampak pada target yang ditetapkan dalam renstra KL 2. Struktur dan Proses Belum adanya pemantauan hasil evaluasi secara berkelanjutan, risiko belum menyentuh risiko strategis dan prioritas risiko, rekomendasi belum dilakukan untuk memperbaiki kinerja, dan evaluasi belum dilakukan atas pengendalian risiko residual. 3. Pencapaian Tujuan Indikator target belum mempertimbangkan capaian tahun lalu	1. Penetapan Tujuan a) Melakukan pemetaan capaian sasaran kegiatan dan sasaran program dalam mendukung keselarasan capaian *outcome* b) Melakukan identifikasi maupun telaah atas beberapa indikator dan target pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai dari Sasaran Strategis sampai dengan Sasaran Program yang belum cukup/belum tepat. 2. Struktur dan Proses Melakukan pengujian terhadap unsur Penilaian Risiko dan Aktivitas Pengendalian sehingga manajemen risiko dapat diterapkan dan melekat dalam proses bisnis KKP, mulai dari level operasional hingga strategis 3. Pencapaian Tujuan Melakukan identifikasi capaian yang terlalu tinggi dan menjadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan penetapan target periode selanjutnya	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	3	1	1	Sangat Baik	Terlampir pada Laporan Hasil Evaluasi Zona Integritas Unit Kerja (Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/181/ PW.04/2023 tanggal 27 November 2023)	Kementerian PAN RB c.q. Deputi RB Kunwas

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4	83,65	3,35	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyusun pohon kinerja dengan memperhatikan isu strategis, ekspektasi kinerja yang diharapkan, serta mengaitkan pohon kinerja tersebut dengan tematik yang berfokus pada 5 prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun pola perjenjangan yang sudah disusun tersebut masih perlu disempurnakan, terutama dalam menjabarkan kinerja strategis yang ada pada pohon kinerja tersebut ke level kinerja taktikal maupun operasional dengan memperhatikan hubungan sebab akibat serta kesesuaiannya dengan peran unit kerja teknis dalam mendukung ekspetasi kinerja yang dimiliki; 2. Penetapan target kinerja yang telah dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama unit kerja teknis di daerah, belum sepenuhnya didasarkan pada hasil realisasi kinerja sebelumnya 3. Informasi kinerja yang telah dituangkan dalam LAKIP, baik dipusat maupun di unit kerja, belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik untuk menentukan target maupun strategi serta aktivitas dalam perencanaan kinerja untuk mendukung pencapaian kinerja kedepan.	1. Menyempurnakan perjenjangan kinerja yang dimiliki, terutama ketika menjabarkan kinerja dari level strategis ke level kinerja dibawahnya dengan mempertimbangkan hubungan sebab akibat serta kesesuaiannya dengan peran unit kerja teknis dalam mendukung ekspektasi kinerja dan tematik yang dimiliki; 2. Melakukan reviu atas target yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja di level pusat hingga unit kerja teknis di daerah dengan memperhatikan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan kondisi eksisting kinerja menuju masa akhir Renstra sehingga target yang dimiliki telah berdasarkan pada kondisi kinerja yang riil dan sesuai dengan kebutuhan 3.Terus mendorong pemanfaatan informasi dalam LAKIP, baik dilevel pusat maupun unit kerja, terutama dalam proses menentukan target, strategi, serta aktivitas yang akan diperjanjikan setiap unit kerja dalam perencanaan kinerja kedepan; 4. Terlampir pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 2023 (Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/65/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023)	Kementerian PAN RB c.q. Deputi RB Kunwas

No	Kompo-nen	Sub Kompo-nen	Indikator Penilaian	Bo-bot	Skor	Skor In-dex	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	94,28	1,89	Dengan catatan 1.b.2 konsistensinya antara renja dan renstr anya menunjukkan nilai 6,44 dari nilai maksimal 8	- Meningkatkan koordinasi K/L dengan Mitra K/L agar keselarasan pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis Renja K/L dengan Renstra K/L lebih optimal. Konsistensi mencakup Nomenklatur, Satuan Target dan Besaran Target Sasaran - Mendapatkan dukungan supervisi / arahan khusus dari Mitra K/L atau pihak yang disarankannya dengan maksud memastikan terjadi peningkatan keselarasan mencakup Nomenklatur, Satuan Target dan Besaran Target Sasaran pada Renja K/L dan Renstra K/L. - Meningkatkan konsistensi, utamanya pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis dalam hal besaran Target yang belum maksimal. - Memastikan Nomenklatur dan Satuan Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis, pada Renja K/L dan Renstra K/L memiliki kesamaan kata berikut tata cara penulisan Besaran Targetnya.	Kementerian PPN/ Bappenas - Biroren
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	2	0,8	Sudah menyusun Arsitektur	Perlu menyusun Peta Rencana SPBE	"Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik"

No	Kompo-nen	Sub Kompo-nen	Indikator Penilaian	Bo-bot	Skor	Skor In-dex	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	87,62	1,75	1. Seluruh Kebijakan kearsipan telah ditetapkan dan memenuhi kriteria serta telah disosialisasikan. 2. Telah melakukan alih media arsip sesuai dengan prosedur serta telah memenuhi target yang telah ditetapkan 3. Telah menggunakan SRIKANDI versi live namun hanya untuk penerimaan dan pengiriman naskah dinas antar instansi. Aplikasi internal menggunakakn E-layar yang mencakup proses bisnis kearsipan secara menyeluruh meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan (pemberkasan), penyusutan, termasuk penerapan tanda tangan elektronik yang bersertifikat BSSN 4. Telah tersedia sumber pengelolaan arsip elektronik. 5. Sedang dalam proses menjadi simpul pada JIKN	1. Menerapkan aplikasi SRIKANDI secara menyeluruh yang mencakup keseluruhan proses bisnis kearsipan. 2. Mendaftar sebagai simpul JIKN dan melaksanakan seluruh tanggungjawab sebagai simpul jaringan.	Arsip Nasional Republik Indonesia
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	93,74	1,87	Rencana penarikan dana masih belum optimal. K/L masih belum mampu merencanakan penarikan dana berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan dalam perspektif jangka pendek (triwulanan) dengan baik, sehingga dapat berdampak pada proyeksi perencanaan kas pemerintah.	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal. 2. Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja. 3. Melakukan pengendalian pencairan anggaran sesuai RPD.	Kementerian Keuangan - DJPB

No	Kompo-nen	Sub Kompo-nen	Indikator Penilaian	Bo-bot	Skor	Skor In-dex	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pengelolaan Aset	2	3,34	1,67	Hasil pengukuran IPA pada KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN adalah 3,34. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa parameter dengan indeks kurang/buruk, yaitu parameter: Realisasi PNBP dari Pengelolaan BMN, Tindak Lanjut Pengelolaan BMN	Dalam upaya peningkatan indeks pada parameter Realisasi PNBP dari Pengelolaan BMN, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga adalah peningkatan PNBP melalui pemanfaatan BMN, perbaikan target/ estimasi PNBP dari pengelolaan BMN yang disampaikan kepada DJA, optimalisasi penggunaan BMN dalam rangka peningkatan persentase kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK, serta tindak lanjut atas BMN yang masuk kategori rusak berat dalam hal BMN dapat dipindahtangankan melalui mekanisme penjualan secara lelang. Kementerian/ Lembaga juga diharapkan dapat melakukan tindak lanjut atas setiap persetujuan pengelolaan BMN yang diterbitkan oleh KPKNL, dan selanjutnya melakukan pengkinian data terhadap informasi BMN yang dikelola.	Kementerian Keuangan - DJKN
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	1,5	5	1,5			Kementerian PANRB - Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik

No	Kompo-nen	Sub Kompo-nen	Indikator Penilaian	Bo-bot	Skor	Skor In-dex	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan	1,5	83,94	1,26	Kelebihan dari kebijakan tingkat instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kerangka IKK ialah proses Agenda Setting berkaitan langsung dengan prioritas nasional jangka pendek dan menengah dan penentuan masalah berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum. Selain itu, implementasi kebijakan sudah jelas, rasional, berorientasi kedepan dan dapat dipertang-gungjawabkan. Kekurangan dari kebijakan tingkat instansi dalam kerangka IKK ialah beberapa data belum memenuhi relevansi pada ajawaban dan terdapat jawaban yang tidak disertai bukti dukung yang kuat dan sesuai. Berdasarkan kondisi hasil input *self assessment, enumerator* telah melakukan pengisian sampel kebijakan dengan baik. Saran teknis yang perlu dilakukan ialah instansi perlu melengkapi dan menggunggah bukti dukung yang relevan dengan jawaban yang dipilih dari tiap-tiap pertanyaan yang diberikan. Lembaga Administrasi Negara	Berdasarkan kondisi hasil input self assessment, enumerator telah melakukan pengisian sampel kebijakan dengan baik. Saran teknis yang perlu dilakukan ialah instansi perlu melengkapi dan menggunggah bukti dukung yang relevan dengan jawaban yang dipilih dari tiap-tiap pertanyaan yang diberikan.	Lembaga Administrasi Negara
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Hukum	1,5	96,44	1,45	Pelaksanaan Reformasi Hukum Prima.	Pelaksanaan Reformasi Hukum dipertahankan.	Kementerian Hukum dan HAM

No	Kompo-nen	Sub Kompo-nen	Indikator Penilaian	Bo-bot	Skor	Skor In-dex	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,5	2,68	0,8	- Penyelenggaraan statistik sektoral di Kementerian Kelautan Dan Perikanan sudah mencapai predikat Baik. - Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik terkait penyelenggaraan forum SDI telah dilaksanakan oleh Walidata Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui keterlibatan aktif walidata dalam Forum Satu Data Indonesia (SDI) dan pemenuhan rencana aksi yang disepakati dalam forum tersebut. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berkoordinasi dan berkolaborasi antar produsen data di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. - Penerapan Aspek Perencanaan Data terkait proses Pendefinisian Kebutuhan Statistik belum dilaksanakan oleh produsen data, dimana tidak ditemukan bukti dukung yang menunjukkan adanya penerapan Pendefinisian Kebutuhan Statistik. I24	Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu melakukan penyusunan proses pendefinisian kebutuhan statistik yang berlaku bagi seluruh produsen data melalui penkajian dalam mengidentifikasi kebutuhan, konsultasi, dan konfirmasi kebutuhan yang ditetapkan oleh walidata dan berlaku untuk seluruh produsen data.	Badan Pusat Statistik
17	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	86,44	1,73	Baik	Selamat atas prestasi yang diraih. Tingkatkan pencapaian khususnya untuk keterisian Formasi Jabfung Pengelola PBJ	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

No	Kompo-nen	Sub Kompo-nen	Indikator Penilaian	Bo-bot	Skor	Skor In-dex	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
18	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Merit	4	393	3,83		1) Menyusun dan menetapkan SKJ untuk seluruh jabatan; 2) Menyempurnakan Manajemen Talenta yang telah dibangun dengan memperhatikan prinsip – prinsip Manjamen Talenta agar menghasilkan rencana suksesi yang sesuai; 3) Melaksanakan pengembangan dan pembinaan karier pegawai berdasarkan pada Manajemen Talenta; 4) Menyusun rencana pengembangan kompetensi individu berdasarkan pada hasil analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja, baik melalui metode klasikal maupun non – klasikal; 5) Melaksanakan promosi dan mutasi pegawai sesuai peraturan perundang – undangan dan prinsip dasar sistem merit.	Komisi Aparatur Sipil Negara
19	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	1,5	4,64	1,39			"Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik
20	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	88,86	1,33			Ombudsman Republik Indonesia
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks SPBE	9	3,58	6,44		Rekomendasi dapat dilihat pada Laporan Hasil Evaluasi yang dapat diakses melalui aplikasi tauval.spbe.go.id	"Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik"

No	Kompo-nen	Sub Kompo-nen	Indikator Penilaian	Bo-bot	Skor	Skor In-dex	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian Prioritas Nasional	2	96,61	1,93	Kinerja kategori Baik berdasarkan Efektivitas IK K/L dan Efektivitas RO K/L dalam mendukung Prioritas Nasional Tahun 2022	Perlu peningkatan kinerja pada indikatorsasaran strategis: (i) Pertumbuhan PDB perikanan; (ii) Nilai ekspor hasil perikanan; dan (iii) Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman. Perlu peningkatan kinerja pada RO: (i) Rekomendasi pemetaan potensi biofarmakologi dan pemanfaatan air laut; (ii) Kapal perikanan bantuan yang tersalurkan; dan (iii) Pelabuhan perikanan UPT Daerah yang ditingkatkan fasillitasnya, termasuk untuk menunjang PNBP perikanan tangkap.	Kementerian PPN/ Bappenas - Deputi PEPP
23	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IK	8	76,19	5,1			Tim Penilai Nasional
24	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Opini BPK	5	5	5			Badan Pemeriksa Keuangan
25	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	85	3,4			Badan Pemeriksa Keuangan
26	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks BerAkhlak	4	62,5	2,5	Cukup Sehat		Kementerian PAN RB c.q. Deputi SDMA

No	Kompo-nen	Sub Kompo-nen	Indikator Penilaian	Bo-bot	Skor	Skor In-dex	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
27	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Penilaian Integritas	10	79,19	7,92	TerJAGA	Rekomendasi 1 : Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, hingga tidak ada lagi perintah atasan yang tidak sesuai aturan, dan pegawai yang bertidak tidak sesuai aturan.; Rekomendasi 2 : Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye kepada seluruh pemangku kepentingan, terkait upaya pencegahan yang telah dilakukan (jika sudah ada), khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut: (1) Kebijakan, regulasi, dan mekanisme pelaporan/pengelolaan gratifikasi di instansi. (2) Penegakan sanksi/ hukuman penerimaan suap/gratifikasi. (3) Pelatihan dan komunikasirutin dengan pegawai/ pimpinan untuk menciptakan perilaku yang menghindari penerimaan suap/ gratifikasi. (4) Mekanisme pengaduan tindakan suap/gratifikasi dan tindak lanjutnya, serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal.; Rekomendasi 3 : Intensifikasi, sosialisasi, serta kampanye penegakan aturan mengenai pengelolaan benturan kepentingan serta penyalah-gunaan perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalah-gunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan.;	Komisi Pemberantasan Korupsi

No	Kompo-nen	Sub Kompo-nen	Indikator Penilaian	Bo-bot	Skor	Skor In-dex	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
								Rekomendasi 4 : Perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan serta memastikan hal-hal berikut: (1) Implementasi proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Internalisasi terkait dengan peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Penguatan mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa. (4) Mengintensifkan penggunaan vendor management system. (5) Pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan. (6) Penyesuaian proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.; Rekomendasi 5 : Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan untuk melindungi pelapor praktik korupsi, hingga tidak ada lagi respons negatif terhadap pelapor praktik korupsi.;	

No	Kompo-nen	Sub Kompo-nen	Indikator Penilaian	Bo-bot	Skor	Skor In-dex	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
								Rekomendasi 6 : Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, untuk meminimalkan hingga tidak memberikan toleransi bagi pengaruh pihak eksternal dalam menentukan program/ kegiatan.; Rekomendasi 7 : Mempertahankan upaya internalisasi kesadaran dan perilaku untuk melaporkan LHKPN, meskipun sebagian besar responden menganggap tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tinggi.; Rekomendasi 8 : Mempertahankan penyediaan informasi tentang pelaksanaan tugas yang memadai, meskipun sebagian besar responden menganggap penyediaan informasi sudah baik.; Rekomendasi 9 : Perbaikan mendasar terhadap upaya peningkatan prosedur layanan yang sudah dilakukan dengan memastikan berbagai hal berikut: (1) Proses bisnis yang sederhana dan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. (2) Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan terkait dengan layanan yang diberikan. (3) Evaluasi dan memotret sudut pandang pengguna layanan terkait dengan prosedur dan kejelasan layanan.	
28	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Kepuasan Masyarakat	8	89,6	7,17		Tetap melaksanakan SKM dan melakukan evaluasi hasil SKM secara konsisten	Kementerian PANRB - Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat
29	RB General	Net Koefisien	Net Koefisien	10					Tim Penilai Nasional

No	Kompo-nen	Sub Kompo-nen	Indikator Penilaian	Bo-bot	Skor	Skor In-dex	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
30	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	0,8	0,67	0,67	Rencana aksi tematik yang disusun belum seluruhnya menjabarkan "how to" atau bagaimana langkah-langkah dalam mencapai sasaran.	Memastikan Rencana aksi tematik yang disusun telah menjabarkan "how to" atau bagaimana langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan sasaran.	Tim Penilai Nasional
31	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	0,8	0,65	0,65	Rencana aksi belum menunjukkan adanya intervensi dalam aspek tata kelola, seperti perencanaan dan penganggaran, proses bisnis dan SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.	Memastikan intervensi dalam rencana aksi memenuhi sebagian besar aspek perencanaan dan penganggaran, proses bisnis dan SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.	Tim Penilai Nasional
32	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus pada Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	0,8	0,48	0,48	Intervensi dalam Rencana aksi yang disusun belum memuat unsur digitalisasi.	Memastikan bahwa intervensi Rencana aksi memiliki unsur digitalisasi pada tematik "Digitalisasi Administrasi Pemerintahan pada Fokus Penanganan Stunting" sesuai dengan Road Map RB Nasional (Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023).	Tim Penilai Nasional
33	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	0,8	0,8	0,8			Tim Penilai Nasional
34	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Laju Inflasi (Strategi Pembangunan)	0,8					Tim Penilai Nasional
35	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	1,2	0,42	0,42			Tim Penilai Nasional
36	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	1,2	0,98	0,98			Tim Penilai Nasional
37	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	1,2	0,3	0,3			Tim Penilai Nasional
38	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	1,2	87,99	1,06			Tim Penilai Nasional
39	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Laju Inflasi (Capaian Dampak)	1,2					Tim Penilai Nasional

3. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Dalam melaksanakan reformasi birokrasi, kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Reformasi Birokrasi di KKP antara lain:

1. Kegiatan utama yang diamanatkan dalam *Road Map* RB Nasional telah dituangkan pada *Road Map* RB KKP.
2. Indikator kegiatan utama telah dikawal dengan target yang logis, realistis, dan berorientasi peningkatan kinerja.
3. Tersedia anggaran yang memadai dalam mendukung pelaksanaan aksi yang telah ditetapkan.
4. Penetapan rencana aksi juga telah memperhatikan kondisi *baseline*/eksisting.
5. Penetapan indikator *output* pada setiap aksi telah relevan dan cukup dalam menjawab aksi yang ditetapkan.
6. Penetapan target pada setiap indikator *output* telah mencakup aspek kejelasan, kelayakan, dan keterukuran dari target yang ditetapkan untuk mengukur hasil atau capaian dari suatu aksi.
7. Telah ditetapkannya *Road Map* RB Tahun 2023-2024 dan Rencana Aksi RB Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2023
8. telah menyelenggarakan Internalisasi Praktik Baik RB di lingkungan KKP pada tanggal 17 Maret 2023 dalam rangka menindaklanjuti surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Nomor B/01/RB.06/2023, tanggal 18 Januari 2023, hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023.
9. Telah mengusulkan inovasi berdasarkan kriteria inovasi digitalisasi yang telah dilaksanakan secara konkrit, memberikan hasil nyata yang positif dengan indikator yang terukur, serta telah menerima penghargaan dari eksternal termasuk yang telah menjadi nominasi untuk mendapatkan penghargaan. Berdasarkan kriteria tersebut terpilih 10 (sepuluh) usulan praktik baik KKP yang selanjutnya diusulkan kepada Kementerian PAN dan RB 31 Maret 2023.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2023, beberapa hal yang akan dilakukana untuk peningkatan kualitas tata kelola birokrasi di KKP diantaranya:

1. Melakukan penyederhanaan birokrasi (penyederhaaan organisasi/transformasi berbasis kinerja dan *agile*).
2. Melaksanakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi ASN.
3. Penguatan implementasi SPIP.
4. Meningkatkan pembangunan Zona Integritas dan meningkatkan layanan konsultasi dan fasilitasi terhadap seluruh unit kerja.
5. Meningkatkan pelaksanaan SAKIP yang terintegrasi.
6. Melakukan optimalisasi penerapan SPBE yang terintegrasi dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur tingkat efektivitas dan dampak penerapan SPBE.
7. Meningkatkan implementasi digitalisasi arsip
8. Penguatan pengelolaan keuangan dan asset.
9. Penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR).
10. Pelaksanaan tata Kelola kebijakan publik
11. Meningkatkan kematangan penyelenggaran *statistic sectoral*
12. Penguatan tata Kelola pengadaan barang dan jasa
13. Penguatan sistem merit
14. Peningkatan pelayanan publik prima
15. Meningkatkan mutu *self-assessement* atas aspek-aspek pada hasil antara area perubahan dan koordinasi dengan instansi *leading*

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP (nilai)
Tahun 2023

IK.18 Nilai IKPA

Definisi

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga.

Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga Cakupan pengukuran nilai IKPA meliputi tiga aspek, diantaranya:

1. Pengukuran aspek kualitas perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud, merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA;
2. Pengukuran aspek kualitas pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud, merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA;
3. Pengukuran aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud, merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA.

Tabel 55. | Capaian IKPA KKP Tahun 2023

Sasaran Strategis 8. Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas										
IK 18. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP (nilai)										
Realisasi 2020-2022			2023				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
93,95	92,15	93,49	93,75	91,99	98,12%	-1,60	93,75	98,12%	93,76	98,11%

Adapun formula dalam penilaian nilai akhir IKPA dan bobot dari setiap indikator IKPA, sebagai berikut:

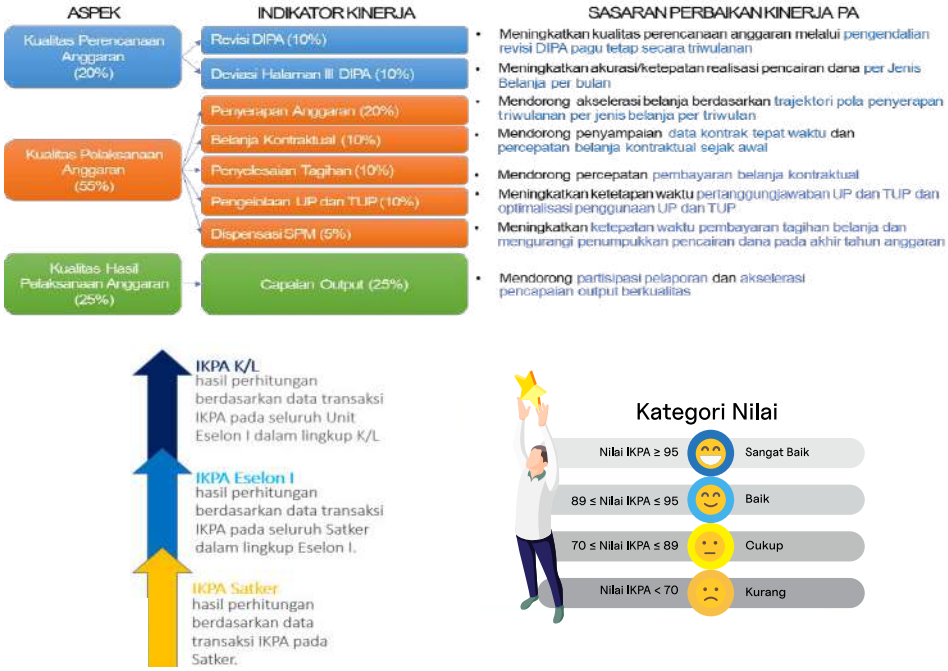

Gambar 103. | Kategori Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Pada November 2023 terdapat revisi terhadap penetapan target IKPA Tahun 2023, dimana semula target IKPA 2023 adalah sebesar 89,00, kemudian sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 938/SJ.1/RC.610/XI/2023 tanggal 1 November 2023 hal Hasil Pembahasan Indikator Kinerja Manajerial Tahun 2024 berubah menjadi:

Tabel 56. | Revisi Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dan 2024

Tahun	Semula	Berubah Menjadi	Kewajiban Pencantuman IK/PK Pada Tahun 2023 dan 2024
2023	89	93,75	Level 0, Level 1, Level 2 (Satker Pusat, UPT, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)
2024	90	93,76	Level 0, Level 1, Level 2 (Satker Pusat, UPT, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)

Analisis Capaian

Capaian IKPA per tanggal 10 Januari 2024 sebesar 91,99 atau mencapai 97,06% dari target sebesar 93,75 atau mengalami perlambatan sebesar1,6 persen apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 93,49.

Tabel 57. | Capaian IKPA KKP Tahun 2023

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	68.93	85.57	93.10	99.17	95.72	85.00	99.73	91.99	100%	91.99
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	10.00	6.89	17.11	9.31	9.92	9.57	4.25	24.93			
			Nilai Aspek	84.47		91.71					99.73			

Dilihat dari tabel diatas terlihat bahwa, faktor yang menyebabkan target IKPA KKP tidak tercapai adalah Indikator Deviasi Hal III DIPA dan Indikator Penyerapan anggaran. Hal ini disebabkan karena :

1. Blokir anggaran pada seluruh Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang baru dibuka pada Juli dan Agustus 2023, sehingga banyak kegiatan yang direncanakan tertunda. Hal ini berpengaruh pada RPD dengan pelaksanaan penyerapan anggaran.
2. Adanya ketidaksinkronan antara bagian perencanaan, Keuangan, dan Penanggungjawab Kegiatan ikut berpengaruh juga terhadap nilai IKPA. Perlu berkoordinasi antar bagian untuk melakukan mereformulasi/merencanakan kegiatan-kegiatan yang tertunda, serta merevisi Hal III DIPA.
3. Proses Pengadaan barang/Jasa yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan awal/jadwal yang ditetapkan.

Adapun capaian nilai IKPA per Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 58. | Rincian Capaian IKPA KKP Tahun 2023 Per Unit Eselon I

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	03213	BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	Nilai	100.00	74.24	96.85	84.24	99.61	96.62	100.00	99.92	95.85	100%	95.85
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	10.00	7.42	19.38	8.42	9.96	9.68	5.00	24.98			
			Nilai Aspek	87.12		97.51					99.92			
2	03202	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	66.26	96.47	84.00	100.00	98.95	100.00	100.00	95.22	100%	95.22
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	10.00	6.63	19.29	8.40	10.00	9.90	5.00	25.00			
			Nilai Aspek	83.13		97.88					100.00			
3	03212	BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	72.15	92.30	93.32	98.95	96.44	90.00	100.00	94.05	100%	94.05
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	10.00	7.22	18.46	9.33	9.90	9.64	4.50	25.00			
			Nilai Aspek	86.08		94.20					100.00			
4	03205	DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	65.84	86.50	93.45	89.02	91.64	90.00	99.99	91.79	100%	91.79
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	10.00	6.58	17.30	9.35	8.90	9.16	4.50	25.00			
			Nilai Aspek	82.92		92.12					99.99			
5	03207	DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	Nilai	100.00	69.74	82.28	90.53	98.99	94.38	80.00	99.45	90.68	100%	90.68
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	10.00	6.97	16.46	9.05	9.90	9.44	4.00	24.86			
			Nilai Aspek	84.87		89.24					99.45			
6	03201	SEKRETARIAT JENDERAL	Nilai	100.00	56.83	82.40	92.74	99.40	95.89	90.00	100.00	90.47	100%	90.47
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	10.00	5.68	16.48	9.27	9.94	9.59	4.50	25.00			
			Nilai Aspek	78.42		92.09					100.00			
7	03203	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	Nilai	100.00	63.88	79.69	93.25	99.14	96.26	85.00	99.44	90.30	100%	90.30
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	10.00	6.39	15.94	9.33	9.91	9.63	4.25	24.86			
			Nilai Aspek	81.94		90.67					99.44			
8	03208	DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	59.56	73.95	94.05	100.00	97.20	100.00	100.00	89.87	100%	89.87
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	10.00	5.96	14.79	9.41	10.00	9.72	5.00	25.00			
			Nilai Aspek	76.78		93.04					100.00			
9	03204	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai	100.00	62.28	78.12	93.39	99.17	97.52	80.00	99.42	89.71	100%	89.71
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	10.00	6.23	15.62	9.34	9.92	9.75	4.00	24.85			
			Nilai Aspek	81.14		89.64					99.42			

Beberapa hal yang telah dilaksanakan untuk mencapai nilai IKPA pada Tahun 2023 antara lain:

1. Rapat Koordinasi peningkatan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Lingkup KKP
2. Monitoring Progres Penyesuaian Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA.
3. Dalam rangka peningkatan capaian indikator penyelesaian tagihan, melakukan upaya dengan menyampaikan Nota Dinas dan Memorandum kepada seluruh Unit Eselon I dengan melampirkan data kontrak yang berakhir sampai dengan bulan Oktober, November dan Desember 2023. Berdasarkan data kontrak tersebut, Unit Eselon I diharapkan menyampaikan ke Satuan Kerja di lingkupnya dan segera menyelesaikan pertanggungjawaban untuk kontrak yang telah jatuh tempo, mempersiapkan dokumen pertanggungjawaban untuk kontrak yang akan jatuh tempo, dan melakukan revisi karwas kontrak apabila terjadi addendum kontrak.
4. Peningkatan capaian indikator Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) melalui penyampaian Nota Dinas kepada seluruh Unit Eselon I dengan melampirkan data UP dan TUP Satuan Kerja yang akan berakhir di bulan berkenaan.
5. Peningkatan capaian indikator Deviasi Halaman III DIPA melalui penyampaian Nota Dinas ke seluruh Unit Eselon I dan Memorandum di lingkup Sekretariat Jenderal mengenai batas waktu pemutakhiran data Rencana Penarikan Dana (RPD) di halaman III DIPA, dan himbauan untuk merealisasikan anggaran sesuai RPD yang telah ditetapkan.

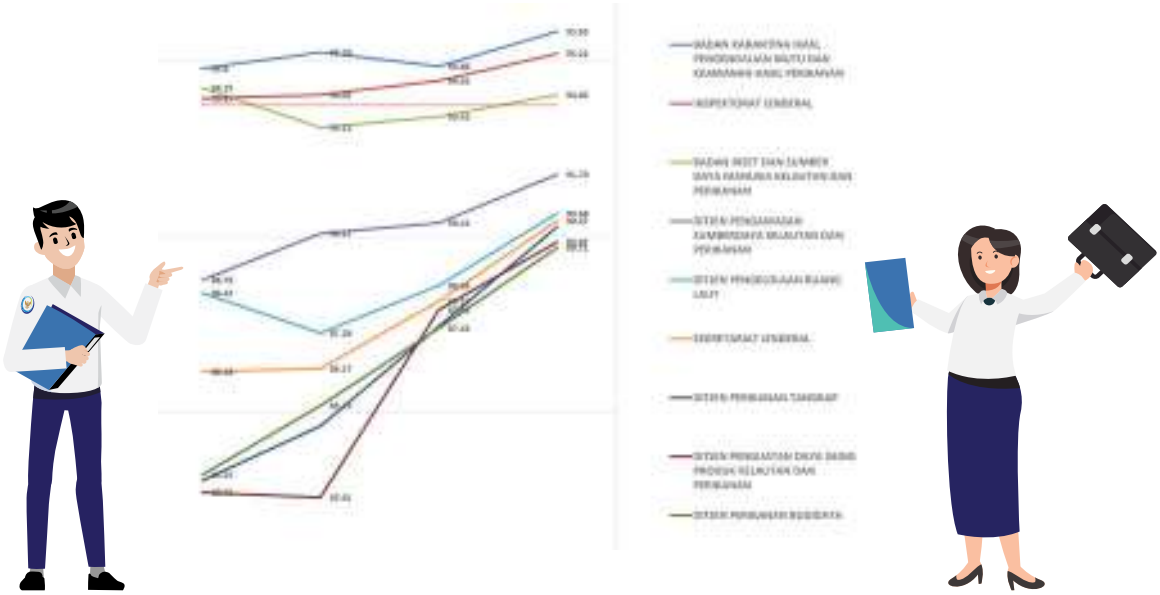

Gambar 104. | Capaian IKPA Triwulanan Unit Eselon I KKP Tahun 2023

Tabel 59. | Perbandingan Nilai IKPA K/L Seluruh Indonesia Tahun 2023

No	Nama KL	Nilai IKPA 2023
1	Badan Pemeriksa Keuangan	97,64
2	Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	97,54
3	Kementerian Keuangan	97,48
4	Badan Pengawas Obat Dan Makanan	96,9
5	Dewan Perwakilan Rakyat	96,64
6	Kepolisian Negara Republik Indonesia	96,28
7	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	95,88
8	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri	95,69
9	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	95,52
10	Dewan Ketahanan Nasional	95,43
11	Kementerian Dalam Negeri	95,39
12	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi	95,38
13	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	95,33
14	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	95,27
15	Mahkamah Agung	95,24
16	Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	95,18
17	Kementerian Pertahanan	95,13
18	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	94,79
19	Badan Narkotika Nasional	94,63
20	Dewan Perwakilan Daerah (Dpd)	94,49
21	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan	94,46
22	Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional	94,45
23	Badan Pusat Statistik	94,39
24	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	94,24
25	Lembaga Administrasi Negara	94,16
26	Kejaksaan Republik Indonesia	94,06
27	Kementerian Pendidikan Nasional	93,98
28	Kementerian Perhubungan	93,89
29	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	93,89

No	Nama KL	Nilai IKPA 2023
30	Majelis Permusyawaratan Rakyat	93,58
31	Kementerian Agama	93,41
32	Badan Standardisasi Nasional	93,33
33	Komisi Pemberantasan Korupsi	93,32
34	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	93,3
35	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	93,29
36	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	93,24
37	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan	93,1
38	Kementerian Perdagangan	92,97
39	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	92,74
40	Badan Keamanan Laut	92,65
41	Arsip Nasional Republik Indonesia	92,61
42	Kementerian Pariwisata	92,59
43	Sekretariat Kabinet	92,56
44	Ombudsman Republik Indonesia	92,55
45	Mahkamah Konstitusi Ri	92,54
46	Badan Intelijen Negara	92,52
47	Kementerian Luar Negeri	92,39
48	Badan Pengawasan Pemilihan Umum	92,35
49	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)	92,32
50	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	92,21
51	Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Bpn	92,13
52	Kementerian Kesehatan	92,12
53	Kementerian Kelautan dan Perikanan	91,99
54	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	91,87
55	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	91,83
56	Badan Kepegawaian Negara	91,69

No	Nama KL	Nilai IKPA 2023
57	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	91,63
58	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	91,53
59	Lembaga Sandi Negara	91,39
60	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	91,23
61	Kementerian Sosial	91,18
62	Lembaga Ketahanan Nasional	91,03
63	Kementerian Sekretariat Negara	90,9
64	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	90,64
65	Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika	90,48
66	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	90,45
67	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	89,89
68	Komisi Yudisial Ri	89,82
69	Komisi Pemilihan Umum	89,52
70	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	89,24
71	Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional	89,04
72	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	88,88
73	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Bpip)	88,82
74	Kementerian Pertanian	88,4
75	Kementerian Ketenagakerjaan	88,25
76	Kementerian Pemuda Dan Olah Raga	88,07
77	Kementerian Koperasi Dan Pengusaha Kecil Dan Menengah	87,48
78	Kementerian Perindustrian	87,42
79	Badan Riset Dan Inovasi Nasional	87,05
80	Badan Koordinasi Penanaman Modal	85,07
81	Badan Pangan Nasional	82,35
82	Otorita Ibu Kota Nusantara	77,05

Sumber: OM SPAN 12 Januari 2024 Pukul 17.12

Program/Kegiatan yang Menunjang Indikator Kinerja

Dalam rangka mencapai target Nilai IKPA KKP Tahun 2023, KKP terus berkomitmen melaksanakan anggaran secara berkualitas dengan didukung melalui kegiatan penunjang diantaranya melalui pendampingan dan peningkatan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Lingkup KKP, Monitoring Progres Penyesuaian Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA, peningkatan capaian indikator penyelesaian tagihan, peningkatan capaian indikator Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), peningkatan capaian indikator Deviasi Halaman III DIPA dan merealisasikan anggaran sesuai RPD yang telah ditetapkan.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Rencana Aksi yang akan dilakukan untuk peningkatan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran untuk Tahun ke depannya adalah:

1. Melakukan rapat koordinasi peningkatan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker lingkup KKP setiap awal bulan.
2. Monitoring progres penyesuaian Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA.
3. Dalam rangka peningkatan capaian indikator penyelesaian tagihan, Biro Keuangan melakukan upaya menyampaikan Nota Dinas dan Memorandum kepada seluruh Unit Eselon I dan Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal dengan melampirkan data kontrak yang berakhir sampai dengan bulan berkenaan. Berdasarkan data kontrak tersebut, Unit Eselon I diharapkan menyampaikan ke Satuan Kerja di lingkupnya dan segera menyelesaikan pertanggungjawaban untuk kontrak yang telah jatuh tempo, mempersiapkan dokumen pertanggungjawaban untuk kontrak yang akan jatuh tempo, dan melakukan revisi karwas kontrak apabila terjadi addendum kontrak.
4. Peningkatan capaian Indikator Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) melalui penyampaian Nota Dinas kepada seluruh Unit Eselon I dengan melampirkan data UP dan TUP Satuan Kerja yang akan berakhir di bulan berkenaan.
5. Peningkatan capaian indikator Deviasi Halaman III DIPA melalui penyampaian Nota Dinas ke seluruh Unit Eselon I dan Memorandum di lingkup Sekretariat Jenderal mengenai batas waktu pemutakhiran data Rencana Penarikan Dana (RPD) di halaman III DIPA, dan himbauan untuk merealisasikan anggaran sesuai RPD yang telah ditetapkan.

Kinerja Rincian Output (RO) dalam Mendukung Prioritas Nasional (PN) Tahun 2023

Pada Tahun 2023, terdapat enam Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah 2023 yang diterjemahkan ke dalam Rincian *Output* (RO) *Tagging* Prioritas Nasional (PN) dengan anggaran dan realisasi sebagaimana tercantum dalam **Gambar 105.**

Kinerja Anggaran

APBN KKP (KKP) Tahun 2023 sebesar Rp6.455.280.145.000 yang terbagi ke dalam sembilan DIPA Induk untuk masing-masing Unit Eselon I lingkup KKP. Berikut rincian anggaran per Unit Eselon I. Pada **Tabel 60**

Gambar 105. | Rincian *Output* (RO) Mendukung Prioritas Nasional Dalam Rencana Kerja KKP Tahun 2023

KKP memiliki lima sumber dana dalam pelaksanaan anggaran di Tahun anggaran 2023 yaitu Rupiah Murni (RM), Pinjaman Luar Negeri (PLN), Rupiah Murni Pendamping (RMP), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Badan Layanan Umum (BLU), dan Hibah Langsung Luar Negeri. Berikut nilai pagu KKP per sumber dana. **Tabel 61.**

Tabel 60. | Pagu Anggaran KKP per Unit Eselon I per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023

No	Unit Eselon I	Pagu Belanja Pegawai	Pagu Belanja Barang	Pagu Belanja Modal	Total Pagu
1.	Setjen	77.585.945.000	421.398.023.000	157.796.637.000	656.780.605.000
2.	Itjen	33.995.348.000	39.513.389.000	2.157.649.000	75.666.386.000
3.	Ditjen PT	190.303.701.000	618.211.426.000	62.299.899.000	870.815.026.000
4.	Ditjen PB	168.653.178.000	807.237.488.000	124.346.639.000	1.100.237.305.000
5.	Ditjen PSDKP	170.336.026.000	696.778.928.000	256.578.577.000	1.123.693.531.000
6.	Ditjen PDSPKP	56.500.000.000	280.969.412.000	5.811.201.000	343.280.613.000
7.	Ditjen PRL	100.241.987.000	298.774.570.000	14.596.439.000	413.612.996.000
8	BRSDMKP	742.912.977.000	583.146.966.000	39.219.572.000	1.365.279.515.000
9	BKIPMKHP	260.471.817.000	224.938.272.000	20.504.079.000	505.914.168.000
	TOTAL	1.801.000.979.000	3.970.968.474.000	683.310.692.000	6.455.280.145.000

Tabel 61. | Pagu Anggaran KKP per Sumber Dana Tahun Anggaran 2023

No	Sumber Dana	Pagu Belanja Pegawai	Pagu Belanja Barang	Pagu Belanja Modal	Total Pagu
1	Rupiah Murni	1.801.000.979.000	3.626.302.585.000	564.764.060.000	5.992.067.624.000
2	Pinjaman Luar Negeri	-	74.590.043.000	1.308.846.000	75.898.889.000
3	Rupiah Murni Pendamping	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000
4	Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	155.090.703.000	49.790.691.000	204.881.394.000
5	Badan Layanan Umum	-	69.559.555.000	4.954.631.000	74.514.186.000
6	Hibah Langsung Luar Negeri	-	44.425.588.000	62.492.464.000	106.918.052.000
7.	Ditjen PRL	100.241.987.000	298.774.570.000	14.596.439.000	413.612.996.000
8	BRSDMKP	742.912.977.000	583.146.966.000	39.219.572.000	1.365.279.515.000
9	BKIPMKHP	260.471.817.000	224.938.272.000	20.504.079.000	505.914.168.000
	TOTAL	1.801.000.979.000	3.970.968.474.000	683.310.692.000	6.455.280.145.000

KKP memiliki 396 Satuan Kerja (Satker) yang terbagi ke dalam empat kewenangan Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) yang terbagi pada sembilan Unit Eselon I dengan rincian sebagai berikut. **Tabel 62**

KKP memiliki empat kewenangan Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) dengan postur anggaran sebagai berikut, tampak dalam **Tabel 63**.:

Tabel 62. | Jumlah Satuan Kerja Lingkup KKP Tahun 2023

No	Unit Eselon I	Kantor Pusat	Kantor Daerah	Dekon-sentrasi	Tugas Pembantuan	Total Satker
1	Sekretariat Jenderal	2	1	34	-	37
2	Inspektorat Jenderal	1	-	-		1
3	Ditjen Perikanan Tangkap	1	23	34	23	81
4	Ditjen Perikanan Budidaya	1	15	34	-	50
5	Ditjen Pengawasan SDKP	1	14	34	-	49
6	Ditjen Penguatan Daya Saing KP	1	1	34	-	36
7.	Ditjen Kelautan dan Pengelolaan Ruang Laut	1	8	34	10	53
8	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP	2	39	-	-	41
9	Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	1	47	-	-	48
	TOTAL	11	148	204	33	396

Tabel 63. | Pagu Anggaran KKP per Kewenangan Tahun Anggaran 2023

No	Kewenangan	Pagu Belanja Pegawai	Pagu Belanja Barang	Pagu Belanja Modal	Total Pagu
1	Dekonsentrasi	-	77.595.535.000	-	77.595.535.000
2	Kantor Daerah	1.395.008.559.000	1.799.829.671.000	200.115.036.000	3.394.953.266.000
3	Kantor Pusat	405.992.420.000	2.073.655.218.000	483.195.656.000	2.962.843.294.000
4	Tugas Pembantuan	-	19.888.050.000	-	19.888.050.000
	TOTAL	1.801.000.979.000	3.970.968.474.000	683.310.692.000	6.455.280.145.000

Realisasi Anggaran KKP (KKP) Tahun 2023 per tanggal 14 Januari 2024 sebesar Rp6.335.397.393.486 dari total pagu sebesar Rp6.455.280.145.000 atau sebesar 98,14%.

Berikut rincian realisasi anggaran per Unit Eselon I sebagai berikut:

Tabel 64. | Realisasi Anggaran KKP Tahun 2023

No	Unit Eselon I	Kantor Pusat	Kantor Daerah	Total Satker
1.	Sekretariat Jenderal	656.780.605.000	631.652.629.134	96,17%
2.	Inspektorat Jenderal	75.666.386.000	75.393.908.501	99,64%
3.	Ditjen Perikanan Tangkap	870.815.026.000	842.674.640.680	96,77%
4.	Ditjen Perikanan Budidaya	1.100.237.305.000	1.087.136.906.277	98,81%
5.	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.123.693.531.000	1.119.216.743.475	99,60%
6.	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	343.280.613.000	339.604.537.406	98,93%
7.	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	413.612.996.000	399.297.824.951	96,54%
8.	Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.365.279.515.000	1.342.845.268.762	98,36%
9.	Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	505.914.168.000	497.626.943.467	98,36%
	Jumlah	6.455.280.145.000	6.335.454.623.418	98,14%

Sumber. Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan, 14 Januari 2024

Pada Tabel 63 dapat dilihat bahwa persentase realisasi anggaran tertinggi dicapai oleh Unit Inspektorat Jenderal sebesar Rp75,3 miliar atau sebesar 99,64% dari pagu Rp75,6 miliar dan persentase penyerapan terendah pada Unit Sekretariat Jenderal dengan realisasi sebesar Rp631,6 miliar atau 96,17% dari pagu sebesar Rp656,7 miliar.

Selanjutnya capaian realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja yang terbagi dalam tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai dengan realisasi sebesar Rp1,7 triliun atau sebesar 98,69% dari pagu sebesar Rp1,8 triliun, belanja barang dengan realisasi sebesar Rp3,8 triliun atau sebesar 97,69% dari pagu sebesar Rp3,9 triliun dan belanja modal dengan realisasi sebesar Rp678 miliar atau sebesar 99,32% dari pagu sebesar Rp683 miliar. Berikut rincian realisasi anggaran KKP Tahun 2023 per jenis belanja per tanggal 14 Januari 2024 sebagaimana **Tabel 65**..

Tabel 65. | Pagu dan Realisasi Anggaran per Unit Eselon I per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023

No	Unit Eselon I	Belanja Pegawai (Rp000,-)			Belanja Barang (Rp000,-)			Belanja Modal (Rp000,-)		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1.	Setjen	77.585.945	75.237.085	96,97	421.398.023	399.242.348	94,74	157.796.637	157.173.196	99,60
2.	Itjen	33.995.348	33.738.656	99,24	39.513.389	39.498.216	99,96	2.157.649	2.157.036	99,97
3.	Ditjen PT	190.303.701	188.285.717	98,94	618.211.426	593.079.760	95,93	62.299.899	61.309.164	98,41
4.	Ditjen PB	168.653.178	165.462.820	98,11	807.237.488	797.757.880	98,83	124.346.639	123.916.207	99,65
5.	Ditjen PSDKP	170.336.026	169.510.309	99,52	696.778.928	693.643.129	99,55	256.578.577	256.063.305	99,80
6.	Ditjen PDSPKP	56.500.000	54.810.973	97,01	280.969.412	279.088.484	99,33	5.811.201	5.705.080	98,17
7.	Ditjen PRL	100.241.987	98.632.702	98,39	298.774.570	286.117.008	95,76	14.596.439	14.496.105	99,31
8.	BRSDMKP	742.912.977	734.036.420	98,81	583.146.966	570.985.639	97,91	39.219.572	37.823.209	96,44
9.	BKIPMKHP	260.471.817	257.663.222	98,92	224.938.272	219.918.148	97,77	20.504.079	20.045.573	97,76
	Jumlah	1.801.000.979	1.777.377.906	98,69	3.970.968.474	3.879.330.613	97,69	683.310.692	678.688.875	99,32

Sumber. Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan, 14 Januari 2024

Realisasi anggaran berdasarkan sumber dana yang terbagi dalam enam sumber dana yaitu belanja Rupiah Murni (RM) dengan realisasi sebesar Rp5,9 triliun atau sebesar 98,97% dari pagu sebesar Rp5,9 triliun, Pinjaman Luar Negeri (PLN) dengan realisasi sebesar Rp61 miliar atau sebesar 81,66% dari pagu sebesar Rp75 miliar, Rupiah Murni Pendamping (RMP) dengan realisasi sebesar Rp0 atau sebesar 0% dari pagu sebesar Rp1 miliar, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan realisasi sebesar Rp187 miliar atau sebesar 91,50% dari pagu sebesar Rp204 miliar, Badan Layanan Umum (BLU) dengan realisasi sebesar Rp48 miliar atau sebesar 65,52% dari pagu sebesar Rp74 miliar, dan Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) dengan realisasi sebesar Rp106,7 miliar atau sebesar 99,80% dari pagu sebesar Rp 106,9 miliar. Berikut rincian realisasi anggaran KKP Tahun 2023 berdasarkan sumber dana per tanggal 14 Januari 2024, **Tabel 66**.

Realisasi anggaran berdasarkan kewenangan yang terbagi dalam empat kewenangan yaitu Dekonsentrasi dengan realisasi sebesar Rp74 miliar atau sebesar 96,42% dari pagu sebesar Rp77 miliar, Kantor Daerah dengan realisasi sebesar Rp3,34 triliun atau sebesar 98,64% dari pagu sebesar Rp3,39 triliun, Kantor Pusat dengan realisasi sebesar Rp2,8 triliun atau sebesar 97,64% dari pagu sebesar Rp2,9 triliun, dan Tugas Pembantuan dengan realisasi sebesar Rp18 miliar atau sebesar 95,51% dari pagu sebesar Rp19 miliar. Berikut rincian realisasi anggaran KKP Tahun 2023 berdasarkan kewenangan per tanggal 14 Januari 2024 sebagaimana **Tabel 67**.

Tabel 66. | Pagu dan Realisasi Anggaran KKP per Sumber Dana Tahun Anggaran 2023

)No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1.	Rupiah Murni	5.992.067.624.000	5.930.448.694.099	98,97%
2.	Pinjaman Luar Negeri	75.898.889.000	61.979.882.540	81,66%
3.	Rupiah Murni Pendamping	1.000.000.000	-	0,00%
4.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	204.881.394.000	187.460.314.455	91,50%
5.	Badan Layanan Umum	74.514.186.000	48.822.236.494	65,52%
6.	Hibah Langsung Luar Negeri	106.918.052.000	106.699.523.080	99,80%
	Jumlah	**6.455.280.145.000**	**6.335.454.623.418**	**98,14%**

Sumber. Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan, 14 Januari 2024

Tabel 67. | Pagu dan Realisasi KKP per Kewenangan TA 2023

No	Kewenangan	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1.	Dekonsentrasi	77.595.535.000	74.820.659.312	96,42
2.	Kantor Daerah	3.394.953.266.000	3.348.749.580.997	98,64
3.	Kantor Pusat	2.962.843.294.000	2.892.888.384.937	97,64
4.	Tugas Pembantuan	19.888.050.000	18.995.998.172	95,51
	Jumlah	**6.455.280.145.000**	**6.335.454.623.418**	**98,14%**

Sumber. Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan, 14 Januari 2024

Pagu dan Realisasi Anggaran KKP (KKP) selama 5 Tahun terakhir dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 sebagaiman tersaji pada **Tabel 68**.

Tabel 68. | Pagu dan Realisasi KKP per Kewenangan TA 2023

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1.	2019	5.510.787.032.000	5.055.148.917.815	91,73%
2.	2020	5.269.869.632.000	4.809.863.593.815	91,27%
3.	2021	4.773.318.827.000	4.720.482.382.960	98,89%
3.	2022	5.468.879.184.000	5.397.792.629.733	98,70%
4.	2023	6.455.280.145.000	6.335.454.623.418	98,14%

Sumber. Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan, 14 Januari 2024

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi penggunaaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi unit kerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi: data capaian nilai kinerja sasaran strategis, data alokasi anggaran dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan perhitungan, nilai efisiensi anggaran KKP tahun 2023 adalah sebesar 5 %. Efisiensi tersebut merupakan hasil optimalisasi pelaksanaan kegiaan di lingkungan KKP melalui koordinasi, kolaborasi dan sinergi antar KL, swasta, Unit Kerja Eselon I lingkup KKP dan pihak terkait serta komitmen bersama seluruh jajaran untuk terus berbenah diri dan mendukung pencapaian kinerja organisasi. Perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dapat dilihat pada **Tabel 69**.

Tabel 69. | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

No	Sasaran Program	Nilai Pencapaian Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	%NPSP x Anggaran Per Sasaran	% Efisiensi Anggaran
1.	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	100,14%	475.917.356.000	465.886.873.231	97,89%	476.583.640.298	10.696.767.067
2.	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	110,17%	319.392.991.000	314.381.556.130	98,43%	351.875.258.185	37.493.702.055
3.	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	93,00%	309.550.103.000	287.217.619.819	92,79%	287.881.595.790	663.975.971
4.	Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat	105,96%	311.322.212.000	292.954.504.338	94,10%	329.877.015.835	36.922.511.497
5.	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	100,00%	97.254.752.000	92.042.455.440	94,64%	97.254.752.000	5.212.296.560
6.	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	104,93%	629.146.711.000	612.898.464.291	97,42%	660.163.643.852	47.265.179.561
7.	Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif	100,99%	794.060.426.000	792.292.797.539	99,78%	801.921.624.217	9.628.826.678
8.	Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	103,81%	3.518.635.594.000	3.477.623.844.198	98,83%	3.652.695.610.131	175.071.765.933
			6.455.280.145.000	6.335.298.114.986	96,20%	6.658.253.140.309	322.955.025.323
						% Efisiensi (8/4)	5,00%

Sumber. Aplikasi Krisna, kinerjaku dan OMSPAN, Kementerian Keuangan (diolah)

Dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya, KKP berkoordinasi, berkolaborasi dan bersinergi dengan KL/Perguruan Tinggi/ LSM/Lembaga terkait program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang terintegrasi sehingga dampaknya semakin besar dan nyata bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden dan tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dimana pembangunan nasional dilaksanakan lintas KL sehingga tercipta efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang semakin terbatas ditengah tantangan global yang semakin komplek. Kolaborasi/integrasi/ kerja sama dengan KL/lembaga terkait dalam rangka mendukung percepatan pembangunan kelautan dan perikanan dilakukan dalam bentuk Kerja sama/Kesepakatan Bersama/ Perjanjian Kerja Sama/ Memorandum Saling Pengertian/ Nota Kesepakatan. Pada Tahun 2023, kerja sama yang telah dilakukan KKP untuk mendukung pencapaian target kinerja sebagaimana Gambar 106.

Gambar 106a. | KKP berkoordinasi dan bersinergi dengan K/L, BUMN dan PEMDA

Gambar 106b. | KKP berkoordinasi, berkolaborasi dan bersinergi dengan universitas, Ormas Lokal, Ormas Asing dan Swasta

Tabel 70. | Daftar Kerja Sama KKP dengan Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah dan Pemerintah Daerah

No	Kerjasama	Mulai	Berakhir	Tentang
		Non Pemerintah		
1	Kesepakatan Bersama (KB) antara KKP dan IKA UNDIP	25 Februari 2023	25 Februari 2028	Sinergi Program Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan
2	KB antara KKP dan PT. BRI (pesero) Tbk	6 Maret 2023	6 Maret 2028	Pemanfaatan Jasa dan Layana Perbankan dalam Peningkatan Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan
3	Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pusat Pelatiahan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan BRSDMKP dan Perkumpulan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK Indonesia)	16 Juni 2023	16 Juni 2025	Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (Aparatur Sipil Negara & Masyarakat) melalui program Pembentukan Agen Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK)
4	PKS antara GISLI (Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia) dan DJPDSPKP	6 Juli 2023	6 Juli 2025	Pembinaan Masyarakat Pesisir di Bidang Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan
5	PKS antara BRSDMKP dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)	16 Agustus 2023	16 Agustus 2026	Sinergi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
6	PKS antara President University dan BRSDMKP	08 September 2023	08 September 2023	Pengembangan Sumberdaya Manusia Bidang Kelautan dan Perikanan
7	PKS antara Shrimp Club Indonesia (SCI) dan BRSDMKP	19 September 2023	19 September 2026	Pengembangan Sumberdaya Manusia Bidang Kelautan dan Perikanan
8	PKS antara Himpunan Pembudidaya Ikan Laut Indonesia (HIPLI) dan BRSDMKP	19 September 2023	19 September 2026	Pengembangan Sumberdaya Manusia Bidang Kelautan dan Perikanan
9	PKS antara PT. Multidaya Teknologi Nusantara (*E-Fishery*) dan BRSDMKP	19 September 2023	19 September 2026	Pengembangan Sumberdaya Manusia Bidang Kelautan dan Perikanan
		Pemerintah Daerah		
1	Nota Kesepahaman (NK) antara Pemda Waktobi dan DJPDSPKP	18 Juli 2023	18 Juli 2026	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Rumput Laut dalam rangka Modeling Hilirisasi Rumput Laut di Kabupaten Wakatobi
2	NK antara Pemda Kab. Ciamis dan BRSDMKP	12 Juli 2023	12 Juli 2026	Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan di Desa Perikanan Cerdas/*Smart Fisheries Village* Kab. Ciamis

No	Kerjasama	Mulai	Berakhir	Tentang
3	NK Antara Pemda Kab. Purbalingga dan BRSDMKP	12 Juli 2023	12 Juli 2026	Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan di Desa Perikanan Cerdas di Kab. Purbalingga
4	NK Antara Pemda Kab. Barru dan BRSDMKP	12 Juli 2023	12 Juli 2026	Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan di Desa Perikanan Cerdas di Kab. Barru
5	NK antara Pemda Waktobi dan BRSDMKP	10 Agustus 2023	10 Agustus 2026	Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan di Kab. Wakatobi
6	PKS antara Pemda Waktobi dan DJPB	10 Agustus 2023	10 Agustus 2026	Pengembangan Budidaya Rumput Laut dalam rangka *Modelling* Hilirisasi Rumput Laut di Kabupaten Waktobi
7	NK Antara Pemda Kab. Konawe Utara dan BRSDMKP	19 September 2023	19 September 2026	Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan di Kab. Konawe Utara
8	NK Antara Pemda Kab. Bengkulu Selatan dan BRSDMKP	19 September 2023	19 September 2026	Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan di Kab. Bengkulu Selatan
9	NK Antara Pemda Kab. Tulungagung dan BRSDMKP	19 September 2023	19 September 2026	Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan di Kab. Tulungagung
10	NK Antara Pemda Kab. Tanah Bumbu dan BRSDMKP	19 September 2023	19 September 2026	Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan di Kab. Tanah Bumbu
		Kementerian/Lembaga		
1	KB antara KKP dan Kementerian BUMN	2 Februari 2023	2 Februari 2026	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2	PKS antara DJPT dan PT. Pertamina Patra Niaga	2 Februari 2023	2 Februari 2026	Dukungan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Sentra/Kampung Nelayan dan Pelabuhan Perikanan
3	NK antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan KKP	3 Juli 2023	3 Juli 2028	Peningkatan Keamanan, Mutu, Manfaat dan Daya Saing Obat dan Makanan bersumber dari Produk Kelautan dan Perikanan

Evaluasi atas Capaian Kinerja Tahun 2023 sebagai *Feedback* Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2023, capaian Kinerja KKP berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan terdapat 18 indikator kinerja, dengan rincian 14 indikator kinerja telah tercapai sesuai target dan 4 indikator kinerja belum tercapai.

Empat belas indikator yang terlah tercapai terdiri dari:

1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP target 62,66 dengan realisasi 62,75.
2. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman target ≤76 dengan realisasi 58,18.
3. Luas kawasan konservasi perairan target 29,1 juta ton dengan realisasi 29,2 juta ton.
4. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB(Perikanan target 4% realisasi 5,49%.
5. Konsumsi ikan target 57,61 kg/kapita/tahun realisasi 57,61 kg/kapita/tahun (angka pronogsa).
6. Tenaga kerja yang terlibat target 456.657 orang realisasi 569.631 orang.
7. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri/DUDI target 70% realisasi 74,17%.
8. WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur target 11 dengan realisasi 11.
9. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir target 32 realisasi 32 kawasan.
10. Produksi garam target 2 juta ton realisasi 2,55 juta ton.
11. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor target 98% dengan realisasi 99,84%.
12. Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP target Rp6,99 triliun dengan realisasi Rp7,7 triliun.
13. Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan target 97 realisasi 97,96%.
14. Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP target 74 realisasi 85,40.

Sedangkan 4 indikator kinerja yang belum tercapai yaitu :

1. Nilai ekspor hasil perikanan target 6,77 USD miliar dengan realisasi sebesar 5,63 USD miliar.
2. Nilai PNBP sektor KP target Rp. 4,04 triliun dengan realisasi Rp1,69 triliun.
3. Produksi perikanan target 28,22 juta ton realisasi 24,74 juta ton.
4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP target 93,75 realisasi 91,99.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada bab Analisa Capaian Kinerja, KKP telah melakukan beberapa upaya sepanjang tahun 2023 untuk 4 indikator kinerja yang capaiannya belum optimal dengan rincian sebagai berikut :

1. Produksi perikanan, KKP telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
   1) Membangun Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kebumen, Jawa Tengah dengan luas 100 hektar dan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Maret 2023. BUBK telah panen perdana yang dihadiri oleh Wakil Presiden pada 26 Juli 2023.
   2) Melakukan revitalisasi tambak udang di 8 lokasi dan tambak bandeng di 5 lokasi.
   3) Membangun *modelling* hilirisasi rumput laut di Wakatobi dengan luasan 45 hektar.
   4) Menyediakan 83,18 juta ekor bantuan benih udang, 12 ribu ekor calon induk udang, 33,64 juta ekor bantuan benih dan 67,19 ribu ekor bantuan calon induk.

5) Pembangunan 2 unit percontohan pembenihan kepiting di Pasuruan.
6) Penyaluran bantuan 163 unit keramba jaring apung.
7) Penyaluran bantuan bioflok 657 unit.
8) Membangun Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) sebanyak 55 paket.
9) Penyaluran bantuan 28 unit mesin dan bahan baku pakan.
10) Pengembangan sistem perbenihan sebanyak 3 unit *broodstock center.*
11) Pelepasan jenis dan/atau varietas ikan unggul bekerja sama dengan unit kerja lainnya, yaitu telah dilakukan pelepasan sebanyak 10 varietas induk unggul (Udang vaname Global Gen, Ikan Batak Tor Soro, Nila Nirwana II, Nila Sultana, Nila Srikandi, Kerapu Cantang, Nila Anjani, Nila Merah Nilasa, Nila Jantan Pandu dan Nila Betina Kunti, Lele Sangkuriang dua dan Induk Udang Unggul Vaname NuSa Dewa (Nusantara Sakti Dewata).
12) Percepatan pelaksanaan kegiatan sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB).
13) Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan UPT daerah serta kelengkapan SDM pendataan.
14) Terdistribusikannya 1.243 unit mesin kapal perikanan di 24 Provinsi.
15) Terdistribusikannya 19.002 unit alat kapal perikanan di 24 Provinsi.
16) Sertifikasi awak kapal perikanan sebanyak 49.812 orang.
17) Pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di 42 lokasi.
18) Koordinasi dengan BP Migas dan Pertamina untuk mendapatkan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan.
19) Koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Kementerian BUMN untuk memperluas jangkauan program solar untuk koperasi nelayan.
20) Mempermudah akses pendanaan dan permodalan bagi nelayan untuk operasional melaut melalui BLU LPMUKP, fasilitasi KUR, gerai pendanaan, dan gerai nelayan.

2. Ekspor Hasil Perikanan, KKP telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
   1) Mengembangkan sistem jaminan mutu keamanan dan hasil perikanan berkelas internasional dan setara dengan negara maju.
   2) KKP berhasil menuntaskan kesepakatan penurunan post tarif ekspor sebesar untuk 4 komoditas tuna olahan ke Jepang. *Zero* tarif ekspor tersebut berlaku untuk tuna kaleng dan cakalang kaleng dari semula 9,6% menjadi 0%, serta dua pos tarif *katsuobushi* dengan *HS Code* 1604.14-091 dan tuna lainnya *HS Code* 1604.14-099, semula 9,6% menjadi 0%.
   3) Mempercepat proses penanganan hambatan ekspor di Amerika Serikat melalui pemenuhan Persyaratan Sertifikasi Udang Tangkapan Amerika Serikat.
   4) Mempercepat penyelesaian peningkatan akses pasar di Jepang, melalui percepatan penyelesaian perundingan *Indonesian-Japan Economic Partnersip agreement* (IJEPA) untuk produk perikanan.
   5) Melakukan sinergitas dan kerjasama dengan BPOM dalam rangka pelaksanaan ekspor ikan dan olahan ikan ke Kerajaan Arab Saudi.
   6) Mendorong UMKM yang berpotensi ekspor untuk berpartisipasi pada pameran skala internasional sehingga dapat memperluas jaringan dan meningkatkan daya saing di pasar global.

3. PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan, KKP telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
   1) Penyempurnaan proses bisnis dan regulasi pengelolaan PNBP terutama mekanisme pemungutan, perhitungan, penyetoran dan sanksi pengelolaan PNBP.
   2) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan PNBP sehingga lebih cepat, tepat, dan terintegrasi.
   3) Peningkatan pembinaan dan koordinasi antar instansi.
   4) Optimalisasi fungsi kantor vertikal KKP di daerah/Unit Pelaksana Teknis dalam rangka penguatan data potensi, perencanaan, kinerja, dan implementasi kebijakan PNBP.
   5) Peningkatan pengawasan dan peran serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka pengawasan kepatuhan perundangundangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atas pengelolaan PNBP.
   6) Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi PNBP.

Beberapa kendala dalam mencapai produksi perikanan diantaranya:

1) Tingginya biaya produksi sebagai akibat dari tingginya harga pakan pabrikan.
2) Serangan penyakit yang di akibatkan oleh virus dan bakteri.
3) Cuaca dan gelombang tinggi di beberapa daerah di Indonesia yang mengakitbatkan nelayan tidak dapat melaut.
4) Fenomena *elnino* yang mengakibatkan kekeringan dan terbatasnya pasokan air untuk budidaya air tawar.

Penyebab tidak tercapainya target nilai ekspor hasil perikanan antara lain:

1) Kinerja ekspor perikanan Indonesia mengalami penurunan dikarenakan perlambatan ekonomi dunia dan aktivitas produksi atau industri di berbagai negara yang menyebabkan permintaan global menurun. Perlambatan ekonomi terjadi di negara utama tujuan ekspor produk perikanan diantaranya Amerika Serikat yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Beberapa komoditas utama yang berkontribusi terhadap penurunan impor tersebut dan merupakan komoditas utama ekspor Indonesia ke Amerika Serikat antara lain: Udang, Rajungan-kepiting,Tuna-Cakalang-Tongkol, Tilapia, dan Cumi-Sotong-Gurita.
2) Diversifikasi pasar produk ekspor belum optimal dikarenakan adanya hambatan ekspor di beberapa negara tujuan baik hambatan tarif maupun non tarif. Kendala ekspor non-tarif antara lain hambatan registrasi dan penambahan eksportir terdaftar di negara tujuan ekspor antara lain Uni Eropa, Rusia, China, Arab Saudi, Chili dan Brazil.

Penyebab tidak tercapainya target Nilai PNBP Sektor KP antara lain:

1) Tahun 2023 merupakan tahun transisi pelaksanaan penarikan pascaproduksi yang sebelumnya praproduksi, dimana kapal yang beroperasi di tahun 2023 masih mengantongi izin praproduksi dan sudah membayar PNBP prapoduksi di tahun 2022. Kapal yang masih mengantongi izin (SIPI) praproduksi belum dapat ditarik PNBP pascaproduksi sampai dengan izin pascaproduksinya terbit.

2) Penarikan PNBP Sumber Daya Alam (SDA) perikanan pascaproduksi menggunakan metode *self assessment* (wajib bayar atau pelaku usaha pemilik izin yang menghitung sendiri besaran kewajiban pembayaran PNBP). Pada tahun transisi 2023, kepatuhan pelaku usaha untuk melaporkan data produksi penangkapan ikan secara lengkap dan akurat masih belum optimal dengan berbagai modus yang dilakukan.
3) Pada saat penyusunan target 2023, penetapan target diasumsikan dapat dilaksanakannya penarikan PNBP SDA dengan sistem kontrak sebagaimana telah diatur dalam PP No. 85 Tahun 2021. Namun demikian, pada perkembangannya ketentuan sistem kontrak dimaksud berdasarkan hasil rapat harmonisasi dengan Kementerian/Lembaga terkait tidak dapat diimplementasikan.
4) Sebagian besar pelabuhan perikanan yang menjadi pelabuhan pangkalan penarikan PNBP SDA pascaproduksi adalah pelabuhan perikanan UPT daerah yang sulit dikontrol oleh KKP.

Penyebab tidak tercapainya target IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) antara lain:

1) Blokir anggaran pada seluruh Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang baru dibuka pada Juli dan Agustus 2023, sehingga banyak kegiatan yang direncanakan tertunda. Hal ini berpengaruh pada Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan pelaksanaan penyerapan anggaran.
2) Kurangnya koordinasi antara bagian perencanaan, keuangan, dan penanggungjawab kegiatan dalam identifikasi, mereformulasi/merencanakan lagi kegiatan-kegiatan yang tertunda, serta segera merevisi Hal III DIPA.
3) Proses pengadaan barang/Jasa yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan awal/jadwal yang ditetapkan.

Memperhatikan Capaian Kinerja Tahun 2023, KKP telah menetapkan Target 2024 melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan rincian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 71. | Realisasi Tahun 2023 dan Target Kinerja Tahun 2024

Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Target 2024
Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat					**100,14**		
Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	62,66	62,75	100,14	63,87
Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan							
Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	Minimize	Nilai Posisi Akhir	76	58,18	120,00	80
Luas kawasan konservasi perairan	Juta Ha	Maximize	Nilai Posisi Akhir	29,1	29,2	100,34	29,3

Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Target 2024
Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat					**93**		
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Perikanan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	4	5,49	120,00	5
Nilai ekspor hasil perikanan	USD miliar	Maximize	Nilai Posisi Akhir	6,77	5,63	83,16	7,2
Konsumsi ikan	kg/kap/ thn	Maximize	Nilai Posisi Akhir	57,61	57,61	100,00	59
Nilai PNBP sektor KP	Triliun Rupiah	Maximize	Nilai Posisi Akhir	4,04	1,69	41,85	4,465
Tenaga kerja yang terlibat	orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	456.657,00	569.631,00	120,00	489.211
Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat							
Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri / DUDI	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	74,17	105,96	72,00
Tatakelola SDKP bertanggung jawab					**100**		
WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur	WPP	Maximize	Nilai Posisi Akhir	11	11	100,00	11
Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir	kawasan	Maximize	Nilai Posisi Akhir	32	32	100,00	21
Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing					**104,93**		
Produksi perikanan	Juta Ton	Maximize	Nilai Posisi Akhir	28,22	24,74	87,67	30,85
Produksi garam	Juta Ton	Maximize	Nilai Posisi Akhir	2	2,55	120,00	2
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	98	99,84	101,88	99
Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP	Triliun Rupiah	Maximize	Nilai Posisi Akhir	6,99	7,7	110,16	10,85
Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif					**100,99**		
Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	97	97,96	100,99	98
Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas					**103,81**		
Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	78	85,4	109,49	80
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,75	91,99	98,12	93,76

Untuk mencapai target kinerja Tahun 2024, KKP mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,1 triliun yang terbagi dalaam 5 Program Pembangunan sebagaimana tersaji pada **Tabel 72**.

Tabel 72. | Anggaran KKP Tahun 2024

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Pengelolaan Perikanan dan kelautan	2.567.997.401.000
2.	Kualitas Lingkungan Hidup	105.603.306.000
3.	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	188.254.910.000
4.	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	372.294.839.000
5.	Dukungan Manajemen	3.869.613.981.000
	Jumlah	**7.103.764.437.000**

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerimtah (SAKIP) Tahun 2023

Berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP KKP oleh Kementerian PAN dan RB Tahun 2023 sebagaimana surat Menteri PAN dan RB Nomor B/65/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 hal Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023, Nilai SAKIP KKP Tahun 2023 sebesar 83,65 (Predikat A) dengan rincian komponen sebagaimana **Tabel 73.**

Tabel 73. | Hasil Evaluasi SAKIP KKP Tahun 2023

Komponen	Bobot	Nilai		Peningkatan Nilai
		2022	2023	
Perencanaan Kinerja	30	26,84	27,03	0,19
Pengukuran Kinerja	30	25,2	25,39	0,19
Pelaporan Kinerja	15	12,45	12,69	0,24
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,35	18,54	0,19
Nilai Hasil Evaluasi	100	82,84	83,65	0,81
Tingkat Akuntabilitas		A	A	

Terdapat 11 rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut:

1) Melakukan reviu atas target yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja di level pusat hingga unit kerja teknis di daerah dengan memperhatikan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan kondisi eksisting kinerja menuju masa akhir rencana strategis sehingga target yang dimiliki telah berdasarkan pada kondisi kinerja yang riil dan sesuai dengan kebutuhan.
2) Menyempurnakan penjenjangan kinerja yang dimiliki, terutama ketika menjabarkan kinerja dari level strategis ke level kinerja dibawahnya dengan mempertimbangkan hubungan sebab akibat serta kesesuaiannya dengan peran unit kerja teknis dalam mendukung ekspektasi kinerja dan tematik yang dimiliki.
3) Mengoptimalkan pemanfaatan penjenjangan kinerja yang dimiliki sebagai alat dalam menentukan tim kerja serta hasil kinerja yang diharapkan sesuai amanat Keputusan Menteri KP Nomor 43 Tahun 2023. Pengimplementasian tersebut agar tidak hanya dilakukan oleh unit kerja yang pusat saja, namun dapat dilakukan hingga ke setiap unit kerja teknis yang berada di daerah.
4) Mengoptimalkan kualitas pengimplementasian *crosscutting* kinerja pada setiap kondisi yang ingin diwujudkan, terutama dalam mengentaskan kemiskinan, dengan cara melakukan pemantauan berkala atas hasil pelaksanaan dari *tagging* program yang dimiliki guna memastikan kinerja yang dihasilkan telah sesuai dengan peran dan ekspektasi yang diharapkan. Selain itu, KKP agar melakukan pemetaan antara hasil kinerja yang menjadi milik Kementerian dan yang dapat diklaim oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari proses mengurangi adanya saling klaim kinerja.
5) Mendorong pemanfaatan pohon kinerja yang sudah disusun untuk menjawab kontribusi KKP dengan memastikan bahwa setiap kegiatan dan aktivitas yang akan dilakukan telah berdasarkan pohon kinerja yang sudah disusun tersebut sehingga pemanfaatan pohon kinerja tersebut dapat selaras dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
6) Mendorong pemanfaatan hasil penilaiaan kinerja organisasi sebagai bagian dari proses penilaian kinerja individu, terutama dalam memastikan adanya peningkatan signifikan pada realisasi kinerja organisasi berdasarkan hasil kinerja setiap individu.
7) Terus mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja yang sudah dilakukan secara berkala sebagai bagian dari proses penyesuaian target kinerja unit kerja kedepan.
8) Menyempurnakan kualitas informasi dalam Laporan Kinerja (LKJ) unit kerja dengan memastikan setiap unit kerja mengifomasikan secara lengkap hasil analisis faktor keberhasilan dan kegagalan yang mempengaruhi ketercapaian kinerja serta potensi efisiensi sumber daya yang dilakukan dalam merealisasikan kinerja.
9) Terus mendorong pemanfaatan informasi dalam LKJ, baik dilevel pusat maupun unit kerja, terutama dalam proses menentukan target, strategi, serta aktivitas yang akan diperjanjikan setiap unit kerja dalam perencanaan kinerja kedepan.
10) Mendorong unit kerja untuk memanfaatkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) internal yang sudah disampaikan sebagai bagian dari bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan strategi, kualitas kinerja, serta perbaikan capaian kinerja pada level kementerian, terutama pada PDB sektor perikanan.

11) Mendorong unit kerja untuk memanfaatkan hasil evaluasi AKIP Internal yang sudah disampaikan sebagai bagian dari bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan strategi, kualitas kinerja, serta perbaikan capaian kinerja pada level Kementerian terutama pada PDB sektor perikanan.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, KKP telah menyusunan rencana aksi tindak lanjut sebagaimana dalam **Tabel 74**.

Tabel 74. | Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi SAKIP KKP Tahun 2023

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
1.	Melakukan reviu atas target yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja di level pusat hingga unit kerja teknis didaerah dengan memperhatikan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan kondisi eksisting kinerja menuju masa akhir rencana strategis sehingga target yang dimiliki telah berdasarkan pada kondisi kinerja yang riil dan sesuai dengan kebutuhan	Melakukan reviu dan validasi usulan indikator dan target secara berjenjang dari level I dan level II lingkup KKP, dengan mempertimbangkan dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan serta hasil evaluasi realisasi capaian tahun sebelumnya.
2.	Menyempurnakan penjenjangan kinerja yang dimiliki, terutama ketika menjabarkan kinerja dari level strategis ke level kinerja dibawahnya dengan mempertimbangkan hubungan sebab akibat serta kesesuaiannya dengan peran unit kerja teknis dalam mendukung ekspektasi kinerja dan tematik yang dimiliki	1. Telah menuangkan Bab Penjenjangan Kinerja (menggunakan *Logical Framework* sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah) pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2. Melakukan reviu dan penyempurnaan penjenjangan kinerja mulai dari unit kerja Eselon I sampai dengan daerah.
3.	Mengoptimalkan pemanfaatan penjenjangan kinerja yang dimiliki sebagai alat dalam menentukan tim kerja serta hasil kinerja yang diharapkan sesuai amanat Keputusan Menteri KP Nomor 43 Tahun 2023. Pengimplementasian tersebut agar tidak hanya dilakukan oleh unit kerja yang pusat saja, namun dapat dilakukan hingga ke setiap unit kerja teknis yang berada di daerah.	1. Melakukan validasi indikator dan target dalam penentuan tim kerja serta hasil kerja mulai unit kerja pusat sampai dengan unit kerja teknis KKP yang berada di daerah. 2. Melakukan uji petik implementasi SAKIP pada unit pelaksana teknis lingkup KKP.

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
4.	Mengoptimalkan kualitas pengimplementasian crosscutting kinerja pada setiap kondisi yang ingin diwujudkan, terutama dalam mengentaskan kemiskinan, dengan cara melakukan pemantauan berkala atas hasil pelaksanaan dari tagging program yang dimiliki guna memastikan kinerja yang dihasilkan telah sesuai dengan peran dan ekspektasi yang diharapkan. Selain itu, KKP agar melakukan pemetaan antara hasil kinerja yang menjadi milik Kementerian dan yang dapat diklaim oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari proses mengurangi adanya saling klaim kinerja.	Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas hasil pelaksanaan dari *tagging* program kemiskinan ekstrem.
5.	Mendorong pemanfaatan pohon kinerja yang sudah disusun untuk menjawab kontribusi KKP dengan memastikan bahwa setiap kegiatan dan aktivitas yang akan dilakukan telah berdasarkan pohon kinerja yang sudah disusun tersebut sehingga pemanfaatan pohon kinerja tersebut dapat selaras dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.	1. Menyusun pohon kinerja yang memuat program kegiatan yang menggambarkan kontribusi KKP. 2. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program kegiatan yang merupakan kontribusi KKP dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dengan memanfaatkan pohon kinerja yang telah disusun.
6.	Mendorong pemanfaatan hasil penilaiaan kinerja organisasi sebagai bagian dari proses penilaian kinerja individu, terutama dalam memastikan adanya peningkatan signifikan pada realisasi kinerja organisasi berdasarkan hasil kinerja setiap individu.	Telah dilakukan penilaian kinerja organisasi berkala (triwulanan) dan dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja individu dalam aplikasi e-kinerja.
7.	Terus mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja yang sudah dilakukan secara berkala sebagai bagian dari proses penyesuaian target kinerja unit kerja kedepan.	Telah dilakukan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja secara berkala sebagai proses penyesuaian target kinerja misalnya di level KKP IK Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP semula target Rp.10 triliun disesuaikan menjadi Rp.6,99 triliun karena adanya penyesuaian kebijakan penyaluran KUR secara nasional.

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
8.	Menyempurnakan kualitas informasi dalam LKJ unit kerja dengan memastikan setiap unit kerja mengifomasikan secra alengkap hasil analisis faktor keberhasilan dan kegagalan yang mempengaruhi ketercapaian kinerja serta potensi efisiensi sumber daya yang dilakukan dalam merealisasikan kinerja	Melakukan reviu laporan kinerja secara berjenjang dan memastikan setiap unit kerja mengifomasikan secara lengkap hasil analisis faktor keberhasilan dan kegagalan yang mempengaruhi ketercapaian kinerja Memastikan setiap unit kerja telah mencantumkan potensi efisiensi sumber daya yang dilakukan dalam merealisasikan kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2023
9.	Terus mendorong pemanfaatan informasi dalam LKJ, baik dilevel pusat maupun unit kerja, terutama dalam proses menentukan target, strategi, serta aktivitas yang akan diperjanjikan setiap unit kerja dalam perencanaan kinerja kedepan.	Memastikan pemanfaatan informasi dalam LKJ, baik dilevel pusat maupun unit kerja, terutama dalam proses menentukan target, strategi, serta aktivitas yang akan diperjanjikan setiap unit kerja dalam perencanaan kinerja kedepan dengan menambahkan substansi Pemanfaatan Infomasi Kinerja Tahun 2022 sebagai bahan penyusunan target 2023 dan menambahkan informasi pemanfaatan Informasi Capaian 2023 sebagai dasar penentuan target 2024 dan upaya yang dilakukan dalam penentuan aktivitas yang dituangkan dalam Rencana Aksi.
10.	Mendorong unit kerja untuk memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal yang sudah disampaikan sebagai bagian dari bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan strategi, kualitas kinerja, serta perbaikan capaian kinerja pada level kementerian, terutama pada PDB sektor perikanan.	1. Capaian kinerja tahun 2023 digunakan sebagai dasar penyusunan target 2024. 2. Capaian kinerja tahun 2023 digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Teknokratik Renstra KKP 2024-2029.
11.	Mendorong unit kerja untuk memanfaatkan hasil evaluasi AKIP Internal yang sudah disampaikan sebagai bagian dari bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan strategi, kualitas kinerja, serta perbaikan capaian kinerja pada level Kementerian terutama pada PDB sektor perikanan.	1. Capaian kinerja tahun 2023 digunakan sebagai dasar penyusunan target 2024. 2. Hasil evaluasi kinerja 2023 dijadikan sebagai perbaikan strategi dan upaya peningkatan kinerja yang dituangkan dalam Rencana Aksi Tahun 2024.

Data sampai dengan 2024

Penyampaian Penghargaan kepada Unit Kerja Eselon I lingkup KKP dengan kategori Penghargaan Terhadap penyelesaian Tindak Lanjut Terbaik (BPK dan Itjen), Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Terbaik dan Efektivitas Bantuan Pemerintah Terbaik

OH INSPIRA EKON MI BIRU

Bab • 04

PRESTASI DAN KINERJA LAINNYA

Prestasi dan Kinerja Lainnya

Tahun 2023, KKP telah menorehkan prestasi di tingkat nasional dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahaan yang baik. Prestasi tersebut terdiri atas :

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas Award)

Tujuan utama Penganurgerahan Germas Award 2023 adalah sebagai apresiasi bagi Menteri atau Kepala Lembaga dalam melaksanakan pembudayaan Germas di tingkat kementerian/lembaga. Sebanyak lima kementerian dan lembaga terpilih menjadi lima instansi terbaik dalam pembudayaan Germas, yaitu KKP, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, BPOM, Kementerian Perhubungan, dan Bakamla. Penghargaan dari Presiden tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada 14 November 2023.

Predikat Mentor Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

APE merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Penganugerahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini didasarkan pada hasil evaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang telah disampaikan oleh K/L, Pemerintah Provinsi (pemprov), dan Pemerintah Kabupaten/Kota (pemkab/pemkot). Pada Tahun 2023, terdapat 360 instansi (16 K/L, 28 pemprov, dan 316 pemkab/pemkot) yang telah melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan PUG melalui evaluasi mandiri. Dari hasil evaluasi mandiri tersebut, dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan melalui sampling, kemudian dilakukan verifikasi akhir. Pada hasil

Gambar 107. | Penyerahan Germas *Award*

Gambar 108. | Penyerahan Anugerah Parahita Ekapraya

verifikasi akhir terdapat 12 K/L, 25 pemprov, dan 237 pemkab/pemkot yang ditetapkan untuk menerima Penganugerahan Parahita Ekapraya Tahun 2023. Kategori Mentor yang diterima KKP merupakan kategori tertinggi, yang disampaikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 19 Desember 2023.

JDIH Terbaik V Tingkat Kementerian

KKP memperoleh penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards Tahun 2023, Terbaik V Kategori Kementerian. Penghargaan ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi KKP. Piala dan piagam penghargaan diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam acara Pertemuan Nasional Pengelola JDIH dan Pemberian JDIHN Awards Tahun 2023 bertajuk "Membangun Hukum Nasional sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa melalui Transformasi Digital" yang digelar dalam Pertemuan Nasional Pengelola JDIHN dan *Legal Development Content Creator* (LDCC) *Awards* Tahun 2023 di Jakarta pada 12 Oktober 2023. Penghargaan KKP sebagai JDIH Terbaik V Tingkat Kementerian merupakan bentuk keseriusan dan komitmen KKP dalam memberikan layanan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat secara mudah, cepat, akurat, dan transparan. JDIH KKP merupakan wadah penyebarluasan dan sarana pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi hukum. Aplikasi ini menyajikan informasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan KKP maupun regulasi-regulasi terkait lainnya. Penghargaan yang diterima oleh KKP sebagai Pengelola JDIH Terbaik V Tingkat Kementerian memberikan tantangan tersendiri bagi KKP untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi hukum. Anugerah JDIHN 2023 merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan atas kinerja terbaik dalam pengelolaan JDIHN.

Gambar 109. | Penyerahan JDIH Terbaik V Tingkat Kementerian

BKN *Award*

Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi yang mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional kembali memberikan penghargaan bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Daerah melalui BKN Award 2023. Penghargaan diberikan bagi Instansi Pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkupnya masing-masing, termasuk pemanfaatan layanan digital ASN.

Untuk kategori Instansi Pemerintah yang dinilai meliputi Instansi Pusat, yakni terdiri dari Kementerian dan Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dan Instansi Daerah yang terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten, serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun penilaian BKN Award 2023 dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: 1). Kategori utama berupa Implementasi Manajemen ASN Terbaik, 2). Kategori elemen implementasi manajemen ASN dan pemanfaatan sistem informasi yang mencakup Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian, Pengembangan Kompetensi, Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja, Penerapan Pemanfaatan Data – Sistem Informasi dan *Computer Assisted Test* (CAT) dan 3). Kategori *special mention* yakni Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN. Ini merupakan Tahun kesembilan sejak BKN Award diluncurkan pada Tahun 2015 dengan tujuan untuk memacu kinerja K/L/D dalam melaksanakan implementasi manajemen ASN. Pemenang BKN Award Tahun 2023 diumumkan melalui Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian 2023 pada 30 Mei 2023 di Kota Bandung. KKP dalam BKN Award 2023 memperoleh penghargaan Kategori Elemen Implementasi Manajemen ASN Pengembangan Kompetensi untuk Kementerian Tipe Besar, Kategori Elemen Implementasi Manajemen ASN untuk Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja untuk Kementerian Tipe Besar.

Gambar 110. | Piagam Peringkat Kedua BKN Award 2023 Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja

Terbaik Kedua Kinerja Anggaran Tahun 2022

KKP meraih penghargaan sebagai kementerian/lembaga dengan Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2022 dari Kementerian Keuangan. Penghargaan diterima langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 di Ballroom Dhanapala, Kementerian Keuangan pada 17 Mei 2023. Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh tim KKP yang selama ini berupaya seefektif mungkin melaksanakan kegiatan maupun program kerja dalam membangun sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Pelaksanaan Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2022 memperhitungkan capaian atas IKPA yang dinilai berdasarkan tiga aspek yakni kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran, serta capaian atas Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). KKP selama ini terus mengupayakan reformasi birokrasi pada seluruh unit kerja untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas setiap kegiatan yang dilakukan. Baik itu pada layanan perizinan, pendampingan usaha bagi masyarakat kelautan dan perikanan, pembangunan infrastruktur perikanan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui satuan pendidikan maupun kegiatan penyuluhan.

KKP berkomitmen menghadirkan reformasi birokrasi yang berkualitas di setiap unit kerja yang ada di pusat maupun daerah. KKP rutin berkonsultasi dengan BPK guna memastikan program-program yang dijalankan sesuai aturan. Dalam ajang tersebut, KKP menempati peringkat tiga untuk kategori K/L Pagu Sedang Tahun anggaran 2022, secara berurutan dari yang teratas, pemenangnya yaitu Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan, KKP, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pusat Statistik.

Gambar 111. | Penyerahan Penghargaan Kinerja Anggaran Terbaik

Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023

Ombudsman RI merilis hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 415 Pemkab, dalam acara penganugerahan yang digelar 14 Desember 2023 di Jakarta Pusat. Terdapat peningkatan jumlah penyelenggara layanan yang masuk zona hijau atau memperoleh opini kualitas tertinggi dan tinggi di 2023 dibandingkan dengan 2022. Total jumlah entitas yang disurvei pada 2023 sebanyak 586, dari jumlah tersebut yang masuk zona hijau 414 (70,70%), zona kuning 133 (22,66%), dan zona merah 39 (6,64%). Sedangkan Tahun 2022, jumlah entitas 586, jumlah yang masuk zona hijau sebanyak 272 (46,42%), zona kuning sebanyak 250 (42,66%), zona merah sebanyak 64 (10,92%).

Gambar 112. | Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023

Meningkatnya jumlah kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang masuk ke dalam zona hijau dapat diartikan bahwa pemenuhan standar layanan, kompetensi penyelenggara dan pengelolaan pengaduan Tahun 2023 lebih baik dari Tahun 2022. Kenaikan ini tidak terlepas dari komitmen dari para penyelenggara untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta keaktifan Ombudsman Pusat maupun perwakilan dalam melakukan pendampingan terhadap penyelenggara layanan.

Hasil penilaian kepatuhan Tahun 2023 menunjukkan, dari 25 kementerian yang disurvei, 20 masuk zona hijau dan 5 masuk ke zona kuning. Tiga peringkat tertinggi pada kategori ini ialah Kementerian Luar Negeri dengan nilai 94,85, Kementerian Koperasi dan UKM dengan nilai 92,91 dan Kementerian Pertanian dengan nilai 91,45. KKP sendiri berhasil meraih posisi enam atau naik tiga peringkat dari Tahun sebelumnya, dengan nilai 88,86.

Peningkatan kualitas layanan publik di sektor kelautan dan perikanan dilakukan dalam berbagai dimensi. Di antaranya dengan meningkatkan sarana prasana layanan berbasis teknologi agar prosesnya lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Di samping sarana prasana untuk mempermudah akses layanan, kualitas pegawai juga ditingkatkan agar pelayanan yang diberikan semakin baik ke masyarakat. Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik mencakup empat dimensi yakni dimensi input yang terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan. Dimensi proses terdiri dari variabel standar pelayanan publik, dimensi *output* terdiri dari variabel penilaian persepsi maladministrasi, serta dimensi pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan.

Juara Kedua Kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan (*Continuous Improvement*)

Menteri Keuangan memberikan penghargaan Anugerah Reksa Bandha kepada Kementerian dan Lembaga Negara (K/L) dan *stakeholders* berprestasi di bidang pengelolaan aset dan lelang, pada 23 November 2023 di Aula Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan. Anugerah Reksa Bandha terdiri dari 5 kategori penghargaan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan 4 kategori di bidang lelang. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Kementerian Keuangan atas kualitas kinerja dan koordinasi yang baik antara K/L dan para stakeholders Kemenkeu terhadap pengelolaan BMN dan pelayanan lelang. Anugerah Reksa Bandha bertujuan untuk meningkatkan motivasi Kementerian dan Lembaga Negara dan *stakeholders* sehingga pengelolaan kekayaan negara dan lelang semakin optimal.

KKP dalam Anugerah Reksa Banda mendapatkan Juara kedua untuk Kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan (*Continuous Improvement*) dengan urutan penerima penghargaan yaitu Juara Ke-1 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, juara ke-2 KKP dan juara ke-3 Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pengelolaan aset yang baik mencerminkan kemampuan suatu negara dalam membuat perencanaan yang baik, yang ditunjukkan dalam kemampuan Kementerian dan Lembaga mengelola pembangunan yang berkualitas. Hal ini sekaligus mencerminkan kepedulian antar generasi yang terpelihara dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan pengelolaan BMN yang andal, efektif, efisien dan akuntabel.

Gambar 113. | Penghargaan Juara Kedua Anugerah Reksa Bandha Tahun 2023

Bhumandala *Award* Nama Rupabumi Kategori KL dengan Penghargaan Perunggu

Pemberian penghargaan Bhumandala yang dilaksanakan pada 6 November 2023 dilakukan melalui serangkaian tahapan di sepanjang 2023. Dimulai dari penyebarluasan informasi dan pendaftaran pada Juni, yang dilanjutkan dengan penjurian tahap pertama pada September, seleksi terhadap 70 dokumen yang masuk dari sembilan K/L, enam provinsi, 14 kabupaten, dan 15 kota. Penjurian menghasilkan 24 finalis, yang kemudian melakukan presentasi inovasi.

Inovasi dalam pemanfaatan IG memainkan peran penting dalam perkembangan berbagai sektor, seperti pelayanan publik, lingkungan, pertanian, dan perencanaan perkotaan. Seluruh partisipan penghargaan Bhumandala telah menunjukkan keunggulan dalam mengembangkan solusi kreatif dan aplikasi yang membantu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Masyarakat. KKP mendapatkan penghagaan untuk Nama Rupabumi Kategori KL dengan urutan penerima penghargaan yaitu emas (Kementerian PUPR), Perak (Kementerian ESDM) dan Perunggu (KKP dan Pushisdros AL). Bhumandala *Awards* ini diharapkan menjadi pemacu dan pendorong bagi K/L/Pemda untuk terus memanfaatkan IG dalam kegiatannya, serta menghasilkan inovasi-inovasi yang cemerlang. Agar dapat menghasilkan IG yang akurat, dan dapat dipertanggung-jawabkan demi pembangunan nasional Indonesia yang lebih baik.

Gambar 114. | Penghargaan Bhumandala Kencana Tahun 2023

***Logistics Awards* (ILA) 2023**

Indonesia *Logistics Awards* (ILA) 2023 digelar sebagai apresiasi terhadap individu, perusahaan, dan institusi yang menunjukkan prestasi, inovasi/terobosan, serta perbaikan dan pengembangan yang signifikan secara internal dalam proses, layanan, dan kapabilitas (infrastruktur, teknologi, teknologi informasi) dan berdampak terhadap peningkatan kinerja logistik nasional. Penghargaan *Government of the Year* diberikan kepada KKP sebagai apresiasi terhadap KKP atas komitmennya dalam pelaksanaan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN). Selain KKP, ILA 2023 juga menganugerahkan *Government of the Year* kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Lembaga *National Single Window*, Kementerian Keuangan.

Gambar 115. | Penghargaan Indonesian Logistic Award Tahun 2023

Keberhasilan KKP mengimplementasikan SLIN diapresiasi *Supply Chain* Indonesia (SCI). Program optimalisasi distribusi hasil kelautan dan perikanan tujuan domestik dan ekspor yang dijalankan meraih penghargaan "*Government of the Year*" pada ajang Indonesia *Logistics Awards* (ILA) 2023. Penghargaan ini membuktikan SLIN telah berperan dalam membangun dan mengembangkan sistem manajemen rantai pasokan ikan dan hasil perikanan terintegrasi dan meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi perikanan hulu-hilir, pengendalian disparitas harga. Termasuk untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan industri dalam negeri serta ekspor berbasis Ekonomi Biru di Indonesia.

SLIN membuat manajemen rantai pasok ikan jadi lebih efektif dan efisien. Implementasi SLIN merupakan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional. SLIN adalah komitmen penyelenggaraan logistik hasil perikanan agar dilakukan secara tepat waktu, tepat kuantitas, tepat kualitas, dan tepat lokasi dengan biaya yang efektif dan efisien. SLIN merupakan sinergi dan kolaborasi antar KL dan pelaku usaha jasa logistik melalui peran aktif dan dukungan dalam penyediaan moda transportasi dalam distribusi hasil perikanan.

Prestasi dalam Bidang Kearsipan dengan Nilai AA (Sangat Memuaskan)

KKP terus memperbaiki tata kelola kearsipan agar lebih mudah, cepat, diakses pengguna. Melalui perencanaan program dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kearsipan yang menangani bidang tersebut. Para arsiparis dan pengelola arsip harus mampu menyajikan dan menyiapkan arsip dengan cepat, mudah ditemukan dan lengkap sesuai dengan materi yang dibutuhkan. Rekomendasi tersebut yakni melakukan perencanaan program pengelolaan kearsipan meliputi identifikasi arsip tercipta, pemberkasan arsip, penataan arsip, penyusunan daftar arsip aktif dan inaktif, penyusutan arsip, serta penyediaan sarana dan prasarana kearsipan.

Kemudian pemenuhan SDM kearsipan sesuai dengan rekomendasi yang telah disetujui Arsip Nasional Republik Indonesi (ANRI) dan disampaikan ke KemenPAN RB sejumlah 621 orang dari berbagai jenjang, saat ini baru terisi 108 pejabat fungsional arsiparis.

KKP juga telah melakukan pengisian dokumen instrumen Audit Sistem Kearsipan Internal yang dikeluarkan oleh ANRI dalam rangka penilaian kearsipan tahun 2023, dan unit kerja telah melengkapi data dukung sehingga nilai pengawasan kearsipan meningkat dari tahun sebelumnya.

Terhitung sejak tahun 2018, sudah lima kali KKP menyerahkan arsip statis ke lembaga ANRI. Terbaru penyerahan 207 nomor arsip statis meliputi Surat Izin Penangkapan Ikan, Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, dan Surat Izin Usaha Perikanan dengan kurun waktu 2001 sampai 2015. Penyerahan arsip itu untuk mendukung pengembangan literasi di bidang kelautan dan perikanan serta kemaritiman, dan memberikan informasi berharga kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, agar arsip menjadi lebih terpelihara dan aman. Dalam acara itu turut diserahkan penghargaan kepada Unit Kerja Terbaik untuk kategori Pengawasan Kearsipan Internal Pada Unit Pengolah Lingkup Pusat dan Lingkup UPT. Unit Kerja Terbaik untuk kategori Pengawasan Kearsipan Internal Pada Unit Pengolah Lingkup Pusat yaitu Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa; Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Unit Kerja Terbaik untuk kategori Pengawasan Kearsipan Internal Pada Unit Pengolah Lingkup UPT yaitu Stasiun KIPM Pontianak, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi dan Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang.

Gambar 116. | Penghargaan Bidang Kearsipan AA (Sangat Memuaskan)

Penghargaan Peringkat 8 sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Tahun 2023

BPSPL Pontianak meraih penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Predikat "Pelayanan Prima". Predikat Pelayanan Prima diperoleh BPSPL Pontianak berdasarkan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 795 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN Tahun 2023.

Gambar 117. | Penghargaan Peringkat 8 Pelayanan Prima

Gambar 118. | Penghargaan Juristica Award

Penghargaan *Juristica Award* 2023 untuk JDIH KKP

KKP meraih penghargaan Juristica Awards 2023 dengan kategori JDIH dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terbaik. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada Kepala Biro Hukum KKP pada acara Rapat Koordinasi Hukum Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Selain KKP, kementerian lain yang mendapatkan penghargaan yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan kategori JDIH dengan Pengelolaan Dokumentasi Hukum Terbaik dan Kementerian Perhubungan dengan kategori JDIH dengan Pengelolaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Terbaik.

The Best Leader For Developing Economy Strategy

Menteri Kelautan dan Perikanan meraih penghargaan *The Best Leader for Developing Blue Economy Strategy* pada acara Indonesia Visionary Leader (IVL) 2023.

Malam *Inagurasi Indonesia Visionary Leader* (IVL) 2023 digelar pada 26 Oktober 2023. IVL diselenggarakan oleh iNews Media Group bagian dari MNC Group merupakan acara tahunan yang telah menjadi sorotan sejak 2017. IVL 2023 menjadi *platform* unggulan untuk mengapresiasi pemimpin-pemimpin inspiratif yang telah memberikan kontribusi luar biasa kepada bangsa dan negara dan bertujuan mengapresiasi pemimpin-pemimpin yang telah membuktikan diri dalam memajukan instansi maupun wilayahnya masing-masing. Tahun 2023 menjadi momentum penting dalam perjalanan Indonesia *Visionary Leader* dengan tema utama "Pemimpin Sebagai Penjaga Resiliensi Ekonomi." Penghargaan *The Best Leader for Developing Blue Economy Strategy* diraih oleh Menteri KP karena dinilai mampu mengembangkan program-program berbasis ekonomi biru, sebagai upaya mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dengan mengedepankan ekologi sebagai panglima.

Gambar 119. | *The Best Leader for Developing Econy Strategy*

Adapun program prioritas KKP meliputi lima kebijakan ekonomi biru yang mencakup perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budi daya ramah lingkungan, pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, serta penanganan sampah plastik di laut. Lima program ekonomi biru KKP diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dan mendukung upaya pelesetarian lingkungan. Selain itu, berbagai terobosan yang telah dikembangkan di sektor kelautan dan perikanan menjadi bukti nyata kepemimpinan visioner Menteri KP dalam mendorong Indonesia menjadi pemimpin dalam industri ekonomi biru. Konsep *blue economy* merupakan pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan bagi laju pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kesehatan ekosistem laut.

Penghargaan Indonesia *Visionary Leader* melalui *Integrated Surveilance System* berbasis Teknologi

KKP melalui Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berhasil meraih penghargaan dalam ajang Indonesia *Visionary Leader* (IVL) 2023 Season XII pada kategori *Best in Integrated Surveillance System in Maritime and Fisheries.* Penghargaan tersebut diserahkan pada 26 Oktober 2023. Indonesia *Visionary Leader* adalah ajang penghargaan bergengsi yang diselenggarakan sejak 2017 oleh iNews Media Group. Program ini dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi atau

penghargaan terhadap para pemimpin visioner di kategori pemerintahan, BUMN, brand, dan institusi lainnya. Dalam penghargaan ini, iNews Media Group membidik pemimpin-pemimpin yang memiliki visi jauh ke depan untuk kemajuan instansi yang dinaunginya. IVL memberikan anugerah kepada 12 pemimpin atau leader yang mempunyai visi kepada Pembangunan di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan KKP dalam menerapkan Strategi Pengawasan Terintegrasi Berbasis Teknologi Satelit atau yang disebut *Integrated Surveillance System* (ISS).

KKP membangun sistem pengawasan yang terintegrasi berbasis teknologi satelit untuk mengawal kebijakan Ekonomi Biru. Strategi Pengawasan Terintegrasi Berbasis Teknologi Satelit atau *Integrated Surveillance System* (ISS) memberi informasi secara real time melalui citra satelit pada *Command Center* KKP mengenai indikasi pelanggaran atau aktivitas aktifitas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU *Fishing*) yang berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Informasi yang masuk ke dalam Command Center KKP selanjutnya divalidasi oleh pesawat *Airborne Surveillance* KKP untuk dilakukan pengecekan final mengenai keberadaan kapal yang melanggar. Apabila keberadaan kapal yang melanggar telah tervalidasi, maka kapal pengawas kelautan dan perikanan dapat segera melakukan intercept terhadap kapal yang melanggar untuk dilakukan penghentian, pemeriksaan, serta penahanan.

Strategi pengawasan ini menjadi solusi efektif dalam menghadapi permasalahan keterbatasan armada dan anggaran hari pelayaran. Penyampaian informasi secara real time melalui teknologi citra radar satelit, AIS, dan VMS, membuat pengawasan patroli di laut saat ini tidak lagi seperti menggergaji laut. Meski demikian, kehadiran kapal pengawas kelautan dan perikanan di wilayah perbatasan (present at sea) tetap diperlukan sebagai simbol kehadiran negara di WPPNRI.

Strategi tersebut dilaksanakan dalam rangka mengawal kebijakan Ekonomi Biru. KKP berkomitmen sebagai “Benteng KKP” agar terwujud pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip Ekonomi Biru, di mana ekologi harus menjadi panglima. Dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, KKP tidak hanya mengawasi kapal perikanan di Indonesia pada saat beroperasi di laut (*while fishing*). Melainkan juga melakukan pengawasan pada saat sebelum keberangkatan kapal (*before fishing*), pendaratan hasil tangkapan (*after fishing*) dan pendistribusian hasil tangkapan ikan (post landing).Pengawasan sebelum keberangkatan kapal perikanan (*before fishing*) terdiri dari pemeriksaan kelayakan teknis dan administrasi dokumen (dokumen perizinan), fisik kapal, alat tangkap, awak kapal, dan aktivitas *Vessel Monitoring System* (VMS). Apabila administrasi dokumen dinyatakan lengkap dan kapal layak untuk beroperasi, maka KKP dapat menertibkan Surat Laik Operasi (SLO). Kemudian, pengawasan pada saat kapal perikanan beroperasi (*while fishing*), yaitu pengawasan kepatuhan kapal saat kegiatan penangkapan ikan guna memastikan kegiatan penangkapan ikan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada tahap ini, pengawasan dilakukan dengan patroli kapal pengawas, VMS, AIS, radar citra satelit, dan pesawat patroli. Selanjutnya, dalam tahap *after fishing*, dilakukan pengawasan kapal perikanan saat mendaratkan hasil tangkapan, yang meliputi memeriksa jenis, jumlah, dan

ukuran hasil tangkapan, kesesuaian alat penanganan, serta pelabuhan pangkalan. Tidak hanya itu, dilakukan pula penertiban HPK kedatangan. Tahap terakhir adalah pengawasan *post landing*. Dalam tahap ini, pengawasan dilakukan setelah pembongkaran kapal perikanan, yaitu pengawasan tujuan distribusi dan pengolahan hasil perikanan, serta ketelusuran hasil tangkapan. Melalui sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi satelit, KKP tidak hanya dapat mendeteksi indikasi illegal fishing, melainkan juga dapat mendeteksi jenis pelanggaran lainnya, seperti tumpahan minyak (*oil spill*). *Command Center* menjadi pusat data (*data center*) yang juga mampu berfungsi untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan solusi bisnis, seperti mengumpulkan data stok ikan, budidaya laut, dan aplikasi lainnya, seperti pemetaan kerentanan pesisir, perubahan garis pantai dan pemetaan atau pemantauan sampah laut.

Gambar 120. | Penghargaan Indonesia Visionary Leader

Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik Penyedia Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan

Kementerian PAN dan RB memberikan penghargaan kepada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) terbaik penyedia sarana prasarana pelayanan publik ramah kelompok rentan. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang setara, berkeadilan, dan inklusif, salah satunya melalui peningkatan sumber daya manusia. Pemberian Penghargaan dilaksankan di Jakarta pada 21 November 2023. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyediaan sarana prasarana pelayanan publik ramah kelompok rentan, terdapat 50 UPP yang masuk dalam kategori terbaik. Hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya respons dan antusiasme yang sangat tinggi di lingkup UPP dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan ramah kelompok rentan.

Penghargaan ini merupakan apresiasi kepada UPP karena telah menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan pelayanan publik yang tidak biasa-biasa. Berbeda dari sebelumnya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyediaan sarana prasarana pelayanan publik ramah kelompok rentan terhadap lokus pelayanan publik yang diusulkan oleh instansi pemerintah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di 2023 meningkat dengan pesat. Kementerian PAN RB telah melakukan pemantauan dan evaluasi telah dilakukan terhadap 226 UPP di lingkup kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Jumlah ini meningkat dari Tahun 2022 yang hanya 49 UPP di lingkup kementerian/lembaga saja, belum mencakup pemerintah daerah," ungkap Diah. Terdapat 50 UPP yang masuk dalam

kategori UPP Terbaik, 55 UPP kategori Sangat Baik, 56 UPP kategori Baik, dan 49 UPP kategori Cukup, sedangkan sebanyak 16 UPP tidak memenuhi kriteria penilaian. Kelompok rentan adalah orang lanjut usia (lansia), anak-anak, penyandang disabilitas, wanita hamil, korban bencana alam, dan korban bencana sosial. Sementara, sarana dan prasarana yang ramah kelompok rentan diantaranya area parkir khusus, jalur pemandu (*guiding block*), jalur landai (*ramp*), pegangan rambat, alat bantu (kursi roda, tongkat dan kruk), area tunggu prioritas, loket khusus, toilet khusus, area bermain anak, ruang laktasi, alat bantu tunanetra, dan alat bantu tunarungu. Adapun UPP di lingkup KKP yang mendapatkan penghargaan yaitu: Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta.

Gambar 121. | Penghargaan UPP Terbaik Penyedia Sarana Prasarana Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan

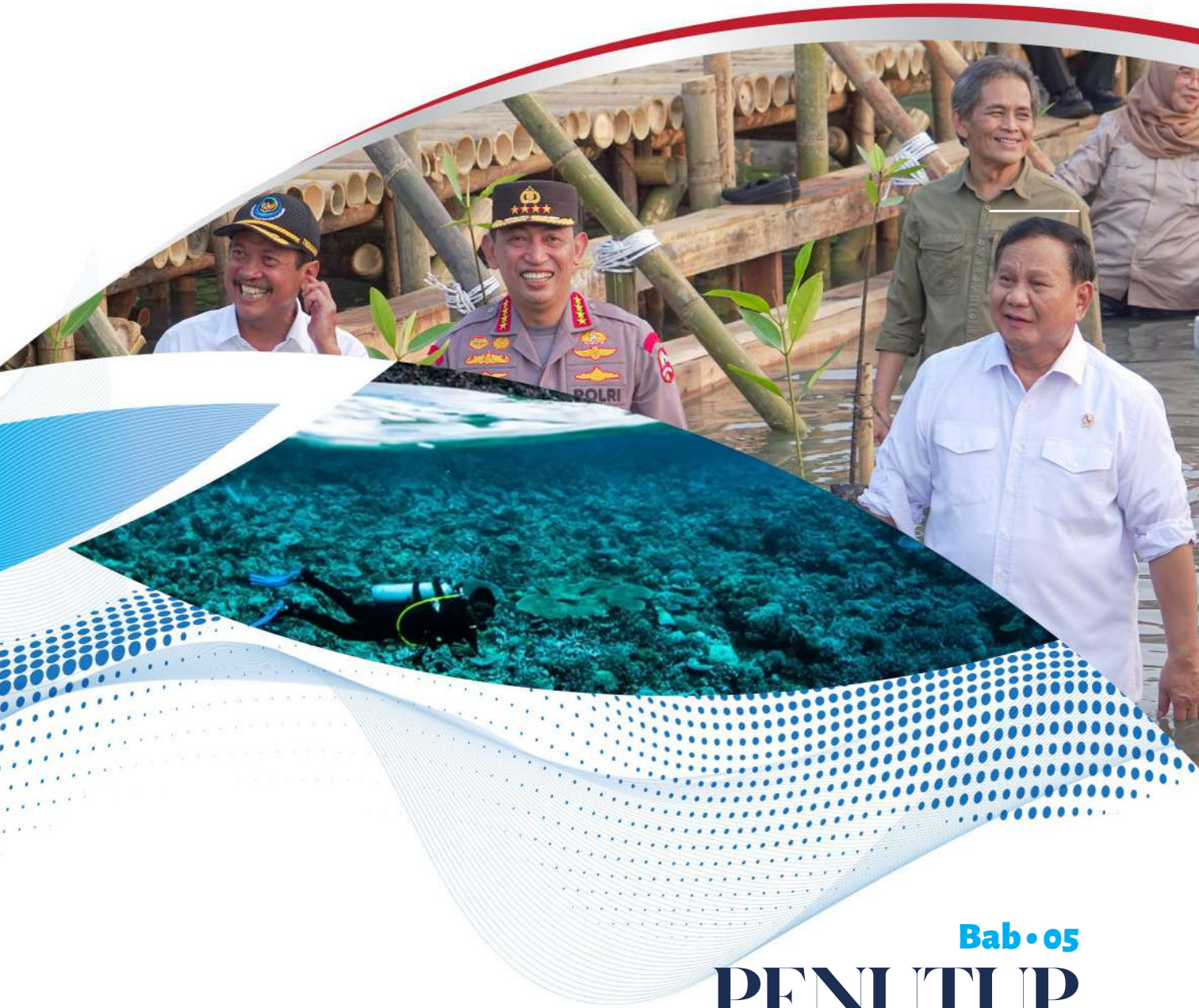

Bab • 05

PENUTUP

PENUTUP

Perhitungan Kinerja Organisasi KKP Tahun 2023 dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja revisi yang telah ditetapkan yang terdiri dari 8 Sasaran Strategis dan 18 Indikator Kinerja.

Sebanyak 14 indikator kinerja telah mencapai target yaitu Indek Kesejahteraan Masyarakat KP (IKMKP), Pertumbuhan PDB Perikanan, Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman, Luas kawasan konservasi perairan, Konsumsi ikan, Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri / DUDI. WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur, Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir, Produksi garam, Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor, Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP, Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, Nilai RB KKP. Sedangkan empat indikator kinerja belum mencapai target yaitu, produksi perikanan, nilai ekspor hasil perikanan, nilai PNBP sektor KP, dan Nilai IKPA KKP.

Realisasi Anggaran pada Tahun 2023 sebesar 98,14% dari pagu Rp 6,46 triliun. Realisasi Anggaran KKP (KKP) Tahun 2023 per tanggal 14 Januari 2024 sebesar Rp6.335.397.393.486 dari total pagu sebesar Rp6.455.280.145.000 atau sebesar 98,14%.

Sepanjang Tahun 2023. KKP juga telah menorehkan banyak prestasi di tingkat nasional dengan menerima berbagai penghargaan yang kedepan perlu dipertahankan melalui berbagai inisiatif inovatif. Keberhasilan KKP tidak terlepas dari kerja sama yang erat dengan para pemangku kepentingan, masyarakat, dan sektor terkait. Setiap capaian dan tantangan menjadi pijakan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja kami di masa mendatang.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan terlibat dalam upaya bersama menjaga keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan.

Semangat kerja sama ini menjadi kunci bagi kemajuan dan keberlanjutan sektor ini demi kesejahteraan bangsa.

Dengan penuh harapan, kami melangkah ke depan, siap menghadapi dinamika global untuk memastikan kelautan dan perikanan Indonesia terus bersinar. Semoga laporan kinerja ini tidak hanya mencerminkan pencapaian, tetapi juga menjadi pijakan untuk langkah-langkah strategis di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2023
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1.	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	1.	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP (indeks)	62,66
COSTUMER PERSPECTIVE				
2.	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	2.	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	≤76
		3.	Luas kawasan konservasi (Juta Ha)	29,10
3.	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	4.	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (%)	4
		5.	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	6,77
		6.	Konsumsi ikan (Kg/kap/thn)	57,50
		7.	Nilai PNBP sektor KP (Triliun Rupiah)	4,038
		8.	Tenaga kerja yang terlibat (Orang)	456657
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
4.	Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat	9.	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri / DUDI (%)	70
5.	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	10.	WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur (WPP)	11
		11.	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	32
6.	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	12.	Produksi perikanan (Juta ton)	28,22
		13.	Produksi garam (Juta ton)	2
		14.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)	98
		15.	Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP (Triliun Rupiah)	10,26
7.	Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif	16.	Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	97
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE				
8.	Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	17.	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP (nilai)	74
		18.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP (nilai)	89

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Data Anggaran :

No.	Program		Anggaran
1.	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Rp.	2.471.046.617.000
2.	Kualitas Lingkungan Hidup	Rp.	91.805.000.000
3.	Nilai Tambah dan Daya Saing industri	Rp.	183.850.814.000
4.	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp.	327.300.950.000
5.	Dukungan Manajemen	Rp.	3.693.653.495.000
Total Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023		Rp.	6.767.656.876.000

Jakarta, 06 Januari 2023
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 15 Juni 2023
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1.	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	1.	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP (indeks)	62,66
COSTUMER PERSPECTIVE				
2.	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	2.	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	≤76
		3.	Luas kawasan konservasi (Juta Ha)	29,10
3.	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	4.	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (%)	4
		5.	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	6,77
		6.	Konsumsi ikan (Kg/kap/thn)	57,61
		7.	Nilai PNBP sektor KP (Triliun Rupiah)	4,038
		8.	Tenaga kerja yang terlibat (Orang)	456.657
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
4.	Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat	9.	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri / DUDI (%)	70
5.	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	10.	WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur (WPP)	11
		11.	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	32
6.	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	12.	Produksi perikanan (Juta ton)	28,22
		13.	Produksi garam (Juta ton)	2
		14.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)	98
		15.	Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP (Triliun Rupiah)	10,26
7.	Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif	16.	Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	97
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE				
8.	Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	17.	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP (nilai)	74
		18.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP (nilai)	89

Data Anggaran :

No.	Program		Anggaran
1.	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Rp.	2.467.620.746.000
2.	Kualitas Lingkungan Hidup	Rp.	91.805.000.000
3.	Nilai Tambah dan Daya Saing industri	Rp.	183.850.814.000
4.	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp.	333.322.212.000
5.	Dukungan Manajemen	Rp.	3.697.700.452.000
Total Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023		Rp.	6.774.299.224.000

Jakarta, 15 Juni 2023
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 30 November 2023
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1.	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	1.	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP (indeks)	62,66
COSTUMER PERSPECTIVE				
2.	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	2.	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	≤76
		3.	Luas kawasan konservasi (Juta Ha)	29,10
3.	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	4.	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (%)	4
		5.	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	6,77
		6.	Konsumsi ikan (Kg/kap/thn)	57,61
		7.	Nilai PNBP sektor KP (Triliun Rupiah)	4,038
		8.	Tenaga kerja yang terlibat (Orang)	456657
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
4.	Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat	9.	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri / DUDI (%)	70
5.	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	10.	WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur (WPP)	11
		11.	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	32
6.	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	12.	Produksi perikanan (Juta ton)	28,22
		13.	Produksi garam (Juta ton)	2
		14.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)	98
		15.	Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP (Triliun Rupiah)	6,99
7.	Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif	16.	Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	97
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE				
8.	Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	17.	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) KKP (indeks)	78
		18.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP (nilai)	93,75

Data Anggaran :

No.	Program		Anggaran
1.	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Rp.	2.301.979.783.000
2.	Kualitas Lingkungan Hidup	Rp.	81.911.638.000
3.	Nilai Tambah dan Daya Saing industri	Rp.	164.057.845.000
4.	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp.	311.322.212.000
5.	Dukungan Manajemen	Rp.	3.588.225.216.000
Total Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023		Rp.	6.447.496.694.000

Jakarta, 30 November 2023
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN